



BUKU PEDOMAN PENDIDIKAN JARAK JAUH

Editor:

SETIJADI



UNIVERSITAS TERBUKA
2005



BUKU PEDOMAN PENDIDIKAN JARAK JAUH

Editor:

SETIJADI

**UNIVERSITAS TERBUKA
2005**

Hak cipta © pada penulis dan dilindungi Undang-undang
Hak Penerbitan pada Penerbit Universitas Terbuka
Departemen Pendidikan Nasional
Kotak Pos 6666 – Jakarta 10001
Indonesia

Dilarang mengutip sebagian ataupun seluruh buku ini
dalam bentuk apa pun tanpa izin dari penerbit

Edisi Kesatu
Cetak pertama, November 2005

Editor : Setijadi

Penelaah Materi : Agus Joko Purwanto
Asnah Said
Ella Yulaelawati
I G.A.K. Wardani
Setijadi

Penelaah Bahasa : Asandhimitra
Zainuddin

Desain cover dan ilustrasi : Anggiat Mangapul
Layouter : Andy Sosiawan

374

PED PEDOMAN pendidikan jarak jauh/Setijadi [ed.] – Cet. 1 -
- Jakarta: Universitas Terbuka, 2005
244 h; ill; 21 cm
ISBN: 979-689-878-X

1. pendidikan jarak jauh
I. Setijadi [ed.]

Kata Pengantar

Pendidikan jarak jauh (PJJ) di dunia sudah hidup lebih dari 100 tahun namun di Indonesia baru berkembang dengan pesat dalam 30 tahun terakhir. Itupun masih terasa asing bagi masyarakat luas bila sampai menyentuh pemahaman mereka tentang konsep dasar dan prinsip yang terkandung di dalamnya. Mereka acap kali hanya melihat praktek PJJ yang menggunakan media, terutama teknologi informasi sehingga setiap proses pendidikan yang menggunakan media dianggap PJJ.

Di samping itu, buku yang berbahasa Indonesia dalam bidang tersebut terbilang langka. Oleh karena itu, terbitnya Buku Pedoman Pendidikan Jarak Jauh yang ditulis oleh para pakar dan praktisi PJJ dengan editor: Dr. Setijadi ini patut kita sambut hangat. Isinya sangat kontekstual dengan kehidupan pendidikan di tanah air, dimulai dengan keterkaitannya dengan pendidikan nasional, perannya dalam berbagai jenjang dan jenis pendidikan seperti pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan nonformal, kiprahnya dalam pelatihan profesional, sampai pada layanannya untuk pendidikan guru. Dengan isi seperti itu buku ini tentu menambah dan memperkaya khasanah pengetahuan kita tentang PJJ di Indonesia.

Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan selamat kepada para penulis dan editor yang telah berhasil menyelesaikan penulisan buku ini. Mudah-mudahan pada masa yang akan datang mereka dapat menerbitkan buku PJJ yang lain. Kepada pembaca saya

mengucapkan selamat menikmati buku ini dan mengharap partisipasinya dengan memberikan komentar dan kritik ke arah penyempurnaannya. Untuk partisipasi tersebut saya ikut menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Atwi Suparman

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Pendahuluan	vii
Bab I Pendidikan Jarak Jauh dalam Konteks Pendidikan Nasional	
<i>Setijadi</i>	1
A. Definisi Pendidikan Jarak Jauh	1
B. Permasalahan Pendidikan Nasional	3
C. Peran Pendidikan Jarak Jauh dalam Pemerataan Pendidikan yang bermutu	8
D. Peningkatan Relevansi Pendidikan Melalui Pendidikan Jarak jauh	15
E. Peningkatan Efisiensi Pendidikan Melalui Pendidikan Jarak jauh	18
F. Reformasi Pendidikan Melalui Pendidikan Jarak Jauh	22
Daftar Pustaka	28
Bab II Pendidikan Dasar dan Menengah Jarak Jauh	
<i>Rusjdy S. Arifin dan Uwes A. Chaeruman</i>	29
A. Fungsi dan Satuan Pendidikan	29
B. Kurikulum dan Bahan Belajar Mandiri	33
C. Proses Pembelajaran, Evaluasi, dan Ujian Akhir Nasional	35
D. Tenaga Kependidikan	37
E. Sarana dan Prasarana	38
F. Pengelolaan, Pembiayaan, dan Pengawasan	39

G. Pendirian dan Akreditasi untuk SMP/MTs Jarak Jauh atau SMA/MA Jarak Jauh	43
H. Sekolah Dasar dengan Sistem Pamong	45
Daftar Pustaka	48
Bab III Pendidikan Jarak Jauh pada Tingkat Pendidikan Tinggi	
<i>Effendi Wahyono, Setijadi, dan Suratinah</i>	49
A. Fungsi dan Satuan Pendidikan	51
B. Kurikulum dan Bahan Belajar Mandiri	55
C. Proses Pembelajaran, Evaluasi, dan Ujian Akhir Nasional	61
D. Tenaga Kependidikan	67
E. Sarana dan Prasarana	70
F. Pengejolaan, Pembiayaan, dan Pengawasan	75
G. Pendirian dan Akreditasi untuk Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi Jarak Jauh	90
Daftar Pustaka	100
Bab IV Pendidikan Nonformal Jarak Jauh	
<i>Asnah Said</i>	103
A. Latar Belakang	103
B. Sistem Pendidikan Nonformal Jarak Jauh	106
C. Pengembangan Bahan Ajar Mandiri	114
D. Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, B, dan C	117
E. Kurikulum Pendidikan Kesetaraan	119
F. Evaluasi dan Ujian Akhir Nasional	121
G. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini	124
H. Menu Pembelajaran Generik	128
Daftar Pustaka	135

Bab V	Pelatihan Profesional Jarak Jauh	
	<i>Nugroho Widi</i>	139
	A. Pembelajaran dan Pelatihan Profesional	139
	B. Pelatihan Jarak Jauh untuk Profesional: Contoh Kasus PMJJ-PPM	149
	C. Program Sertifikasi Profesional	156
	D. Belajar-e untuk Profesional	164
	Daftar Pustaka	183
Bab VI	Pendidikan Guru Jarak Jauh (Kasus FKIP Universitas Terbuka)	
	<i>I G. A. K. Wardani dan Udin S. Winataputra</i>	185
	A. Fungsi dan Satuan Pendidikan	185
	B. Kurikulum dan Bahan Belajar Mandiri	193
	C. Proses Pembelajaran, Evaluasi, dan Ujian Akhir Nasional	199
	D. Tenaga Kependidikan	212
	E. Sarana dan Prasarana	216
	F. Pengelolaan, Pendanaan, dan Pengawasan	222
	G. Pendirian dan Akreditasi	229
	Daftar Pustaka	236
	Biodata Penulis	241

Pendahuluan

Setijadi

Maksud dan Tujuan Penerbitan Buku Pegangan Praktis

Maksud penulisan buku pegangan ini adalah untuk memperkenalkan pendidikan jarak jauh pada berbagai tingkat pendidikan, sesuai dengan UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 31 tentang Pendidikan Jarak Jauh, dan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Jarak Jauh, yang pada waktu tulisan ini dibuat peraturan tersebut masih menjadi Rancangan Peraturan Pemerintah. Sepanjang pengetahuan kami belum ada buku pegangan Pendidikan Jarak Jauh dalam bahasa Indonesia yang mencakup semua jenjang pendidikan. Buku pegangan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang pendidikan jarak jauh dalam konteks sistem pendidikan nasional dan mampu menggunakan wawasan tersebut untuk tujuan pendirian, penilaian, penelitian, dan perbaikan program dan lembaga pendidikan jarak jauh.

Buku pegangan praktis pendidikan jarak jauh ini dapat pula disebut sebagai mitra dekat bagi mereka yang ingin mempelajari dan menyelenggarakannya, di samping sumber-sumber lain yang dapat digali lebih lanjut.

Buku pegangan praktis ini dapat memberikan ide-ide baru, baik bagi lembaga pendidikan konvensional maupun lembaga pendidikan jarak jauh. Apabila terlaksana, maka interaksi antara lembaga pendidikan konvensional dan lembaga pendidikan jarak jauh menjadi semakin erat karena akan menguntungkan kedua belah pihak. Perguruan konvensional, yang ingin menerima lebih banyak murid dengan sumber daya yang terbatas, dapat mencoba *sistem dalam/luar sekolah*. Pelajaran pada waktu di luar sekolah dapat mempergunakan komponen-komponen pendidikan jarak jauh, sedangkan pembelajaran dalam sekolah dapat dibatasi untuk hal-hal yang tidak dapat dilakukan di luar sekolah, seperti interaksi guru-murid, penggunaan peralatan laboratorium atau peralatan lain yang hanya didapatkan di sekolah. Dengan cara ini perguruan tersebut dapat meningkatkan penerimaan murid secara substansial, tanpa menambah sumber daya yang signifikan.

Buku pegangan praktis ini juga memuat hal-hal yang *teoretis*, yang didasarkan pada bacaan, maupun yang *praktis*, sesuai pengalaman para penulisnya. Dengan demikian buku ini diharapkan dapat menjadi sumber ide bagi para pelaksana atau perancang lembaga pendidikan jarak jauh untuk memperbaiki kinerjanya. Mudah-mudahan buku ini mendapatkan tanggapan yang cukup baik dalam bentuk kritik yang membangun untuk memperbaiki kualitas isinya, maupun dalam bentuk tambahan serta perbaikannya. Di masa mendatang diharapkan terbit edisi yang kedua untuk menyempurnakan buku pegangan praktis ini.

Latar Belakang Historis

Pada saat ini, perhatian terhadap pendidikan jarak jauh di Indonesia cukup besar. Namun tidak selamanya demikian. Pendidikan jarak jauh, selama sejarah negara kita, timbul tenggelam

- Pendahuluan

pelaksanaannya. Sewaktu Republik kita ini masih miskin, banyak inisiatif dilaksanakan untuk mengembangkan berbagai jenis pendidikan jarak jauh: pendidikan guru, pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan latihan-latihan di berbagai bidang. Pada waktu harga minyak membubung tinggi dimulai sejak akhir tahun 1973, banyak inisiatif pendidikan jarak jauh ditinggalkan untuk kembali ke pendidikan konvensional. Ketua BAPPENAS pada saat itu meminta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk memekarkan sekolah dasar secara cepat dengan cara yang konvensional berapapun biayanya. Padahal pada saat itu Departemen Dikbud sedang mengadakan eksperimen untuk sekolah dasar secara masal dengan sistem PAMONG. Sistem PAMONG, yang pada dasarnya menggunakan berbagai komponen pendidikan jarak jauh, akhirnya ditinggalkan dan diganti dengan proyek INPRES SD (gedung, buku dan guru) yang menghendaki dibangunnya beribu-ribu gedung SD, dicetaknya berjuta-juta buku pelajaran bagi semua mata pelajaran, diperbanyak jumlah guru dan jumlah SPG. Sebelum jumlah guru lulusan SPG memenuhi kebutuhan, diadakan latihan-latihan singkat untuk memenuhi jumlah guru yang diperlukan bagi sekolah-sekolah baru yang didirikan secara besar-besaran. Maksud pembangunan besar-besaran SD secara konvensional ini adalah: karena dianggap lebih mengenal apa yang harus dikerjakan untuk membangun sekolah konvensional, daripada membangun SD dengan sistem baru seperti SD PAMONG. Padahal karena pembangunan besar-besaran dan mendadak, maka rencana yang dibuatnya menjadi kurang matang dan menimbulkan berbagai penyelewengan. Misal penempatan sekolah di tengah sawah, jauh dari pemukiman penduduk; guru-guru yang dilatih hanya dua minggu, yang langsung diterjunkan untuk mengajar; buku-buku baru yang ditulis para ahli sulit dipahami oleh guru-guru yang mengajar.

Dengan demikian, jelas terlihat, bahwa membangun secara konvensional pun tidak lebih mudah dibandingkan dengan mem-

bangun sistem yang relatif baru, seperti membangun pendidikan jarak jauh untuk memekarkan pendidikan dalam waktu yang relatif singkat. Komponen-komponen dalam sistem pendidikan jarak jauh sebetulnya dapat digunakan untuk pendidikan konvensional, seperti bahan ajar yang memudahkan mahasiswa untuk mempelajarinya sendiri, proses pembelajaran mandiri, ujian yang terkalibrasi, pengelolaan, dan lain-lain. Lebih dari itu, banyak konsep pendidikan jarak jauh berasal dari pendidikan konvensional. Belajar mandiri, misalnya, sudah lama dikenal di perguruan konvensional, meskipun skalanya tidak sebesar pada lembaga pendidikan jarak jauh. Pembelajaran modular lebih dahulu diperkenalkan oleh Sekolah Pembangunan di era tahun 70 hingga 80-an, sebelum konsepnya dipergunakan oleh Sekolah Menengah Pertama Terbuka dan Universitas Terbuka.

Kerangka Penulisan

Buku pegangan ini dibagi dalam enam bagian. Bagian pertama mengenai kedudukan pendidikan jarak jauh dalam pendidikan nasional, sesuai dengan draf pertama Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Jarak Jauh. Akan tetapi ternyata draf tersebut disingkat dan dijadikan satu dengan draf Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan. Draft tersebut sudah dibahas oleh departemen-departemen yang terkait, dan pada waktu ini sudah diajukan ke DPR untuk dibahas. Karena perubahan dari Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pendidikan Jarak Jauh menjadi RPP yang lebih luas cakupannya (RPP Penyelenggaraan Pendidikan), maka pasal-pasal mengenai pendidikan jarak jauh menjadi jauh lebih singkat. Karena itu, penerbitan buku ini mungkin lebih berguna bagi mereka yang sungguh-sungguh ingin mendirikan pendidikan jarak jauh.

- **Pendahuluan**

Bab pertama dimulai dengan bab yang membicarakan permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan dewasa ini, serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Sesudah itu dibahas paradigma pendidikan jarak jauh untuk meningkatkan akses, kualitas, efisiensi dan relevansi pendidikan.

Bab kedua membahas pendidikan dasar dan menengah jarak jauh, secara teoretis maupun praktis, dengan contoh-contoh yang ada di Indonesia. Pencanangan wajib belajar sembilan tahun tidak mungkin dapat tercapai dalam waktu relatif singkat, bila Indonesia tetap mengandalkan pendidikan konvensional seperti pada tahun 70 dan 80-an, seberapa pun uang yang dianggarkan untuk itu. Dengan demikian, penting bagi kita untuk dapat menyelenggarakan pendidikan jarak jauh, tidak hanya bagi pendidikan dasar –untuk ikut menuntaskan kewajiban belajar sembilan tahun– akan tetapi juga pada tingkat pendidikan menengah. Sebab, setelah tamat belajar sembilan tahun, pasti sebagian besar lulusannya ingin melanjutkan pelajarannya ke sekolah yang lebih tinggi. Bagian ini membahas beberapa contoh sekolah dasar dan sekolah menengah jarak jauh, atau yang biasa disebut SD Pamong, SMP Terbuka, dan SMA Terbuka. Meskipun SD Pamong sudah ditiadakan pada tahun 80-an, SD tersebut sudah sempat dipraktekkan dengan hasil memuaskan. Sebetulnya pada saat paceklik ekonomi seperti sekarang ini, menghidupkan kembali SD Pamong sangat membantu meningkatkan angka partisipasi SD, terutama di daerah-daerah yang tertinggal.

Bab ketiga menguraikan pendidikan jarak jauh di tingkat pendidikan tinggi. Setelah didahului oleh pembahasan secara teoretis, termasuk pengembangan perguruan tinggi jarak jauh (PTJJ) yang relatif sederhana sampai ke yang canggih dengan menggunakan TIK yang paling mutakhir, bagian ini juga dilanjutkan dengan pembahasan contoh-contoh perguruan tinggi modus tunggal dan

perguruan tinggi modus ganda dan modus konsorsium yang terdapat di Indonesia maupun di negara lain. Universitas Terbuka adalah contoh PTJJ modus tunggal, Universiti Sains di Penang adalah modus ganda, dan Open Universities Australia adalah contoh PTJJ konsorsium. Dibahas pula PTJJ dari generasi pertama sampai generasi kelima yang menggunakan TIK yang paling mutakhir.

Bab keempat adalah tentang pendidikan nonformal jarak jauh. Meskipun di Indonesia pendidikan jenis ini sudah lama dikenal, akan tetapi masyarakat tidak menyebutnya sebagai pendidikan jarak jauh. Di sini dijelaskan mengapa pendidikan nonformal kesetaraan dan pendidikan anak usia dini, dapat dikatakan pendidikan jarak jauh dengan menjelaskan bahwa (1) guru-gurunya (desainer modul belajarnya) berada di pusat (Jakarta), sedangkan siswanya tersebar di seluruh Indonesia, maka dari itu (2) pendidikan ini menggunakan media (tercetak untuk pendidikan kesetaraan, kecuali pendidikan di bawah kelas 4 SD yang masih menggunakan media orang tua-orang tua atau anggota masyarakat lain, termasuk PAUD yang menggunakan media ibu dari anak peserta didiknya). Sebetulnya PAUD sekaligus juga mendidik ibu-ibu tentang bagaimana hidup dan mengasuh anak secara sehat. Paket A yang setara dengan sekolah dasar dan Paket B setara SMP sudah lama dikenal di Indonesia. Meskipun menggunakan sistem pendidikan jarak jauh, pendidikan nonformal ini lebih dikenal dengan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat di luar sekolah (yang dibantu oleh guru). Pada waktu ini sudah dikembangkan pula Paket C setara SMA.

Bab kelima sebetulnya adalah variasi dari PTJJ. PTJJ yang sudah berkembang juga banyak menyelenggarakan pelatihan profesional jarak jauh. Pembahasan teoretisnya tidak jauh berbeda dengan pembahasan teoretis pendidikan tinggi jarak jauh, tetapi contoh pelaksanaannya diambil dari Lembaga Pendidikan dan

- **Pendahuluan**

Pengembangan Manajemen (LPPM) yang khusus menyelenggarakan pendidikan jenis ini.

Bab keenam juga merupakan variasi dari PTJJ, dan karena dianggap penting, maka bagian ini dibahas tersendiri. Peran pendidikan guru dalam pemekaran sekolah dasar dan sekolah menengah yang diakselerasi seperti sekarang ini sungguh sangat besar. Bilamana pendidikan guru jarak jauh tidak dapat memberikan pendidikan yang berkualitas, maka pendidikan pada tingkat dasar dan menengah akan menderita untuk waktu yang lama. Komponen yang tersulit dalam meningkatkan dan mempertahankan kualitas di sini banyak ditentukan oleh pematapan pengalaman lapangan. Tanpa pematapan pengalaman lapangan yang baik, yang tentunya harus diselenggarakan di sekolah-sekolah maka kualitas guru yang dihasilkan akan bermutu rendah. Teori-teori yang didapatkan oleh mahasiswa calon guru harus dapat dinyatakan dalam praktek mengelola kelas atau praktek mengelola pendidikan jarak jauh. Menyampaikan teori melalui media cetak atau media lain relatif mudah, tetapi membuat mahasiswa terampil di lapangan adalah soal yang cukup sulit, apalagi dalam jumlah banyak yang dibutuhkan untuk menuntaskan kewajiban belajar pendidikan sembilan tahun. Sebagai contoh adalah Pendidikan Guru Sekolah Dasar oleh Universitas Terbuka, yang dimulai pada tahun 1991 dan hingga kini sudah menyelesaikan pendidikan D2 bagi lebih dari 400.000 guru SD di seluruh Indonesia.

Kebijakan Editorial

Untuk menulis buku semacam ini oleh beberapa penulis merupakan tugas yang cukup sulit. Lain halnya buku yang berisi artikel yang lepas-lepas, suatu buku pegangan memerlukan konsistensi tertentu supaya tidak membingungkan. Meskipun setiap bagian

merupakan suatu kesatuan tersendiri, semuanya didasarkan suatu paradigma yang sama, yaitu paradigma pendidikan jarak jauh. Bab ketiga berhubung erat dengan bab keempat dan kelima, yang membutuhkan konsistensi, sehingga buku ini tampil utuh.

Buku ini adalah usaha pertama untuk membuat suatu buku pedoman bagi pendidikan jarak jauh secara menyeluruh. Mudah-mudahan dapat berkenan di hati para pembaca, sehingga ada usaha untuk memberikan saran perbaikan yang diperlukan. □

Bab I

Pendidikan Jarak Jauh Dalam Konteks Pendidikan Nasional

Setijadi

A. Definisi Pendidikan Jarak Jauh

Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), adalah belajar yang direncanakan, yang biasanya terjadi di tempat lain di luar tempat mengajar. Oleh karena itu, diperlukan teknik-teknik khusus desain mata pelajaran, teknik-teknik khusus pembelajaran, metodologi khusus komunikasi melalui berbagai media, dan penataan organisasi serta administrasi yang khusus pula (Moore dan Kearsly, 1996)

Dengan demikian, pada dasarnya pendidikan jarak jauh, adalah jenis pendidikan di mana peserta didik berjarak jauh dari pendidik, sehingga pendidikan tidak dapat dilakukan dengan cara tatap muka. Karena itu penyampaian pesan pendidik kepada peserta didik harus dilakukan melalui media. Media tersebut dapat berupa media cetak, radio, televisi, telepon, orang tua, masyarakat awam, komputer atau media lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan. Karena pesan diberikan melalui media, maka peserta didik diharapkan dapat belajar secara mandiri. Belajar mandiri tidak perlu berarti belajar sendiri, akan tetapi yang penting adalah belajar dengan tanggung jawab sendiri. Bertanya kepada teman peserta didik, kepada orang lain yang lebih tahu, atau mencari sumber lain, di perpustakaan misalnya, untuk menjawab pertanyaan, sering

diperlukan peserta didik, bilamana ia kurang mengerti bahan ajarnya.

Kemandirian memang tidak dapat dituntut dari peserta didik yang belum dapat membaca dan menulis, karena itu, bagi anak-anak maupun orang dewasa yang belum dapat membaca dan menulis, media PJJ yang digunakan adalah orang, biasanya orang tua untuk anak-anak; dan anggota masyarakat lain yang sudah menguasainya bagi orang dewasa. Orang yang ditunjuk menjadi media tersebut mendapatkan tugas untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan atau diketahui peserta didik yang belum dapat membaca dan menulis. Misalnya, yang dilakukan ibu-ibu di Australia untuk mendidik anak kecilnya, atau ibu-ibu di Indonesia dalam mendidik anaknya pada usia dini.

Lembaga PJJ sendiri menyediakan interaksi antara peserta didik dan pendidik atau tutor untuk mengadakan interaksi (diskusi, tanya-jawab) secara tatap muka atau jarak jauh (melalui surat, telepon atau komputer). Akan tetapi tutorial ini jarang dilakukan sehingga peserta didik memang harus banyak belajar secara mandiri. Bila peserta didik tidak ingin belajar mandiri, PJJ bukan cara yang baik untuk menambah pengetahuan dan keterampilan (kecuali bagi mereka yang masih sangat kecil dan yang masih buta huruf, PJJ dapat dilaksanakan dengan media orang tua atau anggota masyarakat lain).

Kecuali (1) adanya jarak yang jauh antara peserta didik dan pendidik, dan (2) individualisasi dan kemandirian dalam belajar. Ada beberapa karakteristik lain yang menjadi ciri PJJ, yaitu (3) adanya bahan ajar yang biasanya dikembangkan sendiri oleh lembaga PJJ, (4) penggunaan berbagai media pembelajaran, (5) adanya bantuan belajar yang berupa tutorial dan bantuan belajar lainnya yang terbatas, (6) adanya proses industrialisasi dalam pengembangan, pengadaan dan distribusi bahan belajar.

- Pendidikan Jarak Jauh dalam Konteks Pendidikan Nasional

B. Permasalahan Pendidikan Nasional

Permasalahan pendidikan biasanya dibagi menjadi empat bagian: pemerataan, kualitas, relevansi dan efisiensi.

1. Masalah Pemerataan Pendidikan

Pemerataan pendidikan bukan sekedar membangun sekolah di mana-mana, akan tetapi juga membuat sekolah yang dapat terjangkau oleh semua anak, terutama pendidikan yang sudah masuk dalam kategori kewajiban belajar. Di Indonesia hal itu berarti bahwa semua anak Indonesia tanpa kesulitan harus dapat masuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Mulai tahun 1974 Indonesia secara besar-besaran membangun gedung sekolah dasar di mana-mana, tanpa perencanaan dan persiapan yang matang. Akibatnya, gedung-gedung terbangun dengan cepat, karena uang untuk itu disediakan Pemerintah. Buku-buku juga disediakan cukup cepat, akan tetapi tanpa kualitas yang cukup memadai.

Masalah yang sangat sulit diatasi adalah penyediaan guru yang dapat mencukupi jumlah sekolah yang didirikan. Meskipun pada waktu itu yang dibutuhkan sekolah dasar hanya guru-guru yang lulus sekolah pendidikan guru, akan tetapi untuk mendidik guru baru setidak-tidaknya diperlukan waktu 4 tahun. Untungnya pada waktu itu persediaan guru yang belum terangkat masih cukup banyak, sehingga guru-guru tersebut dapat diangkat dari status honorer menjadi guru tetap. Guru-guru yang belum mengajar ditempatkan di sekolah-sekolah dasar yang baru.

Pada waktu yang bersamaan pemerintah juga mendirikan SPG-SPG baru untuk menambah guru-guru di sekolah-sekolah yang masih banyak sekali direncanakan. Pada tahun 1974 baru 40% anak usia sekolah dasar yang masuk sekolah, sehingga masih diperlukan berpuluh-puluh ribu sekolah dasar baru (standar enam kelas) untuk

dapat menampung 60% anak yang belum tertampung. Pada tahun 1985 hampir semua anak usia sekolah dasar sudah masuk SD. Masih sekitar 15% yang belum dapat dijangkau sekolah karena tempat tinggal yang terpencil atau karena cacat mental atau fisik.

Meningkatkan angka partisipasi dari 85% menjadi 100% memerlukan usaha-usaha khusus. Pemerintah mulai mendirikan sekolah-sekolah kecil di daerah-daerah terpencil dengan beberapa guru mengajar kelas ganda. Percobaan-percobaan untuk mengintegrasikan anak-anak tuna daksa dan tuna rungu di dalam sekolah-sekolah biasa juga dilaksanakan. Tetapi usaha untuk melaksanakan pendidikan jarak jauh di SD dengan Proyek Pamong (Pendidikan Anak oleh Masyarakat, Orang tua dan Guru), yang dimulai pada tahun 1973, tidak dapat berkembang karena terkalahkan oleh perkembangan SD konvensional yang menjadi proyek utama Pemerintah. Baru sekitar permulaan 1980-an dimulailah pendidikan jarak jauh di tingkat SMP (SMP Terbuka). SMP Terbuka juga hampir lenyap karena dilanda SMP konvensional yang didirikan di mana-mana. Baru setelah keuangan pemerintah menurun dan wajib belajar dicanangkan untuk sembilan tahun maka pemerintah kembali memperhatikan SMP Terbuka sebagai salah satu alternatif yang realistis .

Pada tingkat pendidikan tinggi masalah pemerataan juga baru ditangani melalui pendidikan jarak jauh setelah pemerintah dan swasta tidak lagi sanggup melakukan pemekaran melalui pendidikan konvensional. Pada waktu yang hampir bersamaan, ada usaha untuk meningkatkan guru sekolah dasar setingkat dengan Diploma II (D-II), sehingga mereka perlu pula dididik melalui perguruan tinggi. Pada tahun 1984 sebuah perguruan tinggi jarak jauh dibuka oleh pemerintah untuk menampung lulusan SMA yang hendak meneruskan pendidikannya ke perguruan tinggi, baik bagi mereka yang baru lulus maupun mereka yang sudah bekerja. Selain itu,

- Pendidikan Jarak Jauh dalam Konteks Pendidikan Nasional

perguruan tinggi jarak jauh tersebut, yang dinamakan Universitas Terbuka (UT), ikut serta meningkatkan kemampuan guru sekolah dasar setara dengan tingkat D-II. Pendidikan jarak jauh dapat melakukan peningkatan tersebut tanpa banyak mengganggu kelancaran pelajaran di sekolah dasar yang bersangkutan karena guru-gurunya tetap dapat mengajar, di samping meneruskan pendidikannya.

2. Masalah Kualitas Pendidikan

Memperbanyak sekolah secara besar-besaran seperti di Indonesia dengan INPRES SD, barangkali belum pernah dikerjakan di mana pun di dunia ini. Meskipun demikian, pengembangan sekolah secara cepat, selalu menimbulkan masalah kualitas. Artinya, sekolah-sekolah yang baru biasanya tidak dipersiapkan dengan baik sehingga terjadi kemerosotan kualitas, apakah itu kualitas kurikulumnya, gurunya, gedungnya, peralatan pelajarannya, atau yang lain lagi, yang kemudian menghasilkan kemerosotan hasil belajar. Karena memang tidak mungkin menyiapkan pemekaran sekolah sedemikian banyaknya (sampai lebih dari 10.000 SD tiga kelas per tahun pada waktu jaya-jayanya SD INPRES) dengan cermat. Karena itu, tidak seyogyanya kita membandingkan kualitas pendidikan sekolah pada waktu pemekaran dengan kualitas pendidikan sekolah sebelumnya. Belum lagi bila yang menjadi bahan pembandingan adalah sekolah-sekolah di zaman 'normal', di mana gaji guru dan keperluan sekolah tersedia dengan cukup. Namun demikian, hal itu tidak berarti bahwa kualitas tidak dapat dinaikkan setelah sekolah-sekolah tersebut berdiri. Dalam hal ini pendidikan jarak jauh juga dapat dipertimbangkan, meskipun pendapat umum mengatakan bahwa tidak mungkin pendidikan jarak jauh dapat lebih tinggi mutunya daripada pendidikan konvensional. Pemekaran yang cepat dari SD ini kemudian mengakibatkan pemekaran cepat dari SMP

dan disusul dengan pemekaran SMA dan perguruan tinggi secara cepat pula.

Ada beberapa unsur pendidikan jarak jauh yang dapat dipergunakan untuk ikut meningkatkan kualitas pendidikan sekolah konvensional, sehingga bilamana unsur-unsur tadi dipergunakan secara meluas di sekolah-sekolah konvensional maka unsur-unsur itu dapat membantu meningkatkan pendidikan di sekolah-sekolah konvensional tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah (1) bahan ajar yang lebih mudah dimengerti oleh siswa, dan biasanya lebih bermutu daripada bahan belajar "diktat" yang digunakan di perguruan tinggi konvensional, karena khusus dirancang untuk belajar mandiri dan dikembangkan oleh pengajar-pengajar yang terpilih; (2) ujian yang terkalibrasi; (3) tugas mandiri yang dirancang khusus supaya siswa dapat bekerja mandiri; (4) pengajaran berbantuan media noncetak, terutama yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

3. Masalah Relevansi Pendidikan

Masalah ini berkaitan dengan kualitas pendidikan, namun dapat dibicarakan tersendiri karena banyak lembaga pendidikan yang berusaha memberikan pendidikan yang berkualitas dengan kriteria yang kurang relevan dengan kebutuhan hidup peserta didik. Bila yang diusahakan oleh lembaga pendidikan adalah kecakapan ilmu pengetahuan yang formal, maka paling tidak ada dua hal yang tidak diperhatikan. *Pertama*, pengembangan anak sebagai manusia yang berkembang secara baik, yang dapat mengarungi kehidupannya dengan jelas tanpa terlalu banyak konflik batin, dan yang juga peduli terhadap masyarakat dan lingkungan hidupnya. *Kedua*, ketrampilan yang diperlukan untuk mencari kerja maupun untuk menghadapi masalah-masalah teknis dalam kehidupannya dan kehidupan keluarganya. Tanpa kedua hal itu maka pendidikan

menjadi kurang relevan. Pendidikan formal juga relevan bagi kehidupan peserta didik, akan tetapi penekanan kepada pelajaran formal, mengejar angka, seperti yang dilakukan kebanyakan lembaga pendidikan kini, melupakan sesuatu yang lebih relevan bagi kehidupan peserta didik. Pendidikan jarak jauh maupun pendidikan konvensional keduanya dapat meningkatkan relevansi pendidikan di semua tingkat.

4. Masalah Efisiensi Pendidikan

Masalah ini hubungannya dengan proses pendidikan, yang oleh banyak pengamat dan peneliti pendidikan disebut sebagai kotak hitam, karena dalam prakteknya sukar untuk diketahui proses pendidikan yang terjadi di dalam maupun di luar kelas: bagaimana semangat dan cara anak belajar, bagaimana guru mengajar di kelas, dan proses pendidikan lainnya yang terjadi di kelas maupun di rumah atau tempat lain. Yang kita ketahui adalah hasil akhir proses belajar yang berupa nilai tes dan ujian. Efisiensi pendidikan juga dapat kita ukur dari segi ekonomi: berapa biaya yang kita keluarkan untuk mendidik lulusan dengan kualitas seperti ini? Ditinjau dari segi ini barangkali sekolah-sekolah Indonesia cukup efisien karena biaya keseluruhan (jumlah dari biaya yang dikeluarkan orangtua, masyarakat dan pemerintah) yang dikeluarkan untuk menghasilkan lulusan relatif kecil dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan banyak negara lain dengan kualitas yang sama. Ditinjau dari segi ini pendidikan jarak jauh biasanya juga dianggap lebih efisien daripada pendidikan konvensional karena biaya sarana dan prasarana serta biaya untuk guru, bagi PJJ jauh lebih sedikit daripada pendidikan konvensional, belum lagi biaya yang harus dikeluarkan orang tua bilamana anak harus hidup di kota lain karena di kota tempat tinggal orang tua tidak ada lembaga pendidikan konvensional yang diinginkan.

Yang menjadi masalah adalah, apakah yang terjadi di lembaga pendidikan? Ada lembaga pendidikan yang seakan-akan tidak memberi pelajaran yang baik, terlihat dari banyaknya orang tua yang mengeluh karena mereka harus ikut mengajar anak untuk dapat menyelesaikan pekerjaan rumah. Lagipula pekerjaan rumah yang diberikan setiap hari sangat banyak. Lembaga pendidikan jarak jauh memang ada yang mengandalkan bantuan orang tua untuk mengajar. Misalnya, yang dilakukan di Australia dan Selandia baru melalui radio atau media lain. Orang tua di daerah terpencil dibekali untuk dapat mengajar anaknya yang belum mampu belajar mandiri atau menjadi tutor bagi anak yang sudah dapat mandiri. Cara ini memang tidak dapat dihindari karena tempat tinggal mereka jauh dari sekolah yang terdekat. Bagi semua pihak yang tersangkut, baik pemerintah, orang tua maupun lembaga pendidikan, cara tersebut dapat dibenarkan dan untuk lingkungan tertentu sangat efisien.

C. Peranan Pendidikan Jarak Jauh dalam Pemerataan Pendidikan yang Bermutu

1. Peranan Pendidikan Jarak Jauh pada Akses Pendidikan

Pendidikan jarak jauh dengan berbagai nama, mulai tingkat sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi sudah pernah dilaksanakan di Indonesia dengan hasil yang bervariasi. Ada yang berhasil baik dan dilaksanakan sampai sekarang, ada yang dihentikan karena hasilnya kurang memuaskan, dan ada yang dihentikan karena kalah bersaing dengan sekolah yang sudah lebih dikenal. Namun, semua pendidikan jarak jauh pada semua tingkat dilaksanakan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dan untuk mereduksi biaya. Jadi, desain pendidikan jarak jauh adalah untuk meningkatkan akses pendidikan di semua tingkat.

- Pendidikan Jarak Jauh dalam Konteks Pendidikan Nasional

Pendidikan jarak jauh pada tingkat sekolah dasar dimulai dengan Paket A setara SD. Paket A digagas dan dilaksanakan oleh pendidikan luar sekolah. Semula Paket A setara SD tidak dilihat sebagai sungguh-sungguh setara karena kurikulumnya cukup berlainan, akan tetapi setelah pemerintah mencanangkan wajib belajar enam tahun dan ternyata Paket A memberikan kontribusi yang tidak sedikit pada partisipasi anak umur 6 sampai 12 tahun pada tingkat SD, maka Paket A dalam statistik resmi dimasukkan sebagai ekuivalen dengan SD. Paket A sebetulnya tidak pernah dinamakan pendidikan jarak jauh, akan tetapi ia menggunakan unsur-unsur pendidikan jarak jauh: modul belajar, partisipasi masyarakat dan orang tua untuk ikut membina Paket A, dan pembinaan dilakukan secara terpusat. Yang lebih tepat disebut belajar jarak jauh di tingkat SD adalah SD Pamong SD ini mengikuti kurikulum SD secara lengkap dan dibina oleh guru-guru SD setempat. Modul belajar dan ujian dibuat terpusat. Anak dibiasakan untuk belajar mandiri sejak ia dapat membaca dan menulis. Belajar dalam kelas dibatasi seminimum mungkin, sehingga anak dapat membantu orang tuanya untuk bertani sambil belajar. Sayangnya SD Pamong tidak dilaksanakan secara meluas di luar daerah percobaan, karena pada saat itu SD Inpres sudah sangat meluas sehingga pemerintah tidak merasa perlu untuk melanjutkan SD Pamong. Pada saat ini mungkin sistem Pamong dapat sangat membantu dalam meningkatkan angka partisipasi anak umur 6 sampai 12, tanpa membuat gedung baru dan mengangkat guru-guru baru.

Pendidikan jarak jauh pada tingkat SLTP dimulai dengan SMP terbuka yang didesain sebagai pendidikan jarak jauh. Pendidikan ini dimaksudkan untuk memberikan akses kepada anak umur 12 sampai 15 tahun karena tidak dapat tertampung di SMP konvensional. SMP terbuka juga lama sekali mendapatkan pengakuan pemerintah sebagai alternatif pendidikan untuk meningkatkan akses pendidikan pada tingkat itu. Baru setelah pencanangan wajib belajar 9 tahun,

SMP terbuka menjadi alternatif pendidikan yang diselenggarakan secara meluas. Sekarang SMP terbuka sudah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan di Indonesia.

2. Membuat Pendidikan Jarak Jauh yang Bermutu

Mutu pendidikan pertama-tama tergantung dari mutu masukannya, yaitu mutu peserta didiknya. Akan tetapi perguruan tinggi jarak jauh biasanya juga pendidikan terbuka, yang berarti lembaga PTJJ tidak menyeleksi masukannya. Dengan demikian, siapapun yang ingin masuk PTJJ akan diterima. Demikian pula bagi pendidikan dasar. Karena pendidikan dasar wajib, semua anak usia pendidikan dasar harus masuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Baik sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama, apakah sekolah itu sistem jarak jauh atau tatap muka, harus menerima siapa saja yang ingin masuk sekolahnya. Bila mutu peserta didik baik, maka hasil pendidikannya biasanya juga akan baik. Bila peserta didik tidak bermutu, maka sulit bagi lembaga pendidikan untuk membuat peserta didiknya berhasil baik. Bagi peserta didik PJJ mutu yang baik tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan otaknya, akan tetapi juga kemauannya untuk belajar mandiri. Meskipun peserta didik PJJ pandai, apabila tidak disiplin untuk belajar mandiri akan gagal. Mutu pendidikan suatu lembaga tidak bisa hanya tergantung dari mutu peserta didiknya. Bila proses pendidikannya baik, maka hasil yang dicapainya juga bisa baik, meskipun peserta didiknya mula-mula kurang bermutu. Proses pendidikan suatu lembaga PJJ dapat baik bilamana didukung oleh bahan ajar yang baik, tutorial dan bantuan belajar lainnya yang baik, ujian yang baik, dan prosedur operasional lain yang memadai. Antara masukan dan proses pendidikan saling mempengaruhi. Lembaga PJJ yang proses pendidikannya baik, menjadi terkenal dan dicari oleh calon peserta didik yang memang memerlukannya.

Sekali lagi, hanya peserta didik yang mempunyai disiplin dan ketegaran untuk belajar mandiri akan berhasil di PJJ.

3. Sarana dan Prasarana Pendidikan Jarak Jauh yang Bermutu dan dapat Menjangkau Semua Anak yang Memerlukannya

Sudah jelas bahwa sarana kampus seperti lembaga pendidikan konvensional tidak diperlukan. Meskipun demikian, perlu ada sarana yang dapat digunakan sebagai kantor pusat PJJ. Sarana tersebut meliputi perkantoran bagi staf edukatif dan administrasi untuk melaksanakan tugas mereka sehari-hari. Sarana perkantoran staf administrasi tidak ada bedanya dengan sarana staf administrasi di lembaga PJJ konvensional, akan tetapi untuk staf edukatif perlu ada sarana yang cukup berbeda dengan PJJ konvensional. Selain perpustakaan, yang perlu dimiliki oleh semua lembaga pendidikan, maka staf edukatif PJJ memerlukan sarana komputer dalam rangkaian jaringan lokal yang diperuntukkan untuk pengembangan dan pengadaan bahan ajar, studio media audio dan video, gudang penyimpanan dan distribusi bahan ajar, suatu unit pengujian yang bertugas menganalisis dan menyimpan bahan dan hasil ujian, dan bila perlu sebuah percetakan untuk mencetak bahan ajar tercetak. Tetapi kemungkinan lebih efisien kalau percetakan bahan ajar dilakukan perusahaan profesional di luar lembaga PJJ.

Bilamana PJJ ingin melaksanakan belajar-e, maka sambungan internet berpita lebar adalah kebutuhan mutlak.

4. Sumber daya manusia bagi PJJ yang bermutu

Sumber daya manusia (SDM) yang bermutu perlu dimiliki oleh setiap lembaga PJJ. Hanya saja kebutuhan SDM khusus bagi PJJ tidak sama dengan kebutuhan SDM untuk lembaga pendidikan konvensional. SDM akademik untuk lembaga pendidikan konvensional harus

menguasai mata pelajaran dan cara mengajar peserta didik yang dihadapinya. SDM lembaga PJJ tidak begitu memerlukan SDM seperti itu karena para pengajarnya tidak langsung menghadapi pelajarannya. Yang diperlukan adalah SDM yang berkeahlian dalam (1) pengembangan program dan kurikulum; (2) pengembangan bahan ajar; (3) bantuan belajar, termasuk tutorial; (4) evaluasi hasil belajar; (5) teknologi informasi dan komunikasi (termasuk yang berhubungan dengan belajar-e); ditambah dengan yang berkeahlian dalam bidang-bidang serupa yang ada pada perguruan konvensional, seperti (6) keperustakaan; (7) penelitian; (8) administrasi akademik (termasuk pengelolaan registrasi, perencanaan strategik, sampai dengan pengelolaan kelulusan); (9) logistik (distribusi bahan ajar, dan penyelenggaraan pengujian) dan (10) hubungan masyarakat.

SDM yang berhubungan dengan keahlian dalam mata pelajaran yang diajarkan dapat dipunyai sendiri oleh lembaga PJJ, akan tetapi tidak mutlak, karena ahli mata pelajaran dapat dikontrak dari luar. Meskipun demikian, banyak lembaga PJJ yang mempunyai SDM ahli mata pelajaran, meskipun tugasnya tidak hanya mengembangkan mata pelajaran tetapi juga hal-hal lain yang berhubungan dengan 9 keahlian di atas. Sebab, bila seorang ahli mata pelajaran sudah selesai mengembangkan mata pelajarannya maka ia tidak ada pekerjaan lain kecuali yang berhubungan dengan 9 keahlian di atas, sebelum waktunya untuk merevisi mata pelajaran tersebut. Lembaga PJJ yang baru berdiri memerlukan waktu yang lama untuk mendidik staf edukatifnya untuk menjadi setara kualitasnya dengan staf lembaga pendidikan konvensional yang sudah lama berdiri, kecuali kalau lembaga PJJ tersebut dapat “mencuri” staf berkualitas baik dari lembaga lain untuk menjadi staf tetapnya. Karena itu, banyak lembaga PJJ yang mengontrak ahli mata pelajaran yang terbaik hanya untuk mengembangkan mata pelajaran tertentu yang ahlinya tidak dimiliki lembaga PJJ itu sendiri. Kontrak akan selesai dengan selesainya tugas tersebut.

- Pendidikan Jarak Jauh dalam Konteks Pendidikan Nasional

Pengembangan mata pelajaran yang baik tidak dilakukan oleh seorang ahli mata pelajaran sendirian, akan tetapi ia dibantu oleh sebuah tim yang berkeahlian dalam kurikulum, desain dan penyajian mata pelajaran melalui media tertentu. Hasil tim pengembang bahan ajar pada umumnya dapat diharapkan lebih sempurna daripada hasil seorang ahli secara perseorangan dalam membuat bahan ajar sebagai bahan ajar mandiri dan lengkap.

5. Masalah Biaya Pendidikan Jarak Jauh

a. *Biaya Bagi Penyelenggara*

Biaya untuk pendidikan jarak jauh biasanya lebih murah daripada biaya pendidikan konvensional karena pendidikan jarak jauh biasanya adalah pendidikan massal. Pendidikan jarak jauh bagi negara yang berpenduduk padat seperti Indonesia, Korea, Thailand, dan Inggris mempunyai pendidikan tinggi jarak jauh dalam skala besar. Dengan demikian biaya per mahasiswa menjadi jauh lebih kecil daripada biaya per mahasiswa dari pendidikan tinggi konvensional. Menurut perhitungan Daniel dan Mackintosh (2003), proporsi biaya per mahasiswa dari pendidikan tinggi jarak jauh yang besar - mega universities menurut Daniel (1996) – bila dibandingkan dengan biaya mahasiswa pendidikan tinggi konvensional adalah 5% bagi *Korea National Open University*, 15% bagi Universitas Terbuka, 30% bagi *Sukhothai Thammathirat Open University*, dan 50% bagi *United Kingdom Open University*. Perbedaan yang cukup bervariasi tersebut karena perbedaan penggunaan teknologi dalam penyelenggaraannya. Pilihan teknologi tersebut tidak hanya berpengaruh pada harga perangkat keras dan perangkat lunaknya tetapi berpengaruh pula terhadap faktor-faktor lainnya, termasuk praktek kerja institusinya (Rumble, 2003). Yang dimaksud dengan praktek kerja di sini adalah cara kerja yang dilaksanakan

berdasarkan pilihan teknologi dan bagaimana sumber daya manusia digunakan (termasuk di dalamnya penggunaan tenaga lepas dibandingkan dengan tenaga tetap). Pengaruh praktek kerja terhadap biaya penyelenggaraan pendidikan jarak jauh cukup besar.

Negara-negara yang berpenduduk jarang dan tersebar, seperti Australia dan Selandia Baru, tidak mempunyai perguruan tinggi jarak jauh yang besar. Bahkan negara-negara tersebut jarang mempunyai perguruan tinggi jarak jauh modus tunggal. Pendidikan jarak jauh kebanyakan diselenggarakan oleh perguruan tinggi konvensional (modus ganda), sehingga perhitungan biayanya juga berbeda. Dosen dalam perguruan tinggi konvensional juga disertai mengampu mata kuliah PJJ yang sama, karena jumlah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan jarak jauh juga tidak banyak. Interaksi antara mahasiswa dan dosen juga lebih mudah diselenggarakan karena kampus konvensional sudah ada, sehingga biaya infrastruktur tambahan juga dapat dikurangi banyak.

Pada saat ini sudah banyak pendidikan jarak jauh yang diselenggarakan oleh gabungan berbagai perguruan tinggi (modus konsorsium). Di Australia dilakukan dengan cara menyelenggarakan program studi penuh atau mata kuliah individual yang dapat ditransfer ke perguruan tinggi yang menjadi anggota konsorsium untuk menjadi bagian dari program studi pendidikan konvensional. Cara penghitungan biaya mungkin serupa dengan penghitungan pendidikan tinggi jarak jauh modus ganda, hanya lebih rumit karena meliputi berbagai institusi, cara penghitungannya mungkin lain. Menurut penulis belum ada seorangpun yang membandingkan biaya pendidikan jarak jauh modus konsorsium maupun modus ganda dengan biaya pendidikan tinggi konvensional, meskipun dapat dikatakan bahwa biayanya lebih rendah dari biaya pendidikan mahasiswa konvensional.

- Pendidikan Jarak Jauh dalam Konteks Pendidikan Nasional

b. Biaya Bagi Peserta Didik

Biaya ini sulit dihitung karena sifatnya sangat pribadi. Akan tetapi pengeluaran biaya pondokan bagi mahasiswa konvensional yang membutuhkannya, biaya transpor ke tempat kuliah, dan biaya-biaya lain yang ada hubungannya dengan biaya kehidupan mandiri mahasiswa (lepas dari orang tuanya), sangat bervariasi akan tetapi cukup besar untuk diperhitungkan bila membandingkan biaya pendidikan konvensional dan jarak jauh. Kebanyakan mahasiswa pendidikan jarak jauh tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya tersebut karena mereka dapat tetap tinggal bersama keluarga mereka. Hal ini membuka akses yang lebih besar pada pendidikan jarak jauh bagi calon peserta didik karena tidak mempunyai cukup sumber biaya untuk bertempat tinggal di tempat lain untuk mengikuti pendidikan konvensional.

D. Peningkatan Relevansi Pendidikan melalui Pendidikan Jarak Jauh

1. Pendidikan dan Pengajaran

Pada tahun 50-an Departemen Pendidikan Nasional bernama Kementerian Pendidikan dan Pengajaran. Pemisahan pengertian pendidikan dan pengajaran ada gunanya karena beberapa hal. Pendidikan adalah kata generik yang meliputi pula pengajaran, tetapi pendidikan juga meliputi hal-hal yang tidak termasuk pengajaran, seperti pendidikan moral dan pendidikan agama. Pengajaran meliputi hal-hal yang erat hubungannya dengan pengetahuan dan ilmu. Pengajaran mempunyai metodik sendiri yang tidak dapat begitu saja diterapkan bagi pendidikan moral dan agama. Dengan menyatukan pengertian pendidikan dan pengajaran, maka sesuatu menjadi hilang. Metodologi pendidikan moral dan agama menjadi sama dengan pengajaran. Pendidikan agama

menjadi pengajaran agama, atau pendidikan *tentang* agama. Begitu pula pendidikan moral atau budi pekerti menjadi pengajaran moral dan budi pekerti. Dengan demikian, pendidikan agama dan pendidikan moral dapat diberi nilai, dan bukankah nilai itu diperlukan untuk mengukur kemajuan peserta didik? Apakah dengan mendapatkan nilai 10 atau A untuk pelajaran agama seseorang menjadi lebih beragama daripada seorang yang mendapatkan nilai kurang dari itu? Apakah dengan mengikuti pelajaran budi pekerti anak dapat menjadi lebih bermoral? Dilema iri yang sampai sekarang belum terpecahkan oleh lembaga-lembaga pendidikan, sehingga perkelahian antarsekolah dan kriminalitas oleh anak sekolah bukan lagi hal yang luar biasa. Dengan menyatukan dua pengertian itu, apa yang terjadi adalah: kita menghilangkan tanggung jawab sekolah pada pendidikan. Sekolah sudah merasa cukup bila sudah memenuhi kurikulum tentang *pengajaran* agama, budi pekerti, moral, Pancasila atau apapun namanya. *Pendidikannya* sendiri menjadi tersisihkan.

2. Pendidikan untuk Apa?

Jawaban atas pertanyaan itu bermacam-macam, tergantung dari apa yang dianggap penting dalam kehidupan seseorang. Kalau kita berambisi besar, maka pendidikan ditujukan pada kesuksesan dalam membina karier kita sesudah lulus. Bila kemajuan dalam dunia modern bagi bangsanya menjadi yang utama, maka pendidikan harus ditujukan untuk membuat bangsa Indonesia ini pandai dalam ilmu dan teknologi. Bilamana fokus kita dalam pendidikan pada hal-hal seperti itu, maka pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti menjadi kurang penting. Jauh lebih mudah untuk memberikan *pelajaran* agama dan *pelajaran* budi pekerti dan moral Pancasila, dengan harapan bahwa pengetahuan tentang agama dan moral Pancasila akan membawa kita menjadi orang yang lebih baik. Hal

- Pendidikan Jarak Jauh dalam Konteks Pendidikan Nasional

itu tidak mungkin terjadi, banyak di antara kita yang memakluminya, akan tetapi apa yang harus dilakukan? Tidak banyak ahli yang peduli untuk menjawabnya, karena waktunya habis untuk memikirkan karier dan kekayaan, pembangunan fisik, ilmu dan teknologi, yang juga penting untuk dipikirkan dan dilaksanakan, tetapi bila sampai melupakan aspek kehidupan yang lebih penting, seperti agama dan budi pekerti, maka seluruh kehidupan manusia akan rusak, seperti yang sekarang sudah terjadi di mana-mana. Masalah ini harus ditangani, baik oleh pendidikan konvensional, pendidikan jarak jauh, pendidikan masyarakat maupun pendidikan dalam keluarga.

3. Pengajaran yang Relevan

Untuk menyesuaikan pelajaran dengan ilmu pengetahuan yang berubah dengan cepat PJJ lebih sulit daripada pendidikan konvensional karena pendidikan jarak jauh banyak menggunakan media yang sulit diubah setiap tahun, sedangkan pada pendidikan konvensional, karena media utamanya adalah orang (guru), maka perubahan pelajaran dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Untunglah bahwa keharusan untuk mengubah pelajaran supaya relevan dengan kehidupan peserta didik biasanya tidak banyak dari tahun ke tahun. Namun demikian, supaya pendidikan jarak jauh tidak terjebak pada materi pelajaran yang sebetulnya sudah usang, maka pengembang pelajaran harus mengadakan survei terlebih dahulu sebelum menetapkan materi pelajaran secara detail. Sekali materi ditetapkan dan dibuat, maka biasanya materi tersebut dipertahankan selama lima tahun, sebelum materi tersebut direvisi dan dibuat kembali. Hal ini terutama berlaku bagi materi pelajaran yang jumlahnya dibuat banyak, karena diminati oleh banyak peserta didik. Bagi materi yang dibuat sedikit jumlahnya, karena tidak begitu diminati oleh peserta didik, revisi materi juga masih sulit dilakukan, karena usaha pembuatan materi biasanya meliputi banyak orang

(satu tim pengembang mata pelajaran), yang sulit untuk ditugasi merevisi setiap tahun, apalagi kalau tim pengembang terdiri dari orang-orang di luar lembaga pendidikan jarak jauh itu sendiri.

4. Peningkatan Relevansi Pengajaran

Sebelum berumur lima tahun, bila sangat diperlukan, materi bahan ajar dapat pula ditambah suplemen singkat tentang perubahan-perubahan yang diperlukan. Bagi materi yang sudah berumur lima tahun, survei materi harus diulang bila terlihat bahwa materi itu sudah usang. Hal ini tidak dapat ditawar bilamana pendidikan jarak jauh ingin meningkatkan relevansi dan sekaligus kualitas materi pelajarannya.

Materi pelajaran pendidikan jarak jauh sangat transparan karena setiap orang yang mau dapat mempelajarinya. Dengan demikian, materi yang sudah tidak relevan lagi dan sudah ketinggalan zaman, akan berdampak negatif pada reputasi lembaga pendidikan jarak jauh yang bersangkutan.

E. Peningkatan Efisiensi Pendidikan melalui Pendidikan Jarak Jauh

1. Pendidikan yang Efisien

Pendidikan (atau pengajaran) yang lebih efisien adalah pendidikan yang dapat mencapai sarannya dengan sumberdaya yang lebih kecil. Efisiensi adalah perbandingan cara sekarang dengan cara lama atau cara lain, artinya bilamana cara sekarang menggunakan sumberdaya yang lebih kecil daripada cara lama atau cara lain maka cara sekarang lebih efisien dibandingkan dengan cara lama atau cara lain itu untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam hal ini efisiensi PJJ dibandingkan dengan efisiensi pendidikan

- Pendidikan Jarak Jauh dalam Konteks Pendidikan Nasional

konvensional dalam menggunakan sumberdaya untuk mencapai tujuan yang sama. Biasanya sumberdaya diukur dengan uang. Bilamana uang yang digunakan lebih kecil untuk mencetak lulusannya, maka lembaga itu lebih efisien. Pada pasal 5a di atas tentang pembiayaan pendidikan sudah disebutkan bahwa semua PTJJ (mega universities) yang diteliti lebih efisien dari PT konvensional. Tentunya masih dapat dipertanyakan, apakah hasil dari PTJJ dan PT konvensional itu setingkat. Ada yang mengatakan bahwa PTJJ menghasilkan lulusan yang lebih mandiri, maka dari itu lulusannya lebih dicari oleh perusahaan yang ingin mencari staf baru; tetapi ada pula yang mengatakan bahwa PT konvensional menghasilkan lulusan yang lebih bermutu. Belum ada penelitian (setidaknya di Indonesia) yang berusaha menjawab mana pendapat yang benar, atau seberapa jauh kebenaran masing-masing pendapat tersebut. Yang sudah jelas adalah PJJ sebagai lembaga pendidikan massal mempunyai keuntungan skala ekonomis, sehingga biaya unitnya menjadi jauh lebih kecil.

2. Pengelolaan Pendidikan

Dari segi pengelolaan pendidikan PJJ mempunyai sifat seperti industri. Bahan ajar diperbanyak dalam skala besar dan proses pembuatannya dikontrol kualitasnya layaknya sebuah pabrik yang membuat barang. Distribusi bahan ajarnya juga dilakukan seperti distribusi barang pabrik ke distributornya untuk sampai ke penggunaannya. Registrasi mahasiswa juga dilakukan seperti pada industri yang pesannya datang dari mana-mana. Sebagian pengelolaan PJJ dilaksanakan seperti pada industri perangkat lunak. Peningkatan efisiensi di sini dapat mengikuti cara-cara industri yang efisien, meskipun sebagian masih pula mengikuti efisiensi PT konvensional, seperti efisiensi yang diukur dengan produktivitas lulusan. Ditinjau dari segi produktivitas dengan memakai ukuran

jumlah lulusan dibagi jumlah mahasiswa, maka produktivitas lembaga PJJ jauh lebih kecil daripada produktivitas lembaga pendidikan konvensional. Tetapi harus diingat, bahwa peserta didiknya kebanyakan adalah mereka yang belajar sambil bekerja, sehingga tidak bisa mereka belajar penuh waktu. Karena itu, mereka harus diberi waktu lebih untuk menyelesaikan pendidikannya. Waktu lebihnya juga tidak dapat ditentukan oleh lembaganya karena waktu lebih yang diperlukan peserta didik PJJ sangat ditentukan oleh masing-masing individu. Apabila pekerjaannya ringan dan ia tidak banyak bepergian, dan bilamana ia dapat menyisihkan 50% dari waktu yang dipakai oleh peserta didik lembaga pendidikan konvensional untuk belajar, peserta didik PJJ bisa diharapkan dapat menyelesaikan pendidikannya dalam waktu dua kali lipat peserta didik pendidikan konvensional. Bila lembaga PJJ menghasilkan lulusan rata-rata dalam jangka waktu dua kali dari lembaga pendidikan konvensional maka produktivitas lembaga PJJ dan lembaga pendidikan konvensional tersebut bisa disamakan.

3. Peran Guru dan Kepala Sekolah

Peran guru dan kepala sekolah pendidikan konvensional biasanya sangat penting bagi PJJ, terutama PJJ yang melaksanakan pendidikan guru. SMP terbuka dan SMA terbuka masih memerlukan guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan tutorial yang dilaksanakan secara periodik di sekolah yang berdekatan dengan kelompok belajar SMP dan SMA terbuka. Fasilitas belajar pada sekolah itu juga digunakan untuk belajar peserta didik PJJ. Dengan pengaturan seperti itu sudah jelas bahwa peran guru dan kepala sekolah konvensional tersebut sangat besar dalam PJJ. Dengan menggunakan SDM yang sama maka PJJ tersebut sudah jelas dapat menghemat dalam penggunaan SDM.

- Pendidikan Jarak Jauh dalam Konteks Pendidikan Nasional

Begitu pula halnya bagi pendidikan guru SD setara DII. Guru SD yang dididik berperan sebagai peserta didik. Tutor diambil dari masyarakat, kepala sekolah, atau guru SMP yang sudah berpendidikan S1. Sekolah digunakan sebagai sekolah latihan bagi guru-guru peserta didik, yang disupervisi oleh guru-guru yang sudah mempunyai kualifikasi sebagai supervisor dari Pemantapan Pengalaman Lapangan (PPL). Dengan menggunakan tenaga pendidik yang sudah ada maka penggunaan tenaga supervisor bagi PPL dapat pula dihemat. Dengan demikian, penyelenggaraan PJJ menjadi lebih efisien.

4. Peran Orang Tua

Pendidikan jarak jauh bagi anak kecil memerlukan bantuan orang tua, terutama ibu. Di Australia orang tua ikut serta untuk mengajar anaknya yang belum dapat membaca dan menulis, atas dasar petunjuk dan bahan ajar yang diberikan oleh kantor pusat PJJ. Di Indonesia, banyak ibu yang dilatih untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui PJJ. Dengan demikian, orang tua-lah yang mengikuti PJJ untuk dapat mengasuh anaknya yang masih berumur di bawah enam tahun. Orang tua yang berpendidikan juga dapat menjadi sumber pengetahuan bagi anaknya yang berkesulitan menghadapi tugas dari PJJ yang diikutinya. Bantuan yang diberikan orang tua ini ikut membuat PJJ menjadi lebih efisien.

5. Peran Masyarakat Sekitar Kelompok Belajar

Untuk pelaksanaan Paket A setara SD, Paket B dan Paket C, peran masyarakat sangat penting. Mereka berfungsi sebagai motivator, tutor dan pengelola lembaga PJJ nonformal tersebut. Bagi jenis PJJ lain peran mereka terbatas pada penyelenggara (PAUD) dan mereka yang memenuhi kualifikasi, dapat diangkat menjadi tutor.

Pada SD Pamong, yang sudah tidak dilaksanakan lagi, peran masyarakat sebetulnya cukup besar, sama dengan peran mereka dalam Paket A, B dan C, dan sebagai pendukung dilaksanakannya SD Pamong. Anggota masyarakat ini banyak menyumbangkan tenaganya untuk kepentingan peserta didik PJJ dalam masyarakat lingkungannya dengan sukarela atau dengan biaya yang minimal sehingga kontribusi mereka dapat membuat PJJ lebih efisien.

F. Reformasi Pendidikan melalui Pendidikan Jarak Jauh

1. Reformasi Pendidikan

Reformasi pendidikan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah untuk menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Bagi lembaga pendidikan hal itu berarti bahwa lembaga pendidikan diberdayakan secara lebih luas lagi. Memberdayakan lembaga pendidikan bukannya berarti otonomi penuh dalam mengelola dan menentukan kurikulumnya, akan tetapi ada batasan-batasan yang lebih jelas dan longgar tentang apa yang dapat dilakukan oleh sekolah. Sudah jelas kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh undang-undang itu memerlukan sumberdaya manusia yang lebih canggih, baik pengajarnya maupun orang tua peserta didiknya, yang berperan sangat penting sebagai wali amanat. PJJ dapat mengatasi ini dengan relatif cepat karena sumberdaya manusianya dapat ditingkatkan secara relatif serentak, tanpa harus meninggalkan tugas masing-masing. Pengajar tidak perlu meninggalkan tugas mengajarnya dan para orang tua atau anggota masyarakat lain yang berkecimpung dalam Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tidak perlu meninggalkan tugas masing-masing. Mendidik Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan adalah salah satu tugas yang dapat dilaksanakan

- Pendidikan Jarak Jauh dalam Konteks Pendidikan Nasional

PJJ, supaya kedua lembaga tersebut dapat segera berfungsi dengan baik. Yang terjadi pada saat ini adalah bahwa kedua lembaga tersebut masih banyak dipengaruhi oleh lembaga atau instansi pendidikan yang harus dibinanya, sehingga fungsi mengarahkan dan supervisi tidak dapat secara efektif dilaksanakan.

Yang terkandung dalam reformasi yang diamanatkan undang-undang tersebut *pertama-tama* adalah adanya lembaga pendidikan yang terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini tidak hanya dilakukan melalui kurikulum yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, tetapi juga dengan memberdayakan masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Yang *kedua* adalah membudayakan dan memberdayakan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Reformasi dalam memberdayakan peserta didik ini yang masih harus diusahakan, karena kebanyakan pendidik masih menganggap bahwa peserta didik harus dibentuk sesuai tujuan pendidikan, dan bukan diberi kesempatan untuk berkembang sendiri sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Pendidik tidak perlu menganggap dirinya selalu lebih pandai dari peserta didik, dan menganggap peserta didik harus diberitahu mana yang benar dan mana yang tidak. Jarang sekali ada pendidik yang merasa sudah cukup untuk menjadi fasilitator dan menyilahkan peserta didik mencari sendiri pengetahuan dan keterampilan yang diperlukannya, sehingga kreativitas peserta didik dapat berkembang. Pendidik kebanyakan terlalu mementingkan memberikan pengetahuan, nasihat dan pengarahan kepada peserta didik, seakan-akan itulah satu-satunya tugasnya. Mengubah sikap pendidik menjadi pendidik yang dapat memberdayakan peserta didik adalah sesuatu yang sulit dan memakan banyak waktu.

Yang *ketiga* adalah meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan berdasarkan standar nasional dan global.

Reformasi ini sekarang menimbulkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Ujian akhir berdasarkan standar nasional adalah salah satu dari usaha reformasi yang ditentang oleh sebagian masyarakat, terutama oleh peserta didik yang tidak lulus dan orang tuanya. Menerapkan standar nasional seleksi untuk semua peserta didik adalah salah satu cara menggunakan standar nasional. Cara lain adalah menguji siswa sekolah secara random untuk mengetahui prestasi sekolah, tetapi hasilnya tidak digunakan untuk seleksi kelulusan siswa atau membentuk dewan penguji nasional yang dapat memberikan sertifikasi keunggulan kelulusan bagi siswa yang menghendakinya. Sertifikat ini dapat digunakan untuk meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi, sekaligus untuk menilai prestasi sekolah yang siswanya ikut serta dalam ujian sertifikasi nasional ini. Hal ini bukan diskriminasi karena ujian dilakukan secara sukarela dan tidak menentukan kelulusan siswa.

Yang keempat adalah penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola oleh pemerintah dan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat. Meskipun tujuannya mulia, tetapi implementasinya perlu mendapatkan pemikiran yang cermat karena bisa terjadi pengelolaan lembaga pendidikan pemerintah sedikit lebih longgar sedangkan lembaga pendidikan swasta malah menjadi sangat terbatas gerakannya karena disamakan dengan lembaga pendidikan pemerintah.

2. Mengapa Perlu Reformasi?

Reformasi diperlukan bilamana tatanan yang ada sudah dirasa usang. Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan terdahulu, yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 sudah berusia empat belas tahun pada waktu Undang-Undang yang sekarang ini diterbitkan. Jadi, memang sudah perlu ada pembaharuan. Akan tetapi yang memicu reformasi adalah pergantian pemerintah yang dianggap

- Pendidikan Jarak Jauh dalam Konteks Pendidikan Nasional

otoriter menjadi pemerintah yang lebih demokratis. Jadi gerakan reformasi dalam bidang politik yang menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan bangsa dan negara berdampak besar dalam pendidikan. Apalagi Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen, maka dasar hukum reformasi menjadi lebih jelas.

3. Langkah-langkah Reformasi

Apabila reformasi dalam bidang pendidikan mengandung empat unsur maka tugas reformasi sangat besar. Pertama perlu diperhatikan komitmen pemerintah untuk menyediakan 20% anggarannya bagi pendidikan. Kelihatannya hal ini tidak dapat dilaksanakan dalam waktu beberapa tahun saja. Kalau sudah dilaksanakan mendekati 20%, sudah cukup banyak yang dapat dilakukan.

Selain penyediaan sarana dan prasarana, gaji guru yang layak, pendidikan dan latihan guru dan tenaga kependidikan lainnya perlu ditingkatkan. Prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang sebagian di desentralisasi perlu mendapatkan perhatian utama untuk mencegah korupsi yang sudah lama masuk ke bidang pendidikan. Suasana yang sudah relatif bersih dari korupsi akan memudahkan reformasi pendidikan dilakukan. Pendidikan masyarakat sekitar sekolah untuk berani bertanggung jawab atas pelaksanaan sekolah adalah salah satu unsur reformasi yang diperlukan. Kalau masyarakat masih takut kepada kepala sekolah dan guru karena takut anaknya tidak diterima, maka sekolah yang profesional dan akuntabel akan sulit dikembangkan. Pengawasan dari orang tua dan masyarakat lingkungan sekolah adalah paling efektif untuk mencegah segala jenis malpraktek yang terjadi di sekolah. Undang-undang sudah membuka jalan untuk itu, tinggal orang tua dan masyarakat berani melaksanakannya dengan baik. Kritik terhadap pemerintah dan DPR sekarang sudah semakin berani. Jadi, semesti-

nya kritik terhadap sekolah, yang dibarengi dengan tindakan nyata untuk meluruskan semua yang menyeleweng dari jalan yang semestinya dapat dilakukan oleh Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah.

Reformasi internal lembaga pendidikan dapat segera dilakukan tanpa menunggu diterimanya anggaran 20%. Banyak yang dapat dilakukan untuk membudayakan dan memberdayakan peserta didik sehingga mereka dapat lebih kreatif bertindak dan tidak hanya menunggu perintah pendidik. Perubahan kurikulum berdasarkan kompetensi tidak akan berhasil bilamana pendidik masih mengira bahwa pendidik harus lebih pandai dalam segalanya daripada peserta didik. Karena itu, tugasnya adalah mengarahkan peserta didik supaya mereka menjadi *orang*. Sikap otoriter semacam ini masih banyak terdapat di kalangan para pendidik. Tanpa perubahan sikap pendidik menjadi fasilitator pendidikan para peserta didik tidak akan berkembang menjadi manusia yang kreatif.

4. Peran Pendidikan Jarak Jauh dalam Reformasi Pendidikan

Apa peran yang dapat dimainkan oleh PJJ dalam reformasi pendidikan? Kekuatan PJJ antara lain adalah distribusi informasi dan pelatihan. Dalam hal reformasi, kedua kekuatan itu dapat digunakan. Sosialisasi reformasi dapat dilaksanakan dengan cepat bila lembaga PJJ dapat dilibatkan dalam pengembangan dan pendistribusian informasi tentang reformasi pendidikan yang ingin dilaksanakan. Sosialisasi tidak cukup untuk menggerakkan reformasi itu sendiri. Personil kunci dalam birokrasi pendidikan perlu mendapatkan latihan-latihan khusus bagaimana menggerakkan reformasi itu ke lembaga-lembaga pendidikan yang ada di bawah tanggung jawabnya. Guru dan kepala sekolah perlu pula mendapatkan informasi lengkap tentang reformasi pendidikan yang dapat diterapkan di sekolahnya, dilanjutkan dengan latihan-latihan

- Pendidikan Jarak Jauh dalam Konteks Pendidikan Nasional

yang diperlukan. PJJ bersama lembaga lain dapat membantu dalam menyediakan tutor dan pengawasnya.

Peran lain dari PJJ dalam reformasi adalah pemerataan pendidikan: pemberian kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan, dan adanya materi pembelajaran yang dapat dikontrol oleh masyarakat, serta sifat pendidikannya yang egaliter. Karena peran-peran tadi maka PJJ juga dapat membantu dalam mengembangkan standardisasi pendidikan. □

Daftar Pustaka

Daniel, John dan Wayne Mackintosh. 2003. Leading ODL Futures in the Eternal Triangle: The Mega-University Response to the Greatest Moral Challenge of Our Age; dalam Michael Graham Moore dan William G. Anderson (Ed). *Handbook of Distance Education*.

Moore, Michael G. dan Greg Kearsley. 1996. *Distance Education. A Systems View*. London: Wadsworth Publishing Company.

Rumble, Greville. 2003. Modelling the Costs and Economics of Distance Education; dalam Michael Graham Moore dan William G. Anderson (Ed). *Handbook of Distance Education*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

Bab II

Pendidikan Dasar dan Menengah Jarak Jauh

Rusjdy S. Arifin, Uwes A. Chaeruman

A. Fungsi dan Satuan Pendidikan

Pendidikan Dasar dan Menengah Jarak Jauh merupakan suatu alternatif layanan pendidikan bagi siswa/i jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) dan menengah (SMA/MA dan SMK/MAK) yang memiliki kendala sosial ekonomi, geografis maupun waktu untuk mengikuti pola pendidikan dasar dan menengah secara reguler. Jadi, pendidikan dasar dan menengah jarak jauh merupakan subsistem pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang menerapkan sistem pendidikan jarak jauh. Sebagai konsekuensinya, pendidikan dasar dan menengah jarak jauh ini mengutamakan cara belajar mandiri dan memanfaatkan bahan belajar mandiri dengan bimbingan terbatas dari orang lain. Dengan demikian, sebagai salah satu alternatif layanan pendidikan, pendidikan dasar dan menengah jarak jauh berfungsi untuk: 1) memberikan kesempatan belajar seluas mungkin kepada seluruh usia sekolah dasar dan menengah yang tidak dapat mengikuti pendidikan di sekolah biasa karena kendala sosial, ekonomi, geografis dan atau waktu melalui sistem pendidikan jarak jauh dan cara belajar mandiri; dan 2) meningkatkan partisipasi masyarakat termasuk orang tua siswa dalam menyelenggarakan berbagai alternatif layanan pendidikan.

Bentuk penerapan pendidikan jarak jauh pada jenjang pendidikan dasar adalah Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT) atau Madrasah Tsanawiyah Terbuka (MTsT). Bentuk penerapan pendidikan jarak jauh pada jenjang pendidikan menengah adalah Sekolah Menengah/Kejuruan Terbuka (SMAT/SMKT) atau Madrasah Aliyah (MAT). Model SMP Terbuka, sampai saat ini sudah diterapkan di 2.760 SMP di seluruh Indonesia (2004). Sedangkan untuk SMA Terbuka masih dalam tahap rintisan di 7 lokasi di 6 propinsi di Indonesia.

Alasan diselenggarakannya sistem pendidikan jarak jauh pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah adanya kenyataan bahwa proyeksi 13.1 jiwa usia 13 – 15 tahun yang harus menuntaskan kebijakan wajib belajar 9 tahun pada tahun 2008/2009 tidak dapat ditampung sepenuhnya melalui sistem pendidikan konvensional (SMP reguler). Dari 13.1 jiwa hanya 6.9 juta jiwa yang dapat ditampung di SMP reguler. Sisanya, 6.2 juta jiwa perlu ditampung dengan menggunakan pola pendekatan yang berbeda. Salah satunya adalah melalui penerapan sistem pendidikan jarak jauh, yaitu SMP Terbuka yang diproyeksikan dapat menampung sekitar 2.5 juta jiwa. Selebihnya, sekitar 3.95 juta jiwa dapat ditampung melalui penambahan ruang kelas baru (Dikmenum, Maret, 1995). Prediksi ini dapat digambarkan seperti dalam diagram berikut:

- Pendidikan Dasar dan Menengah Jarak Jauh

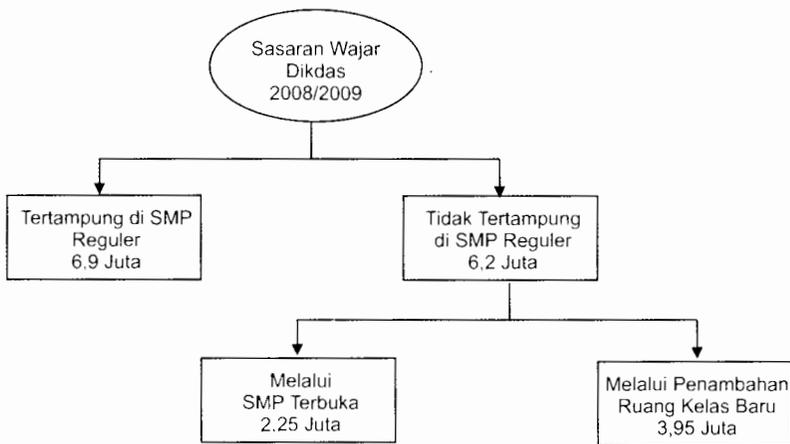


Diagram 2.1

Prediksi Penampungan Sekolah Formal untuk Menunjang WAJAR 9 Tahun

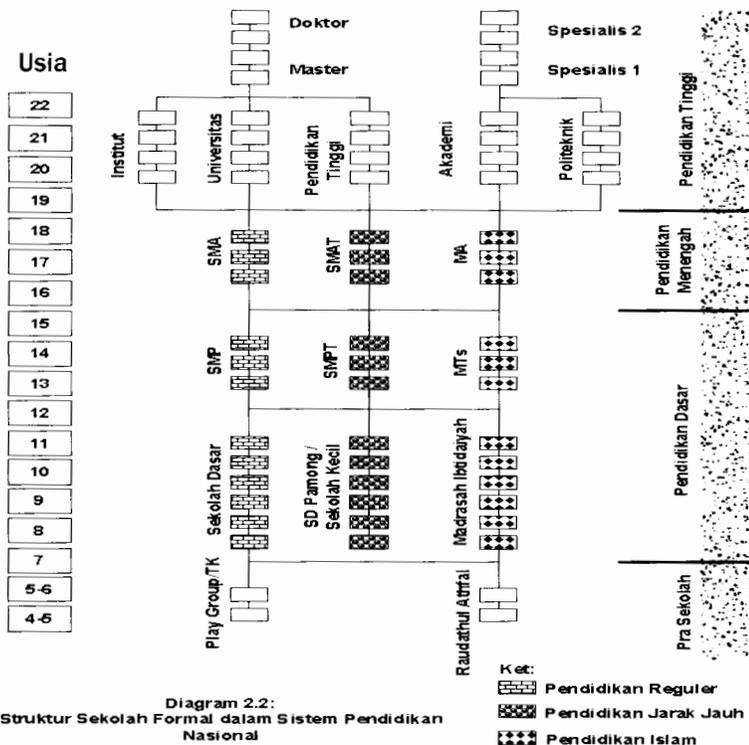
Demikian pula halnya dengan permasalahan yang dihadapi pada jenjang pendidikan menengah. Berdasarkan data yang ada, lulusan SMP dan MTs pada tahun 2000 berjumlah 2.830.727 orang. Dari sejumlah lulusan tersebut hanya 1.874.577 orang yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah reguler. Sehingga terdapat 956.150 orang (33,78%) lulusan SMP atau MTs yang tidak dapat melanjutkan sekolah. Jumlah ini belum termasuk akumulasi jumlah lulusan dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk menampung 33,78% lulusan SMP atau MTs tersebut perlu dicarikan solusi alternatif layanan pendidikan lain. Salah satunya adalah model pendidikan dengan menerapkan sistem pendidikan jarak jauh pada jenjang pendidikan menengah, yaitu dengan dirintisnya SMA Terbuka.

Sebagai subsistem pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, pendidikan dasar dan menengah jarak jauh – seperti SMPT dan SMAT yang dijelaskan di atas – bukan merupakan suatu

lembaga atau UPT baru yang berdiri sendiri melainkan menjadi satu kesatuan dalam satuan pendidikan dasar dan menengah tersebut. SMP Terbuka misalnya, adalah bagian dari SMP reguler yang ada. Jadi, suatu SMP reguler dapat menyelenggarakan dua layanan pendidikan sekaligus untuk dua sasaran siswa yang berbeda (*sistem modus ganda*), yaitu layanan pendidikan untuk siswa reguler dan layanan pendidikan untuk siswa terbuka. Sesuai karakteristiknya, masing-masing kelompok siswa tersebut dilayani dengan sistem belajar yang berbeda. Siswa reguler menggunakan sistem pendidikan konvensional (belajar tatap muka), siswa terbuka menggunakan sistem pendidikan jarak jauh dan cara belajar mandiri.

Kedudukan SMP Terbuka atau SMA Terbuka sebagai subsistem layanan pendidikan yang menerapkan sistem pendidikan jarak jauh pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dapat digambarkan seperti diagram berikut:

● Pendidikan Dasar dan Menengah Jarak Jauh



B. Kurikulum dan Bahan Belajar Mandiri

Pendidikan dasar dan menengah jarak jauh menggunakan kurikulum yang sama dengan pendidikan dasar dan menengah reguler. Namun, mengingat cara belajar pada pendidikan dasar dan menengah jarak jauh yang berbeda (menekankan cara belajar mandiri) maka kurikulum tersebut kemudian dijabarkan lagi ke dalam Pola dasar Kegiatan Pembelajaran (PDKP). PDKP menjabarkan kompetensi yang diharapkan, strategi, metode, penataan materi dan jenis media pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang

diharapkan tersebut. PDKP ini dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan bahan belajar mandiri.

Mengingat cara belajar pendidikan dasar dan menengah jarak jauh menekankan pada cara belajar mandiri, maka bahan belajar utama yang digunakan adalah bahan ajar mandiri. Saat ini bahan ajar mandiri yang digunakan adalah modul cetak yang dirancang khusus untuk belajar mandiri yang dilengkapi dengan panduan belajar bagi siswa dan pedoman bimbingan belajar bagi tutor/guru bina/pamong. Pengembangan modul cetak ini dilakukan oleh tim pengembang yang terdiri dari penulis modul (guru mata pelajaran), ahli materi (dosen mata kuliah bersangkutan), ahli desain pembelajaran, ahli media. Prosedur pengembangan modul cetak sebagai bahan ajar mandiri dapat digambarkan sebagai berikut:

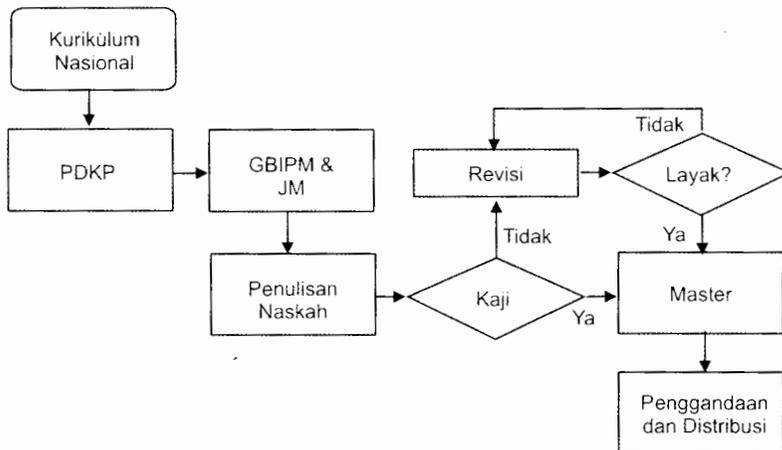


Diagram 2.3 Prosedur Pengembangan Modul Cetak

Keterangan:

- PDKP = Pola Dasar Kegiatan Pembelajaran
- GBIPM = Garis-garis Besar Isi Program Media
- JM = Jabaran Materi

- Pendidikan Dasar dan Menengah Jarak Jauh

Selain modul cetak, dikembangkan pula media belajar noncetak lain seperti radio, kaset audio, televisi, kaset video dan bahan ajar berbasis komputer (CD Interaktif).

C. Proses Pembelajaran, Evaluasi dan Ujian Akhir Nasional

1. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah jarak jauh lebih mengutamakan cara belajar mandiri. Yang dimaksud dengan cara belajar mandiri adalah cara belajar dengan peranan atau kendali dalam menentukan: 1) apa yang akan dipelajari; 2) kapan dan di mana mempelajarinya; dan 3) kapan keberhasilan belajar diuji (evaluasi), lebih besar ada di tangan siswa. Artinya, siswa diberikan keleluasaan dalam menentukan sendiri ketiga variabel di atas. Namun demikian, dalam prakteknya masih diperlukan proses pembelajaran yang sifatnya tutorial tatap muka untuk mendiskusikan berbagai masalah belajar yang tidak dapat dipecahkan sendiri oleh siswa. Dengan demikian, pola pembelajaran untuk pendidikan dasar dan menengah jarak jauh dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yaitu: 1) belajar mandiri secara individu; 2) belajar mandiri secara kelompok; dan 3) tutorial tatap muka.

Belajar mandiri secara individu adalah cara belajar dengan sebagian besar kendali belajar yaitu penentuan apa yang harus dipelajari, kapan, di mana dan bagaimana mempelajarinya serta kapan kemajuan belajarnya diuji, ditentukan oleh siswa dengan bimbingan terbatas dari orang lain. Dengan demikian siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kesempatan yang tersedia bagi masing-masing siswa. Bahkan jika memungkinkan siswa dapat belajar sambil bekerja.

Belajar mandiri secara kelompok adalah cara belajar dengan sebagian besar kendali belajar yaitu penentuan apa yang harus dipelajari, kapan, di mana dan bagaimana mempelajarinya serta kapan kemajuan belajarnya diuji, ditentukan oleh kelompok dengan bimbingan terbatas dari orang lain. Dengan demikian siswa secara kelompok dapat belajar kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kesempatan yang tersedia bagi masing-masing kelompok tersebut. Kelompok siswa dapat terdiri dari 5 – 10 orang. Setiap kelompok bersepakat untuk menentukan topik apa saja yang akan dipelajari, di mana mempelajarinya lengkap dengan jadwal diskusi kelompok yang akan mereka lakukan selama kurun waktu tertentu (misalnya satu semester). Belajar mandiri secara kelompok dapat saja dilakukan secara terjadwal dengan bimbingan dari guru pamong dan dilaksanakan di Tempat Kegiatan Belajar (TKB) atau tempat lain yang ditentukan dan disepakati oleh kelompok.

Tutorial tatap muka adalah proses pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka di sekolah induk, yaitu di SMP/MTs atau SMA/MA reguler. Tutorial tatap muka dapat dilaksanakan pada hari Sabtu atau Minggu antara dua sampai empat kali pertemuan dalam sebulan. Kegiatan tutorial tatap muka ditujukan untuk membahas pelajaran sulit yang ditemui oleh siswa. Kegiatan ini adalah kesempatan bagi siswa untuk bertemu dengan guru bina masing-masing.

2. Evaluasi dan Ujian Akhir Nasional

Evaluasi belajar pada pendidikan dasar dan menengah jarak jauh terdiri dari: 1) tes mandiri; 2) tes akhir modul; 3) Tes Akhir Unit; 4) Ujian Akhir Semester ; dan 5) Ujian Akhir Nasional.

- a. *Tes mandiri* dilaksanakan pada setiap akhir kegiatan belajar dalam modul. Setelah siswa mempelajari satu kegiatan belajar, siswa dapat mengerjakan soal-soal dan tugas yang tersedia

- Pendidikan Dasar dan Menengah Jarak Jauh

dalam modul dan mengoreksi sendiri jawabannya dengan menggunakan kunci jawaban yang telah tersedia dalam modul tersebut.

- Tes akhir modul* adalah tes yang dilaksanakan setiap kali siswa menyelesaikan satu nomor modul tertentu. Tes akhir modul ini dapat disamakan dengan tes formatif atau ulangan harian pada siswa reguler. Pelaksanaan tes akhir modul dilakukan di bawah pengawasan guru bina masing-masing mata pelajaran.
- Tes akhir unit* adalah tes yang dilaksanakan setelah siswa mempelajari beberapa nomor modul dalam unit tertentu. Pelaksanaan tes akhir unit ini pun menjadi tanggung jawab guru bina mata pelajaran bersangkutan.
- Ujian semester* adalah ujian yang diselenggarakan pada setiap akhir semester untuk mengukur keberhasilan belajar siswa selama satu semester. Materi soal dan waktu penyelenggaraan ujian semester sama dengan sekolah reguler.
- Ujian Akhir Nasional* yaitu ujian yang dilaksanakan secara nasional bagi siswa kelas 3 pada akhir tahun. Hasil ujian akhir nasional ini digunakan sebagai dasar penentuan lulus atau tidak dari pendidikan dasar dan atau menengah jarak jauh.

D. Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan pada tingkat sekolah meliputi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah sebagai Koordinator, Guru Bina, Guru Pamong, Guru Pamong Khusus, Guru BP dan Tenaga Administrasi.

- Kepala Sekolah sistem pendidikan jarak jauh bisa dijabat rangkap oleh Kepala Sekolah reguler penyelenggara yang ditetapkan melalui SK dari pejabat pemerintah daerah yang berwenang.

- Wakil Kepala Sekolah/Koordinator diangkat melalui SK oleh pejabat pemerintah daerah yang berwenang. Wakil Kepala Sekolah/Koordinator Sekolah Terbuka dapat berasal dari salah satu guru pada sekolah reguler yang tidak merangkap jabatan lain. Wakil Kepala Sekolah/Koordinator Sekolah Terbuka ini bertugas dan bertanggung jawab mengelola kegiatan sekolah terbuka sehari-hari.
- Guru Bina adalah guru mata pelajaran di sekolah reguler penyelenggara yang bertugas membina kegiatan pembelajaran siswa terbuka sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing.
- Guru Pamong adalah anggota masyarakat yang disertai tugas untuk membimbing kegiatan belajar siswa di Tempat Kegiatan Belajar (TKB). Setiap TKB mempunyai seorang guru pamong.
- Guru Pamong Khusus adalah warga masyarakat di sekitar TKB yang memiliki keterampilan khusus tertentu dan berperan sebagai nara sumber sesuai keterampilan yang dimilikinya. Guru pamong khusus yang biasanya diperlukan antara lain adalah tokoh agama, pengusaha, seniman, olahragawan, dan lain-lain.
- Guru Bimbingan dan Konseling (BK) adalah guru BK di sekolah reguler penyelenggara yang ditugaskan juga untuk memberikan bimbingan dan konseling belajar di sekolah terbuka.
- Tenaga administrasi memanfaatkan satu atau beberapa tenaga administrasi dari sekolah reguler penyelenggara yang diberi tugas khusus mengelola administrasi.

E. Sarana dan Prasarana

Pada prinsipnya, siswa sekolah terbuka dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Namun, untuk memfasilitasi siswa dalam belajar mandiri secara individu dan kelompok atau tutorial tatap muka,

- Pendidikan Dasar dan Menengah Jarak Jauh

diperlukan beberapa sarana dan prasarana khusus. Sarana dan prasarana khusus tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tempat Kegiatan Belajar (TKB)

TKB adalah tempat berkumpulnya siswa secara kelompok untuk melakukan kegiatan belajar mandiri secara kelompok di bawah bimbingan guru pamong. Lokasi TKB diusahakan berada di sekitar rumah tinggal siswa. TKB biasanya memanfaatkan bangunan yang ada di lingkungan setempat seperti rumah penduduk, balai desa, rumah ibadah atau tempat lain yang memungkinkan. Jumlah TKB bervariasi penyebarannya tergantung dari variasi penyebaran rumah tinggal siswa.

2. Sarana untuk Kegiatan Tutorial Tatap Muka

Kegiatan tutorial tatap muka menggunakan fasilitas yang ada di sekolah reguler penyelenggara (sekolah induk). Pada saat mengikuti tutorial tatap muka, siswa dapat menggunakan fasilitas sekolah induk seperti laboratorium, peralatan praktek keterampilan, perpustakaan, sarana olah raga, media pembelajaran (seperti kaset audio, VCD, TV, dan lain-lain).

F. Pengelolaan, Pembiayaan dan Pengawasan

Secara struktural, pengelolaan, pembiayaan dan pengawasan pendidikan dasar dan menengah jarak jauh untuk SMP Terbuka dan SMA Terbuka atau yang sederajat menjadi tanggung jawab bersama antara berbagai pihak terkait yang meliputi pemerintah daerah (Dinas Pendidikan Propinsi dan Kabupaten/Kota), unit-unit terkait di lingkungan Depdiknas (Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama (PLP), Direktorat Pendidikan Menengah Umum (Dikmenum), Pusat

Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan (Pustekkom)), sekolah-sekolah bersangkutan serta masyarakat. Mekanisme penyelenggaraannya dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab Program

Menteri Pendidikan Nasional bertanggung jawab atas terselenggaranya seluruh program pengembangan dan pembinaan layanan pendidikan dasar dan menengah jarak jauh dalam bentuk SMP dan SMA Terbuka. Dalam pelaksanaannya, tanggung jawab ini didelegasikan kepada pimpinan unit terkait di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional seperti Kepala Pustekkom, Direktur PLP dan Direktur Dikmenum bertanggung jawab atas terselenggaranya seluruh program pengembangan dan pembinaan layanan pendidikan dasar dan menengah jarak jauh dalam bentuk SMP Terbuka dan SMA Terbuka.

2. Penyelenggara Pusat

Penyelenggara pada tingkat pusat terdiri dari staf di lingkungan Direktorat PLP, Direktorat Dikmenum dan Pustekkom. Tim penyelenggara ini bertanggung jawab terhadap terselenggaranya program pendidikan dasar dan menengah jarak jauh yang meliputi kegiatan pengembangan sistem, pengembangan bahan belajar, pengembangan ketenagaan, pemasyarakatan, pemantauan, supervisi, pembinaan serta evaluasi sistem secara keseluruhan.

3. Penyelenggara Daerah

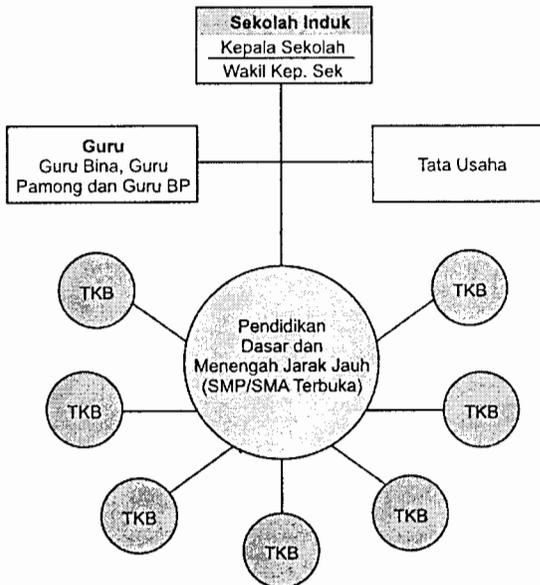
Tim penyelenggara tingkat daerah terdiri dari staf di lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi dan Kabupaten/Kota. Tim ini bertanggung jawab terhadap operasionalisasi penyelenggaraan

- Pendidikan Dasar dan Menengah Jarak Jauh

pendidikan dasar dan menengah jarak jauh di wilayahnya masing-masing yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran, pembiayaan operasional, pemantauan dan pembinaan, dan penggalangan dukungan masyarakat.

4. Sekolah

Pada tingkat sekolah, tanggung jawab pengelolaan dan administrasi berada di tangan Kepala Sekolah Induk dibantu oleh Wakil Kepala Sekolah dan para guru bina, guru BP dan tenaga administratif. Di samping itu, pelaksanaan pada tingkat sekolah juga dibantu oleh guru pamong dan guru pamong khusus dari masyarakat setempat. Pengelolaan pendidikan dasar dan menengah jarak jauh pada tingkat sekolah dapat digambarkan sebagai berikut:



Secara lebih rinci, tugas dan tanggung jawab pengelolaan, pembiayaan dan pengawasan pendidikan dasar dan menengah jarak jauh disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Tugas dan Tanggung Jawab Pengelolaan, Pembiayaan dan Pengawasan
Pendidikan Dasar dan Menengah Jarak Jauh

No.	Kegiatan	Tugas dan Tanggung Jawab					Ket.
		Pusat		Daerah			
		Dit.Dikmenum Dit. PLP	Pustekkom	Dinas Pend. Prop.	Dinas Pend. Kab/Kota	Sekolah	
1.	Penyusunan Konsepsi Dasar	☆	★	☆	☆	☆	
2.	Analisis Kebutuhan	☆	★				
3.	Studi Kelayakan Lokasi	☆	★				
4.	Pengembangan Bahan Belajar	☆	★				
5.	Pemasyarakatan	★	☆	☆	☆	☆	
6.	Penyediaan sarana pembelajaran	☆	☆	☆	★	☆	
7.	Penggandaan Bahan Belajar	★	☆	☆	☆		
8.	Penyediaan Tenaga Pengelola	★					
	a. Rekrutmen				★	☆	
	b. Honorarium				★	☆	
	c. Pembinaan tenaga pengelola	☆	☆	☆	★	☆	
9.	Penerimaan siswa baru				☆	★	
10.	Pengelolaan Tutorial				☆	★	

- Pendidikan Dasar dan Menengah Jarak Jauh

No.	Kegiatan	Tugas dan Tanggung Jawab					Ket.
		Pusat		Daerah			
		Dit.Dikmenum Dit. PLP	Pustekkom	Dinas Pend. Prop.	Dinas Pend. Kab/Kota	Sekolah	
	a. Penyediaan tempat				☉	☆	
	b. Penyediaan sarana prasarana			☆	☉	☆	
12.	Pelatihan pengelola	☆	☉	☆	☆		
13.	Pemantauan dan Pembinaan	☉	☆	☆	☆	☆	
14.	Evaluasi hasil belajar	☆	☆	☆	☉	☆	
15.	Evaluasi sistem	☆	☉	☆	☆	☆	
16.	Evaluasi lulusan	☉	☆	☆	☆	☆	
17.	Pengendali mutu	☉	☆	☆	☆	☆	
18.	Koordinasi dengan instansi terkait	☆	☉	☆	☆	☆	
19.	Penggalangan dukungan	☆	☆	☆	☉	☆	

Keterangan: ☉) Penanggung Jawab;

☆) Unsur yang berperan/pendukung

G. Pendirian dan Akreditasi untuk SMP/MTs Jarak Jauh atau SMA/MA Jarak Jauh

SMP/MTs dan SMA/MA Terbuka merupakan alternatif layanan pendidikan untuk anak-anak yang tidak dapat meneruskan sekolah reguler karena berbagai kendala. Karena sifatnya yang lentur, mudah dibuka kalau memenuhi persyaratan, dan mudah ditutup kalau tidak diperlukan lagi. Pendirian SMP/MTs atau SMA/MA Terbuka tidaklah sesulit mendirikan unit sekolah konvensional. sekolah ini tidak memerlukan gedung baru, karena sebagian besar waktu belajar

siswa dilaksanakan secara mandiri, di manapun dan kapanpun dia sempat. Sekolah ini pun tidak memerlukan guru tersendiri karena dapat memanfaatkan guru dari sekolah induk atau guru-guru dari sekolah lain yang bersedia membantu.

Namun demikian, ada beberapa persyaratan tertentu yang harus dipenuhi untuk mendirikan sekolah terbuka ini. Persyaratan pertama adalah tersedianya calon-calon siswa yang layak untuk mengikuti pendidikan melalui pola ini. Jika di sekitar tempat tersebut jumlah siswa yang tidak dapat mengikuti pendidikan melalui sekolah reguler cukup banyak maka di tempat tersebut dapat didirikan SMP/MTs dan SMA/MA Terbuka.

Persyaratan kedua adalah tersedianya sekolah yang memiliki sumber daya yang cukup untuk dijadikan sebagai sekolah induk. sumber daya yang dimaksud adalah tersedianya sarana yang cukup berupa ruang kelas untuk tutorial, perpustakaan, laboratorium dan sarana penunjang lain yang dapat dimanfaatkan bersama antara siswa sekolah induk dan siswa sekolah terbuka. Sekolah yang hendak menjadi sekolah induk harus memiliki guru yang cukup menyangkut seluruh mata pelajaran. Guru-guru yang dimaksud haruslah mempunyai waktu yang cukup sekurang-kurangnya untuk memberikan tutorial sesuai dengan mata pelajaran yang dibinanya.

Persyaratan lain adalah adanya komitmen yang jelas dari pemerintah daerah setempat untuk menanggung biaya operasional penyelenggaraan sekolah tersebut. Biaya operasional ini meliputi honorarium dan transpor guru bina dan guru pamong, pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran, serta administrasi sekolah. Komitmen pemerintah daerah ini sangat penting mengingat umumnya siswa sekolah terbuka ini adalah orang yang secara ekonomis lemah. Mengharapkan siswa untuk membiayai dirinya sendiri adalah suatu kemungkinan yang sangat kecil. Karenanya,

- Pendidikan Dasar dan Menengah Jarak Jauh

tanpa dukungan pemerintah daerah, sekolah ini tidaklah mungkin dapat berjalan sesuai harapan.

SMP/MTs dan SMA/MA Terbuka bukanlah suatu UPT sendiri, tapi merupakan bagian dari sekolah induknya. Siswa SMP/MTs dan SMA/MA Terbuka terdaftar sebagai siswa sekolah induknya. Dengan sendirinya SMP/MTs dan SMA/MA Terbuka tidak memerlukan akreditasi tersendiri. Status dari sekolah terbuka ini tidaklah berbeda dengan sekolah induknya.

H. Sekolah Dasar dengan Sistem PAMONG

Salah satu bentuk penerapan pendidikan jarak jauh untuk jenjang pendidikan dasar yang pernah dilakukan adalah Sekolah Dasar dengan sistem PAMONG. PAMONG adalah akronim dari Pendidikan Anak oleh Masyarakat, Orang Tua dan Guru. PAMONG menurut istilah SEAMEO-INNOTECH dikenal dengan nama *Solo Project IMPACT (Instructional Management by Parents, Community and Teacher)*. Proyek IMPACT ini dilaksanakan di Naga, Cebu, Pilipina dengan nama *Naga Project IMPACT*.

Proyek eksperimen Sekolah Dasar dengan sistem PAMONG mulai dilaksanakan di Indonesia pada akhir tahun 1974. Eksperimen dilaksanakan di Desa Alastuwo dan Kebak, Kecamatan Kebakkramat, Surakarta, Jawa Tengah. Proyek PAMONG dilaksanakan atas dasar adanya kenyataan bahwa pada tahun 1973 penduduk usia 7 – 12 tahun yang tertampung di Sekolah Dasar baru 57%. Pada tahun 1978 (akhir Pelita II) diharapkan persentase tersebut dapat ditingkatkan menjadi 85,2%. Salah satu upaya pemerintah untuk menampung anak usia SD tersebut adalah melalui pembangunan gedung-gedung SD dan pengangkatan guru-guru Inpres. Namun, tantangan pemecahan masalah pendidikan pada saat itu tidak cukup dengan dua upaya tersebut di atas saja. Pemerintah perlu mencari

alternatif sistem penyampaian pendidikan lain yang dapat meningkatkan pemerataan pendidikan yang efektif dan sekaligus ekonomis.

Untuk mencapai tujuan di atas, yaitu meningkatkan pemerataan pendidikan yang efektif dan ekonomis, maka langkah pokok yang mencirikan sekolah dengan sistem PAMONG adalah sebagai berikut:

1. mengubah cara belajar siswa, yaitu siswa mempelajari sendiri bahan pelajarannya, tidak terikat oleh jam-jam atau jadwal dan ruang kelas, dan maju sesuai dengan kecepatan belajarnya masing-masing;
2. mengubah fungsi guru dari seorang pengajar di depan kelas menjadi seorang pembina pendidikan yang mengelola pendidikan anak di Pusat Kegiatan Belajar (PKB); dan
3. mendorong pengerahan daya dan dana masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi guna pemerataan pendidikan dasar.

Sekolah dengan sistem PAMONG hanyalah bentuk alternatif dari proses penyampaian pendidikan, kurikulum yang digunakan tetap menggunakan kurikulum pendidikan dasar yang berlaku. Mengingat siswa harus mempelajari sendiri bahan pelajarannya, maka bahan ajar yang digunakan dirancang untuk kebutuhan belajar mandiri dalam bentuk modul. Buku-buku pelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku, diubah ke dalam bentuk modul. Modul ini dapat dan boleh dipelajari di mana saja dan kapan saja, sehingga siswa yang terpaksa harus membantu orang tuanya dan tidak dapat bersekolah secara reguler dapat belajar dengan modul tersebut di luar sekolah.

Karena siswa dapat belajar secara sendiri melalui modul, diharapkan seorang guru pembina akan dapat mengelola sejumlah

- Pendidikan Dasar dan Menengah Jarak Jauh

anak yang lebih besar dari satu kelas. Bagi siswa kelas awal (kelas 1, 2 atau 3) yang belum bisa membaca dibimbing oleh seorang pembimbing (tutor). Pembimbing adalah siswa lain di masyarakat yang memiliki pengetahuan lebih tinggi (kakak kelas). Keterlibatan orang tua dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan sistem PAMONG, khususnya dalam pengawasan (monitor) belajar siswa, dan pengawasan pembimbing dan tutor.

Sejak tahun 1976, melalui PKB PAMONG, siswa usia sekolah dasar yang telah putus sekolah karena berbagai alasan dapat diajak kembali belajar. Bila siswa tersebut telah dapat menyelesaikan pelajarannya sampai tingkat kelas VI, mereka diperkenankan mengikuti ujian Sekolah Dasar. Hasil penelitian oleh BP3K menunjukkan bahwa hasil belajar siswa yang belajar dengan sistem PAMONG tidak lebih buruk dibandingkan dengan siswa yang belajar dengan cara konvensional. Bahkan, dalam beberapa hal menunjukkan hasil yang lebih positif. Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir (EBTA) tahun 1976 menunjukkan bahwa siswa/i PAMONG berhasil 99% lulus dan mendapat surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD. Khusus bagi siswa putus sekolah yang kembali belajar lagi, 85% lulus dan mendapat STTB SD. Keberhasilan proyek ini telah membuat dikukuhkannya proyek eksperimen "Pusat Kegiatan Belajar (PKB) PAMONG" melalui SK Menteri P dan K N0. 041/P/1976. □

Daftar Pustaka

- AECT , *Educational Technology, A Glosary of Term*, Washington: AECT Task Force on Definition and Terminology, 1979
- DEPDIKNAS, *Modul Orientasi SMA Terbuka*, Jakarta: Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan, 2002.
- Ibrahim, Nurdin, *SMU Terbuka: Sebuah Alternatif Layanan Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Umum*, dalam Dewi Padmo (ed.), *Teknologi Pembelajaran: Upaya peningkatan Kualitas dan Produktivitas Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, 2003
- Keegan, D, , *Foundation of Distance Education*, Second Edition, London: Routledge, 1993
- Rowntree, Derek, *Exploring Open and Distance Education*, London: Kogan Page, 1992
- Robinson, Bernadette, *Research and Pragmatism in Learner Support*, dalam F. Lockwood (ed.), *Open and Distance Learning Today*, London and New York: Routledge Studies Distance Education, 1997.
- Rumble, G, *The Planning and Management of Distance Education*, London & Sydney: Croom Helm, 1986
- Sadiman, AS, David Selligman, R. Rahardjo, *SMP Terbuka: Studi Kasus Indonesia*, Jakarta: Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan, 1996
- Suparman, Atwi, *Pendidikan Jarak Jauh*, Jakarta, PAU-PPAI 1996

Bab III

Pendidikan Jarak Jauh pada Jenjang Pendidikan Tinggi

Effendi Wahyono, Setijadi, Suratinah

Pengantar

Perguruan tinggi jarak jauh (PTJJ) memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda dengan pendidikan tinggi konvensional (tatap muka). Ciri utama adalah adanya jarak antara dosen dan mahasiswa. Pengertian jarak ini tidak hanya terbatas oleh lokasi, tetapi dapat diartikan bahwa pendidikan tidak dilakukan secara tatap muka. Meskipun mahasiswa berlokasi di sekitar kampus penyelenggara PTJJ, mereka tidak belajar secara tatap muka dengan dosennya. Karena itu, perkuliahan dan komunikasi antara mahasiswa dengan lembaga PTJJ yang diikutinya dilakukan melalui media. Mahasiswa Universitas Terbuka (UT) misalnya, meskipun tempat tinggalnya berada di sekitar kampus UT di Pondok Cabe, Tangerang, mereka tidak dapat mengikuti kuliah secara tatap muka dengan dosennya, tetapi harus melalui perantara alat komunikasi. Mereka dapat berkomunikasi melalui surat, telepon, fax, atau internet.

Ciri lain dari PTJJ adalah sifatnya yang terbuka. Terbuka dapat diartikan bahwa PTJJ terbuka bagi siapapun yang ingin menjadi mahasiswa tanpa seleksi masuk. Untuk kasus UT di Indonesia, siapa saja dapat menjadi mahasiswa tanpa batasan gender, usia, maupun tempat. Siapa saja dapat menjadi mahasiswa UT tanpa seleksi

masuk, asalkan memiliki ijazah setingkat SLTA. Terbuka dapat pula diartikan bahwa materi perkuliahan UT dapat dilihat dan dinilai oleh siapa saja. Setiap mata kuliah di UT dapat diikuti oleh siapa saja yang berminat untuk mendalaminya. Misalnya, mereka yang ingin mendalami keterampilan atau pengetahuan tertentu dapat mengambil mata kuliah tertentu dan mengikuti ujiannya. Terbuka dapat juga diartikan secara harfiah bahwa belajar di UT dapat dilakukan di alam terbuka dan tidak memerlukan ruang belajar khusus.

Karena sifatnya yang terbuka, maka karakteristik PTJJ adalah fleksibel. Mahasiswa dapat mengikuti satu atau beberapa mata kuliah saja. Mereka juga dapat mengambil satu program studi atau lebih sekaligus. Dengan fleksibilitas itu, mahasiswa juga dapat menentukan sendiri kapan belajarnya dan berapa lama ia akan menyelesaikan masa studinya. Karena sifatnya yang fleksibel, mahasiswa PTJJ mempunyai otonomi yang luas: dapat menentukan mata kuliah yang akan diambil, menentukan waktu belajar, dan memilih media pembelajarannya.

Untuk mendukung sifat tersebut di atas, sifat lain dari PTJJ adalah multiakses. PTJJ harus membuka akses yang lebih besar bagi setiap orang yang berminat. Setiap orang dapat menjadi mahasiswa PTJJ. Komunikasi antara dosen dan mahasiswa dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti telepon, fax, surat (pos), dan internet. Media pembelajaran yang digunakan harus memberi kemungkinan kepada mahasiswa untuk memilihnya. Misalnya, mahasiswa dimungkinkan untuk menggunakan bahan ajar cetak maupun noncetak seperti audio/video (CD, DVD), komputer (CAI, internet).

Dengan ciri-ciri tersebut, lembaga PTJJ berpeluang untuk menjadi perguruan tinggi raksasa dengan jumlah mahasiswa yang praktis tak terbatas. Untuk itu, PTJJ harus dikelola dengan manajemen industri. Bahan ajar UT harus diproduksi secara massal.

- Pendidikan Jarak Jauh pada Tingkat Pendidikan Tinggi

Media komunikasi dengan mahasiswa harus disusun secara standar dan manajemen operasionalnya harus menganut asas efektif dan efisien.

Untuk memberikan gambaran secara lebih lengkap mengenai pendidikan tinggi jarak jauh, bagian ini membahas fungsi dan satuan pendidikan tinggi jarak jauh, kurikulum dan bahan ajar, proses pembelajaran dan evaluasinya, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pengawasan, serta pendirian dan akreditasi pada sistem pendidikan tinggi jarak jauh.

A. Fungsi dan Satuan Pendidikan

PTJJ seperti juga pendidikan jarak jauh (PJJ) lainnya, berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat karena mereka tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler. Mereka yang mengikuti PTJJ banyak yang sudah bekerja. Mereka mengikuti PTJJ supaya dapat meneruskan belajar ke perguruan tinggi sambil tetap bekerja. Karena itu, PTJJ seperti juga PJJ lainnya adalah bagian mutlak dari usaha memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk dapat belajar seumur hidup. Ada pula yang mengikuti PTJJ karena alasan biaya, karena biaya keseluruhannya lebih murah daripada biaya mengikuti perguruan tinggi reguler, terutama bagi mereka yang menghindari harus pindah tempat untuk dapat mengikuti perguruan tinggi reguler dengan mengeluarkan biaya tambahan untuk pemondokan. Hanya sedikit mahasiswa PTJJ yang mengikuti kuliahnya secara penuh waktu. Fungsi PTJJ inilah yang kini dimanfaatkan untuk meningkatkan pendidikan guru, terutama pendidikan guru SD.

Kecuali fungsi tersebut, PTJJ juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang dapat menyelenggarakan pendidikan secara massal dan meluas, sehingga praktis tidak ada peserta didik yang tidak dapat dijangkau oleh PTJJ. Dalam era komunikasi digital sekarang ini, bilamana teknologinya sudah sampai ke wilayah peserta didik, tidak ada halangan yang berarti untuk mengikuti PTJJ di mana pun kita berada. Oleh karena itulah, maka PTJJ dapat dengan relatif mudah berfungsi sebagai perguruan tinggi massal. Tentunya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh PTJJ yang ingin berfungsi sebagai lembaga pendidikan massal. Salah satu persyaratannya adalah bahwa komunikasi antara PTJJ dan semua mahasiswanya dapat dilaksanakan dengan relatif mudah, terutama komunikasi antara mahasiswa dan tutornya dengan perhitungan bahwa seorang tutor yang sudah memenuhi kualifikasi sebagai tutor, tidak boleh melayani lebih dari 40 mahasiswa, sehingga pelayanan yang diberikan cukup berkualitas. PTJJ di Inggris mempunyai sekitar 9000 tutor untuk sekitar 200.000 mahasiswa dengan pengertian bahwa tidak semua mata pelajaran perlu dibantu dengan tutorial dan seorang tutor hanya melayani satu mata pelajaran. Untuk mata pelajaran yang relatif mudah dipelajari tidak diperlukan tutorial, karena dapat dicerna sendiri oleh mahasiswa, atau dengan bantuan kelompok belajarnya. Apabila tutorial dilaksanakan dengan tatap muka, maka persyaratan lainnya yang harus disiapkan adalah ruang tutorial di tempat-tempat di sekitar kelompok mahasiswa berada. Untuk mendapatkan tutor dan tempat tutorial itu, PTJJ lebih banyak menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan lain dan tutorial diselenggarakan pada waktu libur. Bilamana tutorial dilaksanakan melalui internet, jumlah tutor tidak dapat dikurangi banyak, karena akses pada tutor akan menjadi sulit bilamana terlalu banyak mahasiswa yang diasuh oleh satu tutor. Tutorial juga dapat diselenggarakan dengan berbagai cara komunikasi lain, seperti telepon dan radio dua arah, namun tutorial tatap muka adalah

- Pendidikan Jarak Jauh pada Tingkat Pendidikan Tinggi

tutorial yang paling “sempurna”, karena ada hubungan pribadi antara tutor dan mahasiswa, dan mereka dapat berinteraksi pada waktu yang sama.

Pada tahun 1997 John Daniel mengatakan terdapat 11 PTJJ yang berfungsi sebagai perguruan tinggi massal (lebih dari 100.000 mahasiswa). Hitungan tersebut tetap sama pada tahun 1999, akan tetapi pada saat ini sangat mungkin jumlah tersebut lebih banyak lagi. Semua perguruan tinggi tersebut adalah perguruan tinggi jarak jauh modus tunggal.

Satuan PTJJ dapat berbentuk tunggal (modus tunggal), modus ganda, maupun modus konsorsium. Universitas Terbuka adalah PTJJ modus tunggal. Begitu pula Universiti Terbuka Malaysia. Bedanya ialah bahwa kalau Universitas Terbuka (UT), Indonesia, adalah perguruan tinggi negeri yang ke-45, Universiti Terbuka (OUM: Open University Malaysia) adalah perguruan tinggi swasta yang ke-7. OUM dimiliki oleh 11 perguruan tinggi negeri, yang kemudian memberikan dukungan penuh kepada Universiti Terbuka. Dukungan yang diberikan berupa fasilitas yang dapat digunakan oleh mahasiswa OUM, bukan dukungan keuangan. OUM mendapat subsidi dari negara, akan tetapi jauh dari memenuhi biaya penyelenggaraannya, sehingga OUM harus mendapatkan anggarannya dari mahasiswa. Karena itu dikabarkan bahwa biaya kuliah di OUM adalah sekitar 4 kali biaya kuliah universitas reguler. Akan tetapi dengan biaya yang begitu besar, fasilitas yang disediakan juga cukup memadai meskipun OUM baru berusia 3 tahun pada bulan Agustus 2005, di 30 pusat belajarnya misalnya, OUM dengan sekitar 40.000 mahasiswa sudah dapat menyediakan sejumlah komputer untuk dipergunakan oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa yang tidak mempunyai komputer di rumah dapat selalu berhubungan dengan pusat universitas secara *online*. OUM adalah sebuah contoh PTJJ yang mahal karena menggunakan teknologi informasi dan

komunikasi untuk berkomunikasi dalam menyampaikan informasi dan bahan ajarnya, meskipun sebagian dari bahan ajarnya masih terdiri dari modul-modul yang tercetak.

Di Indonesia belum banyak dikenal perguruan tinggi (PT) reguler yang menyelenggarakan PJJ modus ganda. Akan tetapi di Penang, Malaysia, Universiti Sains Malaysia (USM) sudah lama menyelenggarakan pendidikan jarak jauh modus ganda. Di samping pendidikan reguler, USM juga menyelenggarakan pendidikan jarak jauh. Bagi satuan PTJJ modus ganda, tidak sulit untuk menyelenggarakan tutorial dan mencari tutornya karena dapat menggunakan fasilitas dan sumber daya manusianya sendiri. USM juga salah satu dari sedikit PTJJ yang sebagian besar program studinya adalah bidang sains. Karena itu, pertemuan tatap muka dalam kampus menjadi cukup intensif terutama untuk pelajaran-pelajaran yang memerlukan laboratorium. Satuan PTJJ modus ganda juga banyak terdapat di Australia. Salah satu contohnya adalah Deakin University. Deakin sejak semula memang direncanakan untuk memberikan PJJ selain pendidikan konvensional. Pada waktu ini Deakin, yang didirikan pada tahun 1974 oleh negara bagian Victoria, sudah merupakan salah satu perguruan tinggi terbesar di Australia dengan 70.000 mahasiswa, di antaranya 13.000 mahasiswa mengikuti pendidikan jarak jauhnya (2004). Deakin mempunyai 5 buah kampus di Victoria tetapi tidak mempunyai cabang regional.

Open Universities of Australia (OUA), yang sebelumnya dinamakan *Open Learning Australia* adalah contoh PTJJ modus konsorsium, yang berarti sebanyak 7 universitas di Australia secara bersama-sama menyelenggarakan pendidikan jarak jauh. OUA tidak mempunyai lembaga dan fasilitas PJJ tersendiri, tetapi dalam setiap perguruan tinggi yang berpartisipasi terdapat unit pendidikan jarak jauhnya yang disertai mengkoordinasi pengelolaan mahasiswa yang

- Pendidikan Jarak Jauh pada Tingkat Pendidikan Tinggi

mendaftarkan diri pada OUA melalui salah satu perguruan tinggi pesertanya. OUA menggunakan fasilitas yang disediakan oleh perguruan tinggi masing-masing. Ijazah dan gelar tetap diberikan oleh perguruan tinggi tempat mahasiswa mendaftar. Layanan OUA ini memudahkan mahasiswa untuk mengambil mata pelajaran dari 7 universitas yang berpartisipasi, dan untuk menggabungkannya dalam suatu program, baik untuk mendapatkan gelar maupun sekadar untuk mendapatkan pengetahuan dan kemampuan tambahan.

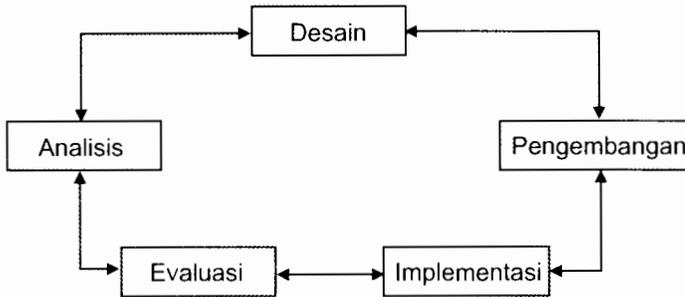
B. Kurikulum dan Bahan Belajar Mandiri

1. Kurikulum

Kurikulum adalah suatu program lengkap yang ditawarkan oleh suatu institusi pendidikan yang berisi tujuan program atau kompetensi lulusan, struktur program, bahan ajar, proses pembelajaran, dan penilaian. Kurikulum masing-masing program berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh lulusannya. PTJJ sebagai salah satu institusi pendidikan, sama seperti pendidikan tatap muka, memiliki kurikulum yang ditawarkan untuk berbagai jenjang pendidikan seperti diploma, sarjana, dan sertifikasi.

PTJJ mengembangkan masing-masing kurikulum dengan memperhatikan tujuan dari program yang dikembangkan. Moore dan Kearsley (1996) menawarkan suatu sistem pengembangan kurikulum yang disebut desain sistem instruksional (DSI). DSI terdiri dari lima prosedur standar yang digunakan dalam pengembangan kurikulum, yaitu tahap analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Diagram 1 menunjukkan proses model yang menunjukkan kelima tahap DSI.

Diagram 1. Proses Model Desain Sistem Instruksional (DSI)



Tahap pengembangan kurikulum dengan DSI dimulai dengan tahap analisis. Pada tahap ini ditentukan keterampilan yang terlibat dalam tugas atau aktivitas. Di samping itu, dalam tahap ini ditentukan pula karakteristik mahasiswa, lingkungan belajarnya, dan materi yang akan dipelajari mahasiswa agar dapat mencapai keterampilan dalam tingkat tertentu. Selanjutnya adalah tahap desain, yaitu tujuan, struktur, dan format pembelajaran dijabarkan secara rinci. Bentuk soal tes dapat dikembangkan dalam tahap ini, demikian pula dengan media pembelajaran.

Tahap pengembangan adalah tahap yang dilakukan setelah penyelesaian desain. Dalam tahap ini, bahan ajar –baik yang tercetak seperti modul dan petunjuk belajar, maupun noncetak seperti audio dan video –mulai ditulis, diproduksi dan diuji coba. Dalam tahap ini staf pengajar dan staf administrasi mulai disiapkan dan dilatih, kemudian diikuti dengan tahap implementasi. Tahap implementasi merupakan tahap penerapan kurikulum, yaitu mahasiswa sudah teregistrasi, bahan ajar telah didistribusikan kepada mahasiswa, dan tutorial dilaksanakan. Tahap terakhir adalah tahap evaluasi yang meliputi kegiatan seperti ujian dan penilaian terhadap mahasiswa, termasuk evaluasi terhadap bahan ajar dan kurikulum itu sendiri. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk

- Pendidikan Jarak Jauh pada Tingkat Pendidikan Tinggi

menentukan perlu-tidaknya dilakukan revisi terhadap bahan ajar dan kurikulum.

Kelima tahap di atas adalah proses berkesinambungan yang dalam pelaksanaannya mungkin terjadi bahwa suatu kegiatan yang dilakukan dalam satu tahap akan terjadi atau dilakukan kembali pada tahap yang lain. Misalnya, kegiatan analisis yang biasanya dilakukan dalam tahap awal, mungkin akan terjadi pada tahap yang lain ketika masalah atau pertanyaan tentang validitas pembelajaran, pembelajar, atau lingkungan belajar muncul.

Pengembangan kurikulum PTJJ adalah suatu pekerjaan yang melibatkan kerja suatu tim yang terdiri dari dua sampai dua puluh orang tergantung dari besar dan sifat program yang dikembangkan. Tim yang terdiri dari dua orang (ahli mata kuliah dan editor) disebut dengan model penulis-editor dan tim yang terdiri lebih dari 2 orang ahli mata kuliah dan pembelajaran disebut model tim kurikulum. Dari segi pembiayaan, model penulis-editor hemat dan hasil kerjanya cepat karena hanya melibatkan dua orang saja. Namun demikian tim ini tidak memiliki ahli pembelajaran; materi substansi dan strategi pembelajaran hanya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman satu orang saja. Sebaliknya, model tim kurikulum terdiri dari ahli mata kuliah dan ahli pembelajaran, sehingga kurikulum atau bahan ajar yang dihasilkan akan lebih lengkap dan sempurna. Di samping itu, model tim kurikulum digunakan bila berbagai media pembelajaran, baik cetak maupun noncetak dikembangkan karena banyak tenaga ahli yang harus mengerjakannya, sedangkan model penulis-editor cenderung digunakan sedikit jenis media yang dikembangkan. Kelemahan dari model tim kurikulum adalah besarnya biaya yang diperlukan karena banyak orang yang terlibat, waktu juga akan lebih lama karena dalam pengembangan kurikulum atau bahan ajar banyak dilakukan diskusi antaranggota tim untuk penyempurnaan hasil.

Model tim kurikulum diterapkan di banyak PTJJ. *Bangladesh Open University* (BOU) (Islam & Haque, 2001) misalnya, mengembangkan kurikulumnya dengan cara membentuk panitia pengembang kurikulum. Panitia ini dibentuk di setiap fakultas dan terdiri dari para ahli dan praktisi dalam bidang atau program yang dikembangkan. Kemudian panitia ini mengembangkan kurikulum yang selanjutnya direviu oleh para dosen di Fakultas tersebut dan akhirnya disetujui oleh Senat Fakultas. BOU menawarkan pendidikan untuk jenjang diploma, sarjana, pascasarjana, dan sertifikasi.

Berbeda dengan BOU yang mengembangkan kurikulum sendiri, *Allama Iqbal Open University* (AIOU) (Sheikh, 2001) di Pakistan memiliki kurikulum yang sama dengan universitas di negara tersebut yang berada di bawah sistem UGC (the University Grants Committee). Dengan menggunakan kurikulum yang sama, maka hanya proses pembelajaran di AIOU yang berbeda dengan proses pembelajaran di universitas lain di Pakistan. AIOU juga menawarkan program-program diploma, sertifikat, sampai program S3.

The Korea National Open University (KNOU) menawarkan berbagai program pendidikan, baik program berijazah maupun diploma. Namun KNOU hanya menawarkan program S1 dan program-program nongelar untuk pendidikan berkelanjutan. Untuk lulus S1, mahasiswa KNOU harus menempuh minimal 140 sks yang terdiri dari 42 sks mata kuliah umum dan 66 sks atau lebih mata kuliah jurusan, serta lulus ujian akhir program dengan nilai minimal memuaskan.

2. Bahan Ajar Mandiri

Bahan ajar merupakan komponen penting dalam sistem PTJJ. Mahasiswa sangat bergantung pada bahan ajar yang tersedia karena mereka banyak belajar mandiri. Oleh karena itu, institusi suatu PTJJ harus menyediakan bahan ajar yang lengkap dan interaktif bagi

- Pendidikan Jarak Jauh pada Tingkat Pendidikan Tinggi

mahasiswanya, agar mereka dapat belajar mandiri. Bagi PTJJ bahan ajar bukan saja dalam bentuk cetak seperti modul atau buku teks, tetapi juga dilengkapi dengan bahan ajar noncetak seperti audio, video, dan bahan ajar berbasis komputer seperti CAI, web dan *online* (Yunus, 2004).

Bahan ajar cetak adalah bahan ajar yang sangat umum dipakai dalam pendidikan jarak jauh. Bahan ajar ini banyak digunakan, karena bahan ajar cetak relatif murah dalam pengembangan dan produksinya serta mudah pendistribusiannya. Banyak mahasiswa sangat terbiasa menggunakan buku, sehingga mereka dapat langsung memanfaatkan bahan ajar cetak dengan maksimal. Di samping itu, bahan ajar cetak sangat fleksibel, mudah dibawa ke mana saja, dapat dibaca atau digunakan di mana saja, tidak mudah rusak, dan mudah digunakannya.

Universitas Terbuka (UT), sejak awal berdirinya, menggunakan bahan ajar cetak yang disebut modul sebagai bahan ajar utama. Modul tidak hanya berisi materi ajar (substansi) tetapi berisi pula petunjuk dan tuntunan bagi mahasiswa untuk mempelajari materi yang disajikan sehingga mahasiswa dapat belajar mandiri. Selain itu, modul berisi tujuan mata kuliah, tugas-tugas, dan tes serta jawaban dan petunjuk penilaian sehingga mahasiswa dapat mengevaluasi tingkat penguasaan materi mereka sendiri. Dapat dikatakan bahwa modul berfungsi sebagai pengganti dosen di dalam kelas. Oleh karena itu, modul haruslah interaktif, bersifat mendorong agar mahasiswa mau belajar, dan bahasanya tidak terlalu formal. Perlu diingat bahwa modul bukanlah karya ilmiah atau buku teks, tetapi merupakan suatu bentuk pembelajaran yang tertulis.

Selain bahan ajar cetak atau modul, PTJJ mengenal juga bahan ajar noncetak seperti audio, video, dan bahan ajar berbasis komputer. Audio atau video dapat digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran yang tidak mudah disampaikan dalam modul.

Penggunaan audio dan video juga dapat meningkatkan motivasi untuk belajar melalui jarak jauh. Audio dapat digunakan untuk menyampaikan bentuk narasi atau dramatik, sedang video sangat berguna sebagai media untuk menyampaikan hal-hal yang perlu dilihat, dan dapat menyampaikan banyak informasi dengan cepat. Kemampuannya untuk memperlihatkan suatu interaksi, menjadikan video sebagai media yang baik untuk mengajarkan berbagai keterampilan. Video baik pula untuk dijadikan media dalam mengajarkan sesuatu yang menggunakan prosedur atau langkah-langkah. Dengan semakin majunya teknologi informasi dan komunikasi, bahan ajar berbasis internet mulai digunakan secara luas, termasuk digunakan dalam pembelajaran jarak jauh (belajar-e).

Pengembangan bahan ajar cetak dan noncetak untuk pembelajaran jarak jauh dilakukan secara kolaborasi antara institusi penyelenggara PTJJ dengan perguruan tinggi lain. Seperti disampaikan oleh Moore dan Kearsley (1996), bahan ajar dikembangkan oleh suatu tim yang terdiri dari berbagai ahli, baik ahli mata kuliah, pembelajaran, dan media pembelajaran, termasuk editor dan produser. Ahli mata kuliah mengembangkan ikhtisar yang berisi materi yang akan diajarkan, tujuan pembelajaran, dan isi setiap unit (kegiatan belajar) dalam modul mata kuliah tersebut. Ikhtisar ini kemudian didiskusikan oleh semua anggota tim, sehingga menghasilkan ikhtisar yang siap digunakan.

Selanjutnya tim ahli mata kuliah mengembangkan bahan ajar cetak dan noncetak, termasuk juga alat evaluasi berdasarkan ikhtisar yang ada dengan dibantu dan dipandu oleh tim teknis seperti ahli pembelajaran, editor, dan ahli media. Agar seluruh kegiatan dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu, maka tim ini diketuai oleh seorang pengampu mata kuliah dibantu seorang tenaga administrasi. Proses pengembangan bahan ajar biasanya memerlukan waktu sekitar dua tahun.

- Pendidikan Jarak Jauh pada Tingkat Pendidikan Tinggi

Kolaborasi antara staf PTJJ dengan ahli mata kuliah dari perguruan tinggi lain dilakukan di banyak perguruan tinggi jarak jauh. KNOU, misalnya, mengemas bahan ajarnya dalam bentuk buku teks. Untuk pengembangan buku teks, baik tulis baru maupun revisi, ditentukan oleh suatu panitia yang terdiri dari beberapa dosen dan seorang kepala bagian tata usaha. Selanjutnya, penulisan bahan ajar itu sendiri dilakukan oleh suatu tim yang terdiri dari beberapa dosen KNOU dan dosen perguruan tinggi lain. Untuk meningkatkan kualitas bahan ajar, KNOU melibatkan mahasiswa dan ahli mata kuliah untuk mengevaluasi bahan ajar setiap mata kuliah. Kemudian berdasarkan hasil evaluasi tersebut, bahan ajar mata kuliah tersebut direvisi.

Di samping buku teks, KNOU juga menyediakan bahan belajar melalui satelit televisi, radio dan kaset. Untuk mata kuliah yang berbobot tiga sks misalnya, mahasiswa mendapatkan bahan belajar berupa sebuah buku teks, satu seri program TV atau radio atau kaset yang berdurasi sepanjang 20,5 jam, delapan jam tutorial tatap muka atau konferensi video, satu tugas dan satu ujian akhir. Sejak tahun 1997, KNOU mengembangkan sistem perpustakaan digital yang dimasukkan dalam *web*. Dengan demikian mahasiswa dapat mempelajari bahan kuliah melalui *web*.

C. Proses Pembelajaran, Evaluasi, dan Ujian Akhir Nasional

1. Proses Pembelajaran

Ciri khas PTJJ adalah terpisahnya mahasiswa dengan dosen dalam proses pembelajaran. Mahasiswa dapat memanfaatkan berbagai bahan belajar yang tersedia dengan pola dan strategi belajar yang dimilikinya. Menurut Moore dan Kearsley (1996),

terdapat tiga jenis interaksi yang perlu diketahui oleh para praktisi PTJJ, yaitu interaksi antara mahasiswa-materi bahan ajar, interaksi antara mahasiswa-tutor, dan interaksi antarmahasiswa. Tugas penyelenggara PTJJ adalah menyediakan fasilitas agar ketiga jenis interaksi tersebut dapat terjadi, sehingga mahasiswa dapat memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhannya. Sering ditemukan bahwa institusi penyelenggara pendidikan jarak jauh hanya memfokuskan diri untuk mengembangkan satu jenis interaksi saja, sehingga jenis interaksi yang lain tidak berkembang dengan baik. Hal ini perlu dihindari mengingat mahasiswa PTJJ memiliki gaya belajar yang berbeda.

Sebagian mahasiswa PTJJ cenderung untuk belajar sendiri sesuai dengan waktu dan kesempatan yang mereka miliki. Mereka cenderung untuk melakukan interaksi langsung dengan materi mata kuliah yang diambilnya. Sangat sedikit kesempatan bagi mereka untuk dapat berinteraksi dengan dosen/tutor atau dengan sesama mahasiswa. Agar mereka dapat berinteraksi secara optimal dengan materi tersebut, PTJJ harus menyediakan bahan ajar yang baik, yang memungkinkan mahasiswa dapat berinteraksi dan memahami materi mata kuliah tersebut dengan baik. Bahan ajar ini dapat berbentuk cetak seperti modul ataupun noncetak, seperti audio dan video kaset, dan juga program berbasis komputer.

Selanjutnya, PTJJ perlu menyediakan fasilitas agar mahasiswa dapat melakukan proses belajar melalui interaksi dengan dosen. Untuk itu, PTJJ dapat menyediakan berbagai bentuk media agar terjadi interaksi antara mahasiswa dan tutor, seperti tutorial tatap muka, tutorial tertulis, tutorial elektronik, dan konferensi-tele. Sebagian besar mahasiswa menyukai bentuk interaksi ini. Melalui interaksi antara mahasiswa-tutor, hal-hal yang sulit mereka pahami dapat dijelaskan dengan baik. Melalui interaksi ini pula, terjadi perluasan materi dan pembahasan berbagai contoh. Mahasiswa

- Pendidikan Jarak Jauh pada Tingkat Pendidikan Tinggi

mendapatkan saran dari tutor untuk membaca buku lain yang berkaitan dengan materi yang dipelajarinya. Bahkan mereka mendapat masukan atau komentar tentang penerapan pengetahuan yang baru mereka pelajari.

Kesempatan berinteraksi antarmahasiswa juga disediakan oleh institusi penyelenggara pendidikan jarak jauh. Melalui interaksi antarmahasiswa, mereka dapat mendiskusikan bahan ajar yang mereka pelajari, memecahkan berbagai masalah yang mereka alami, baik yang berhubungan dengan akademik maupun nonakademik. Mereka juga dapat saling berbagi pengalaman dan informasi. Dengan adanya interaksi antarmahasiswa, mereka mengetahui bahwa mereka tidak sendiri, banyak orang lain yang juga mengikuti pendidikan jarak jauh. Interaksi antarmahasiswa dapat dilakukan melalui kelompok belajar, konferensi audio/video, dan konferensi lewat *e-mail*.

Pada dasarnya mahasiswa PTJJ dituntut untuk belajar mandiri, belajar dengan kemauan dan inisiatif sendiri, mahasiswa harus dapat mengatur dan mendisiplinkan diri dalam belajar agar dapat berhasil. Berikut ini adalah proses belajar di BOU dan AIOU sebagai contoh proses pembelajaran di PTJJ.

Bangladesh Open University (BOU) menyediakan modul sebagai bahan belajar yang harus dipelajari mahasiswa, selain program radio dan televisi. Untuk membantu proses belajar mahasiswa, BOU menyediakan tutorial tatap muka yang diberikan oleh tutor yang direkrut dari dosen universitas tatap muka. Tutor ini sebelumnya mendapatkan pelatihan tutor yang diselenggarakan oleh pusat tenaga pengajar BOU. Mereka memberikan tutorial dua kali sebulan pada hari libur (Minggu) dan dipantau serta diberikan umpan balik oleh anggota pusat tenaga pengajar. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas program tutorial. Tutorial dilaksanakan di

pusat-pusat tutorial yang ditetapkan oleh fakultas. Mahasiswa dapat memilih tempat tutorial yang dekat dengan tempat tinggalnya.

Modul tidak hanya berisi materi pembelajaran, tetapi juga berisi evaluasi diri berupa soal dan kunci jawaban serta umpan balik. Di samping itu, sebagai bahan pemantapan dan bahan pendukung, tersedia pula program radio dan TV yang dikembangkan oleh pusat media. Namun karena program ini bersifat komunikasi satu arah, mahasiswa dapat menghubungi pusat tenaga pengajar melalui telepon dan surat-menyurat untuk mendapat umpan balik dan saran untuk mata kuliah yang ditempuhnya. Mahasiswa juga dianjurkan membentuk kelompok belajar untuk diskusi dan memecahkan masalah dan berinteraksi sesama mahasiswa.

Seperti juga BOU, AIOU memiliki bahan ajar dalam berbagai bentuk, seperti cetak dan noncetak. AIOU juga menyediakan tutorial tatap muka untuk membantu mahasiswa dalam belajar. Tutorial diberikan oleh tutor yang direkrut dari dosen universitas tatap muka. Tutorial dilaksanakan di pusat-pusat belajar yang berada di daerah pada sore hari atau Sabtu-Minggu. Tugas tutor antara lain memberikan bantuan belajar dan mengevaluasi tugas-tugas mahasiswa. Di samping itu, tersedia pula tutorial melalui layanan telepon dan tertulis.

2. Evaluasi dan Ujian Akhir

Seperti halnya perguruan tinggi tatap muka (PTTM), PTJJ juga memberikan evaluasi pada mahasiswanya untuk mengukur keberhasilan belajar mereka. Jika pada PTTM evaluasi hasil belajar dikelola langsung oleh dosen atau penanggung jawab mata kuliah, maka pada PTJJ evaluasi hasil belajar diselenggarakan dengan melibatkan banyak pihak mulai dari perencanaan hingga penyampaian nilai kepada mahasiswa.

- Pendidikan Jarak Jauh pada Tingkat Pendidikan Tinggi

Untuk mengukur keberhasilan mahasiswa dalam menguasai kompetensi yang diharapkan dari suatu mata kuliah, dilakukan dua jenis evaluasi atau tes, yaitu formatif dan sumatif. Tes formatif dilakukan untuk mengukur keberhasilan mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung. Dalam PTJJ, mahasiswa didorong untuk mengukur keberhasilan mereka sendiri melalui tes formatif yang disediakan dalam modul mata kuliah yang diambilnya. Mereka dapat menilai hasil tes formatif dengan cara mencocokkan jawaban mereka dengan kunci jawaban yang telah tersedia. Hasil tes ini tidak diperhitungkan dalam penilaian akhir. Selain tes formatif yang merupakan bentuk evaluasi diri, mahasiswa diberi tugas oleh tutor. Tugas yang mereka kerjakan kemudian diperiksa dan dinilai oleh tutor dan selanjutnya nilai tugas ini biasanya diperhitungkan pada nilai akhir.

Tes sumatif diberikan pada akhir pembelajaran suatu mata kuliah dengan tujuan untuk mengetahui keberhasilan mahasiswa mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Tes sumatif diberikan pada akhir semester pada setiap mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Di samping tes akhir semester ini, terdapat pula evaluasi atau tes yang disebut tes akhir program. Tes ini diberikan kepada mahasiswa program S1 di akhir program. Di Universitas Terbuka, tes akhir program ini disebut Tugas Akhir Program yang dapat diberikan dalam bentuk skripsi atau makalah.

Tes yang umum digunakan dalam sistem PTJJ adalah tes objektif tertulis yang mengukur kemampuan kognitif. Tes jenis ini relatif mudah pengelolaannya bagi peserta tes yang sangat banyak atau massal. Ranah afektif dan psikomotor juga tetap mendapat perhatian, namun dalam kapasitas terbatas. Demikian pula dengan tes uraian; tes ini juga digunakan dalam sistem PTJJ, namun diterapkan dengan sangat terbatas karena pengelolaannya cukup sulit dan melibatkan banyak orang untuk memeriksanya. Tes lisan hanya diterapkan pada

mata kuliah yang benar-benar memerlukan tes lisan, seperti mata kuliah berbicara atau *speaking*.

Berbeda dengan PTTM, yang soal tesnya dikembangkan oleh dosen yang memberikan mata kuliah atau penanggung jawab mata kuliah, pengembangan soal tes dalam PTJJ mengikuti prosedur tertentu dan melibatkan banyak orang. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengembangkan kisi-kisi. Setelah kisi-kisi selesai ditulis dan ditelaah serta dinyatakan dapat digunakan, baru kemudian dikembangkan soal berdasarkan kisi-kisi tersebut. Besar kemungkinan penulis kisi-kisi berbeda dengan penulis soal, demikian pula berbeda orangnya dengan penelaah kisi-kisi dan soal. Oleh karena itu, banyak orang yang terlibat dalam pengembangan soal. Namun tentu mereka yang terlibat adalah mereka yang memiliki keahlian bidang/mata kuliah yang sama.

Ujian dalam sistem PTJJ pada umumnya dilaksanakan serentak dan massal. Oleh karena itu, diperlukan ruang dan pengawas yang cukup banyak. Untuk ini PTJJ dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi tatap muka dalam pengadaan ruang dan pengawas. Saat ini beberapa PTJJ telah menerapkan ujian berbasis komputer atau ujian *online*. Dengan ujian *online*, mahasiswa dapat melakukan ujian secara individual tanpa harus duduk bersama dalam satu ruang.

Pada umumnya penilaian di PTJJ sangat bertumpu pada ujian akhir semester. Mahasiswa KNOU misalnya, mendapatkan nilai yang diperoleh dari ujian akhir semester berbentuk pilihan ganda sebesar 70%. Selebihnya, nilai diperoleh dari tugas dan tes tengah semester berbentuk esai dan kehadiran dalam tutorial untuk mata kuliah yang ditutorialkan.

Berbeda dengan KNOU, BOU menggunakan tes formatif dan sumatif untuk menilai keberhasilan mahasiswa. Tes formatif adalah penilaian berkelanjutan yang merupakan evaluasi diri di dalam modul. Evaluasi diri ini dibuat agar mahasiswa dapat memonitor

- Pendidikan Jarak Jauh pada Tingkat Pendidikan Tinggi

kemajuan belajarnya. Nilai yang diperoleh mahasiswa dari evaluasi diri ini tidak diperhitungkan dalam nilai akhir. Selanjutnya terdapat tugas dari tutor yang harus dikerjakan mahasiswa dan diserahkan kepada tutor. Tugas ini disebut tugas yang diperiksa tutor (TDT). Tutor harus memberikan umpan balik dan juga penilaian pada setiap tugas yang diserahkan. Nilai tugas ini berkontribusi terhadap nilai akhir mahasiswa yang akan ditambahkan pada nilai sumatif yang diperoleh dari ujian akhir semester. Ujian akhir semester ini dilaksanakan di pusat-pusat tutorial, diawasi oleh staf pada pusat tutorial tersebut dan dimonitor oleh staf BOU.

D. Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan bagi PTJJ sangat beragam, tidak hanya sebagai peneliti dan pengajar seperti pada perguruan tinggi reguler. Tenaga kependidikan pada PTJJ ada yang berupa tenaga pinjaman dari lembaga lain, karena tugasnya terbatas, sehingga tidak efisien bilamana PTJJ sendiri mempunyai tenaga tersebut. Kalau PTJJ merasa perlu mempunyai tenaga tersebut, tenaga itu tidak mendapatkan satu jenis tugas tetapi harus merangkap tugas lainnya.

Rincian tenaga PTJJ adalah sebagai berikut:

1. *Ahli materi*, yaitu mereka yang menentukan dan pada umumnya, juga ikut mengembangkan mata pelajaran pada PTJJ. Di UT ahli materi banyak yang dipinjam dari perguruan tinggi reguler. Dengan demikian, maka UT dapat mempekerjakan ahli materi yang terbaik yang dapat direkrutnya. Ahli materi ini kemudian ditempatkan sebagai anggota tim pengembang mata pelajaran yang bertugas menentukan materi apa yang perlu dipelajari mahasiswa.

2. *Ahli desain mata pelajaran*, yang bertugas untuk mendesain mata pelajaran, sehingga mudah dimengerti dan mempunyai unsur-unsur interaktif di dalamnya. Karena itu, ahli desain harus ahli dalam media yang digunakan, mengerti tentang prinsip-prinsip dan teknologi instruksional, dan pengetahuan tentang teknologi yang dipergunakan. Ahli desain mata pelajaran ini harus erat bekerja sama dengan ahli materi untuk menentukan tujuan mata pelajaran, materi yang disampaikan, latihan-latihan dan aktivitas lain yang harus dikerjakan mahasiswa, tata letak bahan ajar, isi media video dan audio yang digunakan, dan pertanyaan-pertanyaan untuk bagian interaktif bahan ajar yang disampaikan melalui media audio, video, atau komputer. Keahlian desain ini juga beragam, tergantung dari media yang digunakan.
3. *Ahli teknologi informasi dan komunikasi*, yang bertugas untuk membantu menyampaikan bahan ajar melalui teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan. Media itu dapat berupa cetakan, audio dan/atau video, melalui radio, televisi atau komputer. Keahliannya pun beragam, sesuai dengan teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan.
4. *Ahli tutorial*, yang bertugas terutama untuk melaksanakan interaksi antara pengajar dan mahasiswa, dan membantu serta mendorong adanya interaksi antarmahasiswa. Pada perguruan tinggi reguler, interaksi ini dijalankan sendiri oleh pengajar yang sekaligus juga ahli materi, tetapi dalam PTJJ hal itu jarang terjadi karena jumlah mahasiswa pada umumnya lebih banyak daripada jumlah sebuah kelas, dan tempat tinggal mereka juga berjauhan. Interaksi dalam PTJJ tidak dapat dilaksanakan secara intensif seperti di perguruan tinggi reguler, tetapi hanya kadang-kadang. Interaksi pada PTJJ sebaiknya tidak dilaksanakan oleh mereka yang mengembangkan bahan ajar tetapi oleh orang lain

- Pendidikan Jarak Jauh pada Tingkat Pendidikan Tinggi

(tutor), yang sudah terlatih untuk mengadakan interaksi dengan mahasiswa, sedangkan tim pengembang belum tentu mempunyai kemampuan tersebut.

5. *Konselor*, yang bertugas untuk membantu mahasiswa menyelesaikan persoalan yang dihadapi dalam belajar, memberikan pengertian tentang teknik-teknik belajar yang diperlukan dalam belajar mandiri, atau membantu menyelesaikan masalah-masalah akademik atau pribadi. Tugas konselor juga dapat dirangkap oleh tutor, bila diperlukan.
6. *Ahli evaluasi pendidikan* bertugas untuk mengembangkan segala jenis tes hasil belajar dan tes lain yang diperlukan. Ahli ini juga bertugas untuk mengembangkan pusat penilaian, yang tidak hanya mengembangkan tes, tetapi juga mengkalibrasi dan menyimpannya dalam suatu bank soal. Selain itu, mereka dapat diberi tugas untuk mengembangkan tugas mandiri bersama dengan program studi.
7. *Ahli penelitian*, yang dalam lingkungan perguruan tinggi di Indonesia, belum ada jabatan ini secara khusus. Biasanya peneliti diambil dari tenaga pengajar yang berniat untuk mengadakan penelitian. Waktu untuk meneliti dapat diberikan secara khusus bagi mereka untuk dapat menyelesaikan penelitiannya, tetapi kebanyakan tenaga pengajar yang meneliti mengerjakannya sambil menunaikan pekerjaan-pekerjaan lainnya.
8. *Pimpinan unit-unit akademik*, yang biasanya diambil dari tenaga pengajar, tidak banyak berbeda dengan pejabat-pejabat serupa di perguruan tinggi reguler. Pejabat-pejabat tersebut adalah Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi. Pejabat-pejabat ini biasanya tidak mempunyai keahlian khusus untuk mengelola sebuah unit akademik, tetapi mereka dipilih berdasarkan kemampuan untuk memimpin.

9. *Tenaga Administrasi*, yang membantu pimpinan unit-unit akademik maupun unit-unit administrasi PTJJ.

E. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana PTJJ yang diperlukan tidak selalu sama, tergantung dari teknologi yang digunakan. Bila masih menggunakan teknologi cetak, maka sarana dan prasarana yang diperlukan berbeda dengan PTJJ menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang canggih (belajar-e). Pada waktu ini PTJJ kebanyakan masih menggunakan kombinasi teknologi cetak dan TIK, baik yang biasa (telepon dan radio) maupun yang canggih (televisi, komputer, dan internet). PTJJ di negara yang berkembang, seperti UT, Sukhothai Thammathirat Open University (STOU) dan Indira Gandhi National Open University (IGNOU) masih lebih banyak menggunakan teknologi cetak daripada TIK, meskipun semuanya sekarang sudah mulai menggunakan TIK yang canggih sebagai percobaan atau peralihan ke masa mendatang. Yang penting dikemukakan di sini adalah bahwa apa pun teknologi yang digunakan, harus mendukung sistem PTJJ yang modern secara praktis.

Untuk mengetahui kebutuhan sarana dan prasarana dalam PTJJ, kita harus memahami dulu sistem PTJJ. Sistem PTJJ terdiri dari beberapa subsistem:

1. Mahasiswa dan Kegiatan Instruksional.
2. Pengembangan Bahan Ajar.
3. Reproduksi Bahan Ajar.
4. Distribusi Bahan Ajar.
5. Media Komunikasi.
6. Pengujian.

- Pendidikan Jarak Jauh pada Tingkat Pendidikan Tinggi

7. Logistik.
8. Jaminan Mutu.

Masing-masing subsistem itu harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, meskipun tidak semua sarana dan prasarana harus dimiliki sendiri oleh lembaga PTJJ. Banyak sarana dan prasarana yang dapat menggunakan sarana dan prasarana yang sudah dimiliki oleh lembaga lain. Di sini akan dibicarakan sarana dan prasarana yang diperlukan: apakah sarana dan prasarana tersebut harus dimiliki sendiri atau dapat menggunakan milik lembaga lain.

Subsistem mahasiswa dan kegiatan instruksional, memerlukan sarana dan prasarana bagi rekrutmen, registrasi, belajar mandiri, dan tutorial. Bila rekrutmen dan registrasi dilakukan secara *online*, sarana dan prasarananya berbeda dengan yang dilakukan secara tertulis dan manual. Registrasi secara manual dan tertulis sudah banyak ditinggalkan karena terlalu lama, tetapi registrasi secara *online* mula-mula banyak kesalahan sehingga data yang diperoleh harus diulangi pencatatannya. Sarana berupa perangkat lunak dan prasarana berupa jaringan komputer yang terkait dengan internet harus cukup disediakan untuk melaksanakan registrasi *online*. Rekrutmen masih dapat dilaksanakan dengan memasang iklan di surat kabar dan membuat pamflet-pamflet yang diedarkan kepada calon mahasiswa. Pemasangan iklan di internet juga dapat membantu rekrutmen melalui surat kabar dan media massa lainnya.

Belajar mandiri, termasuk belajar kelompok, memerlukan tempat belajar yang disediakan oleh mahasiswa sendiri, sedangkan tutorial diselenggarakan di tempat belajar resmi yang disediakan oleh PTJJ yang biasanya berupa ruang kelas, bila perlu dipinjam dari lembaga pendidikan yang ada.

Subsistem pengembangan bahan ajar memerlukan sarana dan prasarana yang mirip dengan yang diperlukan oleh sebuah fakultas pada perguruan tinggi reguler, yaitu untuk mengembangkan program studi, mengembangkan kurikulum, dan mengembangkan bahan ajar dan soal ujian. Hanya saja untuk keperluan PTJJ, ruang pertemuan untuk kegiatan masing-masing tersebut harus disediakan lebih banyak karena pengembangan masing-masing kegiatan subsistem tersebut melibatkan lebih banyak orang. Apalagi bila bahan ajar terdiri dari bahan ajar cetak dan noncetak, lebih banyak keahlian yang diperlukan untuk semua kegiatan tersebut, yang mengakibatkan keperluan sarana dan prasarana yang bertambah banyak, seperti ruang-ruang sidang dengan peralatan untuk memaparkan hasil-hasil bahasan dalam bentuk cetak, suara, gambar, dan video. Pengembangan bahan ajar cetak memerlukan komputer dengan perangkat lunak penerbitan yang cukup baik, sedangkan bahan ajar audio dan video memerlukan studio rekaman audio dan studio yang lengkap.

Subsistem reproduksi bahan ajar mempunyai dua komponen, pencetakan bahan cetak dan pengadaan bahan audio visual. PTJJ tidak perlu mempunyai pencetakan sendiri, kecuali untuk bahan cetak yang dirahasiakan, seperti pencetakan soal-soal ujian. Beberapa PTJJ besar, seperti STOU sejak semula mempunyai pencetakan karena tidak mau tergantung dari pencetakan luar. UT sejak semula memang tidak didesain untuk mempunyai pencetakan sendiri, karena pencetakan di luar sudah memenuhi syarat, kecuali untuk mencetak bahan yang dirahasiakan. Sangat sulit untuk menjaga kerahasiaan soal-soal ujian, apabila mengambil pencetakan dari luar dan biayanya cukup mahal, karena pencetakan yang dapat menjaga kerahasiaan memang harus mempunyai fasilitas-fasilitas khusus. Karena itu, UT mengembangkan pencetakannya sendiri yang khusus mencetak soal-soal ujian. Di samping itu, pencetakan sederhana UT juga dapat mencetak untuk keperluan kantor sendiri.

- Pendidikan Jarak Jauh pada Tingkat Pendidikan Tinggi

Hingga saat ini ketergantungan UT pada percetakan luar tidak menimbulkan masalah yang serius. Demikian pula pertimbangan mempunyai studio rekaman sendiri untuk memperbanyak rekaman audio dan video. UT mempunyai studio rekaman sendiri, karena hal ini lebih efisien-biaya dan lebih dapat diandalkan daripada menggunakan studio komersial untuk menggandakan rekaman audio dan video. Sejak awal studio rekaman untuk mengembangkan bahan ajar audio dan video sudah dimiliki. Karena itu, UT hanya menambah peralatan duplikasi rekaman untuk dapat mereproduksi bahan audio dan video dalam jumlah yang banyak.

Subsistem distribusi bahan ajar, yang terdiri dari komponen penggudangan dan pengiriman, tidak selalu harus mempunyai sarana dan prasarannya sendiri. Gudang yang cukup besar mungkin memang diperlukan di dalam kampus, tetapi gudang dapat disewa dari perusahaan yang kemudian disertai untuk mendistribusikan bahan ajar. Pada mulanya kantor poslah yang disertai untuk distribusi bahan ajar, akan tetapi kantor pos tidak mempunyai tempat penyimpanan yang cukup besar untuk menampung bahan yang akan dikirim setiap semesternya, sehingga UT merasa perlu membangun gudang yang besar di kampusnya. Begitu pula STOU. Akhirnya sebagian besar distribusi diambil alih sendiri oleh UT karena ternyata lebih efektif dan lebih murah, kecuali untuk daerah-daerah yang tidak dapat terjangkau oleh angkutan darat dari Pusat UT, seperti Kalimantan, Sulawesi, Ambon dan Irian Jaya, yang masih tetap menggunakan perusahaan angkutan di luar UT. Sarana untuk mengirimkan bahan ajar UT sendiri menggunakan truk-truk yang dikendarai oleh pengemudi-pengemudi UT. Dengan demikian, subsistem distribusi tersebut dikelola seperti perusahaan transpor barang.

Subsistem media komunikasi terdiri dari komponen pemasangan alat dan penggunaan media. Subsistem ini sebetulnya subsistem pelayanan dari subsistem lainnya. Yang jelas subsistem ini

melayani subsistem mahasiswa dan kegiatan instruksional, subsistem pengembangan bahan ajar, subsistem reproduksi bahan ajar, dan distribusi bahan ajar. Semua sarana dan prasarana yang diperlukan oleh semua subsistem tadi dikelola dan dipelihara oleh subsistem media komunikasi ini. Studio rekaman, dan bila ada studio siaran audio dan video diletakkan pada subsistem ini. Seharusnya percetakan juga diletakkan dalam subsistem ini, tetapi karena beda sifatnya, maka percetakan dikelola tersendiri. Komputer juga demikian, kecuali bila PTJJ sudah menggunakan komputer sebagai sarana multi-media. Sebelum itu komputer dikelola tersendiri oleh pusat komputer.

Subsistem pengujian yang terdiri dari penyelenggaraan dan pelaporan hasil ujian harus mempunyai ruangan yang cukup banyak untuk menyelenggarakan ujian, akan tetapi untuk PTJJ modus tunggal yang besar, ruangan-ruangan tersebut biasanya dipinjam dari lembaga-lembaga pendidikan lain. Pemrosesan dan pelaporan hasil ujian menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pusat komputer.

Subsistem logistik yang terdiri dari komponen sarana dan dana, merupakan subsistem pelayanan untuk semua subsistem lainnya, pengelolaan sarana dan dana yang diperlukan subsistem lain dilakukan oleh subsistem ini. Subsistem ini memerlukan sarana dan prasarana perkantoran dan, bila dianggap perlu, sarana dan prasarana perbengkelan. UT menggunakan bengkel luar untuk memperbaiki mobil dan peralatan lainnya karena hal itu dianggap lebih efektif.

Subsistem jaminan mutu yang mempunyai fungsi monitoring dan evaluasi tidak memerlukan sarana khusus kecuali sarana dan prasarana perkantoran. Subsistem ini semuanya ditentukan oleh kecakapan staf monitoring dan evaluasi, bukan oleh adanya sarana dan prasarana khusus.

- Pendidikan Jarak Jauh pada Tingkat Pendidikan Tinggi

F. Pengelolaan, Pembiayaan, dan Pengawasan

1. Pengelolaan

Berbeda dengan perguruan tinggi tatap muka, pengelolaan PTJJ lebih bersifat massal. Di samping sifatnya massal, PTJJ secara konseptual menerapkan sistem yang terbuka. Sistem yang terbuka berarti mahasiswa dapat melakukan registrasi kapan saja dan di mana saja. Terbuka juga berarti mahasiswa dapat menentukan sendiri program studi yang diikuti, lama studi yang ditargetkan, dan waktu belajar yang dipilih. Karena sifatnya terbuka, maka PTJJ seperti UT dapat diikuti oleh siapa saja, tanpa ada diskriminasi ras, gender, status sosial, maupun usia. Meskipun sifatnya massal, penyelenggaraan PTJJ harus tetap menjaga mutu. Kualitas pendidikan dalam penyelenggaraan PTJJ tetap harus menjadi perhatian utama. Upaya untuk tetap meningkatkan mutu dalam PTJJ ini dapat dilakukan melalui berbagai cara. Dalam kasus UT, misalnya, agar UT dapat mewujudkan mutu yang baik, penyelenggaraan UT harus didasarkan pada tujuh prinsip, yaitu: (1) menyediakan bahan ajar yang berkualitas, (2) menyelenggarakan kontrak interaktif yang efektif dan efisien antara UT dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran, (3) membangun kerja sama belajar di kalangan mahasiswa melalui lebih banyak pembentukan kelompok belajar, (4) membangun sistem umpan balik dengan mahasiswa, (5) membuat mahasiswa belajar secara intensif sesuai dengan waktu yang dituntut untuk mempelajari suatu bahan ajar, (6) mengomunikasikan harapan yang tinggi dari masyarakat pengguna tenaga kerja kepada mahasiswa bahwa lulusan UT harus memiliki kompetensi yang tinggi dan tidak boleh mengecewakan masyarakat, dan (7) memfasilitasi perbedaan minat, bakat, dan cara belajar mahasiswa melalui penawaran program pendidikan yang bervariasi dengan media pembelajaran yang sesuai (Suparman, 2004: 417).

Dengan sifatnya yang massal ini, maka manajemen PTJJ lebih seperti manajemen industri. Sistemnya yang sangat terbuka dalam pendidikan jarak jauh sangat berpengaruh terhadap pola pengelolaan dalam penyelenggaraan pendidikan. Karena bersifat terbuka, perkuliahan dapat diberikan secara massal. Misalnya satu mata kuliah dalam sebuah perguruan tinggi tatap muka hanya diberikan oleh seorang atau satu tim pengajar dalam satu ruang atau tempat tertentu, tetapi dalam sistem PTJJ satu mata kuliah dapat diberikan secara massal kepada banyak mahasiswa dari berbagai penjuruan dalam satu semester tertentu. Pemberian materi perkuliahan dalam perguruan tinggi tatap muka hanya diberikan oleh satu atau tim tenaga pengajar tertentu untuk mahasiswa tertentu dan dalam kelas tertentu, sementara itu dalam sistem PTJJ materi perkuliahan dapat diproduksi secara massal untuk diberikan kepada mahasiswa secara luas. Untuk memudahkan mahasiswa dalam memilih cara dan waktu belajar, bahan ajar dalam PTJJ harus dikembangkan melalui berbagai media pembelajaran yang biasanya disebut bahan ajar multi media. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, bahan ajar untuk PTJJ dapat menggunakan bahan ajar multi media yang sifatnya interaktif, sehingga ketidakhadiran pengajar secara tatap muka dapat digantikan oleh media. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pula, belajar jarak jauh dapat dilakukan secara interaktif langsung (*online*) antara mahasiswa dan dosen (tutor), baik dilakukan secara individual maupun secara kelompok. Pada awal perkembangan PTJJ, interaksi antara tutor dan mahasiswa secara langsung seperti ini hanya dapat dilakukan dalam forum tutorial tatap muka.

Sistem yang massal tersebut telah mempengaruhi struktur organisasi dalam sebuah PTJJ. Struktur organisasi perguruan tinggi tatap muka tidak dapat diterapkan dalam PTJJ. Ketika UT berdiri pada tahun 1984, struktur organisasi UT mengikuti pola struktur organisasi perguruan tinggi tatap muka. Hal itu terjadi karena pada

- Pendidikan Jarak Jauh pada Tingkat Pendidikan Tinggi

waktu itu UT adalah lembaga baru yang belum ada modelnya di Indonesia. Akibat organisasi perguruan tinggi tatap muka yang dipaksakan diterapkan di UT, dalam prakteknya struktur tersebut tidak dapat berjalan secara optimal. Pengembangan organisasi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan UT agak sulit dilakukan karena penentu kebijakan dalam dunia pendidikan lebih memilih pola-pola baku dalam pengelolaan pendidikan. Bentuknya adalah struktur baku yang berlaku umum pada semua perguruan tinggi. Beruntung hal itu telah diantisipasi oleh pengelola UT, sehingga di lapangan UT dapat mengembangkan pola pengelolaan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Bentuknya adalah adopsi antara struktur baku organisasi perguruan tinggi tatap muka dengan unsur-unsur penting yang memungkinkan terlaksananya pengelolaan PTJJ. Organisasi UT seperti halnya perguruan tinggi tatap muka terdiri atas rektor dengan para pembantunya, biro administrasi pendidikan dan biro administrasi keuangan, fakultas dan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, tetapi untuk kegiatan sehari-hari UT memiliki unit-unit operasional yang memungkinkan terlaksananya pendidikan jarak jauh secara massal. Unit-unit tersebut misalnya adalah pengembangan dan pengadaan bahan ajar, distribusi bahan ajar, dan pengolahan pengujian.

Pada prinsipnya, PTJJ adalah sebuah jaringan, baik jaringan internal maupun eksternal. Jaringan internal adalah jaringan antara UT pusat dengan pusat-pusat layanan UT di daerah, sedangkan jaringan eksternal adalah jaringan kerja antara UT dengan lembaga-lembaga di luar UT. Karena bentuknya adalah jaringan, maka kerja sama menjadi masalah yang sangat penting dalam pengelolaan PTJJ. Sejak awal berdiri hingga kini, UT banyak melakukan kerja sama, seperti kerja sama dengan PT Pos Indonesia, PT Telkom, perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia, dan kini dalam kaitannya dengan otonomi daerah, UT banyak menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk memudahkan pembaca mengerti bagaimana pola pengelolaan PTJJ, maka dalam bagian ini akan dibicarakan struktur dasar UT. Secara umum, struktur dasar UT terdiri atas tiga komponen, yaitu komponen penerimaan (registrasi dan distribusi bahan ajar), proses belajar, dan evaluasi.

a. *Registrasi dan Distribusi Bahan Ajar*

Registrasi di UT berlangsung sepanjang waktu. Mahasiswa UT dapat melakukan registrasi kapan saja dan di mana saja. Selama ini registrasi dapat dilakukan di kantor pos maupun di kantor UPBJJ. Tetapi ke depan, sejalan dengan perkembangan PTJJ generasi kelima, dikembangkan registrasi *online* melalui internet. Dengan demikian, akses untuk menjadi mahasiswa UT menjadi lebih mudah. Mahasiswa UT yang mempunyai akses ke komputer dapat melakukan registrasi dari rumah atau kantor mereka, tidak perlu harus pergi ke kantor pos atau UPBJJ. Faktor-faktor yang mendukung terwujudnya registrasi *online* adalah: (1) tersedianya sarana teknologi informasi dan komunikasi yang memadai, (2) tersedianya lembaga keuangan (perbankan) yang membantu menangani setoran SPP secara *online* dengan daya jangkauan yang cukup luas, dan (3) kemampuan dan kemauan mahasiswa untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui internet (Sulaiman, 2004: 347). Sistem registrasi sepanjang waktu, dapat dilakukan di mana saja, merupakan salah satu unsur yang membedakan sistem PTJJ dengan sistem pendidikan tatap muka. Dalam perguruan tinggi tatap muka, registrasi dibatasi untuk waktu tertentu dalam setiap semester tertentu, dan di tempat yang tertentu pula.

Pada umumnya PTJJ menganut sistem registrasi sepanjang tahun. Mahasiswa PTJJ dapat meregistrasikan mata kuliah yang diikutinya dalam setiap semester, kapan saja dan di mana saja. Meskipun demikian, registrasi mata kuliah dibatasi dalam masa ujian tertentu

- Pendidikan Jarak Jauh pada Tingkat Pendidikan Tinggi

dalam setiap semester. Untuk kasus UT misalnya, mahasiswa dapat mendaftarkan mata kuliah sampai batas satu bulan sebelum ujian semester. Mahasiswa yang melakukan registrasi setelah tanggal yang ditentukan atau lewat dari satu bulan terakhir menjelang tanggal ujian tetap diterima sebagai mahasiswa, tetapi untuk masa ujian berikutnya. Masa satu bulan itu oleh UT digunakan untuk mengolah data mahasiswa, mulai dari penentuan tiras soal, lokasi ujian, sampai daftar mahasiswa setiap ruangan (daftar 20-an). Daftar ini mengatur tempat duduk mahasiswa dalam setiap ruangan. Agar mempunyai waktu yang cukup untuk mempelajari bahan ajar, mahasiswa dapat membeli bahan ajar terlebih dahulu sebelum melakukan registrasi.

Pola registrasi yang berlangsung sepanjang waktu tersebut memerlukan pola pengelolaan yang berbeda dengan perguruan tinggi tatap muka. Pada awalnya pengolahan data registrasi dilakukan terpusat. Mahasiswa melakukan registrasi di kantor pos, dan mengirimkan berkas registrasi yang telah diisi langsung ke kantor UT Pusat di Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang. Data pribadi mahasiswa yang dikirim melalui pos dari berbagai penjuru itu kemudian diproses di kantor UT Pusat. Data registrasi mahasiswa tersebut kemudian dijadikan bahan untuk pengiriman bahan ajar kepada mahasiswa, serta bahan untuk menentukan kebutuhan bahan ujian dan tempat ujian.

Sistem registrasi yang sentralistik ternyata tidak efisien. Pengiriman bahan ajar sering terlambat diterima oleh mahasiswa karena lamanya proses perjalanan berkas registrasi yang dikirim melalui pos. Sejak tahun 1990 UT mulai merancang desentralisasi registrasi. Dalam konsep desentralisasi registrasi ini, mahasiswa melakukan registrasi di kantor pos kemudian mengirimkan berkas registrasi yang telah diisi ke kantor UPBJJ terdekat. Mahasiswa juga dapat langsung melakukan registrasi di kantor UPBJJ. Berkas

registrasi yang diproses di UPBJJ ini kemudian dikirim ke UT Pusat. Untuk mempercepat penerimaan bahan ajar, mahasiswa memperoleh bahan ajar dari UPBJJ. Untuk menjamin ketersediaan bahan ajar di UPBJJ, setiap UPBJJ harus memiliki stok bahan ajar yang cukup. Untuk itu, setiap UPBJJ membutuhkan tempat penyimpanan bahan ajar yang mencukupi. Sebaliknya, UT Pusat harus menginvestasikan dananya yang cukup besar dalam bidang penyediaan bahan ajar. Saat ini misalnya, UT menyediakan sekitar 650 mata kuliah yang dapat diregistrasi oleh mahasiswa. Untuk menjamin setiap mahasiswa UT yang meregistrasi mata kuliah menerima bahan ajar tepat waktu, UT harus menyediakan bahan ajar untuk setiap mata kuliah yang ditawarkan secara mencukupi, dalam arti sesuai dengan jumlah mahasiswa yang meregistrasi di setiap daerah atau UPBJJ.

Ketepatan waktu bagi mahasiswa menerima bahan ajar juga sangat tergantung pada sistem pengelolaan distribusi bahan ajar. Penggunaan aplikasi komputer dalam distribusi bahan ajar merupakan syarat mutlak bagi kecepatan dan ketepatan pengolahan data distribusi. Tanpa data yang akurat, sulit bagi pengelola PTJJ untuk dapat menggandakan dan mendistribusikan bahan ajar kepada mahasiswa secara tepat waktu (Sastrawan Putra, 2004: 359). Keakuratan data ini juga sangat berpengaruh terhadap efisiensi pengadaan bahan ajar. Data yang tidak akurat dapat menyebabkan kesalahan dalam memprediksi pengadaan bahan ajar dan hal itu akan menyebabkan terjadinya pemborosan.

Dalam kasus UT, pendistribusian bahan ajar diawali dengan penentuan tiras cetak untuk satu semester ke depan. Penentuan tiras cetak ini dilakukan melalui sebuah rapat penentuan tiras yang dipimpin oleh Pembantu Rektor bidang Operasional dengan melibatkan unsur fakultas, Biro Administrasi Akademik (BAAK-RENSI), Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK), Pusat

- Pendidikan Jarak Jauh pada Tingkat Pendidikan Tinggi

Penerbitan, Pusat Produksi Multi Media, Pusat Komputer, dan Pusat Distribusi. Prediksi kebutuhan bahan ajar ini didasarkan atas data registrasi mata kuliah yang diambil mahasiswa pada semester sebelumnya, data penjualan di UPBJJ, dan data stok yang tersedia baik di gudang UT pusat maupun di UPBJJ (Sastrawan Putra, 2004:360; Soleiman & Listyarini, 2004: 641-642). Penentuan tiras ini untuk menjamin tersedianya bahan ajar di UPBJJ pada setiap mata kuliah yang diregistrasi mahasiswa.

Selain penentuan tiras, hal yang tidak kalah penting dalam penyediaan bahan ajar adalah masalah distribusi. Bagaimana bahan ajar dapat diterima oleh mahasiswa secara cepat dan tepat. Ketepatan waktu dalam penerimaan bahan ajar akan mempengaruhi proses belajar mahasiswa. Lebih awal mahasiswa memperoleh bahan, mahasiswa menjadi lebih siap dalam menghadapi ujian. Tetapi dalam kenyataannya hal ini sangat tergantung pada mahasiswa. Dalam sistem registrasi sepanjang tahun, pola registrasi mahasiswa sangat berpengaruh terhadap kecepatan penerimaan bahan ajar. Mahasiswa yang mendaftarkan pada awal semester akan memiliki kesempatan belajar yang lebih lama sehingga mahasiswa yang bersangkutan memiliki waktu yang cukup untuk menguasai bahan ajar. Dengan demikian, mahasiswa yang bersangkutan akan lebih siap dalam menghadapi ujian. Sebaliknya, bagi mahasiswa yang melakukan registrasi pada akhir semester tidak akan memiliki waktu yang cukup untuk dapat menguasai bahan ajar.

b. Proses Belajar

Dalam PTJJ proses belajar sangat tergantung pada kemampuan mahasiswa. Sistem PTJJ menuntut mahasiswa untuk dapat belajar secara mandiri. Dalam sistem belajar mandiri ini, mahasiswa mempunyai otonomi yang penuh dalam menentukan waktu, cara belajar, dan media yang digunakan (cetak atau noncetak).

Mahasiswa mempunyai kebebasan untuk menentukan waktu belajar, apakah di rumah, memanfaatkan waktu luang di kantor, atau di perpustakaan. Mahasiswa juga mempunyai kebebasan untuk memilih cara belajar, apakah dengan cara belajar sendiri atau berkelompok. Dalam sistem PTJJ mahasiswa memiliki kebebasan pula dalam memilih media pembelajaran yang ada, apakah mau menggunakan media bahan ajar tercetak atau media noncetak.

Hal tersebut membedakan PTJJ dengan sistem kuliah tatap muka. Dalam sistem tatap muka, mahasiswa tidak memiliki otonomi dalam menentukan waktu dan tempat belajar serta media pembelajaran yang digunakan. Semua itu sudah ditentukan oleh penyelenggara pendidikan secara ketat. Dalam sistem tatap muka, mahasiswa tidak dapat menentukan sendiri waktu belajar. Penyelenggara pendidikan tatap muka telah menentukan jadwal yang ketat yang mengatur kapan (waktu), di mana (tempat) perkuliahan diberikan dengan media yang tatap muka atau media lain yang dikelola oleh pengajar.

Untuk membantu mahasiswa dalam memahami bahan ajar, UT menyediakan bantuan, baik bantuan konsultasi maupun bantuan tutorial. Seperti halnya dengan bahan ajar, mahasiswa juga memiliki kebebasan dalam menentukan bentuk tutorial. UT memberikan bantuan tutorial melalui berbagai media. Mahasiswa memiliki kebebasan untuk menentukan jenis tutorial apa yang paling cocok baik dari segi waktu maupun biaya. Jika mahasiswa memiliki waktu untuk mengikuti tutorial tatap muka, UT menyediakan fasilitas tutorial tatap muka seperti ruangan dan tutor. Mahasiswa yang tidak memiliki waktu untuk mengikuti tutorial tatap muka, mereka dapat mengikuti tutorial dengan jalan media elektronik. Mahasiswa yang tidak dapat datang ke tempat tutorial tatap muka tetapi tidak mempunyai akses internet, mereka dapat mengikuti tutorial melalui surat yang dikirim melalui pos. Berbeda dengan perkuliahan dalam

- Pendidikan Jarak Jauh pada Tingkat Pendidikan Tinggi

tatap muka, tutorial sifatnya hanya bantuan bimbingan belajar. Oleh karena itu, dalam tutorial inisiatif harus datang dari mahasiswa. Dari segi waktu, tutorial juga berbeda dengan kuliah tatap muka. Dalam kuliah tatap muka, mahasiswa harus mengikuti kuliah satu semester penuh sebanyak (umumnya) 16 kali pertemuan. Sedangkan dalam sistem jarak jauh, tutorial hanya diberikan beberapa kali dalam satu semester. Tutorial lebih bersifat bimbingan, bagaimana mengatur strategi belajar, bagaimana memahami materi perkuliahan yang disajikan baik melalui media cetak maupun elektronik, bagaimana mempersiapkan ujian, dan sebagainya.

c. *Evaluasi*

Evaluasi merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan mahasiswa dalam belajar. Di UT evaluasi diberikan dalam bentuk tugas mandiri, ujian akhir semester, dan ujian komprehensif. Tugas mandiri sebenarnya semacam tugas tengah semester, yaitu bentuk soal/pertanyaan seputar bagian materi perkuliahan yang dikerjakan secara individual di rumah. Ujian akhir semester merupakan ujian terstruktur yang diberikan kepada setiap mahasiswa di dalam suatu ruangan tertentu. Sedangkan ujian komprehensif adalah ujian yang diberikan kepada mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di UT.

Dari segi institusi, evaluasi harus dilihat sebagai alat untuk melakukan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung-jawaban penyelenggaraan pendidikan. Melalui komponen-komponen yang terdapat dalam kerangka acuan jaminan kualitas dalam PTJJ, Pusat Penjaminan Kualitas secara reguler melakukan evaluasi untuk mengetahui apakah kerangka acuan tersebut dapat dikerjakan oleh setiap unit terkait. Jika kerangka acuan tersebut telah

dijalankan sebagaimana mestinya, maka UT dapat memberikan jaminan bahwa layanan UT telah memenuhi standar layanan PTJJ yang berlaku dalam lingkungan PTJJ di manapun, bukan hanya level Asia tetapi bahkan level dunia. Kerangka acuan tersebut disusun berdasarkan standar internasional dengan memperhatikan sifat dasar dan struktur PTJJ di manapun.

Sesuai sifat dasarnya, maka struktur PTJJ seperti UT harus dibangun dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- Kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan dalam program akademik, staf, jumlah mahasiswa, dan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi.
- Dapat melayani tujuan jangka pendek dan jangka panjang.
- Memungkinkan terjadinya proses komunikasi antarunit dan antara lembaga PTJJ dengan pihak luar.
- Adanya kejelasan peranan pimpinan pusat dan unit.

Agar struktur dasar tersebut dapat dijalankan, organisasi PTJJ harus didukung dengan staf yang profesional dalam bidang administrasi pendidikan, teknologi komunikasi dan informasi, produksi bahan ajar, pergudangan, distribusi bahan ajar, serta pengelolaan jaringan kerja sama (Suparman, 2004: 231).

2. Pembiayaan

Sebagai organisasi pendidikan, pengelolaan keuangan PTJJ harus memperhatikan sumber penerimaan dan pengeluaran. Sumber utama penerimaan adalah dari SPP mahasiswa dan penjualan bahan ajar, baik cetak maupun elektronik. Sumber lainnya antara lain adalah penjualan formulir dan produk PTJJ lainnya, serta penjualan jasa seperti jasa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. UT sebagai lembaga pendidikan milik pemerintah menerima anggaran

- Pendidikan Jarak Jauh pada Tingkat Pendidikan Tinggi

belanja, baik dalam bentuk dana rutin seperti gaji pegawai, perawatan bangunan, biaya perjalanan, maupun dana pengembangan.

Penerimaan tersebut harus dapat menutupi seluruh biaya operasional PTJJ. Biaya operasional itu meliputi biaya pengembangan bahan ajar baik cetak maupun elektronik, biaya penggantian bahan ajar, biaya distribusi bahan ajar, biaya pengolahan data mahasiswa, biaya tutorial, biaya pengembangan soal ujian dan biaya penyelenggaraan ujian.

Dalam perguruan tinggi tatap muka, penyelenggaraan mata kuliah tidak banyak memerlukan biaya. Untuk membuka mata kuliah tertentu, institusi perguruan tinggi tatap muka tinggal menunjuk dosen yang dianggap memiliki keahlian yang relevan. Tetapi membuka suatu mata kuliah dalam PTJJ memerlukan suatu proses kegiatan yang panjang serta memakan biaya yang tidak sedikit. Pembukaan mata kuliah diawali dengan penyusunan rancangan bahan ajar yang dituangkan dalam bentuk profil rancangan mata kuliah. Dalam profil rancangan mata kuliah tersebut termuat analisis instruksional, rancangan materi mata kuliah, garis besar program pembelajaran yang di antaranya berisikan kompetensi mata kuliah, tujuan pembelajaran, modus pembelajaran, dan materi pembelajaran (Yunus dan Pannen, 2004: 67). Jika penulis mata kuliah diambil dari luar, biasanya terlebih dahulu diawali dengan penataran penulisan rancangan bahan ajar, dan penataran penulisan bahan ajar. Penulisan bahan ajarnya sendiri umumnya memerlukan waktu rata-rata satu tahun. Dalam masa penulisan itu biasanya diadakan berbagai kegiatan seperti lokakarya penulisan bahan ajar, reviu materi, reviu instruksional, edit bahasa, penentuan kode mata kuliah, dan penentuan jadwal ujian agar tidak bentrok dengan ujian mata kuliah lainnya, dan memasukan dalam buku katalog sebagai mata kuliah yang dapat diregistrasi oleh

mahasiswa, pengetikan, pewajahan, penentuan tiras, penggandaan (pencetakan), dan pendistribusian ke daerah-daerah (UPBJJ) agar setiap mahasiswa yang melakukan registrasi dapat langsung memperoleh bahan ajarnya.

Saat bahan ajar masih dalam bentuk draf dikembangkan pula naskah media yang materinya mendukung, melengkapi, atau memperjelas naskah cetak melalui media lain seperti CD, video, atau audio. Pengembangan naskah untuk media noncetak ini tidak kalah rumitnya dengan pengembangan naskah untuk media cetak. Kegiatan ini dimulai dari penyusunan garis besar program media, penulisan naskah, revidu materi, revidu media, edit bahasa, survei lapangan untuk lokasi *shooting*, ijin lokasi, pengambilan gambar, edit, previu, dan sebagainya. Pengembangan naskah untuk media cetak dan noncetak dilakukan secara paralel, sehingga saat media cetak selesai digandakan, media noncetaknya juga selesai digandakan. Hal ini dilakukan karena pengembangan bahan ajar dalam PTJJ merupakan paket yang disebut paket bahan ajar multi media. Pengembangan naskah noncetak ini bahkan lebih rumit dari pengembangan bahan ajar cetak. Untuk program video atau pun audio misalnya, setelah naskah selesai, yang bentuknya berbeda dengan naskah cetak, dilakukan proses produksi yang memakan waktu lama. Semua kegiatan tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Meskipun proses belajar dalam PTJJ sangat bergantung pada kemandirian mahasiswa, penyelenggara PTJJ tetap harus memberikan fasilitas bimbingan belajar, baik dalam bentuk konseling pengelolaan waktu belajar, maupun dalam bentuk tutorial. Komponen biaya penyelenggaraan tutorial antara lain meliputi sewa ruangan, honor tutor, petugas kebersihan, dan panitia penyelenggara tutorial, serta pengadaan bahan-bahan tutorial. Komponen ini harus diperhitungkan dalam penentuan besarnya SPP.

- Pendidikan Jarak Jauh pada Tingkat Pendidikan Tinggi

Pengembangan soal ujian juga tidak kalah rumitnya dengan pengembangan bahan ajar. Seperti halnya pengembangan bahan ajar, pengembangan soal ujian dalam PTJJ juga melibatkan banyak orang dengan biaya yang tidak sedikit. Rangkaian kegiatan pengembangan soal yang harus dibiayai antara lain meliputi penulisan kisi-kisi soal, revidi kisi-kisi, penulisan soal, validasi soal, pengetikan, dan pengelolaan di bank soal. Sedangkan komponen yang harus dibiayai dalam penyelenggaraan ujian meliputi pencetakan naskah ujian, pengepakan naskah ujian, pendistribusian naskah ujian sampai ke lokasi-lokasi ujian, pencetakan daftar peserta ujian, pencetakan daftar lokasi ujian dan pengiriman ke tempat-tempat ujian, sewa ruang-ruang ujian, honor pengawas ujian, pengolahan hasil ujian, dan pengiriman hasil ujian ke setiap alamat mahasiswa.

Penyelenggaraan pendidikan sifatnya tidak komersial, tetapi besarnya penerimaan harus dapat menutupi seluruh rencana pengeluaran. Dengan adanya keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran, maka pengelolaan sebuah PTJJ dapat berjalan lancar. Lancarnya layanan terhadap mahasiswa dalam penyelenggaraan PTJJ akan memperlancar proses belajar-mengajar.

Pembukaan setiap mata kuliah harus diperhitungkan titik impasnya. Artinya, berapa target mahasiswa yang akan meregistrasi mata kuliah tersebut untuk mencapai titik impas dengan biaya produksi. Misalnya biaya produksi untuk satu mata kuliah yang besarnya 3 SKS mencapai Rp 50.000.000,-. Agar penyelenggara PTJJ tidak rugi, harus dihitung berapa mahasiswa yang harus meregistrasi mata kuliah tersebut agar biaya produksi tersebut kembali. Kalau biaya registrasi mata kuliah per SKS-nya Rp 11.000,- seperti UT, maka untuk menghitung titik impasnya adalah $\text{Rp } 50.000.000 : (\text{Rp } 11.000,- \times 3) =$ kurang lebih 1.500 mahasiswa. Artinya UT tidak akan rugi kalau satu mata kuliah diregistrasi minimal 1.500 mahasiswa.

Ilustrasi di atas memberikan gambaran bahwa manajemen PTJJ dalam beberapa hal lebih mendekati manajemen industri. Lembaga PTJJ seperti UT tidak mungkin menyelenggarakan mata kuliah jika mahasiswanya sedikit seperti pada lembaga pendidikan tatap muka. Pencetakan bahan ajar dengan hanya 100 eksemplar biayanya lebih mahal bila dibandingkan dengan biaya pencetakan bahan ajar yang oplahnya lebih dari 3000 eksemplar. Meskipun demikian, sebagai universitas negeri UT memiliki tanggung jawab dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, UT harus membuka program studi yang peminatnya tidak banyak, tetapi ilmunya harus terus dikembangkan seperti matematika, biologi, dan statistik. Program-program studi tersebut tidak banyak peminatnya tetapi ilmunya harus terus dikembangkan. Untuk pembiayaan program studi yang tidak banyak peminatnya tersebut dilakukan subsidi silang. Program studi yang banyak peminatnya mensubsidi pengembangan program studi yang tidak banyak peminatnya.

Dengan sistem perkuliahan yang bersifat massal, maka pengelolaan PTJJ menjadi lebih efisien bila dibandingkan dengan sistem tatap muka. Karena itu, biaya mahasiswa PTJJ umumnya lebih kecil bila dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh mahasiswa dari perguruan tinggi tatap muka, bila jumlah peserta PTJJ besar. Misalnya biaya perkuliahan di UKOU perbandingannya adalah 1 : 2 biaya perkuliahan di perguruan tinggi tatap muka di Inggris. *The University of the Air* di Jepang perbandingannya adalah 1:4, 1:3, dan 2:3 dari universitas nasional, universitas negeri, dan program harian universitas swasta. Di STOU Thailand perbandingannya sangat bervariasi, tetapi rata-rata biaya perkuliahan di STOU hanya sekitar 12.82% sampai 90.70% dari perguruan tinggi tatap muka. Biaya per lulusan di STOU berkisar antara 4.84% sampai 22.83%. Di Indonesia, biaya perkuliahan di UT hanya 1/6 dari biaya perkuliahan di PTN tatap muka (Suparman dan Zuhairi, 2004: 303-311). Perkecualian adalah *Universiti Terbuka Malaysia* yang

- Pendidikan Jarak Jauh pada Tingkat Pendidikan Tinggi

biayanya—kabarnya—mencapai empat kali lipat dari biaya perkuliahan di perguruan tinggi tatap muka.

3. Pengawasan

Untuk menjamin kualitas akademik dan layanan administrasi yang diberikan kepada mahasiswa, dalam lembaga PTJJ perlu ada kontrol kualitas. Kualitas akademik UT dikontrol oleh Senat Akademik. Sebagai badan normatif, Senat Akademik mengontrol kualitas dan layanan akademik. Di samping itu, UT juga memiliki Pusat Jaminan Kualitas yang mengontrol apakah semua unit di UT dapat bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pengawasan tersebut diarahkan pada terjadinya penyelenggaraan pendidikan secara efektif dan efisien. Untuk menjamin setiap unit menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka pemberian layanan yang berkualitas, baik layanan administrasi maupun layanan akademik, UT menyusun kerangka acuan jaminan kualitas yang dibagi dalam sembilan komponen. Komponen tersebut meliputi kebijakan dan perencanaan, pengadaan dan pengembangan sumber daya manusia, manajemen dan administrasi, mahasiswa, perencanaan dan pengembangan program, perencanaan dan pengembangan mata kuliah, bantuan belajar bagi mahasiswa, pelayanan mahasiswa, dan media pembelajaran. Kesembilan komponen kerangka acuan tersebut dikembangkan oleh *Asian Association of Open Universities (AAOU)*, sebuah organisasi perguruan tinggi yang menyelenggarakan pembelajarannya melalui sistem jarak jauh. AAOU mengembangkan kerangka acuan tersebut dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan jarak jauh yang diselenggarakan oleh anggotanya, termasuk UT. Dengan melaksanakan kerangka acuan yang dikembangkan AAOU, kualitas layanan UT diharapkan dapat memenuhi standar internasional.

Sebagai institusi pemerintah yang bernaung di bawah Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), UT berada di bawah pengawasan internal Depdiknas, yaitu Inspektorat Jenderal dan pengawas eksternal, yaitu BPK dan BPKP. Pengawasan yang dilakukan baik oleh Inspektorat Jenderal Depdiknas, BPKP, maupun BPK lebih banyak ditekankan pada bidang administrasi, keorganisasian, dan keuangan.

G. Pendirian dan Akreditasi untuk Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi Jarak Jauh

1. Pendirian Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi Jarak Jauh

Penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh (PTJJ) secara umum didasarkan atas dua isu besar, yaitu tuntutan pemerataan kesempatan belajar dan terbatasnya daya jangkau perguruan tinggi tatap muka. Pendidikan bukan lagi menjadi sesuatu yang elitis tetapi menjadi lebih egaliter. Bahkan, dalam konstitusi negara Indonesia, pendidikan menjadi hak setiap warga negara sehingga pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan bagi setiap warga negara yang berkeinginan dan mempunyai kemampuan untuk mengikuti pendidikan. Di sisi lain, daya jangkau lembaga pendidikan dengan sistem konvensional sulit menjangkau dan dijangkau oleh orang yang memiliki kemauan dan kemampuan tersebut. Ada orang yang memiliki kemauan dan kemampuan intelektual yang tinggi tetapi tidak memiliki kesempatan untuk hadir kuliah tatap muka setiap hari di kampus-kampus konvensional, yang umumnya berlokasi di kota-kota besar.

- Pendidikan Jarak Jauh pada Tingkat Pendidikan Tinggi

Perguruan tinggi tatap muka memiliki keterbatasan daya jangkauan. Sementara itu banyak calon mahasiswa yang keberadaannya di luar jangkauan. Dalam sejarah, lahirnya PTJJ umumnya dilatarbelakangi oleh adanya perluasan daya jangkauan perguruan tinggi tatap muka. Contohnya adalah *University of London* di Inggris. Universitas ini didirikan pada tahun 1830 sebagai institusi yang melaksanakan pengujian dan pemberian gelar, sementara proses pembelajaran dilaksanakan oleh institusi lainnya. Mahasiswa yang berada di wilayah Inggris Raya maupun di daerah-daerah koloninya dapat menempuh ujian untuk mendapatkan gelar dari *University of London*. Dengan cara ini *University of London* dapat menjangkau mahasiswa yang tersebar di berbagai penjuru, baik di wilayah kerajaan Inggris maupun di daerah-daerah koloninya. Pada perempat terakhir abad ke-19, *University of Chicago* dan *Illinois Wesleyan College* di Amerika Serikat memperkenalkan program ekstensi sebagai suatu cara untuk menjangkau warga masyarakat yang tidak dapat mengikuti program tatap muka di kampus universitas yang bersangkutan. Pada tahun 1950-an *University of New England*, Australia, didirikan dengan misi menyelenggarakan program pendidikan tatap muka dan jarak jauh sekaligus.

Di Indonesia, berdirinya Universitas Terbuka tahun 1984 dilatarbelakangi oleh adanya isu-isu besar dalam dunia pendidikan, yaitu rendahnya daya tampung perguruan tinggi konvensional, dan rendahnya mutu pendidikan. Ledakan lulusan SLTA pada akhir Pelita IV yang besarnya mencapai 1,5 juta lulusan sementara itu daya tampung perguruan tinggi negeri yang ada hanya sekitar 400 ribu. Dengan kondisi tersebut diperkirakan ada sekitar 700 ribu lulusan SLTA yang tidak mendapatkan kesempatan belajar di perguruan tinggi. Untuk dapat menampung lulusan SLTA itu perlu perencanaan daya tampung perguruan tinggi sampai 1,5 juta mahasiswa, dengan asumsi bahwa semua lulusan SLTA ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Penambahan daya tampung yang

besar itu, di samping memerlukan ruangan yang cukup besar dengan dana yang tidak sedikit, akan menimbulkan masalah baru, yaitu penambahan tenaga pengajar yang diperkirakan akan mencapai 80.000 – 90.000 orang. Meskipun dana yang diperlukan untuk mengembangkan dapat disediakan, penambahan 80.000 dosen sampai akhir Pelita IV (selama 5 tahun) tidak mungkin dapat dicapai (Direktorat Pembinaan Sarana Akademik, 1982: 6).

Masalah lain adalah rendahnya mutu pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pada akhir dasawarsa tahun 1970-an banyak guru SLTP dan SLTA yang dididik secara darurat dalam bentuk program singkat, sehingga belum memenuhi standar kemampuan yang disyaratkan untuk mengajar di sekolah-sekolah pada tingkat pendidikan tersebut. Upaya untuk meningkatkan pendidikan guru (D2 untuk SLTP dan S1 untuk SLTA) setelah mereka bekerja ternyata tidak mudah, karena kendala biaya dan waktu. Mereka harus meninggalkan tugas mengajarnya. Pada tahun 1981, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melaksanakan program pendidikan jarak jauh PGSLP D2 bagi guru sekolah lanjutan tingkat pertama (SLP) yang telah memiliki ijazah D1 dan PGSLP. Program ini diberi nama Program Belajar Jarak Jauh Proyek Pengembangan Pendidikan Diploma Kependidikan. Proyek ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Untuk menyelenggarakan proses pendidikannya, dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Belajar Jarak Jauh di 12 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah memutuskan membuka sebuah universitas negeri yang sifatnya terbuka dengan sistem belajar jarak jauh. Keputusan itu diambil karena beberapa pertimbangan: Pertama, pendidikan jarak jauh tidak memerlukan dosen tetap dengan jumlah yang banyak. Kedua, sumber daya pendidikan tinggi yang ada dapat dimanfaatkan untuk membantu penyelenggaraan sistem belajar jarak jauh tanpa mengganggu tugas

- Pendidikan Jarak Jauh pada Tingkat Pendidikan Tinggi

pokok mereka. Ketiga, pendidikan jarak jauh tidak memerlukan banyak ruangan. Keempat, biaya pendidikan relatif lebih murah bila dibandingkan dengan pendidikan sistem tatap muka. Kelima, pendidikan jarak jauh dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi pendidikan. Melalui teknologi pendidikan penyampaian pendidikan dapat dirancang dengan sesedikit mungkin sumber daya manusia, tetapi dapat menimbulkan terjadinya suasana dan kemauan belajar mahasiswa sehingga dapat mengakibatkan pula terjadinya suatu perubahan perilaku pada mahasiswa. Dengan demikian, melalui pemanfaatan media pendidikan, sistem belajar jarak jauh tidak berbeda kualitasnya dengan sistem belajar tatap muka. Kelebihannya, dengan menggunakan media cetak maupun elektronik (audio/video), sistem belajar jarak jauh dapat menjangkau lebih banyak mahasiswa dengan melibatkan staf pengajar yang jauh lebih sedikit, karena dimensi ruang dan waktu tidak lagi menjadi penentu.

Atas dasar pertimbangan itu, pada akhir tahun 1981 pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan mendirikan sebuah universitas yang nonkonvensional dengan sistem terbuka yang diberi nama Universitas Terbuka Indonesia (*Indonesian Open University-IOU*) yang kemudian berubah namanya menjadi Universitas Terbuka (UT). Meskipun gagasan untuk mendirikan UT sudah dimulai sejak 1981, panitia persiapan berdirinya UT baru secara efektif bekerja pada Oktober 1983. Hal itu disebabkan adanya keraguan pada level pengambil keputusan di lingkungan Depdikbud (kini Depdiknas). Setelah melalui berbagai kendala, akhirnya pada 4 September 1984 UT resmi berdiri yang ditandai dengan kuliah perdana yang disampaikan melalui TVRI dan RRI. Dengan berdirinya UT, maka Program Belajar Jarak Jauh Proyek Pengembangan Pendidikan Diploma Kependidikan dan program Akta Mengajar V, yang semula dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) diserahkan kepada UT.

Pada awalnya, PTJJ di Indonesia dan di berbagai negara lain masih diragukan keberhasilannya oleh berbagai kalangan. Tetapi dalam perkembangannya, PTJJ mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan yang pesat itu telah membuat berbagai kalangan memandang PTJJ sebagai alternatif, terutama bagi kalangan yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka.

Smith (1986) sebagaimana dikutip Suparman dan Zuhairi menyebutkan tiga faktor yang mendorong penyelenggaraan pendidikan jarak jauh (PJJ), yaitu:

1. Laju pertumbuhan teknologi komunikasi seperti radio, televisi, telepon, dan komputer yang sangat cepat.
2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat cepat.
3. Kenaikan biaya pendidikan pada sistem pendidikan tatap muka.

Dalam bentuknya yang paling dasar, PTJJ diselenggarakan dengan sistem korespondensi. Sistem pembelajaran dilakukan melalui surat-menyurat antara penyelenggara pendidikan dengan peserta didik. *University of South Africa* (UNISA) adalah salah satu pelopor dalam penyelenggaraan PTJJ dengan sistem korespondensi. Universitas ini didirikan pada tahun 1946 di Afrika Selatan sebagai universitas terbuka tertua di dunia berbasis korespondensi.

Kemajuan teknologi komunikasi memberikan pengaruh yang sangat positif terhadap perkembangan PTJJ. Dengan perkembangan teknologi ini, maka sistem pembelajaran dalam PTJJ tidak lagi berbasis korespondensi. Kemajuan teknologi komunikasi telah mendorong dikembangkannya berbagai media pembelajaran (multi media) dalam PTJJ *United Kingdom Open University* (UKOU) di Inggris dalam penyelenggaraan PTJJ melalui multi media. UKOU yang didirikan tahun 1969 merupakan universitas terbuka modern pertama yang perkuliahannya menggunakan bahan ajar multi

- Pendidikan Jarak Jauh pada Tingkat Pendidikan Tinggi

media, baik media cetak maupun noncetak. UKOU banyak bekerja sama dengan *British Broadcasting Corporation* (BBC) dalam produksi dan penyiaran program audiovisual untuk perkuliahan jarak jauh (Zuhairi, 2005).

Di Indonesia, sejak berdiri UT telah mengembangkan bahan ajarnya dengan sistem multi media. Bahan ajar UT tidak hanya dikembangkan dengan menggunakan media cetak, tetapi juga non cetak seperti audio/video. Di samping itu, UT juga bekerja sama dengan TVRI, kemudian TPI dan kini dengan *Quick Channel* dan televisi pendidikan untuk menayangkan materi perkuliahannya melalui televisi. UT juga bekerja sama dengan RRI dan radio-radio lokal dalam rangka pemberian perkuliahan melalui radio. Di samping itu, sebagian bahan ajar UT juga disampaikan melalui internet. Melalui internet, mahasiswa UT dapat memperoleh bahan ajar suplemen sebagai pengayaan materi perkuliahan yang disampaikan melalui media cetak dan audio/video (kini juga dalam bentuk CD/DVD). Saat ini UT sedang mengembangkan bahan ajar lengkap yang dapat diperoleh oleh mahasiswa baik melalui CD maupun internet.

Pemanfaatan media teknologi informasi dan komunikasi dalam PTJJ kini telah sampai pada generasi kelima. Dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi generasi kelima ini, pembelajaran dapat disampaikan melalui jaringan komputer (internet) secara interaktif. Teknologi ini digunakan oleh UT untuk mengembangkan registrasi *online*, tutorial *online*, ujian *online* (sedang disiapkan) dan bimbingan belajar *online*.

Tuntutan pembangunan yang begitu kuat telah mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu-ilmu terapan. Ilmu-ilmu tersebut diperlukan untuk memenuhi berbagai tuntutan pembangunan. Karena perkembangan pembangunan berkembang begitu pesat, maka orang pun sebagai pelaksana pembangunan

dituntut untuk terus meningkatkan pengetahuannya. Di samping itu, ada keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi. Ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh perguruan tinggi tatap muka memiliki keterbatasan daya jangkau, terutama daya jangkau secara ekonomis dan geografis. Pendidikan tatap muka membutuhkan infrastruktur yang tidak murah. Ruang-ruang kuliah, fasilitas laboratorium, dan perpustakaan memerlukan biaya yang besar. Begitu juga dengan pengembangan SDM-nya. Biaya operasional tersebut sebagian besar diambil dari mahasiswa yang dampaknya adalah pada mahalannya biaya kuliah yang harus ditanggung oleh mahasiswa. Mahalnya biaya operasional menyebabkan tidak semua orang dapat melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi tatap muka. Di samping itu, pendidikan tinggi tatap muka mempunyai keterbatasan akses. Mereka hanya dapat melayani mahasiswa yang memiliki waktu untuk hadir ke kampus sesuai jadwal perkuliahan yang telah ditentukan. Perguruan tinggi tatap muka tidak dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas, baik mereka yang lokasinya memang jauh dari kampus maupun mereka yang karena sesuatu hal, misalnya karena pekerjaannya, tidak dapat hadir ke kampus. Keterbatasan-keterbatasan perguruan tinggi tatap muka itu telah mendorong berkembang pesatnya PTJJ.

Karena sifatnya terbuka, PTJJ dapat dikembangkan pada hampir semua jenis dan jenjang pendidikan. PTJJ dapat dibuka dalam bentuk universitas, sekolah tinggi, institut, pendidikan vokasi, maupun profesional. Perkuliahan dalam PTJJ dapat dikembangkan dalam bentuk paket-paket yang dapat diambil oleh semua orang yang ingin meningkatkan pengetahuannya dalam bidang-bidang tertentu selain mata kuliah utuh yang harus diambil oleh mahasiswa untuk jenjang akademik (S1, S2, dan S3), dan jenjang profesional (D1, D2, D3, dan D4).

- Pendidikan Jarak Jauh pada Tingkat Pendidikan Tinggi

2. Akreditasi Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi Jarak Jauh

Mutu pendidikan merupakan masalah yang secara serius mendapat perhatian dari pemerintah. Seperti halnya pada pendidikan dasar dan menengah, mutu pendidikan tinggi di Indonesia secara umum dianggap rendah bila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Di sisi lain, pendidikan di Indonesia sudah menjadi lembaga komersial. Tidak sedikit lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikannya hanya semata-mata untuk kepentingan komersial dengan mengabaikan mutu. Bila hal ini semakin berkembang, maka masyarakat yang akan dirugikan, baik masyarakat peserta didik maupun pengguna lulusan lembaga pendidikan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional (BAN) yang bertugas melakukan penilaian mutu dan efisiensi perguruan tinggi. Masalah yang dinilai meliputi kurikulum, mutu dan jumlah tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, tata laksana administrasi akademik, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Setelah melakukan penilaian pada sebuah lembaga penyelenggara pendidikan tinggi, BAN kemudian memberikan akreditasi pada level program studi. Akreditasi BAN atas sebuah perguruan tinggi ini kemudian dipublikasikan sehingga masyarakat mengetahui status program studi dari setiap lembaga penyelenggara pendidikan tinggi.

Secara garis besar, akreditasi pada perguruan tinggi tatap muka dilakukan pada kurikulum, kemampuan dosen, dan ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan. Hal itu berbeda dengan pada PTJJ seperti UT. Karena UT menyelenggarakan pendidikannya dengan sistem jarak jauh, maka ada komponen lain yang juga perlu dinilai, yaitu

media komunikasi dan pembelajaran, dan distribusi bahan ajar. Dosen bagi perguruan tinggi seperti UT adalah penulis bahan ajar dan soal-soal ujian. Penyampaian perkuliahan di UT tidak dapat dilakukan secara langsung seperti halnya pada perguruan tinggi tatap muka, tetapi melalui perantara media, baik media cetak maupun noncetak seperti kaset, CD, DVD, CAI, dan internet. Materi perkuliahan yang baik mungkin tidak dapat diterima mahasiswa jika penggunaan media pembelajarannya tidak tepat. Materi yang baik dengan pilihan media yang tepat juga belum tentu dapat diterima oleh mahasiswa jika disampaikan dengan bahasa yang tidak baik. Dengan melihat kenyataan ini, penilaian kualitas tenaga pengajar/dosen dalam lembaga pendidikan jarak jauh tidak hanya didasarkan pada gelar atau tingkat pendidikan tertentu yang telah ditempuh oleh seorang dosen, tetapi juga pada kemampuannya dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran. Selain dituntut memiliki kemampuan menguasai materi pembelajaran, dosen/pengajar di UT juga dituntut memiliki kemampuan dalam bidang bahasa dan penggunaan media.

Masalah lain adalah tentang tugas dan fungsi program studi. Dalam pendidikan tatap muka program studi memiliki tugas dan fungsi merencanakan, mengendalikan, dan menyelenggarakan perkuliahan dengan sarana dan prasarana (SDM, ruang kuliah, perpustakaan, dan laboratorium) yang memadai, dan melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam pendidikan jarak jauh, program studi juga mempunyai tugas mengadakan bahan ajar (dari proses penulisan sampai pencetakan) dengan berbagai media, mendistribusikan bahan ajar, memberikan bantuan belajar (tutorial dan konseling), mengadakan dan mendistribusikan soal ujian, dan melaksanakan ujian

Melihat gambaran tersebut penilaian atas kelayakan sebuah program studi pada lembaga pendidikan jarak jauh lebih rumit bila

- Pendidikan Jarak Jauh pada Tingkat Pendidikan Tinggi

dibandingkan dengan program studi pada lembaga pendidikan tinggi tatap muka. Dengan demikian, perlu ada standar-standar tertentu untuk melakukan penilaian kelayakan sebuah program studi pada lembaga pendidikan tinggi jarak jauh.

Pelaksanaan akreditasi UT agak rumit karena standar bakunya belum ada. Hal ini karena UT adalah satu-satunya lembaga pendidikan negeri yang menyelenggarakan pendidikannya dengan sistem jarak jauh di Indonesia.

Standar baku UT harus didasarkan pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana lembaga sejenis yang ada di berbagai negara. Untuk itu, UT menyusun kerangka acuan jaminan kualitas yang dikembangkan oleh AAOU: Kerangka acuan ini yang akan dijadikan dasar penilaian kelayakan lembaga pendidikan tinggi jarak jauh. Dengan kerangka acuan tersebut, maka akreditasi UT tidak hanya dilakukan oleh BAN tetapi dapat dilakukan oleh lembaga internasional dari organisasi penyelenggara pendidikan jarak jauh seperti AAOU dan *International Council for Distance Education (ICDE)*. ICDE adalah organisasi pendidikan jarak jauh di dunia yang berpusat di Norwegia. Sedangkan AAOU adalah organisasi lembaga penyelenggara pendidikan tinggi jarak jauh untuk tingkat Asia. Kedua organisasi ini setiap tahun menyelenggarakan konferensi yang diikuti oleh seluruh anggota dan partisipan lainnya. ICDE beranggotakan 142 lembaga penyelenggara pendidikan jarak jauh. Sejak tahun 1903 ICDE mendirikan ICDE Standard Agency (ISA) yang bertugas melakukan penilaian kualitas PTJJ.

Untuk menilai kualitas layanannya lembaga penyelenggara pendidikan jarak jauh memiliki lembaga/pusat jaminan kualitas. *SukhothaiThamathirat Open University*, Thailand misalnya memiliki pusat jaminan kualitas di dalam struktur organisasinya. Demikian pula UT. Sejak tahun 2004 UT telah membentuk Pusat Penjaminan Kualitas dalam rangka meningkatkan kualitas layanan UT. □

Daftar Pustaka

- Daniel, John dan Wayne Mackintosh. 2003. Leading ODL Futures in the Eternal Triangle: The Mega-University Response to the Greatest Moral Challenge of Our Age; dalam Michael Graham Moore dan William G. Anderson (Ed). *Handbook of Distance Education*.
- Daniel, John. 1996. *Mega-Universities and Knowledge Media. Technology Strategies for Higher Education*. London: Kogan Page, 1996.
- Deakin University, 2005. Tersedia dalam <http://www.deakin.edu.au>, 8 Agustus 2005.
- Direktorat Sarana Akademis (1982). "Konsep Rancangan Universitas Terbuka: (Draft tidak diterbitkan). Jakarta: Direktorat Sarana Akademis, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Jegede, O and Shive, G. (2001), Open and distance education in the Asia Pacific Region, Hong Kong: Open University of Hong Kong Press.
- Moore, M.G. and Kearsley, G. (1996). *Distance Education: A system view*. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company.
- Moore, Michael Graham dan Greg Kearsley. 1996. *Distance Education. A Systems View*. London: Wadsworth Publishing Company, 1996.
- Open University Malaysia, 2003. *Prospectus 2002/2003*. Universiti Terbuka Malaysia, 2002.
- OUA. 2005. *Open Universities Australia – Company Profile*. Tersedia dalam OU and ICT, 2000. Facts and Figures; dalam *ALT Conference, 2000*. 3 September 2000. <http://www.open.edu.au>, 7 Agustus 2005

- Pendidikan Jarak Jauh pada Tingkat Pendidikan Tinggi

- Pannen, P. dan Sehar, R. (2004). *Apa yang perlu Anda tahu tentang Pendidikan Jarak Jauh*. Jakarta: Depdiknas.
- Putra, A. Agung M. Sastrawan (2004). "Perkembangan Distribusi Bahan Ajar." Dalam Effendi Wahyono dkk (Ed.). *20 Tahun Universitas Terbuka: Dulu, Kini, dan Esok*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, hal.349-364
- Rumble, Greville. 2003. Modelling the Costs and Economics of Distance Education; dalam Michael Graham Moore dan William G. Anderson (Ed). *Handbook of Distance Education*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. 2003.
- Soleiman, Nuraeni dan Sri Listyarini (2004). "Pengelolaan Distribusi Bahan Ajar di Universitas Terbuka". Dalam Asandhimitra dkk (Ed.). *Pendidikan Tinggi Jarak Jauh*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, hal. 631-662
- Suparman, Atwi dan Aminudin Zuhairi (2004). *Pendidikan Jarak Jauh: Teori dan Praktek*. Jakarta: Pusat Penerbitan Bahan Pustaka
- Suparman, Atwi (2004). "Universitas Terbuka Menuju Pusat Unggulan". Dalam Effendi Wahyono dkk (Ed.). *20 Tahun Universitas Terbuka: Dulu, Kini, dan Esok*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- The Open University, 2000. *Plans for Change 2000 – 2010*. Dokumen yang tidak dipublikasi, 2000.
- USM. 2005. *Universiti Sains Malaysia*. Tersedia dalam <http://www.usm.my/> 8 Agustus 2005.
- White, Vernon. 1986. *Distance Education in Australia*. A Country Paper Presented at Regional Seminar on Distance Education, Bangkok.

- Yunus, M. dan Paulina Pannen (2004). "Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Jarak Jauh". Dalam Asandhimitra dkk (Ed.). *Pendidikan Tinggi Jarak Jauh*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, hal. 45-73.
- Yunus, M. (2004). Perkembangan Sistem Layanan Bantuan Belajar. Dalam Effendi Wahyono dkk (eds.), *Universitas Terbuka: Dulu, Kini dan Esok* (hal 365-79). Tangerang: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Zainul, Asmawi. (2004). *Mengetahui Apa yang Mahasiswa Tahu*. Jakarta: Depdiknas.
- Zuhairi, Aminudin (2004). "Perkembangan dan Kontribusi Pendidikan Tinggi Jarak Jauh dalam Upaya Global Membangun Masyarakat Berbasis Pengetahuan". dalam Effendi Wahyono dkk (Ed.). *20 Tahun Universitas Terbuka: Dulu, Kini, dan Esok*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, hal.3-61

Bab IV

Pendidikan Nonformal Jarak Jauh

Asnah Said

A. Latar Belakang

Indonesia telah menetapkan bahwa seluruh penduduk yang berusia 7-15 tahun memperoleh pendidikan dasar pada tahun 2008/09. Pendidikan dasar 9 tahun, diselenggarakan selama 6 tahun di Sekolah Dasar (SD) dan 3 tahun di Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat. Di dalam amandemen UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) ditulis, "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan" Ini lebih dipertegas lagi di dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 5 Ayat (1) ditulis, "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu" Departemen Pendidikan Nasional mengemban amanat konstitusi tersebut untuk mengatur layanan pendidikan yang bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun secara bermutu, pemerintah wajib menyediakan pendidikan dasar dan masyarakat wajib mengikutinya. Kenyataannya masih banyak anak usia 7-12 tahun yang masih belum beruntung untuk mendapatkan pendidikan tersebut.

Data Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen pendidikan Nasional (Balitbang) tahun 2004, bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa jumlah penduduk

Indonesia yang berusia 10 tahun ke atas adalah 176, 027, 800. Dari jumlah tersebut 72, 83% (128, 201, 046 orang) tidak bersekolah lagi, baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Oleh karena itu, Departemen Pendidikan Nasional, melalui Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda membuat kebijakan publik menyangkut kebutuhan dasar segenap warga masyarakat dengan cara mengadakan program belajar setara SD/MI/ sederajat bagi anak-anak yang kurang beruntung tersebut yaitu, program Paket A setara SD/MI. Menurut Jalal (2005) paket A berperan dalam memberikan layanan terutama bagi anak putus sekolah kelas 1V,V, dan VI, yang pada tahun ajaran 2004/2005 berada sekitar 320 ribu lebih. Penentuan sasaran program Paket A untuk tahun anggaran 2005 adalah 77. 326 atau sekitar 23% dari jumlah putus sekolah pada tahun ajaran 2004/2005. Pada tahun 2005, program Paket A berjumlah 82, 290 orang. Program pemerintah Wajar 9 tahun menghendaki bahwa semua anak usia 7-12 tahun memperoleh pendidikan SD/MI /setara sampai tamat.

Karena adanya kepercayaan pemerintah dan pengakuan masyarakat terhadap pendidikan kesetaraan, setiap tahun sasaran layanan program Paket A mengalami peningkatan. Kesuksesan ini membawa konsekuensi pada peningkatan kebutuhan layanan pendidikan SMP/MTs sederajat. Menurut Jalal (2005), pada tahun 2004/2005 anak yang putus SMP/MTs berjumlah 263, 793 orang, sedangkan anak yang lulus SD/MI tidak melanjutkan ke SMP/MTs berjumlah 495. 261. Sekitar 760 ribu lebih anak usia sekolah merupakan sasaran program Paket B. Pelayanan untuk penuntasan wajar 9 tahun pada tahun anggaran 2005 adalah sebanyak 416, 495 orang atau sekitar 65% dari jumlah sasaran Paket B. usia sekolah. Seluruh anak usia tersebut wajib memperoleh layanan pendidikan SMP/MTs dan yang sederajat. Untuk memenuhi kewajiban tersebut,

- Pendidikan Non Formal Jarak Jauh

pemerintah menyelenggarakan pola layanan alternatif pendidikan dasar yang disebut program Paket B.

Jumlah warga belajar yang memerlukan layanan pendidikan sekolah menengah akan meningkat secara pesat. Di samping itu, perlu diperluas akses pendidikan menengah bagi peserta didik putus SMA/MA/SMK, dan lulusan SMP/MTs/Paket B yang tidak melanjutkan. Untuk melayani tuntutan masyarakat tersebut, pemerintah perlu mengantisipasi keadaan ini. Oleh karena itu, pemerintah menyelenggarakan pola layanan pendidikan alternatif yang disebut program Paket C sebagai pengganti sekolah formal. Walaupun program Paket C belum dimasukkan dalam kategori wajib belajar, tetapi program ini dibutuhkan oleh masyarakat. Menurut Jalal (2005), pada tahun 2004/2005 terdapat 172, 982 anak putus SMA dan MA. Pada tahun yang sama anak yang lulus SMP/MTs tidak melanjutkan sekolah berjumlah 745, 298 orang. Artinya, terdapat 918, 280 anak usia 16-18 tahun yang memerlukan layanan Paket C di samping usia dewasa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ada tiga jalur pendidikan yang kita kenal, yaitu jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan alternatif yang memberikan berbagai pelayanan pendidikan untuk semua agar setiap warga negara memperoleh pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Yang termasuk dalam pendidikan nonformal adalah pendidikan anak usia dini (PAUD). Dalam pasal 1 ayat (14) disebutkan bahwa PAUD adalah " suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut “ Dunia internasional pun sudah sepakat memberikan perhatian terhadap masalah pendidikan pada anak-anak usia dini sebagaimana dicantumkan dalam komitmen *Education for All* di Jomtien, Thailand, (1990) dan komitmen *World Fit for Children* di New York, (2002).

Pendidikan anak usia dini diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal atau informal. Pendidikan formal anak usia dini meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan nonformal anak usia dini mencakup Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan informal anak usia dini berupa pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan dan masyarakat.

B. Sistem Pendidikan Nonformal Jarak Jauh

Pada dasarnya Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam pelaksanaannya menggunakan Sistem Pendidikan Jarak Jauh (SPJJ). Perbedaan kedua program ini terletak pada siswanya. Siswa Pendidikan Kesetaraan belajar secara mandiri dibantu oleh tutor dan menggunakan bahan ajar modul. Sedangkan untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) proses bimbingan dan belajar diselenggarakan secara tatap muka oleh para guru. Para guru, pendidik, orang tua murid dan para orang dewasa lainnya memberikan bimbingan kepada anak usia dini melalui bahan ajar modul yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

Para ahli mengajukan berbagai pendapat dan konsep tentang Sistem Pendidikan Jarak Jauh (SPJJ) yang satu sama lain berbeda menurut sudut pandang atau perspektif masing-masing. Beberapa

- Pendidikan Non Formal Jarak Jauh

pendapat dari para ahli akan menjelaskan Sistem Pendidikan Jarak Jauh (SPJJ) seperti berikut ini.

1. SPJJ adalah suatu bentuk pembelajaran mandiri yang terorganisasi secara sistematis, di mana konseling, penyajian materi pembelajaran, dan penyeliaan serta pemantauan keberhasilan siswa dilakukan oleh sekelompok tenaga pengajar yang memiliki tanggung jawab saling berbeda (Dohmen, 1967).
2. SPJJ adalah sistem pendidikan yang tidak mempersyaratkan adanya tenaga pengajar di tempat seseorang belajar, namun dimungkinkan adanya pertemuan-pertemuan antara tenaga pengajar dan siswa pada waktu tertentu (French Law, 1971).
3. SPJJ adalah suatu transaksi antara siswa dan pengajar dalam suatu lingkungan yang terpisah. Proses pengajaran terjadi secara terpisah dari proses belajar. Keterpisahan ini menyebabkan terjadinya perilaku siswa dan pengajar yang spesifik, sehingga komunikasi antara pengajar dengan para siswa harus difasilitasi oleh media cetak, dan media-media lainnya (Moore, 1973).
4. SPJJ memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. Keterpisahan antara siswa dan pengajar
 - b. Penggunaan bahan belajar, sehingga siswa dapat belajar sendiri di rumah
 - c. Menggunakan media pembelajaran, sehingga mempersatukan pengajar dan siswa dalam suatu interaksi pembelajaran
 - d. Pertemuan sekali-kali untuk keperluan pembelajaran, sehingga adanya komunikasi dua arah (Keegan, 1980).
5. SPJJ didasarkan pada keterpisahan antara siswa dan pengajar dalam ruang dan waktu, pemanfaatan (paket) bahan belajar yang dirancang diproduksi secara sistematis, adanya komunikasi tidak terus-menerus (*non continuous*) antara siswa, tutor, dan organisasi pendidikan melalui beragam media, serta adanya

penyeliaan dan pemantauan yang intensif dari suatu organisasi pendidikan (Pannen, 1999).

6. SPJJ merupakan proses pendidikan yang bagian penting pengajarannya disampaikan oleh seseorang yang berada di tempat terpisah dan pada waktu yang mungkin berbeda dengan tempat dan waktu pelajar. Hanya, ketidaktergantungan akan tempat dan waktu ini akan memerlukan penggunaan sederet media instruksional, yang berfungsi untuk mengurangi peranan pengajaran tatap muka konvensional (Suparman, 2004).

Dari penjelasan konsep SPJJ, tersebut terdapat persamaan dan perbedaan pendapat dari para ahli tersebut. Pada umumnya para ahli tersebut menyatakan pendapat yang sama tentang keterpisahan antara siswa dan pengajar, penggunaan media pembelajaran, pembelajaran mandiri, dan paket bahan belajar. Menurut Jonassen, (1996), SPJJ memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sistem pendidikan formal yang terstruktur (konvensional). Mengacu pada deskripsi teoretis tentang SPJJ dapat disimpulkan bahwa karakteristik pendidikan jarak jauh tersebut berfokus pada beberapa hal sebagai berikut:

Karakteristik pertama, yang membedakan SPJJ dengan sistem pendidikan formal yang terstruktur (konvensional) adalah keterpisahan yang bersifat sementara antara pengajar dengan peserta didik selama proses pembelajaran. Proses pembelajaran tidak terjadi di ruang kelas, secara fisik terpisah antara peserta didik dan pengajar atau adanya jarak antara peserta didik dan guru. Di dalam Pendidikan Kesetaraan, program Paket A, B dan C proses pembelajarannya tanpa harus melalui tatap muka secara teratur karena kondisi geografis, sosial ekonomi, dan situasi masyarakat. Menurut Acuan Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, B, dan C (2004) Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, B, dan C lebih dapat melayani masyarakat yang kurang beruntung yang

- Pendidikan Non Formal Jarak Jauh

selama ini terpinggirkan, terabaikan, atau yang merasa tidak sesuai dengan sistem pendidikan formal yang terstruktur, yang lebih kaku dan dibatasi ruang kelas dan waktu. Pada umumnya warga kelompok usia sekolah (7-15) ini mempunyai kendala untuk mengikuti pendidikan, yaitu kendala ekonomi dan jarak yang jauh. Dengan demikian, perlu ada pendidikan alternatif yang diberikan kepada warga belajar dengan memperhatikan karakteristik dan kendala yang dihadapi warga belajar. Kendala yang dihadapi warga belajar adalah masalah biaya dan ketidakmampuan warga belajar mengatasi jarak untuk mengikuti pendidikan. Di samping itu, dapat ditafsirkan juga warga belajar dari golongan ekonomi lemah masih banyak yang tidak bersekolah. Sebahagian dari mereka membantu orang tua mencari nafkah secara mandiri, atau membantu orang tua dengan bekerja pada pihak lain. Agar mereka yang bekerja dapat memperoleh layanan pendidikan maka layanan tersebut perlu diberikan di luar jam kerja mereka yang beragam. Agar jarak tidak menjadi kendala, maka pembelajaran diselenggarakan pada lokasi yang berdekatan dengan tempat tinggal warga belajar.

Karakteristik kedua, adalah dalam penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran telah digunakan untuk berbagai kegiatan dalam proses pembelajaran. Pada dasarnya proses pembelajaran adalah proses komunikasi. Dalam proses komunikasi, guru berperan sebagai sumber pesan (*communicator*), dan peserta didik berperan sebagai penerima pesan (*communican*). Agar pesan tersebut dapat diterima secara efektif oleh peserta didik diperlukan sarana penyalur pesan, yaitu media pembelajaran. Menurut Heinich, (1996), media pembelajaran merupakan penyalur pesan yang disampaikan oleh guru kepada peserta didik agar pesan tersebut dapat diserap dengan mudah dan cepat. Di dalam Sistem Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, B, dan C media pembelajaran dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dan berfungsi sebagai sumber utama pengganti guru. Media pembelajaran tersebut

membawa pesan pembelajaran yang relevan dengan tujuan dan isi pembelajaran yang sudah ditentukan. Di dalam proses pembelajaran peserta didik dibantu dengan menggunakan media pembelajaran cetak (modul). Untuk Program PAUD yang terdiri dari anak-anak berumur enam tahun kebawah proses pembelajaran dilakukan secara tatap muka. Pembelajaran mandiri dengan menggunakan bahan ajar cetak (modul) disiapkan untuk para guru, pendidik, orang tua dan orang dewasa, sebagai bekal pengetahuan mereka untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak yang tergabung didalam program PAUD. Perbedaan penggunaan bahan ajar cetak didalam kedua program ini (Program Paket A, B, C dan Program PAUD) terletak pada siapa sasaran yang harus menggunakannya.

Karakteristik ketiga, adalah dalam SPJJ terdapat beberapa subsistem penting seperti pengembangan bahan ajar, reproduksi bahan ajar, distribusi, media komunikasi, pengujian siswa, kegiatan instruksional, logistik dan jaminan kualitas (Suparman, 2004). Subsistem penting SPJJ, terutama bahan ajar cetak adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Pengelola Pendidikan Jarak Jauh. Bahan ajar ini dikembangkan melalui beberapa tahapan dan dengan cara yang sistematis. Menurut Panduan Pengembangan Bahan Ajar Jarak Jauh, (2001), proses pengembangan bahan ajar dalam SPJJ merupakan proses yang sangat penting dan harus selalu terkendali mutunya. Pengelola Pendidikan Jarak Jauh atau Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, B, C dan Program PAUD dalam hal ini adalah Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, Departemen Pendidikan Nasional yang bertanggung jawab mempersiapkan kegiatan pembelajaran yang terjadi di daerah-daerah, mengembangkan bahan ajar cetak dengan mutu yang terstandarisasi, reproduksi bahan ajar, distribusi bahan ajar, media komunikasi dan melaksanakan evaluasi

- Pendidikan Non Formal Jarak Jauh

pembelajaran dalam standar yang terjamin mutunya atau adanya jaminan kualitas.

Karakteristik keempat, adalah dalam strategi penyampaian materi pelajaran. Peserta didik belajar secara mandiri melalui interaksinya dengan berbagai sumber belajar, termasuk bahan ajar cetak (modul) yang dirancang dan disiapkan oleh pengelola pendidikan atau penyelenggara PJJ. Strategi penyampaian materi pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik dibantu dengan bahan ajar cetak. Yang dimaksud dengan bahan ajar cetak adalah bahan pembelajaran mandiri untuk mencapai penguasaan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan belajar peserta didik. Di samping itu, peserta didik dapat menentukan dan menetapkan waktu belajar sesuai dengan potensi dan kondisi peserta didik. Modul ini dapat digunakan di manapun dan kapan saja oleh peserta didik. Menurut Acuan Pembelajaran Program Paket A, B dan C (2004), pembelajaran dengan menggunakan modul bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran tanpa harus melalui tatap muka secara teratur karena kondisi geografis, sosial ekonomi dan situasi masyarakat. Proses pembelajaran dengan menggunakan modul sebagai bahan ajar utama menuntut kemandirian belajar peserta didik. Dengan bantuan modul yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu, peserta didik dapat belajar sendiri di rumah secara mandiri. Konsep belajar mandiri dilandasi oleh filsafat pendidikan yang dikemukakan oleh Peter (1973) yang merumuskan bahwa proses belajar dapat terjadi tanpa harus adanya proses mengajar. Belajar mandiri adalah usaha peserta didik untuk mencapai kompetensi akademis, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menentukan tujuan belajarnya, merencanakan proses belajarnya, menggunakan sumber belajar yang dipilihnya, membuat keputusan-keputusan akademis, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang dipilihnya untuk mencapai tujuan belajarnya.

Karakteristik kelima, adalah belajar dengan kelompok kecil, pembelajaran diselenggarakan pada lokasi yang berdekatan dengan tempat tinggal peserta didik. Pembelajaran diadakan melalui bentuk kelompok-kelompok belajar. Kelompok belajar terdiri dari kelompok-kelompok kecil yang beranggota teman-teman terdekat atau jarak tempat tinggal yang dekat, peserta didik dapat belajar bersama untuk memecahkan berbagai permasalahan belajar. Kegiatan kelompok belajar ini diharapkan menjadi pertemuan berkala, dan penambahan pengalaman agar peserta didik mampu untuk berdiskusi dan memecahkan masalah yang ditemui di dalam materi yang disajikan di dalam modul. Di samping itu, belajar kelompok adalah untuk mendukung keberhasilan belajar mandiri. Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, B, dan C memiliki kelompok belajar yang tersebar di seluruh Indonesia.

Karakteristik keenam, adalah tutorial yang diartikan sebagai bimbingan dan bantuan belajar. Tutorial adalah satu bentuk bimbingan belajar atau bantuan belajar yang potensial dan mampu menciptakan situasi belajar yang kondusif dan peningkatan hasil belajar peserta didik. Dalam SPJJ, salah satu bentuk layanan belajar yang diberikan kepada peserta didik adalah tutorial tatap muka. Tutorial merupakan bagian integral dari proses pembelajaran SPJJ. Kegiatan tutorial ini diharapkan memicu proses belajar agar peserta didik mampu belajar secara mandiri, sehingga dapat membantu kelancaran proses pembelajaran. Dalam kegiatan tutorial, tutor berperan sebagai fasilitator, nara sumber, pengelola kegiatan pembelajaran, penilai pembelajaran, pembimbing dan pemberi bantuan belajar perseorangan maupun kelompok. Menurut Acuan Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, B, dan C (2004), di dalam proses pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, B, dan C pada satu sisi tutor memiliki peranan fokus yang bertanggung jawab untuk mengarahkan pembelajaran: apa yang akan dipelajari, bagaimana mempelajarinya, dan kapan

- Pendidikan Non Formal Jarak Jauh

suatu materi dipelajari, pada sisi lain peserta didik juga memastikan pada dirinya apakah sudah terjadi proses belajar melalui refleksi diri, pengalaman hidup, dan melalui berbagai macam aktivitas. Tugas tutor adalah memotivasi peserta didik agar mau belajar sendiri, memberikan petunjuk tentang cara belajar, dan menjelaskan materi-materi sulit yang tidak dapat dipelajari sendiri oleh peserta didik. Di samping itu, tutor juga bertugas menyelenggarakan penilaian hasil belajar dan menyelenggarakan administrasi pembelajaran. Dalam Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, B, dan C pertemuan dengan tutor dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertemuan awal dan pertemuan akhir pokok bahasan. Pada pertemuan awal, tutor menjelaskan tujuan mempelajari materi yang akan dipelajari dan cara mempelajarinya. Dengan berbekal pada pengetahuan dasar tersebut, diharapkan peserta didik dapat mempelajari secara mandiri materi yang tertulis pada modul. Apabila peserta didik mengalami kesulitan, maka diusahakan pemecahan kesulitan belajar melalui kelompok belajar. Apabila kesulitan tersebut belum dapat dipecahkan, maka kesulitan tersebut dibawa pada pertemuan akhir pokok bahasan dengan tutor. Untuk dapat melaksanakan tutorial dengan baik, seseorang perlu dilatih agar ia memiliki wawasan dan keterampilan membimbing dan membantu peserta didik untuk belajar.

Enam karakteristik pendekatan pembelajaran yang telah disebutkan di atas, seperti keterpisahan antara pengajar dengan peserta didik, penggunaan media pembelajaran, bahan ajar yang dirancang secara sistematis, belajar mandiri dengan menggunakan modul, kelompok belajar dan tutorial, merupakan serangkaian proses pembelajaran yang menjadi karakteristik SPJJ. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Sistem Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, B, C dan PAUD termasuk di dalam kelompok jalur Pendidikan Nonformal Jarak Jauh. Alasan ini diberikan karena sistem atau pendekatan pembelajaran yang selama ini dilaksanakan oleh

kedua program tersebut memiliki enam karakteristik SPJJ sebagaimana yang dijelaskan di atas.

C. Pengembangan Bahan Ajar Mandiri

Pembelajaran berbasis kompetensi dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik peserta didik serta kompetensi dasar pada umumnya. Pembelajaran menggunakan bahan ajar mandiri atau yang lebih dikenal dengan nama modul. Bahan ajar mandiri atau modul merupakan bahan ajar utama atau suatu aplikasi dari salah satu pendekatan pembelajaran mandiri. Belajar mandiri memfokuskan penguasaan kompetensi dari bahan kajian yang dipelajari dengan waktu tertentu sesuai dengan potensi dan kondisi peserta didik. Konsep belajar mandiri menuntut peserta didik melakukan pembelajaran secara proaktif dan mandiri karena proses belajar harus dapat terjadi dengan porsi kehadiran guru yang relatif lebih sedikit. Untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan, peserta didik perlu memanfaatkan modul yang tersedia yang didesain khusus dan sangat sistematis untuk dipelajari secara mandiri. Oleh karena itu, dalam pengembangannya hendaknya diperhatikan kriteria penulisan modul seperti : mudah dibaca, menggunakan bahasa yang sederhana, jelas dan komunikatif. Menurut Suparman (1995) komponen-komponen berikut ini, harus ada dalam mengembangkan modul.

1. Penulisan Bagian Pendahuluan

Bagian pendahuluan di dalam modul berisi deskripsi singkat materi yang dibahas, relevansi atau kegunaan materi dan tujuan yang diharapkan dicapai, serta petunjuk mempelajari modul. Pada umumnya ada dua jenis pendahuluan yang harus ditulis, yaitu pendahuluan untuk satu mata pelajaran, yang disebut *a. Tinjauan mata pelajaran* dan *b. Pendahuluan* untuk setiap modul.

- Pendidikan Non Formal Jarak Jauh

- a. *Tinjauan Mata Pelajaran*

Tinjauan mata pelajaran merupakan gambaran isi keseluruhan mata pelajaran secara sepintas, biasanya terdiri dari :

- Deskripsi singkat mata pelajaran
- Kegunaan mata pelajaran bagi peserta didik
- Tujuan Instruksional Umum (TIU) dan peta kompetensi
- Petunjuk bagi peserta didik untuk mempelajari modul tersebut
- Bahan pendukung lainnya

- b. *Pendahuluan untuk Setiap Modul*

Pendahuluan di dalam modul berisi deskripsi singkat dan relevansi atau manfaat materi yang akan dipelajari, serta tujuan yang diharapkan dikuasai peserta didik setelah mempelajari satu modul.

2. **Penulisan Bagian Penyajian**

Di dalam modul bagian penyajian berisi uraian tentang isi pelajaran yang terbagi menjadi beberapa subbagian. Setiap modul terbagi menjadi 2-4 kegiatan belajar yang masing-masing tersusun sebagai berikut: a. *Uraian*; b. *Contoh*; c. *Latihan*

- a. *Uraian*

Uraian adalah paparan materi berupa fakta/data, konsep, prinsip, generalisasi, teori, metode, keterampilan dan masalah yang disajikan secara naratif yang berfungsi merangsang tumbuhnya pengalaman belajar peserta didik. Materi yang disajikan harus sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Materi tersebut juga dipaparkan secara logis dan sistematis, komunikatif dan menarik.

b. *Contoh*

Contoh dapat berupa benda, ilustrasi, angka dan gambar. Tujuan diberikan contoh adalah untuk memantapkan pemahaman peserta didik. Contoh yang digunakan dalam penyajian uraian harus relevan dengan isi uraian, konsisten, logis, dan bermakna dan sesuai dengan realitas.

c. *Latihan*

Latihan adalah berbagai bentuk kegiatan belajar yang harus dilakukan peserta didik setelah membaca uraian materi, untuk memantapkan pemahaman terhadap materi yang disajikan. Latihan yang diberikan harus relevan dengan materi yang disajikan dan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Latihan yang sering dilakukan melatih peserta didik dapat berpikir kritis dan logis.

Bagian akhir dari modul adalah rangkuman dan penutup. Rangkuman adalah uraian singkat tentang saripati dari uraian materi yang telah disajikan. Rangkuman harus disajikan secara ringkas dan berurutan. Tujuan dari penutup adalah untuk peserta didik mempersiapkan diri mengukur prestasinya berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Bagian penutup terdiri dari tes formatif, umpan balik, tindak lanjut dan kunci jawaban tes formatif beserta penjelasannya. Tes formatif adalah tes yang diberikan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang dibahas. Menurut Hannafin (1988) tujuan utama diadakannya tes formatif adalah sebagai prosedur sistematis yang digunakan untuk pemantapan tujuan-tujuan belajar yang telah dicapai. Umpan balik adalah suatu petunjuk untuk mengukur jawaban sendiri setelah peserta didik menjawab seluruh soal tes formatif. Pada umumnya umpan balik yang diberikan adalah untuk memberikan jawaban yang benar. Tindak lanjut adalah informasi tentang hasil kerja peserta didik

- Pendidikan Non Formal Jarak Jauh

setelah mengerjakan tes formatif. Menurut Dick & Carey (1978) tindak lanjut untuk memperbaiki kesalahan dibuat semenarik mungkin, agar peserta didik bisa dipacu perhatiannya dalam mempelajari modul. Peserta didik harus mengulang mempelajari modul jika jawaban yang benar baru 60 % atau peserta didik belajar lagi sampai ia memperoleh nilai B (80%) atau A (90%). Apabila telah memperoleh nilai B/A peserta didik dapat melanjutkan ke bab berikutnya. Kunci jawaban tes formatif berisi jawaban tes formatif yang dilengkapi dengan penjelasan dan sebab dari jawaban yang benar atau terpilih. Tujuan diadakannya penjelasan agar peserta didik memahami mengapa jawaban tersebut yang dipilih.

D. Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, B, dan C

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Direktorat Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda menyelenggarakan program pendidikan nonformal. Salah satu pelayanan pendidikan nonformal adalah Pendidikan Kesetaraan. Pendidikan Kesetaraan meliputi Program Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs, dan Paket C setara SMA/MA, merupakan bagian dari pendidikan nonformal/pendidikan luar sekolah.

Secara filosofis, kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara didalam melaksanakan program Paket A, B dan C sesuai dengan misi utama pemerintah. Konstitusi secara tegas mengamanatkan, pemerintah berkewajiban memberi layanan pendidikan kepada setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang sosial ekonomi. Sasaran pendidikan kesetaraan adalah peserta didik usia sekolah untuk menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dan peserta didik dewasa untuk meningkatkan kecakapan dan taraf hidup. Di samping itu, ketiga program ini juga melayani warga

masyarakat lain yang memerlukan layanan khusus dalam memenuhi kebutuhan belajarnya sebagai dampak perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dan perubahan peningkatan taraf hidup. Ketiga program ini ditujukan juga untuk peserta didik yang berasal dari masyarakat yang kurang beruntung, tidak sekolah, putus sekolah dan putus lanjut, serta usia produktif yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidup. Menurut Acuan Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, B, dan C (2004) tujuan pendidikan kesetaraan adalah sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi pendidikan bagi kelompok masyarakat yang karena keterbatasan sosial, ekonomi, waktu, kesempatan, dan geografi, tidak dapat bersekolah pada usia sekolah.
- b. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengelola sumberdaya yang ada di lingkungannya untuk meningkatkan taraf hidupnya.
- c. Memberikan kesetaraan akademik: Paket A setara dengan SD/MI, Paket B setara dengan SMP/MTs dan Paket C setara dengan SMA/MA, yang dapat dipergunakan untuk melanjutkan belajar ataupun kenaikan pangkat.

Pemberian kesetaraan akademik untuk Paket A, B, dan C diperkuat dan diperjelas oleh Pasal 26, ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan, hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional penilaian.

E. Kurikulum Pendidikan Kesetaraan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat pada umumnya. Paradigma baru pendidikan berorientasi pada mutu pendidikan yang berkaitan dengan dimensi manusia Indonesia seutuhnya. Kecenderungan yang terjadi selama ini, proses dalam memberikan layanan pendidikan lebih banyak dikaitkan dengan aspek kemampuan akademik khususnya aspek kognitif. Layanan pendidikan seperti ini, mengakibatkan terabainya aspek-aspek moral, budi pekerti, seni dan lifeskill. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan dampaknya terhadap kehidupan, maka perlu dilakukan penyempurnaan secara utuh layanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat terutama yang berkaitan dengan kurikulum. Oleh karena itu, menurut Yulaelawati (2004) kompetensi dalam kurikulum perlu dikembangkan untuk memberikan keterampilan dan keahlian berdaya saing serta berdaya suai untuk bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidaktentuan, dan kerumitan-kerumitan dalam kehidupan. Kurikulum yang berbasis kompetensi dapat menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas, budaya, serta bangsanya.

Kurikulum yang digunakan dalam Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, B dan C adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Menurut Soewondo (2001) yang dimaksud dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) adalah suatu kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan tugas/pekerjaan dengan standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik yaitu: berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Kompetensi dapat dimiliki oleh siswa, setelah ia selesai belajar. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta pola berpikir adalah cermin refleksi dari pemahaman dan penghayatan dari apa yang telah dipelajari

oleh siswa. Pada tahun 2004 telah dihasilkan kurikulum pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C yang berbasis kompetensi. Kurikulum tersebut disusun bekerja sama dengan Pusat Kurikulum yang terdiri dari para pakar kurikulum, universitas dan forum tutor. Penyusunan kurikulum Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, B, dan C memperhatikan beberapa standar kompetensi sebagai berikut :

1. Standar Kompetensi Kecakapan Hidup.
2. Standar Kompetensi Lulusan.
3. Standar Kompetensi Mata Pelajaran.

1. Standar Kompetensi Kecakapan Hidup

Setiap lulusan pendidikan kesetaraan diharapkan dapat memiliki kecakapan hidup agar peserta didik memiliki keterampilan, sikap, dan perilaku adaptif, kooperatif dan kompetitif dalam menghadapi tantangan kehidupan di masyarakat setempat, di lingkungan baru, atau di mana pun ia berada. Kompetensi kecakapan hidup tersebut dikembangkan melalui proses pembelajaran dan pelatihan berbagai mata pelajaran yang mendukung penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional dan kepribadian profesional.

2. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan pendidikan kesetaraan terdiri atas a. standar kompetensi lulusan Paket A setara SD/MI, b. standar kompetensi lulusan Paket B setara SMP/MTs, dan c. standar kompetensi lulusan Paket C setara SMA/MA. Yang dimaksud dengan kesetaraan dalam hal ini adalah standar kompetensi lulusan program Paket A, B, dan C sama dengan standar kompetensi lulusan yang disetarakan, walaupun pendekatan dan metodologi untuk mencapai kompetensi tersebut tidak harus sama. Di samping itu, ketiga program Paket A, B, dan C ini diperkaya dengan keterampilan yang lebih berorientasi kecakapan hidup.

- Pendidikan Non Formal Jarak Jauh

3. Kompetensi Mata Pelajaran

Standar kompetensi mata pelajaran terdiri atas sejumlah mata pelajaran berorientasi pembinaan akhlak mulia, akademik dan mata pelajaran kecakapan hidup yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi peserta didik dan lingkungan terdekatnya. Penyampaian kompetensi mata pelajaran disesuaikan dengan karakteristik dan jenjang peserta didik. Kompetensi mata pelajaran secara terinci dapat dilihat pada masing-masing standar kompetensi mata pelajaran untuk setiap jenjang pendidikan kesetaraan.

F. Evaluasi dan Ujian Akhir Nasional

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No: 114/U/ 2001 tentang Penilaian Hasil Belajar Secara Nasional, penilaian pada akhir program dilakukan melalui ujian nasional yang dilaksanakan oleh Pusat Penilaian Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan Nasional (Puspendik Balitbang Depdiknas). Penilaian pendidikan ini dimaksudkan untuk menjamin mutu lulusan pendidikan nonformal setara dengan lulusan pendidikan formal. Pada akhir program pendidikan kesetaraan, baik Program Paket A, Paket B, maupun Paket C, dilaksanakan penilaian pendidikan sebagai salah satu upaya pengendalian mutu. Penjaminan dan pengontrolan kualitas dilaksanakan secara ketat. Upaya penjaminan kualitas dimulai dari penyusunan bahan ajar dengan standar nasional. Penyelenggaraan ujian nasional dilakukan untuk sejumlah mata pelajaran yang ditentukan sebagai standar nasional, dengan demikian diharapkan lulusan program pendidikan kesetaraan mempunyai dampak yang setara, yaitu lulusan Paket A setara dengan lulusan SD/MI, lulusan Paket B setara dengan lulusan SMP/MTs, dan lulusan Paket C setara dengan lulusan SMA/MA

Sistem Penilaian Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, B dan C dilakukan dengan dua cara sebagai berikut, yaitu: penilaian proses yang terintegrasi dalam pembelajaran, dan pengujian akhir. Kedua cara penilaian tersebut, dilakukan sebagai berikut: *Pertama*, penilaian proses yang terintegrasi dalam pembelajaran dapat dilakukan secara mandiri dengan mengerjakan berbagai tugas dan latihan yang terintegrasi dalam setiap modul. Setiap peserta didik dapat mengukur kemampuannya, dengan cara hasil tugas dan latihan yang sudah dikerjakan dibandingkan dengan kunci jawaban yang tersedia di dalam modul. Bila peserta didik sudah tuntas belajar dan mencapai kompetensi pada setiap kegiatan modul, selanjutnya peserta didik dapat mengerjakan kegiatan berikutnya. Peserta didik hanya dapat mempelajari materi berikutnya, apabila materi sebelumnya telah dikuasai. Pengontrolan penguasaan materi digunakan dengan cara menggunakan soal-soal yang ada di setiap akhir modul, dengan penilaian yang dilakukan oleh tutor dengan kunci jawaban yang terbakukan secara nasional. Selama proses pembelajaran berlangsung penilaian dilakukan juga oleh tutor, melalui pengamatan, diskusi, penugasan, ulangan, dan penilaian produk yang dihasilkan oleh peserta didik pada akhir setiap modul. Selanjutnya tutor membuat laporan kemajuan hasil belajar peserta didik dari hasil penilaian yang diperolehnya selama proses belajar berlangsung. Hasil penilaian tersebut didokumentasikan oleh tutor di dalam buku rapor peserta didik.

Kedua, pengujian akhir, untuk mengukur tingkat kesuksesan peserta didik digunakan ujian akhir nasional UAN. Penilaian dilakukan secara nasional yang dilaksanakan oleh Puspendik Balitbang Depdiknas dalam Ujian Nasional Paket A, Paket B, dan Paket C. Penyelenggaraan sistem ujian nasional ini mulai dari penyusunan soal-soal ujian akhir dan pemeriksaan lembar jawaban ujian melalui komputer, penentuan lokasi ujian, penentuan batas kelulusan, dan semua kegiatan yang berkaitan dengan ujian yang

- Pendidikan Non Formal Jarak Jauh

ditetapkan oleh lembaga pengujian independen yaitu: Puspendik Balitbang Depdiknas. Penetapan standar kelulusan ditetapkan secara nasional. Bekerja sama dengan Direktorat Dikmas, Ditjen PLSP diterbitkan Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk menjaga standar yang terjamin mutunya. Standar Prosedur Operasional tersebut mengatur secara rinci penyelenggaraan ujian nasional sejak persiapan di tingkat pusat sampai dengan pelaksanaan di lokasi ujian. Pelaksanaan ujian secara reguler dipantau secara ketat dan terkendali. Ujian akhir ini menggunakan sistem lulus dan tidak lulus. Belum tamat kelulusan hanya ditentukan oleh hasil UAN.

Ujian Nasional diselenggarakan dua kali dalam satu tahun, yaitu: periode pertama dilaksanakan pada bulan April dan Mei, dan periode kedua pada bulan Oktober. Dilakukan perubahan jadwal ujian, apabila pada bulan tersebut bertepatan dengan bulan Ramadhan. Hasil Ujian Nasional sepenuhnya dijadikan bahan penentuan kelulusan peserta program Paket A, Paket B, dan Paket C. Peserta Ujian Nasional yang berhasil memenuhi kriteria kelulusan akan memperoleh predikat "LULUS" dan sebaliknya, mereka yang belum berhasil memenuhi kriteria kelulusan diberi predikat "BELUM LULUS" Peserta ujian yang dinyatakan "LULUS" berhak memperoleh Surat Tanda Lulus (STL) yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Puspendik Balitbang Depdiknas serta memperoleh Ijazah yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat Ditjen PLSP dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota setempat. Menurut Jalal (2005), pada tahun 2004 sebanyak 84.593 orang telah mengikuti Ujian Nasional Paket C dan lulus 59.109 orang. Pada tahun anggaran 2005 sebanyak 23.713 orang Paket C yang dilayani pendidikan kesetaraan. Jumlah ini belum termasuk peserta didik swadaya.

Selanjutnya uraian di bawah ini, akan menjelaskan tentang Program PAUD yang dikelola oleh Direktorat PAUD, Direktorat yang berada dibawah Ditjen PLSP Depdiknas.

G. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini

1. Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia

Menurut Program Nasional bagi Anak Indonesia (PNBAI, 2004), hingga saat ini baru sekitar 28% anak usia dini yang terlayani pendidikannya. Mereka terlayani di Bina Keluarga Balita (9, 6%), Taman Kanak-Kanak (6,5%), Raudhatul Athfal (1,4%), Kelompok Bermain (0,13%), dan di Taman Penitipan Anak (0, 05%), lainnya (9, 9%) terlayani di SD. Yang sangat memprihatinkan adalah bahwa rasio layanan lembaga pendidikan anak usia dini terhadap anak yang dilayani adalah 1: 86.

Menurut Direktorat PAUD (2004), jumlah anak usia dini yang terlayani di lembaga PAUD jalur pendidikan nonformal telah mulai meningkat. Peningkatan tersebut terutama pada program Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Posyandu Terintegrasi PAUD. Pada awal tahun 2004 jumlah anak yang terlayani di Kelompok Bermain telah mencapai 36.649 anak, di Taman Penitipan Anak ada 15.308 anak. Angka tersebut di atas belum bisa dijadikan rujukan, karena belum semua daerah mengirimkan datanya.

Potensi besar yang dimiliki oleh Program Posyandu (ada 245.758 Posyandu) yang selama ini dibina oleh jajaran Departemen Kesehatan dan PKK serta Departemen Dalam Negeri. Jika Program Posyandu ini dapat diintegrasikan dengan program pelayanan pendidikan bagi PAUD, maka tentu makin banyak anak usia dini yang dapat terlayani di desa-desa. Menurut Education For All Indonesia (EFA, 2002), keadaan seperti ini memerlukan kerja sama yang lebih baik dari semua pihak yang terkait. Upaya penginte-

- Pendidikan Non Formal Jarak Jauh

grasian yang dimulai sejak tahun 2003, telah dirintis di beberapa tempat, seperti di Kabupaten Sumedang dan Krawang (Jawa Barat) dan Kabupaten Tanah Datar (Sumatra Barat).

Melihat kondisi di atas, sistem penanganan terhadap pendidikan anak usia dini di Indonesia selama ini perlu ada perbaikan. Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (2004) perlu ada terobosan baru untuk memberdayakan dan mensinergikan semua potensi yang telah ada di masyarakat dalam rangka tercapainya layanan terhadap tumbuh-kembang anak secara utuh, menyeluruh dan terintegrasi.

2. Visi, Misi dan Tugas Direktorat PAUD

a. Visi dan Misi

Visi Direktorat PAUD (2005) adalah terwujudnya anak usia dini yang cerdas, sehat, ceria, dan berakhlak mulia serta memiliki kesiapan baik fisik maupun mental dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Misi Direktorat PAUD adalah :

- mengupayakan pemerataan pelayanan, peningkatan mutu, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dini,
- mengupayakan peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam memberikan layanan pendidikan dini, dan
- mempersiapkan anak sedini mungkin agar kelak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

b. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Direktorat PAUD (2005) adalah menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan standarisasi serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang PAUD. Fungsi Direktorat PAUD adalah :

- Penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang penitipan anak, kelompok bermain, satuan pendidikan sejenis, dan pemberdayaan peran serta masyarakat.
- Penyiapan bahan rumusan standarisasi teknis, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang penitipan anak, kelompok bermain, satuan pendidikan sejenis, dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

c. *Lingkup Sasaran*

Menurut Direktorat PAUD (2005), lingkup sasaran PAUD adalah sebagai berikut :

- a. Anak usia lahir sampai dengan 6 tahun, diutamakan anak yang belum mendapatkan layanan pendidikan prasekolah.
- b. Orang tua dan masyarakat yang memiliki anak usia dini dan/atau terlibat dalam berbagai layanan pendidikan anak usia dini.
- c. Lembaga-lembaga yang memberikan layanan bagi anak usia dini dan/atau memiliki kepedulian terhadap pendidikan anak usia dini.
- d. Para calon orang tua.

d. *Fokus Program*

Menurut Direktorat PAUD (2005), fokus program untuk pendidikan anak usia dini adalah sebagai berikut :

- Intervensi PAUD yang ada di lembaga-lembaga penitipan anak.
- Layanan pendidikan bagi anak usia 2-6 tahun yang diselenggarakan di kelompok-kelompok bermain.
- Layanan pendidikan bagi anak-anak usia lahir sampai dengan 6 tahun yang berada di berbagai lembaga di luar penitipan anak atau kelompok bermain.

- Pendidikan Non Formal Jarak Jauh

e. *Strategi Pendekatan*

Menurut Direktorat PAUD (2005), strategi pendekatan yang dilakukan untuk pendidikan anak usia dini adalah sebagai berikut :

- Pengelolaan pendidikan yang berbasis masyarakat.
- Pemberdayaan para pakar/praktisi di bidang pendidikan anak usia dini/tumbuh kembang anak, melalui Forum dan Konsorsium PAUD. Konsorsium PAUD berfungsi sebagai pemikir, pengembang ide, nara sumber, mitra dalam pengembangan program, inovasi program, dsb.
- Mengkaji dan merumuskan dan menerbitkan acuan teknis.
- Sosialisasi pentingnya PAUD kepada masyarakat.
- Memfasilitasi adanya jaringan informasi/komunikasi serta jaringan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini.
- Memberikan bantuan teknis, pendamping dan/atau pembinaan secara berkesinambungan terhadap berbagai layanan pendidikan dini yang ada di masyarakat.
- Memfasilitasi upaya-upaya peningkatan wawasan dan kemampuan bagi para penanggung jawab, pembina, dan petugas pendidikan anak usia dini di masyarakat (a.l. melalui tugas belajar, program pelatihan, studi banding, atau penyebarluasan informasi tentang PAUD).
- Mengembangkan berbagai acuan menu pembelajaran, metode, bahan belajar dan sarana pembelajaran pendidikan anak usia dini yang dipandang lebih mudah, murah, dan bermutu.
- Mengembangkan pusat-pusat rujukan pendidikan anak usia dini, melalui berbagai cara kerja sama dengan berbagai Perguruan Tinggi, Lembaga-lembaga PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat, maupun Unit-unit Pelaksana Teknis Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda yang ada di tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota.

- Keberpihakan kepada anak/warga masyarakat yang karena sesuatu hal tidak terjangkau dan/atau tidak memiliki kemampuan untuk menjangkau lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini yang telah ada.

H. Menu Pembelajaran Generik

Direktorat PAUD telah mengembangkan berbagai Acuan untuk layanan pendidikan anak usia dini. Salah satu di antaranya adalah Acuan Menu Pembelajaran untuk PAUD atau dikenal dengan Menu Pembelajaran Generik. Menurut Jalal (2004), menu pembelajaran generik artinya menu pembelajaran yang tidak bersifat paten (tidak harus diikuti secara kaku). Menu tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut oleh para penyelenggara PAUD di lapangan. Acuan ini akan disempurnakan secara terus menerus, berdasarkan masukan dari lapangan dan hasil-hasil penelitian terbaru. Acuan ini digunakan sampai ada Acuan yang baru dan baku. Menu Pembelajaran Generik yang telah disusun oleh Direktorat PAUD (2002) serta penyempurnaan dan penambahan dari beberapa pendapat para ahli lainnya, akan diuraikan di bawah ini.

1. Pendekatan Pembelajaran Generik

a. *Berorientasi pada kebutuhan anak.*

Kegiatan pembelajaran pada anak usia dini harus senantiasa berorientasi kepada kebutuhan anak. Kebutuhan anak yang dimaksud adalah untuk mendapat layanan pendidikan, kesehatan dan gizi yang dilaksanakan secara integratif dan holistik.

b. *Belajar melalui bermain.*

Bermain sambil belajar adalah penting untuk perkembangan anak karena bermain adalah suatu kebutuhan anak. Melalui

- Pendidikan Non Formal Jarak Jauh

aktivitas bermain, berbagai tugas dan pekerjaan anak dapat terwujud dengan hasil yang maksimal. Bagi anak bermain merupakan aktivitas utama karena terjadinya interaksi anak dengan lingkungannya. Suatu interaksi yang serius dan mempunyai arti tersendiri yang sangat menyenangkan. Bermain merupakan alat utama dan tempat latihan bagi anak. Oleh karena itu, bermain merupakan pendekatan PAUD sehingga alat permainan, strategi dan metode yang digunakan oleh pendidik harus menarik dan menyenangkan hati anak. Melalui bermain anak diajak untuk menjelajahi dunianya, sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya, sehingga anak tumbuh kembang sesuai dengan potensinya. Di samping itu, anak terlatih untuk secara terus menerus meningkatkan diri dan mandiri pada saat anak bermain.

c. *Kreatif dan inovatif.*

Setiap anak memiliki potensi untuk berkembang, seluruh potensi yang ada di dalam diri anak perlu dikembangkan seoptimal mungkin. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan harus kreatif dan inovatif. Memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kreativitas. Menyiapkan berbagai kegiatan dilakukan dengan cara menarik perhatian anak dan setiap kegiatan menyenangkan yang dapat membangkitkan rasa ingin tahu anak. Di samping itu, kegiatan yang dilakukan juga dapat memotivasi anak untuk berpikir kritis, sehingga anak dapat menemukan hal-hal baru dari kegiatan tersebut secara mandiri.

d. *Lingkungan yang kondusif.*

Lingkungan pembelajaran harus diciptakan sedemikian menyenangkan dan menarik. Setiap anak merasa senang dan nyaman dalam bermain, sehingga anak selalu betah berada di dalam ruangan atau di luar ruangan. Lingkungan fisik dan sarana belajar senantiasa disesuaikan dengan ruang gerak anak.

e. *Menggunakan pembelajaran terpadu.*

Kegiatan pembelajaran dirancang dengan menggunakan pembelajaran terpadu berdasarkan tema. Tema harus menarik minat anak, agar anak mampu mengenal berbagai konsep dengan mudah dan jelas, sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi anak. Menurut Indrati (2003), dalam pemilihan tema hendaknya dikembangkan hal-hal yang paling dekat dengan anak dan sederhana serta menarik minat anak. Penggunaan tema dimaksudkan agar anak mampu mengenal berbagai konsep secara mudah dan jelas.

f. *Mengembangkan keterampilan hidup.*

Mengembangkan keterampilan hidup bertujuan agar anak mampu menolong dirinya sendiri, disiplin, dan mampu hidup secara mandiri. Di samping itu, anak memperoleh bekal keterampilan dasar yang dapat digunakan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya di lingkungan masyarakat.

g. *Menggunakan berbagai media dan sumber belajar.*

Menggunakan media dan sumber belajar dari lingkungan dan alam sekitar anak, dapat juga disiapkan oleh pendidik sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan anak. Media dan sumber belajar adalah sesuatu yang harus digunakan sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran karena sangat erat hubungannya dengan hasil belajar anak. Menurut Kemp (1994), di dalam proses pembelajaran media dan sumber belajar harus dijadikan bagian yang tidak terpisahkan. Penggunaan media pembelajaran dapat memberi pengaruh terhadap perubahan perilaku anak. Media dan sumber belajar dapat diterima anak melalui pendengaran, penglihatan, perabaan, dan penciuman. Tiap anak mempunyai kemampuan yang berbeda dalam penerimaan tersebut. Media dan sumber belajar yang sesuai dengan

- Pendidikan Non Formal Jarak Jauh

berbagai jenis indra yang dimiliki anak yang kondisinya sangat berbeda sangat menunjang proses pembelajaran.

h. *Pembelajaran berorientasi pada prinsip-prinsip perkembangan anak.*

Proses pembelajaran berorientasi pada prinsip-prinsip perkembangan anak, artinya proses pembelajaran memperhatikan prinsip-prinsip perkembangan anak, terutama pada masa peka atau masa emas anak-anak usia dini. Menurut Semiawan (2004), setiap anak dilahirkan dengan perbedaan kemampuan, bakat dan minat. Anak dapat berkembang seoptimal mungkin, jika kemampuan, bakat dan minatnya masing-masing diperhatikan sebagai dimensi yang ikut mempengaruhi hasil belajar anak. Jika anak diperlakukan sesuai dengan kebutuhan perkembangan, dimungkinkan penggalan potensi anak secara optimal. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh pendidik, dimana pendidik bisa memilih kegiatan untuk dipadukan dengan kebutuhan perkembangan anak, minat, bakat dan potensi anak.

2. Kecerdasan Jamak

Kegiatan pendidikan anak usia dini diarahkan pada upaya untuk merangsang semua potensi kecerdasan anak dengan memperhatikan 9 (sembilan) bidang kecerdasan anak. Berdasarkan perkembangan teori terakhir tentang kecerdasan jamak (*Multiple Intelligence*) dari Armstrong (1994), dan Gardner (1993) setiap anak memiliki potensi kecerdasan jamak, yang berfungsi secara unik. Potensi kecerdasan jamak ini akan berkembang secara maksimal, jika anak menerima layanan pendidikan sejak dini dan yang tepat sesuai dengan perkembangan anak. Potensi anak akan berkembang secara maksimal, sehingga anak menjadi cerdas dalam bidang yang dikembangkan. Akan tetapi sebaliknya anak akan mempunyai tingkat kecerdasan rendah, jika potensi anak tidak dikembangkan

sejak dini. Setiap bidang kecerdasan dapat bekerja sama untuk menunjang kegiatan kecerdasan tertentu. Pendidik perlu memahami arti kecerdasan tersebut. Menurut Moleong (2003) berdasarkan pendapat dari Armstrong (1994) pengertian sembilan kecerdasan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. *Kecerdasan verbal linguistik*, adalah kecerdasan di bidang bahasa, kemampuan atau kompetensi anak untuk menggunakan kata-kata secara efektif, apakah secara lisan atau tulisan. Anak menulis kreatif, memiliki kosa kata yang luas, mengeja kata-kata dengan mudah dan tepat. Anak unggul dalam pelajaran membaca dan menulis. Kecerdasan ini bisa dirangsang oleh pendidik melalui berbicara, mendengarkan, membaca, menulis, berdiskusi, bercerita yang lucu dan berpuisi yang indah.
- b. *Kecerdasan logika-matematika*, adalah kecerdasan dalam bidang matematika. Kemampuan atau kompetensi anak menggunakan bilangan angka secara efektif (misal, menghitung diluar kepala secara cepat, menjelaskan masalah secara logis, dan kemampuan menggunakan bilangan). Anak menyenangi pelajaran matematika. Kecerdasan ini bisa dirangsang oleh pendidik melalui kegiatan menghitung, membedakan bentuk, menganalisis data dan bermain dengan benda-benda.
- c. *Kecerdasan visual-spasial*, adalah kecerdasan mempersepsikan dunia spasial secara tepat. Kemampuan anak dalam mempersepsi warna, garis, dan ruang. Anak mudah membaca peta, grafik, dan diagram, mudah memahami gambar dan ilustrasi dari pada memahami teks. Anak menonjol dalam pelajaran seni. Kecerdasan ini dapat dirangsang oleh pendidik melalui bermain balok-balok dan bentuk-bentuk geometri, melengkapi teka teki, menggambar, melukis, menonton film maupun bermain dengan daya khayal (imajinasi).

● Pendidikan Non Formal Jarak Jauh

- d. *Kecerdasan musikal*, adalah kecerdasan anak dalam bidang musik, yang dapat memberikan reaksi dan mengekspresikan berbagai jenis bentuk-bentuk musik, terutama dalam ritme, melodi, irama bunyi alat musik. Anak mudah mengikuti irama lagu musik, peka terhadap suara di lingkungan sekitar dan memiliki suara yang bagus untuk menyanyi. Anak berprestasi baik dalam seni musik dan senang memainkan alat musik. Kecerdasan ini dapat dirangsang oleh pendidik melalui irama, nada, berbagai bunyi dan menggunakan alat musik sederhana.
- e. *Kecerdasan kinestetik*, adalah kecerdasan mengekspresikan ide dan perasaan dalam gerakan tubuh. Dalam kecerdasan ini termasuk keterampilan tubuh khusus seperti koordinasi, keseimbangan, kekuatan, fleksibilitas, dan kecepatan. Anak senang melompat-lompat, berlari, bergulat dan banyak bergerak, menunjukkan kegiatan fisik melebihi anak-anak seusianya. Di samping itu, anak menunjukkan keterampilan dalam pekerjaan tangan, seperti : kerja kayu, mekanik dan menjahit. Kecerdasan kinestetik ini dapat dirangsang oleh pendidik melalui gerakan, tarian, olahraga, mengerjakan sesuatu, bekerja dengan tanah liat, dan terutama kegiatan yang ada gerakan tubuh.
- f. *Kecerdasan naturalis*, adalah kecerdasan memahami dan peka terhadap sifat-sifat alam. Anak menyenangi flora dan fauna, lebih senang belajar di luar daripada di dalam kelas. Anak senang dan menikmati berjalan-jalan di alam terbuka, suka berada di kebun dan memiliki kesadaran ekologis yang tinggi. Senang menangkap serangga, akrab dengan hewan peliharaan, senang dengan daun-daun dan benda alam lainnya. Kecerdasan ini dapat dirangsang oleh pendidik melalui pengamatan lingkungan, bercocok tanam, memelihara binatang, termasuk mengamati fenomena alam seperti hujan, angin, banjir, pelangi, siang malam, panas dingin, bulan dan matahari.

- g. *Kecerdasan interpersonal*, adalah kecerdasan memahami orang lain, yang secara tepat dapat menggambarkan perasaan orang lain dan memiliki rasa empati yang tinggi terhadap orang lain. Anak senang bergaul, memimpin, mengajar, memberikan nasihat kepada teman-temannya. Anak tidak suka membuat masalah dengan teman-temannya. Anak senang bermain, mencari kelompok bermain dengan orang lain. Anak punya banyak teman, dan senang membantu temannya yang mempunyai masalah. Kecerdasan ini dapat dirangsang oleh pendidik melalui bermain bersama teman, bekerja sama, bermain peran dan memecahkan masalah, serta menyelesaikan konflik sesama teman. Anak diberi pekerjaan dan permainan di dalam kelompok-kelompok.
- h. *Kecerdasan intrapersonal*, adalah kecerdasan memahami potensi diri dan pengendalian diri. Kemampuan untuk bertindak secara adaptif atas dasar pengetahuan sendiri. Anak menunjukkan kemauan dan kebebasan yang tinggi. Anak senang bekerja sendiri daripada bekerja dengan orang lain. Anak merasakan secara mendalam kelebihan dan kelemahan dirinya. Anak senang belajar dari keberhasilan dan kegagalan diri sendiri. Kecerdasan ini dapat dirangsang oleh pendidik melalui pengembangan konsep diri, harga diri, mengenal diri sendiri, percaya diri, termasuk kontrol diri dan disiplin.
- i. *Kecerdasan spiritual*, adalah kecerdasan mengenal dan mencintai ciptaan Tuhan. Anak memiliki perilaku yang baik, sopan, saling menghargai sesama teman. Kecerdasan ini dapat dirangsang oleh pendidik melalui penanaman nilai-nilai moral, pelajaran budi pekerti dan agama. □

- Pendidikan Non Formal Jarak Jauh

Daftar Pustaka

Bates, A. W. (1995), *Technology, Open Learning and Distance Education*, New York: Routledge.

Daniel, J. (1996), *Mega Universities and Rout Ledge Media Technology Strategies for Higher Education*, London: Kogan Page.

Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, (2003), *Pedoman Sosialisasi PAUD*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Direktorat Pendidikan Anak Dini Usia, (2002), *Modul Pelatihan Pengelolaan Pusat PAUD*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

_____ (2002), *Jurnal Ilmiah Anak Dini Usia*, Edisi 2, Oktober 2002, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional

_____ (2003), *Acuan Ilmu Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Dini Usia (Ilmu Pembelajaran Generik)*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Direktorat Pendidikan Masyarakat Sekolah dan Pemuda, (2004), *Acuan Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Program A, B, C*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

_____ (2004), *Acuan Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Program A, B, C*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

_____ (2004), *Acuan Kurikulum Pendidikan Kesetaraan Program A, B, C*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Dohmen, G, (1967) dalam D. Keegan, (1986), *The Foundations of Distance Education*. London: Croom Helm.

- _____ (1967) dalam Tian Belawati (1999) *Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Ella Yulaelawati, (2004), *Kurikulum dan Pembelajaran, Filosofi Teori dan Aplikasi*, Bandung: Pakar Raya.
- Fasli Jalal (2004), Makalah Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- _____ (2005), *Bahan Memorandum Akhir Jabatan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (2001-2005)*. Tidak diterbitkan.
- French Law, (1971) dalam D, Keegan, (1986), *The Foundations of Distance Education*. London: Croom Helm.
- Heininch, R, Molenda, M., Russell, J. & Smaldino, S (1996), *Instructional Media and Technology for Learning*. New Jersey, Prentice Hall.
- Howard Gardner, (1993) *Multiple Intelligences*, New York: Basicbooks, A Division of Harper Collins publishers, Inc.
- Iskandar (2002), *Makalah Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Dasar dan Menengah*, Jakarta: Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional.
- Jurnal Ilmiah Anak Dini Usia, (2002), Edisi Perdana Buletin PAUD.
- Keegan, D (1980), On Defining Distance Education. *Distance Education*, (Vol. 1 No.1) 13-26.
- Makalah Lokakarya Pendidikan Kesetaraan, (2005), Bandung: Subdit Kesetaraan.
- Makalah Semiloka, (2003), "Penerapan Multiple Intelligences dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi Melalui Pembelajaran Terpadu", Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.

- Pendidikan Non Formal Jarak Jauh

Makalah Seminar dan Lokakarya Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, (2004) *"Menyongsong Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis Kecerdasan Jamak di Masa Depan"*. Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, dengan Universitas Negeri Jakarta.

Makalah Seminar Pendidikan Anak Dini Usia (2005), *Stimulasi Berbagai Batasan Kecerdasan Anak melalui Proses Pembelajaran yang Tepat*. Jakarta.

Moore, M. G. (1993), *Theoretical Principles of Distance Education*, London: Routledge.

_____ & Lears Ley, G (1996), *Distance Education: A System New*, Bel Mount: Wads Worth Publishing.

_____ (1993). Theory of transactional distance dalam D. Keegan, *Theoretical principles of distance education*. New York: Routledge.

Mulyasa, E. Dr, M.Pd. (2004), *Implementasi Kurikulum 2004*, Panduan Pembelajaran MBK, Bandung: PT Remaja Londa Karya.

Paulina Pannen, (1999), Pengertian Sistem Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh dalam Tian Belawati, *Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*, Jakarta: Universitas Terbuka.

Peters, O. (1993), Distance Education in Aport Industrial Society in Keegan, D. (ed), *Theorical Principles of Distance Education*, Page 39-58, London: Routledge.

Proyek Pengembangan UT, (2004), *Panduan Pengembangan Bahan Ajar Jarak Jauh*, Jakarta: Universitas Terbuka.

Pusat Antar Universitas untuk Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional UT, (2004), *Bahan Ajar Program Akreditasi Tutor Universitas Terbuka (PAT-UT)*, Jakarta: PAU-PPAI UT.

- Rowntree, D. (1996), *Depeloving Open and Distance Learning*, London: Kogan Page.
- Soewondo, MS, Drs, MM, M.Si, (2003), *Makalah Peranan Guru Pada Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Suparman A, Zuhairi A, (2004), *Pendidikan Jarak Jauh: Teori dan Praktek*, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Tian Belawati, (Ed) (1999), *Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Yonassen, D.H. (ed), (1996), *Handbook of Research for Educational Communication and Technology*, NewYork: MacMillan.

Bab V

Pelatihan Profesional Jarak Jauh

Nugroho Widi

A. Pembelajaran dan Pelatihan Profesional

1. Definisi

Siapakah yang bisa disebut profesional? Dari ensiklopedi umum, seorang profesional adalah seorang yang terkait dengan atau termasuk pada suatu profesi (Microsoft Encarta, 2003). Dengan demikian, pembelajaran untuk profesi ini mencakup spektrum yang sangat luas, mulai dari pengetahuan, keterampilan, sampai ke perilaku dan sikap yang sangat khusus untuk profesi itu. Jenis profesi nyaris tidak terbatas. Segala sesuatu yang dikerjakan secara serius untuk mencari uang, bukan sekedar hobi, disebut **profesi**.

Karena bersifat serius itulah, maka seorang profesional harus kompeten di bidang profesinya. Untuk mencapai kompetensi itu, pada umumnya dia terlebih dahulu menjalani pembelajaran dan pelatihan secara ekstensif dan intensif.

Cakupan pembelajaran untuk profesional meliputi pembelajaran (formal atau nonformal) untuk mencapai kompetensi profesi tertentu, maupun pembelajaran yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan orang yang telah menjalani suatu profesi. Dengan demikian, belajar di perguruan tinggi dapat digolongkan dalam

pendidikan praprofesi; demikian pula pelatihan sertifikasi nonformal untuk mencapai spesialisasi pekerjaan tertentu.

Cakupan Tulisan

Mengingat luasnya cakupan PJJ untuk profesi, pembelajaran untuk profesional yang akan dibahas dalam tulisan ini hanya akan dibatasi pada pembelajaran jarak jauh untuk meningkatkan kemampuan orang yang **sudah** bekerja pada suatu profesi tertentu. Karena terus berubah dengan cepat dalam dunia yang sudah makin global dan *online*, maka hanya akan dibahas beberapa contoh untuk memberikan gambaran. Gaya belajar para profesional makin kaya dan beraneka ragam. Pembelajaran untuk profesional terus berubah cepat dengan adanya belajar-e dan teknologi audio-video.

2. Kompetensi

Sebelum pembahasan lebih lanjut, perlu disinggung tentang istilah **kompetensi** yang digunakan dalam profesi.

Mengapa kompetensi itu penting? Sebab kompetensi sering ditetapkan sebagai sasaran pembelajaran. Seorang profesional belajar untuk mencapai suatu kompetensi tertentu yang diwajibkan dalam profesinya. Kompetensi sering menjadi standar untuk mengukur sejauh mana keberhasilan suatu pembelajaran.

Banyak definisi kompetensi yang dapat dipakai dalam profesi, di antaranya:

Demonstrated performance and application of knowledge to perform a required skill or activity to a specific, predetermined standard.

Totland, Terje, 1997. Enterprise Modelling, thesis at doctoral degree "doktor ingeniør" at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Norwegia.

- Pelatihan Profesional Jarak Jauh

Tersedia dalam <http://www.idi.ntnu.no/grupper/su/publ/html/totland/ch071.htm> 20 Agustus 2005.

The ability to perform work activities to the standards required in employment

University of Warwick, 2001. *Glossary of Terms and Concepts (UK)*. Centre for Lifelong Learning, UK. Tersedia dalam <http://www.warwick.ac.uk/fac/soc/conted/SocratesAPEL/uk/glossuk.htm> 1 September 2005.

Kompetensi profesi yang sesuai adalah “kemampuan bekerja yang memenuhi standar-standar yang diperlukan dalam suatu pekerjaan atau profesi tertentu”.

Dalam suatu profesi, kompetensi tidak hanya sekedar pengetahuan, melainkan meliputi kemampuan bekerja yang dilaksanakan dalam suatu profesi tertentu. Ada dua jenis kompetensi, yang pertama adalah kompetensi jelas, yaitu kompetensi yang mudah dibentuk dan terlihat jelas, dan yang kedua adalah kompetensi lunak, yaitu kompetensi yang perlu waktu lama untuk dibentuk, karena bersifat tersembunyi. Misalnya kompetensi seorang sekretaris terdiri dari aneka pengetahuan dan keterampilan teknis kesekretariatan yang mudah terlihat, namun meliputi kompetensi lunak, antara lain orientasi pada pelanggan, berpikir analitis dan konseptual, serta fleksibilitas dalam bekerja. Lebih lanjut jenis kompetensi juga bisa dibedakan antara kompetensi inti, kompetensi manajerial, dan kompetensi fungsional. Organisasi memerlukan orang-orang yang memenuhi syarat agar menghasilkan kinerja tinggi, sehingga penilaian kompetensi amat diperlukan. Berbagai definisi dan model telah dikembangkan dalam bidang ini (Permana, Nina Insania, 2005).

3. Dalam Bidang Pembelajaran Profesi Apakah PJJ Dapat Digunakan?

Untuk mencapai kompetensi suatu pekerjaan, metode pembelajaran yang diperlukan amat bervariasi, termasuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Setiap profesi memerlukan kompetensi khusus dan mengenai cara mencapainya, tidak semua orang percaya pada metode PJJ. Ada pengajar yang secara intensif menggunakan PJJ, namun ada juga yang menolaknya, sehingga sering terjadi pro-kontra di kalangan para profesional. Pada kenyataannya tidak semua pembelajaran menggunakan PJJ. Pelatihan-pelatihan mutakhir dalam skala besar bisa menggunakan kombinasi metode. Dalam perkembangan terakhir ini PJJ ditempatkan sebagai sistem pendidikan yang bersifat komplementer terhadap sistem pendidikan biasa (Suparman, 2004).

Sebagai contoh untuk menggambarkan bahwa PJJ bisa dipakai untuk proyek skala besar lintas negara, di Eropa ada sebuah proyek bernama proyek *Europhamili*, dengan tujuan untuk melatih manajemen bagi tenaga profesional dalam bidang layanan kesehatan. Lingkupnya seluruh Eropa. Cara yang dipilih adalah dengan gabungan antara berbagai metode di antaranya kelas pelatihan, praktek lapangan, serta PJJ.

60% of course time will be allocated to field activities in the form of practical placements, data collection, development of a professional project linked to the trainee's interests...

One of the innovative tools used on the EUROPHAMILI course is a purpose built distance learning platform. It will enable both individual and collective work to be organised, whilst encouraging exchanges with teachers and tutors. (<http://www.europhamili.org/index.php>).

Europhamili, 2005. The European Training Course for Health Service Professionals. ENSP, European Commision. Tersedia

- Pelatihan Profesional Jarak Jauh

dalam <http://www.europhamili.org/index.php>, 18 November 2005.

Pada awalnya PJJ banyak digunakan dalam ilmu-ilmu sosial karena dianggap memiliki kelemahan dalam pengajaran praktek. Penerapan yang secara luas dilakukan adalah pembelajaran manajemen dan bisnis. Pada saat ini terdapat ribuan jasa manajemen dan bisnis dengan metode PJJ. Kutipan promosi berikut ini berasal dari sebuah situs web perusahaan penyedia jasa manajemen yang menggambarkan bahwa PJJ cukup berhasil diterapkan dalam bidang tersebut:

We specialise in the supply of Home - study training courses and training aids to many successful managers, salespeople and entrepreneurs. Our training courses are designed to help you get more out of your current situation, or guide you through a new venture, which will help you increase your earning potential and promotional prospects. Information is only good if it can be proved to work successfully. That is why these courses have been put together with knowledge obtained from over fifty years of successful business, selling and management experience. ...

Syllabus includes-improving your own & others performances, effective management of people, selecting the appropriate forms of communications, understanding the causes of motivation and job satisfaction, how to implement methods to improve motivation, performance management, employee development, meaningful appraisals and reviews, developing team effectiveness, recruiting the right people and understanding the art of decision making.

Libra Management Training, 2005. Distance Learning/Home - study Courses. Libra, UK. Tersedia dalam

<http://www.libramanagement.co.uk/21350.html> 1 September 2005

Metode PJJ dalam bidang manajemen dan bisnis tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan saja melainkan sudah mencapai praktek dan penerapannya dalam perbaikan kinerja dan keterampilan bahkan untuk meningkatkan motivasi dan sikap kerja.

Perusahaan menerapkan PJJ sebagai bagian dari pembelajaran mereka. Banyak organisasi membentuk universitas korporat, pusat pendidikan dan pelatihan. Mereka menggunakan PJJ karena mempercepat pembelajaran dan meningkatkan keunggulan kompetitif, meningkatkan produktivitas, mengefisienkan proses rekrutmen dan retensi karyawan, serta menghemat biaya. IBM Global Campus, misalnya memiliki lebih dari 1.000 bahan belajar termasuk modul-modul berbasis-web. Pengeluaran perusahaan-perusahaan raksasa juga sangat besar. IBM mengeluarkan 2 milyar dolar per tahun. General Electric 500 juta dolar per tahun untuk pembelajaran korporat mereka. Total pasar untuk pembelajaran korporat dan pemerintah global diperkirakan lebih dari 365 milyar dolar di tahun 2003. Diperkirakan sebanyak 50% pelatihan yang dilakukan melibatkan teknologi. Pasar belajar-e meningkat pesat hingga lebih dari 11 milyar dolar pada tahun 2003 dan meningkat terus (Oblinger, Diana G, and Sean G Rush, 2003).

Sebagai gambaran lain, PJJ juga sudah memasuki bidang bimbingan hidup dan konseling spiritual, suatu penerapan yang amat bersifat praktek, terapan dan pribadi, yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh metode konvensional, bahkan dengan bantuan tutor secara khusus. Contoh berikut merupakan gambaran bahwa belajar spiritual dapat menggunakan PJJ:

More than 25 years ago, Holistic Learning Centers began as a Self-actualization training company called LIFE Seminars. HLC has since evolved into a spiritual-based HOLISTIC DISTANCE LEARNING SCHOOL that offers clinically proven courses, self-actualization intensives, educational products & services with supervised internships, one on one

- Pelatihan Profesional Jarak Jauh

personalized instruction, tele-classes & tele-sessions, training manuals, client textbooks, and audiocassette training programs. Holistic Learning Centers life coaching, spiritual counseling, life coaching school's curriculum are customized to meet its student's time restraints, educational background and budgetary needs.

HOLISTIC LEARNING CENTER, 2005. Life Coach Training & Spiritual Counseling. USA. Tersedia dalam

<http://www.holisticlearningcenter.com/distance.html>, 01 September 2005

PJJ memang banyak digunakan untuk ilmu-ilmu sosial yang tidak banyak memerlukan praktek dalam laboratorium secara nyata. Namun demikian ada pengalaman bahwa PJJ dapat dipakai dalam ilmu-ilmu nonsosial. Berdasarkan pengalaman di Australia (Taylor dalam Suparman, 2004), PJJ ternyata berhasil digunakan untuk belajar teknik mesin tingkat subprofesional.

Teknik mesin di Australia diajarkan pada dua tingkat: sub-profesional dan profesional. Tingkat subprofesional adalah tingkat yang paling banyak peminatnya. Secara logika, pembelajaran teknik mustahil jika harus menggunakan PJJ. Prakteknya memerlukan lab dan praktek lapangan. Namun penggunaan PJJ di Australia dicoba dilakukan karena keterbatasan jumlah ahli teknik mesin dan jauhnya tempat-tempat pertambangan dan pembangunan dari pusat-pusat kampus. Tenaga-tenaga subprofesional ini menjadi pengawas proyek pembangunan dan asisten tenaga lulusan profesional. Program pengajaran tersebut merupakan program pascamatrikulasi paruh waktu selama empat tahun. Di dalamnya terdapat praktik dan praktikum yang melibatkan berbagai aspek kegiatan, termasuk tenaga pengawas mahasiswa, catatan kerja praktik, penggunaan kotak percobaan serta prosesor mikro. Institut Teknik mengakui bahwa lulusan program PJJ ini berhasil dengan baik. Meskipun demikian, untuk tingkat profesional

gagasan ini masih ditolak oleh kelompok konservatif (Suparman, 2004, hal. 132-134).

Di negara-negara lain, program PJJ untuk profesional telah dilaksanakan secara luas. Di Kanada, Jepang, Inggris, dan diberbagai negara maju, PJJ sudah diterapkan secara luas. Di negara berkembang seperti Venezuela, tahun 1964 lebih dari 20.000 orang mendaftar PJJ. Pada tahun 1985, di Kenya 4500 orang mengikuti pendidikan guru sementara dengan syarat berpengalaman mengajar minimal 3 tahun. Program ini digabung dengan tatap muka dan siaran radio. University of South Pacific (USP) di Fiji, Pasifik Selatan menawarkan program pendidikan guru melalui program jarak jauh. Di Thailand yang mulanya memberikan pendidikan untuk guru dan administrator, kini memberikan pendidikan manajemen, ilmu murni, hukum, ilmu kesehatan, dan pertanian. Di Cina, perguruan tinggi dan universitas di Beijing telah menawarkan program korespondensi sekitar 140 pilihan dari berbagai ilmu. PJJ juga digunakan dalam pelatihan profesional untuk para guru (www.crel.org). Indonesia melalui Universitas Terbuka telah menggunakan metode PJJ:

Di Indonesia sendiri, Universitas Terbuka menawarkan program penyetaraan D II dan S1 guru SD. Masukannya adalah para Guru SD yang mempunyai latar belakang pendidikan SPG atau sederajat. Di samping itu UT menawarkan pula program penyetaraan D III Guru SLTP dengan masukan guru SMP yang mempunyai latar belakang pendidikan D1 atau yang sederajat. Demikian pula U1 menawarkan program S1 Guru SLTA dengan masukan guru SLTA yang berlatar belakang D III atau yang sederajat. Mulai tahun 2001, program S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), ditawarkan dengan menggunakan paket bahan ajar multimedia serta komponen praktek dan praktikum. Program-program tersebut dilaksanakan dengan menggunakan bahan cetak, kaset audio, tutorial tatap muka, dan praktik mengajar atau praktik pengalaman

- Pelatihan Profesional Jarak Jauh

lapangan. Dalam matakuliah IPA digunakan kit sains. Ini semua menunjukkan bahwa PJJ mampu menawarkan program yang melibatkan praktik sebab konsep PJJ memang lebih dari sekedar konsep korespondensi (Suparman, 2004, hal. 135).

Semua contoh tersebut membuktikan bahwa PJJ bisa digunakan dalam berbagai bidang pembelajaran profesi dan telah terbukti berhasil. PJJ digunakan dengan menggunakan aneka bahan dan media ajar, termasuk tutorial tatap muka dan pengawas praktik lapangan. Perbedaannya terletak pada tingkat kesulitannya. Ada kompetensi kerja yang mudah di-PJJ-kan dan ada yang lebih sulit.

4. Kompetensi PJJ

Terdapat tiga jenis kompetensi yang diperlukan dalam sebuah profesi, yaitu:

1. Kompetensi dalam pengetahuan (*Knowledge*, disingkat K)
2. Kompetensi dalam keterampilan (*Skill*, disingkat S)
3. Kompetensi dalam sikap kerja (*Attitude*, disingkat A)

Tiga jenis kompetensi di atas --sering disingkat KSA--, merupakan sasaran yang hendak dicapai dalam pembelajaran profesional. PJJ dapat dipakai untuk pengetahuan dan sebagian keterampilan. Sedangkan untuk sebagian besar sikap kerja yang masuk golongan *keterampilan halus*, misalnya hubungan antar-pribadi, cara berkomunikasi, dan macam-macam sikap yang mendukung kelancaran pekerjaan, sampai sekarang PJJ masih dianggap lemah, karena pengajar sulit bahkan tidak dapat memberikan contoh dan mengawasi langsung prakteknya.

Bagi profesional, pembelajaran yang populer dan sering dipakai adalah *training*, *coaching*, *counselling*, dan *mentoring*. *Training* lebih bersifat pelatihan di kelas. *Coaching* dan *counselling* bersifat

satu persatu atau individual. Dengan dukungan aneka media dan teknologi maju yang ada sekarang ini, sebetulnya PJJ dapat dipakai untuk *training*, *coaching* dan *counselling*, meskipun sulit untuk *mentoring*. Dalam metode *mentoring*, pengajar memberikan praktek hidup untuk dilihat dan ditiru siswa. Seorang tukang batu belajar menjadi profesional dengan terlebih dahulu menjadi pembantu tukang lain yang akan mengajarnya dalam jangka waktu cukup lama. Untuk mencapai kompetensi yang diharapkan dalam sebuah profesi, tidak cukup hanya dengan pelatihan interaksi jarak jauh ditambah tutorial tatap muka sesekali saja, melainkan perlu diberikan contoh nyata kehidupan seorang mentor pada anak didiknya dalam jangka waktu cukup lama. Untuk itulah PJJ digunakan secara bijaksana, sesuai keunggulan dan kelemahannya.

5. Pembelajaran untuk Pengembangan Karier Profesional

Seseorang dikatakan profesional jika memiliki berbagai kompetensi sebagai syarat dijalankannya profesi itu. Dengan demikian, saat ini terdapat beberapa bidang yang dikembangkan.

Yang pertama tentang sumber daya manusia berdasarkan kompetensi. Di dunia ini, organisasi yang terbanyak mengeluarkan biaya untuk pengembangan kompetensi adalah perusahaan. Perusahaan memerlukan peningkatan kompetensi para karyawannya untuk mengikuti tantangan persaingan dan perubahan yang semakin cepat.

Dari segi sumber daya manusia perusahaan, pembelajaran untuk pengembangan karier merupakan bidang yang berkembang dalam beberapa dekade ini karena berhubungan dengan produktivitas dan pengembangan perusahaan. Karier didefinisikan sebagai perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997).

- Pelatihan Profesional Jarak Jauh

Peningkatan produktivitas menjadi sasaran utama pembelajaran di perusahaan-perusahaan: bagaimana menghasilkan keluaran semaksimal mungkin dengan masukan seminimal mungkin; bagaimana meningkatkan kinerja bisnis; bagaimana meningkatkan kinerja layanan di departemen publik; bagaimana meningkatkan kinerja lembaga-lembaga nirlaba. Hal-hal ini menjadi topik bahasan yang selalu diminati dalam pembelajaran profesi.

Sejak dilakukan eksperimen studi kerja, industri dan dunia kerja berlomba mencari cara paling baik untuk meningkatkan produktivitas kerja. Sejak itu berbagai metode peningkatan kinerja terus dikembangkan; antara lain ada yang menggunakan metode PJJ: 1) *Balanced Scorecard*, 2) ISO 9001:2000 sistem manajemen mutu, 3) Aliran Kontinyu, 4) Six Sigma, 5) *Seven Wastes*, 6) Teori Konstrain, 7) Manajemen Mutu Terpadu (TQM), dan sebagainya (<http://www.agilean.com/methods.htm>)

B. Pelatihan Jarak Jauh untuk Profesional: Contoh Kasus PMJJ-PPM

1. PMJJ-PPM, Fungsi dan Satuan Pendidikan

Kasus berikut ini akan menggambarkan secara umum bagaimana pelaksanaan suatu pelatihan jarak jauh untuk profesi manajemen. PMJJ-PPM (Pembelajaran Manajemen Jarak Jauh PPM) adalah bagian dari Lembaga Manajemen PPM yang bergerak dalam pelatihan manajemen secara jarak jauh. PMJJ PPM dimulai sejak tahun 1979 dan setiap tahunnya secara rutin terus menambah modul-modul baru.

Pembelajaran ini dirancang khusus bagi karyawan atau wirausaha yang ingin belajar manajemen, namun sulit meninggalkan tempat kerja. Bentuknya adalah modul-modul singkat yang terapan: banyak contoh dan ilustrasi. Jumlah halaman per modul berkisar

dari 50 sampai 150 halaman. PMJJ-PPM memberikan sertifikasi untuk peserta yang lulus per modulnya. PMJJ-PPM terutama menggunakan bahan cetak, yang didukung oleh teknologi informasi (web/belajar-e, kaset audio, e-mail, fax, dan telepon).

Dengan metode PJJ, peserta tidak perlu hadir di kelas dan tutorial dilakukan secara tertulis, namun atas permintaan perusahaan diadakan tutorial kelas yang dipimpin oleh para staf pengajar Lembaga Manajemen PPM. Sebagian modul PMJJ juga bisa dialih-kreditkan ke mata kuliah Universitas Terbuka. Pemegang Sertifikat PMJJ dapat mendaftar dan melanjutkan ke program gelar Sarjana di Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Terbuka. Beberapa modulnya disediakan dalam bentuk belajar-e.

Tahun 2005 tersedia 29 paket kursus, yang terdiri dari 88 modul. Sejak tahun 1979 program ini telah diikuti 99.000 peserta, baik secara pribadi maupun secara kelompok perusahaan di seluruh Indonesia.

2. Kurikulum dan Bahan Belajar Mandiri

Setiap paket dan modul disusun untuk kebutuhan khusus organisasi yang memerlukan pelatihan manajemen untuk suatu topik tertentu. Tidak ada suatu kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan formal tertentu.

Daftar paket kursus yang tersedia antara lain:

Kelompok Manajemen Umum

- Manajemen Umum
- Manajemen Proyek
- Manajemen Perkantoran
- Pengorganisasian
- Perencanaan dan Pengendalian
- Manajemen Kesekretarian

- Pelatihan Profesional Jarak Jauh

Kelompok Manajemen Pemasaran

- Manajemen Pemasaran
- Salesmanship (Kewiraniagaan)
- Manajemen Pemasaran Ekspor

Kelompok Manajemen Keuangan

- Manajemen Keuangan
- Akuntansi Keuangan
- Akuntansi Biaya
- Akuntansi Manajemen
- Manajemen Keuangan untuk Nonmanajer Keuangan

Kelompok Manajemen Personalia

- Manajemen Personalia (Sumber Daya Manusia)
- Supervisi Tenaga Kerja

Kelompok Manajemen Produksi

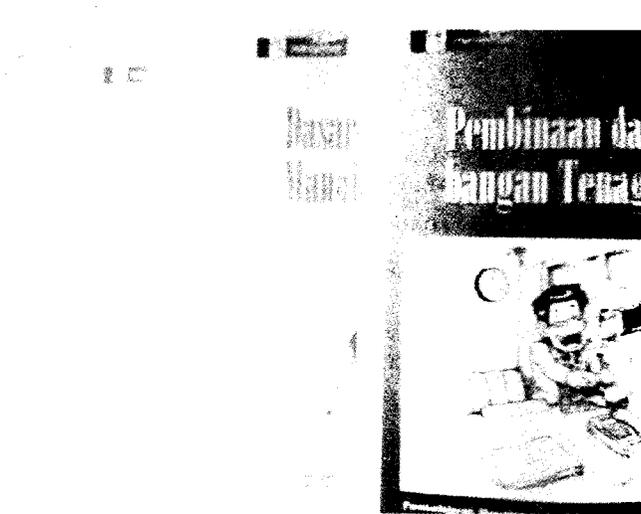
- Manajemen Produksi
- Manajemen Pembelian
- Manajemen Pergudangan
- Gemba Kaizen (Peningkatan Produktivitas ala Jepang)
- 5 - S (Manajemen Tempat Kerja ala Jepang)

Kelompok Keterampilan Khusus

- Manajemen Partisipatif
- Pengambilan Keputusan
- Manajemen Organisasi Seni
- Manajemen Risiko
- Manajemen Bisnis Ekspor Impor



Gambar 1: Suasana di PMJJ-PPM



Gambar 2. Sebagian sampul modul-modul Manajemen

- Pelatihan Profesional Jarak Jauh

3. Proses Pembelajaran, evaluasi, dan ujian

Proses belajar peserta cukup sederhana, yaitu sebagai berikut:

a. Mendaftar

Calon peserta dapat mendaftarkan diri setiap saat dengan mengisi formulir pendaftaran dan membayar biaya kursus. Pembayaran biasanya dilakukan melalui transfer bank, sedangkan pengembalian formulir pendaftaran melalui fax. Pendaftaran melalui web maupun e-mail mulai banyak dilakukan.

b. Menerima Bahan Kursus

Setelah mendaftar, peserta akan menerima bahan kursus lengkap dengan perangkatnya.

c. Mulai belajar

- Mempelajari rata-rata satu unit per minggu
- Mengerjakan latihan soal dan kasus

d. Kesulitan belajar

Apabila menemui kesulitan dalam belajar, peserta dapat mengajukan pertanyaan secara tertulis dengan menggunakan formulir permintaan keterangan. Pertanyaan dapat disampaikan melalui e-mail atau fax, dan dijawab secara tertulis. Tutorial tertulis semacam ini tidak dikenakan biaya tambahan dan pertanyaannya tidak dibatasi. Bila perusahaan memerlukan tutorial tatap muka, dikenakan biaya tambahan.

e. Menerima bahan ujian

Setelah jangka waktu dua bulan, secara otomatis peserta dikirim bahan ujian. Namun demikian, peserta dapat mengajukan ujian lebih cepat dengan cara memberitahukan kepada PMJJ-PPM terlebih dahulu. Ujian dikirimkan dalam bentuk tertulis, fax, atau e-mail sesuai permintaan peserta. Pada umumnya soal berbentuk sederhana, yaitu pilihan berganda, benar-salah, atau esai.

f. *Pelaksanaan Ujian*

Peserta menjawab soal ujian yang telah diterima dalam batas 3 minggu dan segera mengirimkan jawaban ujian ke PMJJ-PPM. Untuk peserta individual yang tersebar di seluruh Indonesia, pelaksanaan ujian belum dapat diawasi di sebuah tempat. Namun di perusahaan-perusahaan yang mengikutsertakan banyak peserta, umumnya pelaksanaan ujian dikoordinasikan, sehingga dilaksanakan dan diawasi di satu tempat.

4. Tenaga Kependidikan

Pembina PMJJ-PPM adalah para staf pengajar di Lembaga Manajemen PPM, saat ini berjumlah 11 orang, 1 orang bergelar S-1, 9 orang bergelar S-2 dan satu orang dengan gelar S-3. Sembilan orang adalah staf intern Lembaga Manajemen PPM, dan dua orang dari luar lembaga tersebut.

Tanggung jawab pembina antara lain adalah menulis dan mengembangkan bahan agar menjawab pertanyaan peserta, dan mengoreksi jawaban ujian.

Staf administrasi dan pemasaran berjumlah 5 (lima) orang. Satu orang kepala bagian, dua orang administrasi peserta dan pembuatan bahan, satu orang untuk administrasi bahan, dan satu orang di bagian pemasaran serta pendaftaran.

5. Sarana dan Prasarana

Saat ini PMJJ-PPM menempati ruang di Jl. Menteng Raya 9 Jakarta Pusat dan mempunyai beberapa sarana penunjang, di antaranya komputerisasi. Komputerisasi itu meliputi data peserta, entri dan pencarian data, status belajar peserta, keuangan, administrasi surat-menyurat dan ujian, pembuatan sertifikat, dan pembuatan laporan. Beberapa tampilan layar komputer berikut ini memberikan contoh gambaran tentang sarana.

- Pelatihan Profesional Jarak Jauh

LAPORAN PENJUALAN

LAPORAN PENJUALAN TAHUN 2007

NO. KAMUS SAJATI	KODE PENJAJARAN	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DES
1. MAHASISWA PERKANTORAN	111.1	24	5	1	4	3	4	4	5	0	0	0	0
	111.2	21	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	111.3	12	3	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0
2. MAHASISWA PERKAMPUS	112.1	23	3	4	1	3	1	4	5	0	0	0	0
	112.2	22	2	1	1	4	2	1	0	0	0	0	0
	112.3	14	4	1	1	1	3	2	5	0	0	0	0
3. MAHASISWA PERKANTORAN	113.1	13	2	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	113.2	5	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	113.3	7	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
4. PERUSAHAAN	114.1	5	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	114.2	7	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0
	114.3	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
5. PERUSAHAAN/PERUSAHAAN/PERUSAHAAN	115.1	14	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	115.2	7	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	115.3	10	2	4	2	1	2	0	0	0	0	0	0
7. MAHASISWA PERUSAHAAN	117.1	26	4	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	117.2	15	2	1	4	1	1	0	0	0	0	0	0
	117.3	9	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
8. MAHASISWA PERUSAHAAN	118.1	5	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	118.2	6	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	118.3	6	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9. MAHASISWA PERUSAHAAN	119.1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	119.2	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	119.3	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
10. MAHASISWA PERUSAHAAN	120.1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
	120.2	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
	120.3	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0

Page 1 of 2

Gambar 3. Laporan Kepesertaan

Modifikasi Data Peserta

File Record

Data Peserta

No. Kepesertaan: _____

Nama Peserta: _____

Perusahaan: _____

Entitas: _____

Alamat: _____

RTA: _____ BUKU FIS: _____

BANK: C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Definisi: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

ALAMAT KEMERAHAN: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Foto Serwis: Ya Tidak

Gambar 4. Entry dan Modifikasi Data Peserta

- Pelatihan Profesional Jarak Jauh

organisasi atau asosiasi profesi, perusahaan, universitas, bahkan pemerintah dan lembaga-lembaga lain.

Di Indonesia, sertifikasi profesi mulai ditangani secara serius melalui pembentukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), suatu lembaga independen yang bertanggung jawab pada presiden, dibentuk berdasarkan PP no. 23 tahun 2004, dengan anggota dari swasta dan pemerintah. BNSP diprakarsai oleh 3 Menteri terkait dan KADIN Indonesia dengan Surat Keputusan Bersama (SKB). BNSP adalah bagian dari Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Visinya adalah menjadi lembaga otoritas yang tepercaya dalam menjamin kompetensi tenaga kerja secara nasional dan internasional. Badan ini bertugas menyelenggarakan sertifikasi melalui uji kompetensi. Selain meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di dalam maupun luar negeri, tujuannya yang lain adalah menjadi filter masuknya tenaga kerja asing.

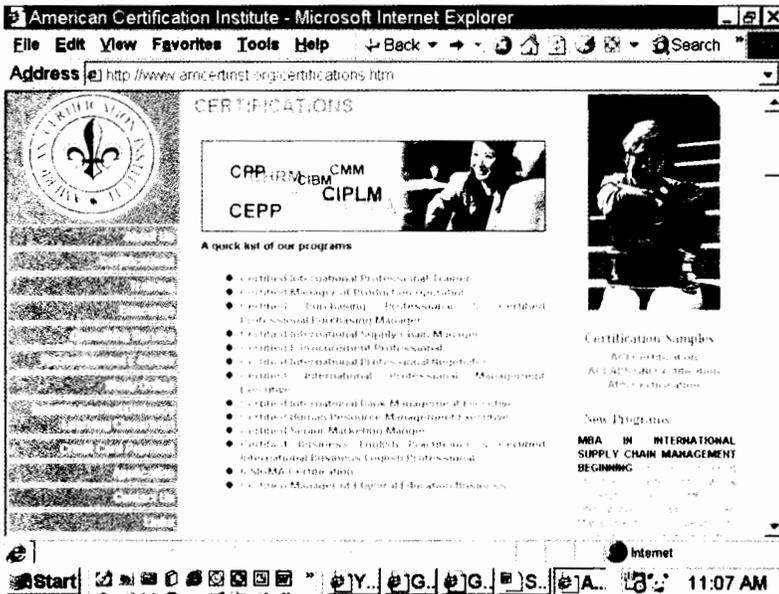
Salah satu penyebab sertifikasi ini berkembang secara global adalah internet. Internet mengatasi kendala waktu, tempat, dan kesulitan kirim-mengirim yang biasanya menjadi kendala para profesional. Melalui internet, belajar dan ujian dapat dilakukan di mana saja, tidak harus datang ke sebuah lokasi tertentu, tetapi cukup mendaftar di situs *web*, membayar, mengikuti persyaratan, dan sebagian besar ujian dilakukan melalui *web* atau e-mail. Hal ini sangat menghemat waktu. Pengakuan sertifikasi mudah diperoleh. Sebagian pengakuan sertifikasi bahkan tanpa ijin pemerintah sama sekali, cukup disahkan oleh organisasi profesi dan diakui dalam profesi itu. Banyak sertifikasi yang bersifat global dan dapat diperoleh siapa saja yang berminat dan bekerja sebagai profesional. Pasar atau konsumenlah yang menentukan.

Karena kemudahan itulah, maka banyak lembaga dan asosiasi profesi menawarkan sertifikasi melalui situs web mereka. Karena pertumbuhannya begitu cepat dan bersifat global, maka tidak

mungkin untuk mendapatkan daftar penyedia sertifikasi secara lengkap di seluruh dunia. Sebagai gambaran, berikut ini terdapat (sebagian kecil) daftar sertifikasi dari berbagai bidang profesi:

1. Sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi

Sebagai contoh adalah dari *American Certification Institute*, yang memberikan sertifikasi dalam bidang manajemen bisnis. www.amcertinst.org



Berikut ini adalah beberapa program sertifikasi yang ditawarkan:

- Certified International Professional Trainer*
- Certified Manager of Production Operation*

- **Pelatihan Profesional Jarak Jauh**

Certified Purchasing Professional & Certified Professional Purchasing Manager

Certified International Supply Chain Manager

Certified E-Procurement Professional

Certified International Professional Negotiator

Certified International Professional Management Executive

Certified International Bank Management Executive

Certified Human Resource Management Executive

Certified Senior Marketing Manger

Certified Business English Practitioner & Certified International Business English Professional

6-SIGMA Certification

Certified Manager of Physical Education Business

2. Sertifikasi dari Perusahaan

Beberapa perusahaan sering menawarkan sertifikasi. Misalnya dalam bidang komputer, sasarannya adalah para profesional pengguna produk mereka. Microsoft mengeluarkan banyak produk populer yang dipakai secara luas dan penguasaan produk itu memerlukan kompetensi khusus yang sulit diperoleh hanya dari sekolah resmi atau dari kursus biasa. Maka Microsoft membuka pelatihan dan sertifikasi khusus untuk produk-produk mereka.

IBM: Professional Certification Program from IBM.

NOVELL: Professional Certifications.

Sybase Inc – Certification.

Microsoft Certified Professionals (MCPs)

Certified NetAnalyst - Network Forensic Professional.

Certified Linux Professional.

Sun Java Certification.

CFRE. Philanthropic fundraising executives.

Berbagai macam sertifikasi komputer:

MCSE, CCNA, Microsoft ... Quick Cert - Accurate and Professional Certification Tools CBT Direct - Courses include MCSE, Cisco, A+, Linux, Oracle and more.

Certified Internet Web Professional.

Computer Professional Certification.

Microsoft Training and Certification Online

UNIX Training and Linux Certification.

3. Sertifikasi dari Organisasi Profesi dan lain-lain

Sertifikasi dari organisasi profesi berjumlah paling banyak.

Certified Professional Environmental Auditor (CPEA); Certified Public Accountant (CPA) etc. www.taxsites.com/certification.html
Project Management Institute.

www.pmi.org/info/PDC_CertificationsOverview.asp

Paralegal Professional Certification www.nala.org/cert.htm

Certified Administrative Professional® (CAP®) rating through IAAP.

www.iaap-hq.org/cert/advantage.htm

GIS (Geographic Information Systems) Certification. www.gisci.org/

Modeling and Simulation Professional Certification.

www.simprofessional.org/

LPI - Certification. Linux Professional Institute.

www.lpi.org/en/lpic.html

Information Security CISSP and SSCP, (ISC)², Inc.

<https://www.isc2.org/>

ICCP - Institute for Certification of Computing Professionals

www.iccp.org/iccpnew/certification.html

Linux Professional Institute. www.lpi.org/

ICCP - Institute for Certification of Computing Professionals.

Certified Computing Professional. www.iccp.org/iccpnew/

- **Pelatihan Profesional Jarak Jauh**

XML Development Professional Certified Program.

<http://learningtree.com/us/cert/progs/7062.htm>

Informatica Professional Certification,

www.informatica.com/services/education_services/certification/default.htm

OPSEC Certified Professional (OCP) Application Process.

www.opsec.org/OCPCertification.html

Certified System Administrator (CSA); etc.

www.caldera.com/education/certification.html

Certified Data Management Professional Program.

<http://dama.internet4associations.com/public/pages/index.cfm?pageid=578>

MySQL Professional Certification <http://phpnuke.org/>

Certified Internet Web Professional.

www.ciwcertified.com/certifications/mcasa.asp?comm=CND&llm=2

NACM Credit Certifications. Credit management professionals.

www.nacm.org/education/certification/certification.html

Certified Information Systems Security Professional.

<http://apec.isu.edu/professcert.htm>

Certification of Computing Professionals.

www.computer.org/certification/FactorFiction.htm

Professional Physicist Certification. www.cap.ca/cert/cert.html

Drug and Alcohol Professionals.

www.fdap.org.uk/certification/certification.html;

www.iaodapca.org/

Certification for Licensed Psychologists in Substance Abuse Treatment. The American Psychological Association.

www.apa.org/college/

Hospitality Industry Professional Certification, Certified Hospitality Sales Professional (CHSP) etc. www.ei-ahla.org/certification.asp

Retailer's Bakery Association – Certification.

www.rbanet.com/development/certification.htm

The Wildlife Society professional certification program.

www.wildlife.org/professional/index.cfm

American Fisheries Society. www.fisheries.org/Certification.shtml

Master Teaching Professional Golf Certification.

www.usgtf.com/level4.html

American Culinary Federation Certification.

www.acfchefs.org/certify/crt.html

ASM Academy. Certification by the American College of Microbiology; American Board of Medical Laboratory Immunology (ABMLI).

www.asm.org/Academy/index.asp?bid=2105

American Fisheries Society Professional Certification.

www.fisheries.org/html/Certification.shtml

The Society of Wetland Scientists Professional Certification Program,

www.wetlandcert.org/

Corrections Certification Program. www.aca.org/certification/

ACES Int'l Certification Programs: Professional Fiber Optics.

www.acesinternational.org/

CPAM (Certified Patients Account).

www.aaham.org/certification/prof/prof_certification.htm

Professional Certification-Classroom Teacher.

www.edu.gov.mb.ca/ks4/profcert/teachapp.html

Nursing Specialty Professional certification, in clinical or professional area.

www.njha.com/healthrecruitment/certification.aspx

Certified Petroleum Geologist. www.dpa.aapg.org/certification.cfm

Transportation Professional Certification.

www.ite.org/certification/certification_board.html

ASFPM Certified Floodplain Manager Program.

www.floods.org/Certification/certprog.asp

- **Pelatihan Profesional Jarak Jauh**

MotherMassage®: Massage During Pregnancy Professional Certification <http://spas.about.com/library/blmothermassage.htm>

Librarian Professional Certification.

http://mbclc.state.ma.us/grants/state_aid/certification/pro_information.php

Professional Certification CCCPE – Ergonomics.

www.ace-ergocanada.ca/index.php?contentid=139

American Correctional Association (ACA): Professional Certification Program, Professional Development Specialist,

www.aca.org/certification/certification_certified.asp

Project Management Professional Certification

www.butrain.com/mdp/Project_Management_Professional_Certification.asp

Professional Certified Investigator (PCI).

www.asisonline.org/certification/pci/pcihow.xml

ISSA – Certifications. Business Continuity Professional Certification.

DRI International's world-renowned professional certification program (ABCP, CBCP, MBCP). www.issa.org/certifications.html

FDAP's Drug & Alcohol Professional Registration & Accreditation, Thames Valley University. www.fdap.org.uk/certification/dap.html

4. Perguruan Tinggi

Professional Certificates - UTA College of Education.

www.uta.edu/soe/graduate/esl.html

Professional Certifications & Programs at UNM Continuing Education <http://dce.unm.edu/Certificates/>

Professional Certification Exams.

www.iccsafe.org/certification/professional.html

Professional Certification Test Preparation Courses at the University of Minnesota. www.cce.umn.edu/professionalcertification/

Valdosta State University. Project Management Professional (PMP). Certified Bookkeeper (CB), etc.

www.valdosta.edu/conted/Programs/courses/procert.htm

Woodring College of Education - Residency Certificate.

www.wce.wvu.edu/Resources/Certification/Pro/

Cleveland State University Professional Certification & Licensure Programs. www.csuohio.edu/academic/acprocert.html

D. Belajar-e untuk Profesional

1. Belajar-e

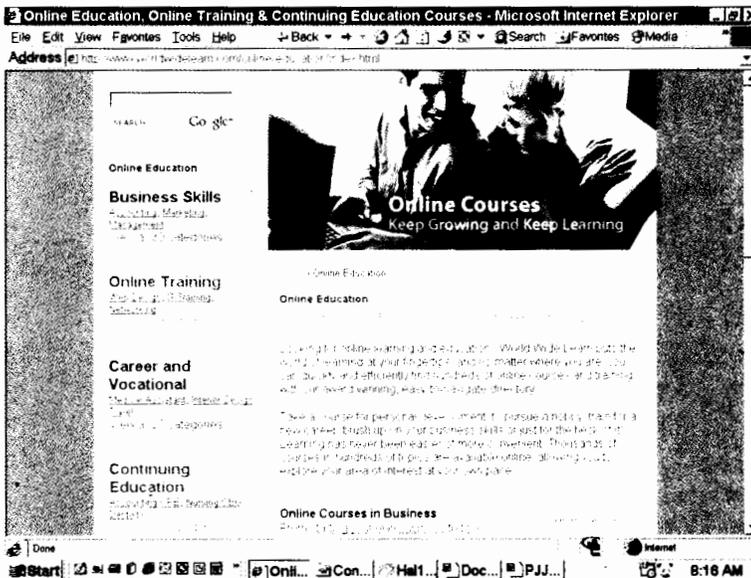
Salah satu perkembangan baru yang banyak diadopsi dalam pembelajaran profesional adalah belajar-e. Kebutuhan dan persaingan ketat dalam bisnis adalah faktor utama yang mendorong diadopsinya belajar-e. Belajar-e dan metode PJJ yang lain dinilai bisa meningkatkan pengenalan dengan pakar-pakar nasional maupun internasional, memperluas wawasan, mengurangi biaya, dan menurunkan biaya kesempatan dari produktivitas yang hilang (Berge, Zane L dalam Moore, 2003).

Belajar-e adalah belajar dengan media elektronik-internet. Semua yang dilakukan pada belajar konvensional dilakukan pula dengan metode ini. Semua dibawakan dalam media elektronik. Semua proses yang dialami siswa dalam belajar secara konvensional maupun PJJ (bimbingan, kelas, PJJ tertulis, dan sebagainya) juga dialami atau disimulasikan dalam belajar-e, meskipun beraneka ragam hasil dan efektivitasnya. Dari karakteristik pembelajarannya, belajar-e dapat dikategorikan dalam PJJ.

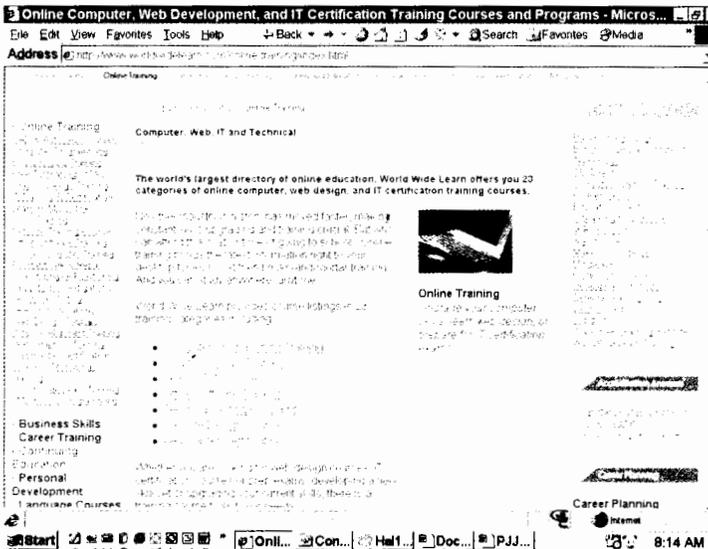
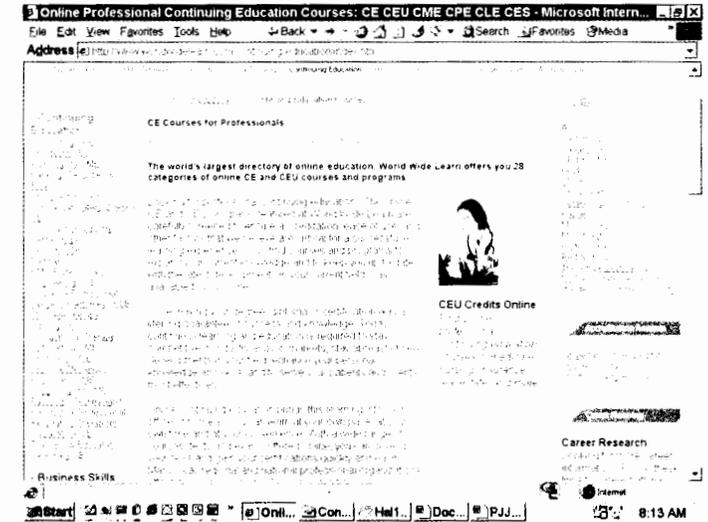
Penggunaan internet meningkat dengan cepat dari tahun ke tahun. Jumlah pengguna internet di Indonesia bertambah dari 1,9 juta orang di tahun 2000 menjadi 12 juta orang di tahun 2004 (estimasi dari APJII) dan di akhir tahun 2005 bertambah lagi menjadi

- Pelatihan Profesional Jarak Jauh

16 juta orang. Dari taksiran IDC, perusahaan intelijen dan riset pasar global, pasar untuk belajar-e di tahun 2002 secara global sudah melampaui pasar untuk belajar metode kelas. Diperkirakan mulai tahun 2002, 50% potensi pasar untuk pembelajaran menggunakan metode belajar-e, sedangkan sisanya metode CBT (pelatihan berbasis komputer) dan metode kelas (Sihotang & Prahesti, 2005).



Gambar Pelatihan dan Pendidikan Gelar Online dari Berbagai Bidang Studi dan Profesi



Gambar Contoh program-program PJJ *online* untuk pengembangan profesi.

- **Pelatihan Profesional Jarak Jauh**

Keuntungan untuk perusahaan antara lain:

- Meningkatkan kompetensi karyawan sehingga perusahaan lebih kompetitif.
- Distribusi informasi/bahan dapat dilakukan lebih cepat dan murah.
- Konsistensi materi belajar.
- Penghematan biaya.

Dalam penghematan biaya di tengah persaingan yang ketat, contoh kutipan berikut ini memberikan gambaran tersebut:

Sedangkan di dunia bisnis, belajar-e pada awalnya merupakan bagian dari upaya penghematan di perusahaan. Dalam kondisi persaingan usaha yang kian ketat seperti sekarang ini, perusahaan harus mampu mempertahankan konsumennya dengan cara memberi pelayanan yang terbaik. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan usaha menjadi salah satu kunci keberhasilan.

Bayangkan suatu perusahaan yang memiliki sejumlah cabang yang tersebar di berbagai daerah. Ketika meluncurkan sebuah produk baru, sewajarnya perusahaan itu tuntas melakukan pembaharuan pemahaman produk itu di seluruh cabang, khususnya lini depan yang langsung berhubungan dengan pelanggan. Dalam proses tersebut, biasanya cabang akan mengirim sejumlah karyawannya untuk mengikuti sejumlah pelatihan di kantor pusat, atau sebaliknya pusat akan mengirimkan karyawannya ke kantor cabang.

Yang terjadi pada saat itu adalah: perusahaan perlu mengeluarkan biaya untuk akomodasi dan transportasi peserta pelatihan dari cabang ke pusat atau sebaliknya ke cabang, selain biaya penyelenggaraan yang besar. Perusahaan perlu menyediakan waktu yang cukup panjang untuk mendatangkan peserta pelatihan dari berbagai cabang. Ada lagi bila terjadi perubahan yang harus disosialisasikan.

Ini contoh sederhana pada satu produk saja. Coba bayangkan apa yang akan terjadi, bila perusahaan itu harus meluncurkan sejumlah produk baru dalam kurun waktu singkat untuk menghadapi pesaingnya? (Septyarini, 2005, hal. 122).

Sebetulnya yang membedakan belajar-e dan metode PJJ lain adalah ciri khas belajar-e, yaitu di LMS (*Learning Management System*)-nya. LMS adalah mesin pembelajarannya, program web yang dipakai untuk belajar, berinteraksi dan berkomunikasi melalui *network* atau jejaring komputer di intranet maupun internet (Sembel, Sandra, 2005).

Komponen belajar-e secara umum adalah:

1. Konsultasi dan manajemen perubahan bagi perusahaan yang memerlukan introduksi dan implementasi belajar-e dalam sistem pembelajaran mereka.
2. LMS, diperlukan program belajar dan interaksi, sebagai kelas dan sekolah virtual.
3. Pembuatan bahan (modul).
4. Infrastruktur: komputer, server dan jaringan.

Belajar-e saat ini mulai dipakai oleh perusahaan yang memiliki fasilitas intranet dan internet. Di Indonesia, yang mulai banyak memanfaatkan adalah perbankan. Akan makin banyak perusahaan menggunakan cara ini.

Profil perusahaan yang cocok untuk memakai belajar-e:

- Jumlah karyawan > 200
- Memiliki produk atau jasa dalam jumlah yang banyak (contoh: bank, ritel)
- Jumlah keluar-masuk karyawan tinggi (contoh: asuransi)
- Pembaharuan informasi sering dilakukan karena informasi tersebut sering berubah (contoh: instansi pemerintah/Depar-

- Pelatihan Profesional Jarak Jauh

temen, misalnya Dirjen Pajak, Departemen Keuangan, BI) (bahan dari *E-Learning Summit*, 2005).

Dari segi materi, belajar-e juga sesuai bila materinya berupa:

- penjelasan langkah demi langkah,
- studi kasus, dibentuk simulasi,
- risiko dan biaya tinggi, misalnya simulator penerbangan.

Kelemahan belajar-e *muncul* jika digunakan untuk interaksi atau kontak langsung antarpeserta, misalnya bermain peran, kursus kepemimpinan, kursus bahasa, dan lain lain.

Menurut pengalaman, kendala penerapan *belajar-e* di Indonesia (untuk organisasi atau perusahaan) saat ini adalah

- mengubah budaya belajar peserta,
- ketersediaan komputer dan akses internet,
- biaya komputer dan akses internet yang masih tinggi,
- meyakinkan perusahaan bahwa belajar-e tidak akan mengurangi produktivitas (Majalah Infokomputer, Juni 2005).

Tantangan terbesar dalam pelatihan adalah mengubah budaya belajar, dari belajar terpimpin (di kelas) menjadi belajar mandiri.

Tantangan terbesar implementasi e-learning di dunia pendidikan maupun bisnis adalah budaya belajar mandiri. Ini memerlukan motivasi pribadi yang besar. Peserta harus mampu mengatur dan menaati sendiri jadwal belajarnya. Beban belajar pun ditentukan sendiri oleh peserta. Tutor hanya berperan sebagai konsultan yang membantu kesulitan pemahaman materi. Di perusahaan, pembentukan budaya ini dapat dibantu dengan dukungan peraturan perusahaan. (Septyarini, Majalah Infokomputer, Juni 2005, hal. 124).

Pengalaman Universitas Terbuka dalam menggunakan *tutorial online* untuk masyarakat yang lebih luas menyimpulkan bahwa kendalanya terletak pada masih rendahnya minat, tingkat melek TIK, serta daya jangkau mahasiswa UT dalam memanfaatkan internet. Masalah biaya, aksesibilitas dan aspek teknis masih menjadi kendala utama (Suparman, 2005).

Belajar-e memerlukan waktu rutin tiap hari untuk belajar sambil akses ke internet. Akses internet di Indonesia memerlukan biaya tidak sedikit dan jarang ada infrastruktur murah yang dapat diakses oleh siswa. Kendala biaya memang masih menjadi persoalan utama dalam belajar-e. Sebagai gambaran, belajar melalui Warung Internet (Warnet) masih terbilang mahal karena per jamnya paling murah harus membayar tiga atau empat ribu rupiah, sedangkan melalui Telkomnet Instan atau langganan internet *dial-up* harus membayar Rp 9 ribu hingga belasan ribu rupiah per jamnya sedangkan tidak semua kota memiliki jaringan internet atau warnet. Dalam hal ini terdapat berbagai faktor dan kepentingan bisnis, sehingga bantuan pemerintah amat diharapkan agar akses murah dapat diwujudkan.

Untuk mengubah gaya belajar, ternyata banyak sekali tantangan. Di organisasi, tantangan datang dari pegawai yang menyukai pelatihan konvensional karena pelatihan sering dianggap sebagai kesempatan bepergian ke luar daerah dan penghasilan tambahan. Kesiapan SDM agar melek komputer/internet merupakan permasalahan besar, bukan hanya di masyarakat luas, melainkan di dalam perusahaan-perusahaan.

Jika diterapkan di organisasi besar yang memiliki infrastruktur dan akses yang memadai, masih diperlukan manajemen perubahan yang intensif, berupa sosialisasi, ditambah pelatihan-pelatihan khusus, agen perubahan, peraturan dan sistem bantuan untuk menjawab aneka pertanyaan siswa, dan lain-lain.

- **Pelatihan Profesional Jarak Jauh**

Karena berbasis web yang merupakan teknologi baru, sering terjadi ketidaksinkronan dengan sistem-sistem lain di perusahaan, sehingga untuk menyesuaikan, bertambah banyak biaya yang dikeluarkan. Di Indonesia, akses semacam ini sering tidak lancar, sehingga hal ini sangat berpengaruh pada minat dan semangat belajar.

Keunggulan belajar-e terletak pada belajar menggunakan simulasi dan menerangkan prosedur. Kelemahannya terasa jika memerlukan interaksi langsung antarorang. Oleh sebab itu, belajar-e dan belajar konvensional (tatap muka di kelas) lebih baik dipakai secara gabungan, belajar-e dipakai sebagai pelengkap metode konvensional kelas dan tertulis.

Komponen Belajar-e adalah:

- Konsultan bagi perusahaan yang memerlukan pengantar belajar-e dalam sistem pembelajaran mereka.
- Manajemen Perubahan untuk mengubah kebiasaan belajar.
- SMB/LMS, yaitu program untuk belajar dan interaksi sebagai kelas dan sekolah virtual.
- Produksi isi atau materi belajar.
- Infrastruktur perangkat keras: komputer, server dan jaringan komputer.

2. Kasus Penerapan Belajar-e

Di dunia sudah banyak contoh penerapan belajar-e. Perusahaan-perusahaan yang khusus membuat program dan modul untuk belajar-e berjumlah puluhan bahkan ratusan, sebagai contoh adalah *WebCT*, *Blackboard*, *Microsoft*, *Enterprise*, *Saba*, *WBT*, *Oracle*, *Websoft*, *Docent*, *Learn Communication*, dan sebagainya.

Implementasi belajar-e di Indonesia sudah dilakukan antara lain di Bank Mandiri (mungkin terbesar di Asia Tenggara), Unilever, Motorola, IBM, GE, Binus, IM2, dan lain-lain.

Pada tahun 2005 modul yang telah diikuti di Bank Mandiri mencapai 40 ribu modul (Bondan, Riyani T, 2005)

Belajar-e dilirik sebagai alternatif solusi yang diharapkan mampu mengatasi persoalan secara efisien dan efektif. Untuk menghindari penurunan kinerja, maka terlebih dahulu harus ada dukungan dari manajemen puncak dan manajemen perubahan, perubahan cara kerja di seluruh tingkatan. Pendekatan yang digunakan bernama *Awareness, Interest, Trying, and Adopt*. *Awareness* dibentuk melalui focus group discussion untuk melihat sejauh mana penerimaan belajar-e di berbagai tingkatan. Selain itu ada penyebaran poster, penerbitan buletin dan penyebaran memo, serta diadakan *grand launching* di internal.

Untuk meningkatkan interes, belajar-e ini dikaitkan dengan kebijakan perusahaan. Jika ikut, karyawan mendapat angka kredit untuk kenaikan kariernya. Ada penghargaan terhadap mereka yang mencapai hasil terbaik di belajar-e ini.

Sebagai sarana Trying, disediakan sedikitnya satu Personal Computer (PC) untuk setiap unit. Di masing-masing unit maupun kantor cabang dipilih dan dibentuk agen-agen perubahan, biasanya dari kepala cabang atau tingkatan supervisor lainnya. Ada pula Training Plan Assessment (dengan LMS) secara online. Dengan demikian, si pegawai dapat melihat perkembangan yang telah diraihny dan dapat memetakan sendiri kebutuhannya.

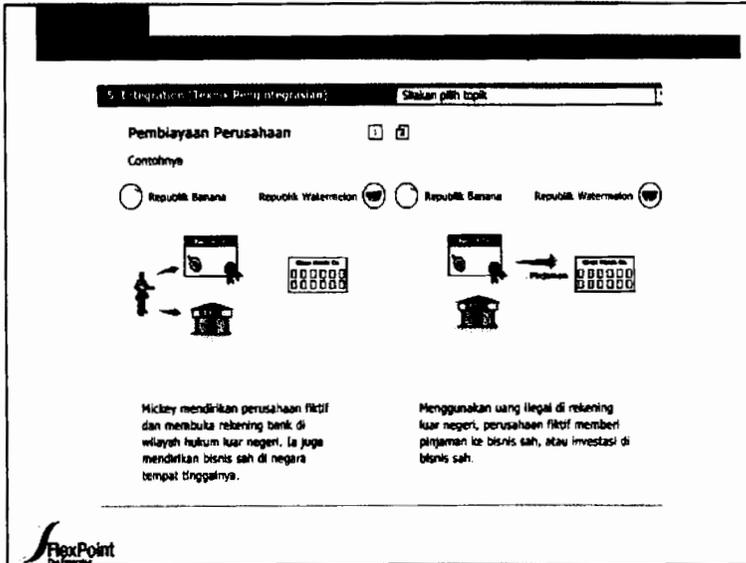
Titik genting dalam implementasi belajar-e adalah perubahan paradigma. Biasanya pelatihan harus diadakan di kelas dengan bimbingan trainer, tetapi sekarang harus disiplin belajar sendiri. Dulu mendapat uang saku tambahan karena mengikuti pendidikan di luar kantor, sekarang tidak lagi.

- Pelatihan Profesional Jarak Jauh

Persoalan lain yang juga menghambat adalah akses internet. Untuk Indonesia Timur, misalnya, digunakan cara lama: lewat pos atau fax dan pengiriman pelatih. Namun dari sisi total pengeluaran operasional secara keseluruhan, tentunya biaya yang dikeluarkan tidak seperti dulu.

Universitas Terbuka memiliki pengalaman dalam penerapan belajar-e untuk masyarakat luas, bukan untuk suatu perusahaan tertentu di Indonesia. Dari pengalaman tersebut, rendahnya minat, tingkat melek TIK, serta daya jangkau mahasiswa UT dalam memanfaatkan internet dirasakan menjadi kendala utama.

UT telah meluncurkan berbagai program pendidikan melalui internet, tetapi sangat sedikit diakses oleh mahasiswa, walaupun untuk mengaksesnya, mahasiswa tidak perlu membayar selain biaya internet. UT menyediakan *tutorial online* untuk 171 mata kuliah, namun hanya 56 mata kuliah yang diakses mahasiswa. Jumlah mahasiswa yang memanfaatkan fasilitas *tutorial online* hanya 3.381 orang dan mahasiswa yang aktif berinteraksi secara *online* hanya 775 orang (UT, 2003 dalam Suparman, 2004). Ini menunjukkan masih rendahnya minat, tingkat melek TIK, serta daya jangkau mahasiswa UT dalam memanfaatkan internet. Masalah biaya, aksesibilitas, dan aspek teknis masih menjadi kendala utama.



Gambar. Contoh modul Belajar-e untuk bank (Sembel, S., bahan Seminar e-learning, 2005)

Kasus lain adalah di *Federal International Finance* (FIF). FIF menggunakan aplikasi yang tergabung dalam paket aplikasi *Oracle 11i HRMS*. Dengan lebih dari 3000 karyawan di 70 kantor cabang di lebih dari 150 kota seluruh Indonesia, FIF menghemat biaya yang biasanya harus dikeluarkan untuk akomodasi peserta maupun yang harus berkeliling ke seluruh Indonesia. Di *Astra Credit Companies* yang memiliki 35 cabang di 26 kota, dengan kurang dari 2000 karyawan, diterapkan belajar-e sejak awal. Diharapkan efisiensi dan efektivitas kerja lebih cepat terbentuk. (Septyarini, 2005)

- Pelatihan Profesional Jarak Jauh

3. Proses Desain Bahan

Dalam desain bahan, digunakan berbagai metode dan salah satu di antaranya yang cukup populer adalah metode ADDIE:

- A - Analisis, melakukan analisis kebutuhan dan pekerjaan, hasilnya adalah silabus/course *outline* berupa apa saja yang diperlukan. Tujuan Umum dan Khususnya disusun dan dibuat dalam bentuk seperti silabus jadwal pendidikan atau pelatihan.
- D - Desain, dalam tahap ini dilakukan perancangan, hasilnya adalah dokumen alur yang mencakup rencana skenario, teks, tampilan, animasi, gambar dan audio yang dipakai. Kemudian dibuat *Storyboard* berdasarkan dokumen alur tersebut. *Storyboard* berisi rencana teks, suara serta tampilan di layar. Dibuat sketsa-sketsa untuk menggambarkan wujud gagasan tampilannya.
- D - Pengembangan, yaitu memasuki tahap produksi. Pengembangan dilanjutkan dengan pembuatan bahan, penggunaan *templates*, penulisan teks, rekaman audio, dan desain grafis. Semua digabung menjadi satu dalam bentuk tampilan utuh.
- I - Implementasi, isi/materi digabung dengan SMB/LMS, dicobakan pada pengguna dan dites secara langsung di jaringan internet. Dalam taraf uji coba ini bagi para siswa dilakukan *pretes* dan *postes*, supaya dapat dilihat sejauh mana efektivitas belajar menggunakan bahan yang telah disusun ini.
- E - Evaluasi. Penilaian akhir oleh pengguna.

Pengembangan materi sebetulnya dapat dikembangkan sendiri dengan tenaga-tenaga khusus. Harga materi masih cukup tinggi, dihitung per jam belajar-e. Ada yang mematok harga 3000-6000 US\$ per jam belajar-e, setara dengan 40-50 halaman layar.

SDM yang dibutuhkan untuk menyusun bahan belajar-e terdiri dari:

- Pakar Materi Subjek (SME = *Subject Matter Expert*), biasanya adalah orang yang mengetahui bahan yang akan dibuat atau instruktur dari modul itu. Dia akan terlibat di semua tahap.
- Desainer Instruksional, ahli dalam menyusun desain pembelajaran menggunakan belajar-e, semacam pembuat skenario, akan terlibat di semua tahap.
- Desainer Grafis, khususnya yang membuat animasi dan grafis *web* lainnya.
- Penulis dan pengetikan bahan.
- *Programer Web*, yang mengelola *server* dan *SMB/LMS*.
- Teknisi Audio dan pengisi suara.

Alur penyampaian materi belajar-e dibagi dua kelompok: 1) yang bersifat kronologis, dan 2) yang bersifat Teori.

Materi yang bersifat kronologis antara lain:

- cerita,
- proses, misalnya cara kerja mesin,
- prosedur, misalnya cara mengganti ban,
- sebab-akibat, misalnya jika terjadi masalah.

Penyampaian materi kronologis berurutan dari awal hingga akhir. Sedangkan materi yang berupa teori dapat disampaikan dari teori ke contoh, atau sebaliknya dari contoh dulu kemudian teorinya.

Sebuah layar belajar-e memiliki bagian-bagian antara lain:

- Judul
- Menu dan Navigasi
- Teks
- Latihan/Kuis
- Grafis, gambar, animasi, video
- Audio
- Pelacakan (*Tracking*), dan lain-lain

- Pelatihan Profesional Jarak Jauh

Beberapa pedoman praktis yang diperoleh dari pengalaman antara lain adalah: satu kursus (paket) dibagi menjadi beberapa subpaket dan selanjutnya dibagi lagi menjadi modul-modul. Satu tujuan belajar (satu modul) sebaiknya maksimal terdiri atas 7-10 halaman layar. Satu layar biasanya memerlukan waktu 1-3 menit, satu modul dikerjakan dalam 15 menit, berisi 10-15 layar. Untuk pengguna karyawan 1 layar maksimal 60 kata. Modul kuliah dapat memuat lebih banyak teks.

Alur belajar sebaiknya cukup sederhana dan linier. Gunakan sesedikit mungkin sub-bab di bawah per babnya agar tidak membingungkan. Berikan contoh-contoh jelas: skenario, analogi, gambar, animasi dan lain-lain agar mudah diingat. Huruf harus jelas dan ada konsistensi menu, panduan *style*, tampilan umum layar, teks, termasuk *style* kartun yang konsisten. Kalau perlu dibuat modul untuk pengenalan navigasi. Untuk mengurangi ukuran *file*, gunakan gambar dan animasi *flash*, kurangi dan gunakan kompresi untuk gambar *bitmap (bmp)*, audio serta video.

Untuk mempercepat proses produksi digunakan *templates* yang siap pakai, bentuk-bentuknya antara lain:

- Diagram alir, gambar diagram, dapat dipilih yang akan diklik.
- Pohon keputusan, dipilih “ya” atau “tidak” setiap tahap.
- Diagram waktu, misalnya sejarah perusahaan.
- Langkah bernomor, tombol diklik: keluar gambar atau teks, diklik yang mana saja.
- *Walkthrough*, urutan yang dapat diklik mulai dari awal sampai akhir.
- Skenario, bentuknya cerita, biasanya animasi, dapat digunakan untuk pembukaan untuk menarik perhatian.
- Klasifikasi, sub-subbab (lapis) penjelasan tentang suatu bab, jangan terlalu banyak.

- Berlapis, deretan tombol atau menu jika diklik atau *mouse over* di atasnya muncul keterangan teks atau gambar.
- Tabel Perbandingan, dibandingkan antar dua hal, satu persatu atau sekaligus.

Latihan dan Ujian

Setiap satu konsep diberikan latihan atau contoh. Setelah selesai dikerjakan, dapat dilanjutkan dengan mengambil ujian. Soal dapat berupa mencocokkan, benar-salah, pilihan ganda, memilih, esai, atau bentuk soal yang lain. Kemungkinan soal dibuat acak; jawaban disimpan per pertanyaan demi menghindari hilangnya data akibat koneksi internet yang buruk, dan langsung mendapat angka untuk setiap pertanyaan yang dijawab. Untuk mengatasi koneksi internet, materi dapat dimuat dalam CD dan dikirim, kemudian ujiannya dibuat terpisah dan diawasi.

4. Paket Program Pembuatan

Program pembuatan adalah program-program komputer yang diperlukan untuk pembuatan belajar-e.

Pada dasarnya terdapat berbagai macam program pembuatan yang dipakai. Ada bahan yang di-*download* lalu dijalankan di komputer. Ada yang langsung dimainkan menggunakan *browser* seperti *Internet Explorer*.

Untuk bahan yang di-*download* dan dijalankan di komputer, bahan dapat dibuat dalam format yang biasa dipakai di komputer:

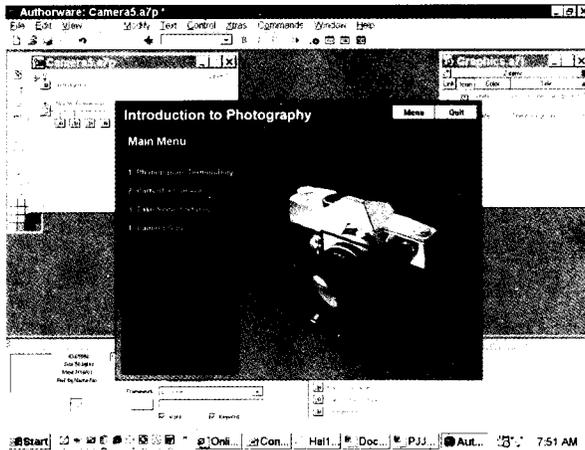
- *Microsoft Office*, misalnya *Word*, *Excel*, *Powerpoint*
- *Adobe Acrobat* yang menghasilkan *file* berformat *PDF*
- *MP3*, *MPEG*, atau *file* audio-video yang lain

- Pelatihan Profesional Jarak Jauh

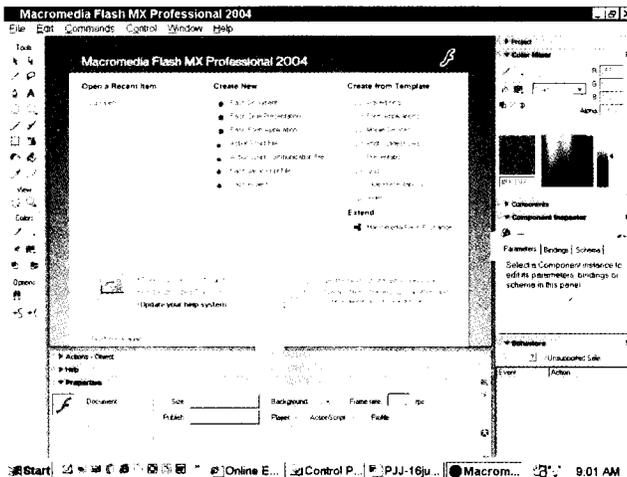
Namun, bila diinginkan bahan dapat dimainkan langsung oleh browser internet semacam *Internet Explorer*, *Netscape*, *Opera*, *Mozilla*, atau yang lain, maka diperlukan program pembuatan dari golongan desain grafis internet semacam *Macromedia Dreamweaver* dan *Flash*[®] (www.macromedia.com). Hasilnya dimainkan dalam browser. Untuk aplikasi berbasis web ini banyak terdapat penyedia program-program demikian, tergantung kebutuhan dan anggaran yang ada. Membuat sendiri pun tidak terlalu sulit bagi organisasi yang sudah mapan.

Modul-modul, bahan kuliah, dan bahan belajar lain, dapat dibuat menggunakan beberapa program, antara lain *Macromedia E-learning Suite* (www.macromedia.com/software/elearningsuite/) yang seterusnya terdiri dari berbagai program seperti *Dreamweaver* yang dilengkapi program tambahan untuk menyusun modul belajar-e. Ada pula *Macromedia Authorware* yang menyediakan cara pembuatan belajar-e secara lengkap, *Macromedia Flash* untuk membuat animasi, kemudian *Robohelp* untuk membuat menu Bantuan yang bagus, dan *Captivate* untuk menangkap layar komputer. *Microsoft Office* (<http://office.microsoft.com>) termasuk *Microsoft Powerpoint* juga dapat dimanfaatkan dengan hasil cukup baik.

Desainer harus cukup memahami metode pendidikan dan pengajaran karena tidak semua materi sesuai untuk belajar-e. Karena itu belajar-e harus dipakai secara proporsional, kadang disajikan secara utuh, dan untuk komplemen, dan hanya untuk suplemen dalam suatu pembelajaran (Septyarini, 2005). Di Indonesia terdapat beberapa perusahaan pembuatan materi belajar-e, misalnya Mitra Integrasi Komputindo, Boston Group Indonesia, TeleMatics, Lembaga Manajemen PPM, dan sebagainya.



Gambar Contoh layar *Macromedia Authorware 7.01*, program yang sering dipakai untuk membuat desain belajar-e secara keseluruhan. Program ini adalah yang terkemuka dalam penyusunan bahan kursus belajar-e.



Gambar Contoh layar *Macromedia Flash MX*, program yang sering dipakai dalam pembuatan materi belajar-e, terutama yang perlu animasi.

- Pelatihan Profesional Jarak Jauh

5. SMB (Sistem Manajemen Belajar)

SMB (Sistem Manajemen Belajar) atau lebih dikenal LMS (*Learning Management System*) pada dasarnya adalah mesin pembelajaran yang dipakai dalam belajar-e. Pada dasarnya SMB sama dengan situs web biasa, perbedaannya adalah pada tambahan program-program kecil khusus untuk belajar, misalnya untuk kuis, *tracking*, dan sebagainya.

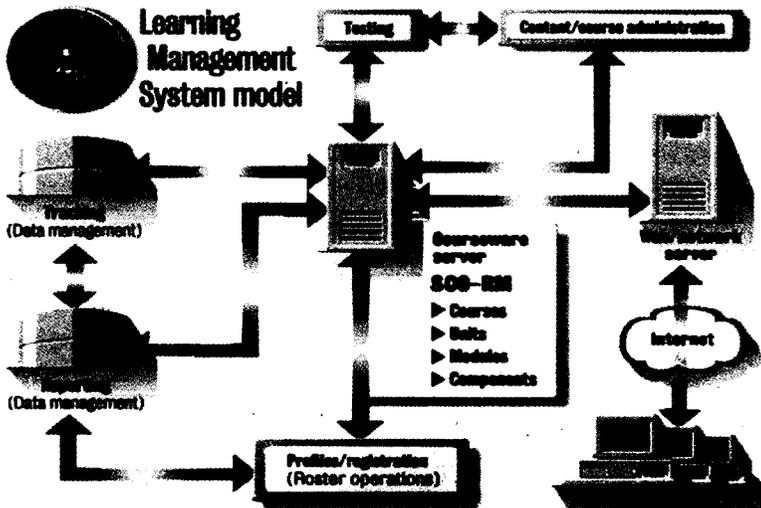
Belajar-e terdiri dari beberapa lapis atau bagian yang didesain terpisah:

- Lapis Presentasi, tampilan grafis dan web....;
- Lapis Instruksional, desain pembelajaran dan pengetahuan yang disampaikan;
- Lapis Teknikal, program pembuatan, bahasa *HTML*, *Flash*, *XML*, *SCORM*, *web and server basisdata*.

Semuanya disajikan secara terpadu dalam program pembelajaran yang disebut SMB. Sebuah SMB biasanya memiliki komponen sebagai berikut:

- Manajemen Siswa dan Instruktur: registrasi, keuangan, manajemen anggaran pelatihan, profil, laporan, nilai, statistik, dan lain-lain;
- Manajemen Kursus: pembuatan dan penampilan modul, ujian, bahan, dan lain-lain;
- Manajemen Kelas, kolaborasi dan interaksi, *tracking*, *library*, berbagai sumber belajar, *links* situs web, dan lain-lain;
- Lain-lain, misalnya sistem-sistem yang diterapkan dalam organisasi, misalnya sistem dukungan kinerja, manajemen ketrampilan dan kompetensi, dan berbagai sistem penilaian, penggajian, dan pengembangan yang lain.

Standar diperlukan agar isi/materi dapat dipakai di berbagai SMB, dan SMB itu sendiri memenuhi syarat. Di dunia ada lebih dari 10 standar yang diperkenalkan, tetapi yang paling populer adalah SCORM, AICC, dan IMS. Dari ketiganya, yang paling banyak dipakai adalah SCORM (*Sharable Content Object Reference Model*). SCORM terdiri dari standarisasi materi belajar agar bisa dipakai dalam berbagai SMB, dan berbagai persyaratan untuk membuat SMB (antara lain mengenai *runtime environment* dan *sequencing/navigation*). Untuk men-download standar SCORM dan spesifikasi secara lebih jelas dapat mengunjungi web www.adlnet.org/



The Sharable Courseware Object Reference Model is at the heart of the Learning Management System model proposed by the Department of Defense's Advanced Distributed Learning Initiative. The SCORM will allow courseware designers to easily update and reuse courses by simply swapping out old content and replacing it with new material. Various database modules will allow course administrators to test, track and administer student progress across the Internet.

Gambar : Contoh model sebuah Sistem Manajemen Belajar, dari <http://www.dsv.su.se/~klas/Learn/LMS/lms.html>

- Pelatihan Profesional Jarak Jauh

Daftar Pustaka

- Berge, Zane L, (2003), Planning and Managing Distance Learning and Education in the Corporate Sector, article in *Handbook of Distance Education* (Moore and Anderson, editor), contact : berge@umbc.edu
- Bondan, Riyani T. (2005). Bahan Seminar *E-Learning Summit*, kasus Bank Mandiri, 23 Februari 2005
- Lembaga Manajemen PPM (2005), *Brosur dan katalog* www.lppm.ac.id, 10 September 2005.
- Ladyshefsky, Richard K. (2000) *Developing health professionals through the use of reciprocal peer coaching*. Graduate School of Business Curtin University of Technology USA.
<http://lsn.curtin.edu.au/tlf/tlf2000/ladyshefsky.html>
- Microsoft Corporation (2003). *Microsoft Encarta.2003 CD ROM*
- Mitra Integrasi Komputindo, PT (2005) Bahan dari Seminar *E-Learning Summit*, 23 Februari 2005, Hotel Shangri-La
- Oblinger, Diana G, and Sean G Rush, 2003. The Involvement of Corporations in Distance Education, article in *Handbook of Distance Education* (Moore and Anderson, editor).
- Sembel, Sandra, (2005) Bahan Training *Developing and Evaluating E-Learning*, Flexpoint Consulting, 17-18 Mei 2005 di Park Lane Hotel.
- Septyarini (2005) E-learning Membudayakan Pembelajaran Secara Mandiri, *Majalah Infokomputer*, edisi Juni 2005.
- Sihotang dan Prahesti, (2005), E-learning dan Sertifikasi Kompetensi, bahan Seminar *E-Learning, Professionalism, and Competitiveness*, 22 Juli 2005.

Suparman, M Atwi, Prof., dan Zuhairi, Aminuddin, Ph.D. (2004)
Pendidikan Jarak Jauh, Teori dan Praktek. Pusat Penerbitan
Universitas Terbuka.

Bab VI

Pendidikan Guru Jarak Jauh

(Kasus FKIP Universitas Terbuka)

I G. A. K. Wardani, Udin S. Winataputra

A. Fungsi dan Satuan Pendidikan

1. Guru dan Pendidikan Guru

Pendidikan guru merupakan suatu lembaga yang keberadaannya sangat diperlukan sepanjang masa, karena keberadaan guru memang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sebuah bangsa. Guru merupakan aset besar sebuah bangsa yang ingin berkembang karena gurulah yang dianggap berperan penting dalam mengantarkan suatu bangsa menuju berbagai kemajuan dan meninggalkan berbagai keterpurukan. Konon kabarnya, ketika Hiroshima dan Nagasaki luluh lantak dibom atom, hal pertama yang mendapat perhatian pemerintah Jepang adalah guru. Meskipun banyak faktor lain yang menyebabkan dalam waktu singkat Jepang maju pesat dan mampu bersaing dengan negara maju lainnya, namun perhatian yang diberikan terhadap keberadaan guru perlu diperhitungkan sebagai salah satu sumber majunya negeri matahari terbit tersebut. Bertitik tolak dari cerita tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan guru harus mendapat perhatian yang memadai, jika negeri tercinta ini ingin maju seperti negara lainnya.

Pada awalnya, pendidikan guru berada pada dua jenjang, yaitu pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan pada jenjang

pendidikan tinggi. Sejak jaman kemerdekaan sampai dengan awal tahun 60-an, pendidikan guru untuk sekolah dasar (SD) diselenggarakan dalam satu sekolah yang disebut Sekolah Guru B (SGB), yang mendidik tamatan sekolah rakyat (SR) selama empat tahun untuk menjadi guru SD. Seiring dengan berbagai pembaharuan, kualifikasi guru SD kemudian ditingkatkan dari lulusan SGB menjadi lulusan Sekolah Guru A (SGA), yang kemudian namanya diubah menjadi Sekolah Pendidikan Guru (SPG). Dengan ditingkatkannya kualifikasi guru SD dari lulusan SGB menjadi lulusan SGA/SPG, maka para guru yang sudah mengajar perlu meningkatkan pendidikannya. Salah satu cara untuk meningkatkan pendidikan tersebut adalah melalui kursus tertulis yang disebut Kursus Pendidikan Guru, yang memanfaatkan buku Himpunan Pelajaran yang diterbitkan oleh Balai Pendidikan Guru (BPG) Bandung. Barangkali kursus tertulis ini dapat disamakan dengan pendidikan guru jarak jauh, yang ketika itu memang menggunakan bahan-bahan tertulis, pertemuan sewaktu-waktu, dan kemudian ujian. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendidikan guru jarak jauh ketika itu berfungsi meningkatkan kualifikasi dan kemampuan para guru yang sudah mengajar.

Pendidikan jarak jauh di berbagai negara memang menjalankan fungsi sebagai pendidikan guru, seperti halnya di Bhutan, Zambia, dan negara-negara lain di Afrika (Chivore, 1992), di samping fungsi utama lain yaitu pemberantasan buta huruf. Oleh karena itu, status dan fungsi pendidikan guru jarak jauh tidak dapat diabaikan karena memang memegang peran yang sangat penting bagi pendidikan guru, baik yang prajabatan maupun yang dalam jabatan. Kebutuhan guru yang meningkat, terutama di jenjang pendidikan dasar dan menengah, membuat lembaga pendidikan guru konvensional (tatap muka) tidak mampu menghasilkan jumlah guru yang dibutuhkan. Kondisi seperti ini memaksa pemerintah melaksanakan "*crash program*", berupa pengangkatan guru kilat yang hanya dididik

- Pendidikan Guru Jarak Jauh (Kasus FKIP Universitas Terbuka)

selama dua minggu untuk mengajar di SD. Hal ini terjadi di Indonesia pada tahun 70-an. Tentu saja kondisi seperti ini merupakan kondisi yang tidak menguntungkan karena dapat menimbulkan masalah dalam berbagai aspek pendidikan, khususnya mutu pendidikan. Berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan para guru kilat ini perlu dilakukan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Pelatihan secara terprogram, pemberian kesempatan untuk melanjutkan studi, serta penataran secara insidental merupakan contoh-contoh upaya peningkatan kemampuan para guru yang sedang bertugas di lapangan.

2. Fungsi Utama Pendidikan Guru Jarak Jauh

Sesuai dengan namanya, fungsi utama lembaga pendidikan guru jarak jauh adalah menyelenggarakan pendidikan guru dengan sistem belajar jarak jauh. Ini berarti, para mahasiswa yang mengikuti program ini tersebar di seluruh pelosok tanah air. Berbeda dengan pendidikan guru tatap muka yang menyiapkan calon guru yang berasal dari tamatan sekolah menengah, maka di Indonesia, pendidikan guru jarak jauh menerima mahasiswa yang sudah berstatus sebagai guru yang sedang aktif mengajar. Para guru ini tidak perlu meninggalkan tugas mengajarnya, karena pendidikan jarak jauh memang memungkinkan mereka belajar sambil mengajar.

Pendidikan guru jarak jauh di Indonesia, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka (FKIP-UT) mempunyai kaitan erat dengan peningkatan kualifikasi dan kualitas guru. Khusus dalam peningkatan kualifikasi guru SD, hal ini bermula dari dihapusnya secara bertahap Sekolah Pendidikan Guru (SPG) yang merupakan sekolah yang menghasilkan calon guru sekolah dasar (SD). Sejak dihapusnya SPG, maka sesuai dengan Surat Keputusan Mendikbud nomor 0854/U/1989, tentang Pengadaan dan Penyetaraan Guru Sekolah

Dasar, sejak tahun 1990, pendidikan guru sekolah dasar (PGSD) berada di jenjang pendidikan tinggi, beralih dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti). Dalam surat keputusan tersebut juga ditegaskan bahwa bagi guru SD yang sedang aktif mengajar dan belum memenuhi kualifikasi D-II, disediakan Program Penyetaraan D-II PGSD yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka bekerja sama dengan Ditjen Dikdasmen. Dengan demikian, pendidikan guru jarak jauh yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka, yang sebelumnya hanya mencakup pendidikan guru untuk SLTP dan SLTA, sejak tahun 1990 juga menangani pendidikan guru sekolah dasar.

Di luar negeri, seperti di Zimbabwe, pendidikan jarak jauh juga berfungsi sebagai pendidikan prajabatan bagi para calon guru. Hal ini terjadi karena tuntutan jumlah guru, terutama untuk sekolah dasar, jauh melebihi jumlah guru yang dapat dihasilkan oleh lembaga pendidikan guru konvensional (Chivore, 1992). Program pendidikan guru jarak jauh ini adalah: *The Zimbabwe Integrated National Teacher Education Course (ZINTEC)*. Sebagai pendidikan guru yang terintegrasi, ZINTEC bekerja sama dengan lima *Teacher College*. Mahasiswa ZINTEC mengambil kuliah di salah satu dari *Teacher College* tersebut pada awal dan akhir program, dan pada waktu-waktu tertentu di antaranya. Ketika para mahasiswa tidak mengambil kuliah di *Teacher College*, mereka ditugaskan mengajar di sekolah, dibantu dengan bahan ajar jarak jauh, dan disupervisi oleh para dosen dari *Teacher College*, di samping oleh kepala sekolah dan para pengawas pendidikan (Chivore, 1992). Dari deskripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan guru jarak jauh perlu berkolaborasi dengan berbagai lembaga yang terkait dengan pendidikan guru, dan juga dengan lembaga yang mempekerjakan guru. Tanpa kolaborasi seperti itu, akan sulit bagi

- Pendidikan Guru Jarak Jauh (Kasus FKIP Universitas Terbuka)

pendidikan guru jarak jauh untuk menyelenggarakan pendidikan guru, baik yang prajabatan maupun yang dalam jabatan.

3. Fungsi Pendidikan Guru pada FKIP Universitas Terbuka

Fungsi pendidikan guru jarak jauh yang diselenggarakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) lebih menekankan pada pendidikan dalam jabatan, bukan pada pendidikan prajabatan. Hal ini didasarkan pada hakikat dari pendidikan jarak jauh yang sesuai dengan kondisi para guru yang memerlukan peningkatan kualifikasi. Pendidikan jarak jauh yang dapat berlangsung tanpa mengenal batas-batas ruang, waktu, serta latar belakang budaya dan sosial ekonomi, membuat pendidikan guru jarak jauh menjadi pilihan utama bagi para guru yang sedang aktif bertugas di sekolah. Jauhnya tempat mengajar para guru dengan lembaga pendidikan guru tatap muka, terbatasnya waktu para guru untuk mengikuti pendidikan tatap muka, serta terbatasnya kondisi ekonomi para guru, merupakan kendala utama dalam meningkatkan kualifikasi melalui pendidikan guru tatap muka. Bagaimanapun juga, terlepas dari kondisi tempat mereka bertugas, setiap guru berhak mendapat kesempatan untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan profesional, dan sekaligus berhak, bahkan wajib, meningkatkan kualifikasi sesuai dengan tuntutan yang semakin meningkat. Oleh karena itu, pada saat ini, pendidikan guru jarak jauh memainkan peran yang sangat potensial dalam peningkatan kualifikasi guru.

Komitmen yang ditunjukkan oleh FKIP-UT untuk menyelenggarakan program *dalam jabatan* merupakan kesepakatan tidak tertulis yang juga dilandasi oleh kenyataan tuntutan pendidikan guru prajabatan, terutama dalam tuntutan pelaksanaan Pemantapan Pengalaman Lapangan (PPL). Sudah merupakan rahasia umum bahwa pendidikan guru tatap muka juga mendapatkan kesulitan dalam mencari sekolah latihan dan membimbing para mahasiswa

dalam latihan-latihan PPL. Banyaknya mahasiswa yang memerlukan latihan PPL, di samping enggannya sekolah menerima para calon guru ini untuk berlatih di sekolahnya, serta kurangnya tenaga pembimbing, merupakan masalah yang serius untuk diatasi. Pendidikan guru tatap muka yang relatif memiliki dosen yang memadai dalam berbagai disiplin ilmu serta sekolah yang dekat dengan kampusnya masih mempunyai masalah dalam pelaksanaan PPL, apalagi pendidikan guru jarak jauh yang jumlah mahasiswanya sangat banyak dan tersebar di seluruh pelosok tanah air.

Dengan memfokuskan diri pada pendidikan dalam jabatan, pendidikan jarak jauh mampu mengatasi kondisi seperti di atas. Tempat latihan bagi para guru untuk meningkatkan kemampuan mengajarnya adalah sekolahnya sendiri, bahkan kelasnya sendiri. Hal ini dapat dilakukan karena semua mahasiswa FKIP-UT adalah para guru yang sudah mengajar. Kelas atau sekolahnya sendiri merupakan laboratorium bagi para guru untuk mencobakan berbagai gagasan inovatif yang diperolehnya selama mengikuti pendidikan guru jarak jauh. Para supervisor yang akan membantu mereka dalam berlatih dapat direkrut dari para guru senior yang terdapat di sekolah tersebut atau di sekitarnya. Inilah yang merupakan alasan yang kuat bagi FKIP-UT untuk menyelenggarakan pendidikan dalam jabatan. Di samping faktor sekolah latihan, tentu masih banyak faktor lain yang membuat fokus FKIP-UT terletak pada pendidikan dalam jabatan. Sistem belajar yang tidak mengenal istilah putus sekolah, membuat para mahasiswa, yang juga sibuk dengan tugasnya sebagai guru, merasa tidak terancam. Mereka dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan kemampuan dan waktu belajar yang tersedia. Bagi mereka yang memang mempunyai potensi dan waktu yang memadai, masa studi yang diperlukan mungkin cukup singkat, namun, para guru yang sangat sibuk dan hanya memiliki kemampuan sedang-sedang saja, mungkin memerlukan waktu studi yang lebih panjang.

- Pendidikan Guru Jarak Jauh (Kasus FKIP Universitas Terbuka)

Program pendidikan guru di FKIP-UT makin lama makin berkembang. Kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait dengan tenaga guru telah membuat FKIP-UT mengembangkan berbagai program pendidikan guru yang inovatif sesuai dengan kebutuhan lapangan, mulai dari program sertifikat, diploma, sampai sarjana, bahkan program pascasarjana. Contoh program pendidikan guru yang inovatif yang telah dikembangkan oleh FKIP-UT, antara lain adalah Program Penyetaraan Diploma III (D-III) PGSM, tahun 1992, 1993, 1997, 1998; Program Guru Rumpun Bidang Studi (PGRBS) pada tahun 1995; dan Program Sertifikasi Guru Bidang Studi (PSGBS) pada tahun 1997 (Winataputra, 1999). Kiprah FKIP-UT ini membuktikan bahwa pendidikan guru jarak jauh memang mampu menjalankan fungsi dalam peningkatan kualifikasi dan kualitas guru. Kepercayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam bentuk ijin pembukaan Program S1 PGSD bagi FKIP-UT pada tahun 2002 merupakan satu indikator tambahan, bahwa pendidikan guru yang diselenggarakan oleh FKIP-UT memang layak untuk meningkatkan kualitas dan kualifikasi guru.

Sampai dengan bulan April 2005, FKIP-UT memiliki lima jurusan, yang semuanya mempunyai misi yang sama yaitu meningkatkan kualitas dan kualifikasi guru. Jurusan Ilmu Pendidikan menaungi Program Pendidikan Guru SD (PGSD), baik jenjang D-II, maupun jenjang S1 serta program Akta Mengajar. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni menaungi program Pendidikan Bahasa Indonesia dan Pendidikan Bahasa Inggris, baik untuk guru-guru SMP maupun SMA, pada jenjang S1. Jurusan Pendidikan MIPA menaungi program Pendidikan Biologi, Pendidikan Fisika, Pendidikan Kimia, dan Pendidikan Matematika. Selanjutnya, Jurusan Pendidikan Ilmu Sosial menaungi Program Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), serta Pendidikan Ekonomi dan Koperasi. Akhirnya, Jurusan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan menaungi Program D-II PGSD Penjaskes,

yaitu program peningkatan kualifikasi dan kualitas bagi guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan di SD.

Dengan diberlakukannya struktur baru di Universitas Terbuka mulai akhir April 2005, jurusan di FKIP-UT juga mengalami perubahan, meskipun jumlahnya tetap lima. Jurusan yang berubah adalah Jurusan Ilmu Pendidikan, yang kini hanya menaungi Program Akta Mengajar, sementara satu program Ilmu Pendidikan yang lain sedang dikembangkan. Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) dan Program Pendidikan Guru TK, bersama dengan Program Pendidikan Guru Olah Raga melebur menjadi satu jurusan, yang disebut sebagai Jurusan Pendidikan Dasar. Sementara itu, tiga jurusan yang lain tidak mengalami perubahan. Namun, perlu dicatat bahwa perubahan ini tidak mengubah fungsi FKIP-UT sebagai penyelenggara pendidikan guru dalam jabatan.

4. Satuan Pendidikan

Universitas Terbuka (UT) adalah universitas negeri ke-45 di Indonesia. Oleh karena itu, semua program pendidikan yang diselenggarakan oleh UT, termasuk program pendidikan guru jarak jauh yang diselenggarakan oleh FKIP-UT, merupakan program pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Selanjutnya, sesuai dengan SK Mendikbud No. 0854/U/1989 tentang pengadaan dan penyetaraan guru SD, maka semua pendidikan guru (termasuk pendidikan guru bagi guru SD) berada pada jenjang pendidikan tinggi. Oleh karena itu, pendidikan guru jarak jauh yang diselenggarakan oleh FKIP-UT merupakan satuan pendidikan formal dalam jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sehubungan dengan itu, penghargaan terhadap lulusan UT, termasuk lulusan pendidikan guru jarak jauh sama dengan penghargaan yang diberikan kepada lulusan universitas negeri lainnya.

- Pendidikan Guru Jarak Jauh (Kasus FKIP Universitas Terbuka)

B. Kurikulum dan Bahan Belajar Mandiri

1. Kurikulum

Sebagaimana halnya pendidikan guru yang diselenggarakan melalui pertemuan tatap muka, pengembangan kurikulum pendidikan guru jarak jauh juga diselenggarakan melalui berbagai tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan, studi kelayakan, pengembangan draf, serta reviu dan revisi. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum program studi dalam pendidikan guru jarak jauh memerlukan waktu yang cukup panjang, mulai dari studi kelayakan sampai dengan siapnya kurikulum tersebut diimplementasikan. Faktor lain yang menyebabkan waktu pengembangan kurikulum (dengan diimplementasikannya kurikulum tersebut) menjadi lebih panjang adalah kesiapan bahan ajar. Berbeda dengan pendidikan guru tatap muka yang setiap saat dapat mengembangkan dan mengimplementasikan/memberlakukan kurikulum baru, kurikulum pendidikan guru jarak jauh tidak mungkin diimplementasikan jika bahan ajar belum siap.

Terkait dengan fungsi sebagai pendidikan dalam jabatan, kurikulum pendidikan guru jarak jauh selalu mengacu kepada kurikulum pendidikan prajabatan. Lebih-lebih ketika UT ditugaskan menyelenggarakan Program Penyetaraan D-II PGSD, maka Kurikulum PGSD Prajabatan harus dijadikan acuan. Namun sayangnya, ketika pertama kali program ini diluncurkan, Kurikulum PGSD Prajabatan belum ada, karena dibuka pada waktu yang sama. Oleh karena itu, ketika pengembangan Kurikulum DII PGSD Penyetaraan 1990, tidak ada Kurikulum D-II PGSD Prajabatan yang dapat dijadikan acuan. Untuk mengatasi hal tersebut, kurikulum dikembangkan dengan melibatkan dosen-dosen dari LPTK calon penyelenggara D-II PGSD Prajabatan. Dengan cara ini, Kurikulum

D-II PGSD Penyetaraan diharapkan akan setara dengan Kurikulum D-II PGSD Prajabatan.

Di samping mengacu kepada kurikulum program prajabatan, Kurikulum Pendidikan Guru Jarak Jauh juga mengikuti perkembangan mutakhir dalam bidang pendidikan serta kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), seperti Standar Nasional Pendidikan, serta otonomi dan demokratisasi pendidikan. Berbagai pembaharuan dalam kurikulum dan pembelajaran seperti pendekatan kompetensi yang melahirkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), pendekatan konstruktivisme, pembelajaran kreatif dan produktif, pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk, juga diakomodasi dalam pengembangan Kurikulum Pendidikan Guru Jarak Jauh. Selain itu, perkembangan pendidikan yang terjadi pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah seperti perubahan kurikulum sekolah, perubahan nama satuan pendidikan, sistem pembelajaran, juga menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan Kurikulum Pendidikan Guru Jarak Jauh. Para mahasiswa pendidikan guru jarak jauh adalah para guru yang sedang aktif mengajar di berbagai jenjang sekolah. Oleh karena itu, mereka seyogyanya diakrabkan dengan berbagai perkembangan pendidikan yang terjadi di berbagai satuan pendidikan. Hal ini diharapkan dapat membantu mereka mencerna pembaharuan tersebut lebih cepat dari rekan-rekannya yang tidak sedang melanjutkan studi.

Tidak berbeda dengan Kurikulum Pendidikan Guru Tatap Muka, kurikulum utuh setiap program studi dalam Pendidikan Guru jarak Jauh terdiri dari komponen-komponen berikut.

1. Visi, misi, dan tujuan Program Studi.
2. Profil/Kompetensi Lulusan.

● Pendidikan Guru Jarak Jauh (Kasus FKIP Universitas Terbuka)

3. Struktur Kurikulum, yang merupakan daftar mata kuliah yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan, lengkap dengan bobot sks masing-masing dan sebarannya per semester.
4. Deskripsi Mata Kuliah, untuk semua mata kuliah yang ditawarkan dalam program studi. Setiap deskripsi mata kuliah memuat kompetensi yang akan dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah tersebut, pengalaman belajar yang harus dihayati mahasiswa untuk mencapai kompetensi tersebut, topik/materi kajian, serta prosedur dan alat evaluasi yang akan digunakan untuk menilai tingkat penguasaan kompetensi mahasiswa.
5. Pedoman Umum Pembelajaran, memuat berbagai pendekatan, metode, dan teknik yang akan diterapkan dalam pembelajaran, yang memungkinkan mahasiswa menguasai kemampuan keguruan yang diharapkan.
6. Pedoman Umum Penilaian, memuat prosedur, jenis, dan alat penilaian yang secara umum digunakan untuk menilai kompetensi para calon guru dalam berbagai bidang.

Dari segi struktur kurikulum, sesuai dengan rumpun kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang guru (Depdiknas, 2002), yaitu: (1) menguasai substansi dan metodologi disiplin ilmu serta materi kurikuler dalam kurikulum sekolah, (2) memahami perkembangan peserta didik, (3) menguasai pembelajaran yang mendidik, serta (4) mengembangkan kepribadian dan keprofesionalan; maka mata kuliah dalam Program Pendidikan Guru Jarak Jauh dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kelompok Mata Kuliah Bidang Ilmu (MKBI), kelompok mata kuliah Kependidikan dan Keguruan (MKKK), dan kelompok mata kuliah Kepribadian dan Keprofesionalan (MKPP). Ketiga kelompok mata kuliah ini mengakomodasi mata kuliah yang menunjang pencapaian kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain, sebagaimana yang tertuang dalam

SK Mendiknas No. 045 /2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

Di samping kurikulum utuh setiap program studi, kurikulum di FKIP–UT juga terdiri dari paket-paket untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kualitas guru sesuai dengan permintaan dari lapangan. Paket-paket ini dapat merupakan paket yang menjurus kepada program sertifikat dan bahkan dapat ditransfer jika ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan demikian, guru yang mengambil program sertifikat dapat mentransfer kredit yang telah dimiliki, jika ingin melanjutkan ke jenjang S1.

2. Bahan Belajar Mandiri

Bahan ajar untuk setiap mata kuliah dikembangkan secara sistematis melalui pengembangan Rancangan Mata Kuliah (RMK) yang mencakup Peta Kompetensi dan Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP). Peta kompetensi yang merupakan hasil dari Analisis Instruksional (AI) menggambarkan kompetensi umum yang akan dicapai dalam satu mata kuliah, serta kompetensi khusus yang mendukung tercapainya kompetensi umum tersebut. Di samping itu, peta kompetensi juga menggambarkan hubungan antarkompetensi khusus sesuai dengan hakikat setiap kompetensi khusus tersebut. Hubungan ini akan menjurus kepada urutan kompetensi yang harus lebih dahulu dikuasai dalam satu mata kuliah. GBPP adalah garis besar program yang merupakan peta yang menggambarkan kompetensi, pengalaman belajar, materi kajian, dan evaluasi untuk dituangkan dalam modul-modul bahan ajar.

Dengan berpedoman pada GBPP, para penulis bahan ajar akan mengembangkan materi pokok mata kuliah dalam bentuk modul. Setiap modul merupakan materi pokok yang bersifat pembelajaran mandiri dan lengkap, sehingga mampu membimbing mahasiswa untuk belajar mandiri. Pembelajaran mandiri berarti bahan belajar

ini mampu membuat mahasiswa belajar secara mandiri, mengatur kecepatan belajarnya, menilai pencapaiannya sendiri, serta berdasarkan hasil penilaian tersebut, memutuskan untuk mengulang kembali atau meneruskan ke bahan belajar berikutnya. Lengkap berarti segala sumber belajar yang diperlukan mahasiswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan tersedia dalam bahan belajar tersebut. Oleh karena itu, berbagai media seperti media cetak, media audio, dan video merupakan suplemen dari modul-modul tertentu, sehingga mahasiswa mendapatkan materi yang memadai yang akan menunjang pencapaian kompetensi yang diharapkan. Di samping itu, sumber-sumber yang diperkirakan dapat diakses secara mudah oleh mahasiswa, juga dicantumkan dalam bahan belajar.

Dengan melihat jumlah waktu yang diperlukan untuk menguasai kompetensi yang dituntut dalam sebuah modul, maka bobot sebuah modul ditentukan sama dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) sks. Ini berarti, bahan belajar mata kuliah yang berbobot dua sks akan terdiri dari enam modul; untuk mata kuliah tiga sks, sembilan modul dan seterusnya. Sebuah modul terdiri dari 40–60 halaman untuk bidang noneksakta, dan 30–40 halaman untuk mata kuliah eksakta. Dengan pembatasan jumlah halaman seperti itu, diharapkan bahan belajar akan memuat berbagai contoh dan latihan yang mempermudah mahasiswa mencerna berbagai konsep, khususnya konsep-konsep yang akan diterapkan langsung oleh para guru, ketika melaksanakan tugasnya sebagai guru. Kemampuan keguruan memang harus dibentuk melalui latihan yang dirancang secara sistematis dan bertahap. Contoh-contoh yang tepat dengan jumlah yang memadai akan mempermudah para mahasiswa untuk melaksanakan latihan, baik secara mandiri, maupun dalam kelompok.

Para pengembang bahan ajar jarak jauh berasal dari berbagai LPTK tatap muka yang cukup terkenal di negeri ini, di samping tenaga akademik dari FKIP-UT. Agar para penulis dapat

mengakomodasi karakteristik pendidikan guru jarak jauh dalam menulis bahan ajar, maka pada awal penulisan diadakan semacam pelatihan singkat dalam menulis bahan ajar mandiri. Bahan ajar yang sudah selesai ditulis kemudian ditelaah oleh tenaga akademik yang berasal dari LPTK yang berbeda. Hasil telaah merupakan masukan bagi penulis untuk memperbaiki/menyempurnakan bahan ajar. Dengan cara ini, bahan ajar mandiri yang dikembangkan untuk para mahasiswa pendidikan guru jarak jauh akan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi substansi maupun cara penyajian. Pada kenyataannya, bahan ajar dalam bentuk modul ini banyak dimanfaatkan oleh perguruan tinggi tatap muka. Kenyataan ini merupakan salah satu indikator bahwa bahan ajar mandiri yang dikembangkan oleh Universitas Terbuka dapat diterima/dipakai oleh perguruan tinggi lain.

Selain bahan ajar cetak, bahan ajar mandiri juga terdiri dari bahan ajar berupa video dan audio, serta bahan ajar "*online*". Bahan ajar audio dan video pada dasarnya merupakan suplemen dari bahan ajar cetak, sedangkan bahan ajar *online* dikaitkan dengan tutorial *online* yang diperuntukkan mahasiswa yang mempunyai akses ke internet. Pada dasarnya semua jenis bahan ajar dikembangkan dengan langkah-langkah yang sama dan bersumber dari RMK. Jika bahan ajar cetak yang disertai dengan multimedia berupa audio dan video merupakan bahan ajar utama yang wajib diikuti/dipelajari oleh mahasiswa, maka bahan ajar *online* merupakan bahan ajar alternatif, yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa yang mempunyai akses ke internet. Jalinan kerja sama yang dibangun oleh penyelenggara pendidikan jarak jauh dengan penyedia layanan internet, diharapkan dapat meningkatkan jumlah mahasiswa yang mampu memanfaatkan bahan ajar *online*. Di samping itu, juga tersedia bahan ajar dalam bentuk Pembelajaran Berbantuan Komputer (PBK) secara terbatas.

- Pendidikan Guru Jarak Jauh (Kasus FKIP Universitas Terbuka)

C. Proses Pembelajaran, Evaluasi, dan Ujian Akhir Nasional

1. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran merupakan komponen yang paling krusial dalam pendidikan karena proses pembelajaran yang dilaksanakan dengan benar akan membuahkan hasil belajar yang sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ada pihak yang mempertanyakan apakah proses belajar dalam pendidikan guru jarak jauh mampu menjamin terbentuknya kompetensi guru (Kompas, 9 Mei 2005, hal. 9). Sikap apatis terhadap pendidikan guru jarak jauh lebih banyak didasarkan pada kurangnya informasi tentang proses pembelajaran dalam pendidikan guru jarak jauh. Hal ini menyebabkan munculnya anggapan, bahwa proses pembelajaran dalam pendidikan guru jarak jauh hanya dilakukan dengan membaca modul dan melalui internet, sebagaimana yang terungkap dalam Kompas, 9 Mei 2005 tersebut. Padahal sebenarnya, sesuai dengan hakikat pembentukan kemampuan keguruan, proses pembelajaran dalam pendidikan guru jarak jauh sangat beragam, seperti yang diuraikan berikut ini.

Sesuai dengan karakteristik pendidikan jarak jauh, maka pendidikan guru jarak jauh pun mengutamakan kemampuan mahasiswa untuk belajar mandiri, meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa UT belum siap mengubah cara belajar tatap muka menjadi cara belajar jarak jauh (Kadarko, 2000). Hasil penelitian yang lain menunjukkan bahwa mahasiswa UT mempunyai potensi untuk belajar mandiri, hanya belum mampu bertanggung jawab secara penuh (Puspitasari & Islam, 2003). Hasil-hasil penelitian tersebut tentu merupakan alat pemacu bagi penyelenggara program untuk mengupayakan agar para mahasiswa

pendidikan guru jarak jauh cepat mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan belajar mandiri.

Sejalan dengan tuntutan belajar mandiri, para mahasiswa yang sedang aktif bertugas sebagai guru, diharapkan mampu mengatur dirinya dalam belajar dan melaksanakan tugas sebagai guru. Mereka diharapkan mampu menguasai berbagai kemampuan keguruan melalui berbagai kegiatan, seperti mempelajari materi pokok yang disediakan dalam bentuk modul, membentuk kelompok belajar untuk membahas berbagai permasalahan yang ditemui dalam mencerna isi modul, mengikuti tutorial, baik yang bersifat wajib, maupun atas prakarsa sendiri, mengikuti kegiatan praktikum, serta mengikuti kegiatan Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM) dan Pemantapan Kemampuan Profesional (PKP) yang merupakan muara dari program pendidikan guru. Setiap kegiatan belajar mempunyai tuntutan dan ciri khas masing-masing sesuai dengan kemampuan yang akan dikuasai, sebagaimana yang terungkap dalam deskripsi berikut ini. Namun perlu dicatat bahwa kualitas setiap kegiatan belajar akan saling mempengaruhi keberhasilan mahasiswa. Misalnya, kegiatan mahasiswa dalam membaca modul akan mempengaruhi kualitas kegiatan tutorial yang diikuti, demikian pula kegiatan tutorial akan mempengaruhi kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan PKM dan PKP.

a. *Membaca Modul*

Kegiatan membaca modul mata kuliah yang sedang diambil menuntut mahasiswa mengerjakan berbagai tugas dan latihan yang dapat dilakukan secara mandiri. Bahan belajar yang disiapkan dalam bentuk modul memang dikembangkan untuk memenuhi prinsip: “mandiri”, yang berarti mahasiswa mampu membelajarkan dirinya sendiri dengan menggunakan modul yang disediakan. Mereka mampu menilai kemajuannya dalam penguasaan kompetensi yang

- Pendidikan Guru Jarak Jauh (Kasus FKIP Universitas Terbuka)

dituntut, baik melalui pengerjaan tugas dan latihan, maupun melalui pengerjaan tes formatif. Jika perlu, mereka dapat berdiskusi dengan teman-temannya atau berkonsultasi dengan para tutor. Terdapat modul-modul tertentu yang dilengkapi dengan media audio dan/atau video yang terkait dengan kompetensi yang didukung oleh modul tersebut. Dalam hal ini, mahasiswa harus mampu mengatur diri untuk mendengarkan atau menyaksikan media yang disediakan tersebut. Tanpa melakukan kegiatan itu, mahasiswa tidak mungkin menguasai kompetensi yang diharapkan.

Meskipun kegiatan membaca modul merupakan kegiatan mandiri yang wajib dilakukan oleh mahasiswa sebelum mengikuti tutorial, namun pengalaman menunjukkan banyak mahasiswa yang belum membaca modul ketika datang ke tempat tutorial. Tidak semua mahasiswa mampu mengubah gaya belajar tradisional menjadi gaya belajar mandiri. Oleh karena itu, layanan belajar baik yang bersifat akademik maupun nonakademik harus disediakan bagi mahasiswa (Simpson, 2000). Sering terjadi mahasiswa hanya membaca modul ketika ujian sudah di ambang pintu. Gaya belajar seperti ini tentu tidak akan membuahkan hasil yang diharapkan karena membaca modul bukan seperti membaca dongeng yang dapat dilahap dalam waktu singkat. Membaca modul memerlukan kesungguhan dan kecermatan agar konsep-konsep yang dipelajari dapat dikuasai dengan baik. Oleh karena itu, mahasiswa pendidikan jarak jauh, lebih-lebih mahasiswa pendidikan guru, harus membuat jadwal belajar dan menaati jadwal tersebut. Disiplin terhadap diri sendiri sangat menentukan keberhasilan mahasiswa, di samping juga akan menjadi kunci keberhasilan dalam melaksanakan tugas sebagai guru yang sedang melanjutkan studi. Di sinilah pentingnya layanan belajar seperti yang sudah diungkapkan di depan.

b. Belajar Kelompok

Belajar dalam kelompok merupakan salah satu modus dalam pembelajaran jarak jauh. Berbeda dengan belajar kelompok pada pendidikan tatap muka yang diprakarsai oleh dosen, belajar kelompok dalam pendidikan jarak jauh harus diprakarsai oleh mahasiswa sendiri dengan cara membentuk kelompok belajar. Anggota kelompok biasanya terdiri dari para guru yang mengambil program/paket yang sama, misalnya Program D-II PGSD, paket 1, Program Pendidikan Bahasa Inggris, atau Program Akta Mengajar. Satu faktor lagi yang dipertimbangkan dalam membentuk kelompok adalah jarak tempat tinggal/tempat mengajar yang memungkinkan mereka berkumpul tanpa menempuh jarak yang terlalu jauh. Setiap kelompok belajar harus menjadwalkan pertemuan kelompok sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang tersedia. Untuk mahasiswa yang sedang bertugas sebagai guru, tempat dan waktu pertemuan kelompok dapat diatur sehingga tidak mengganggu jadwal mengajar mereka. Kegiatan dalam kelompok dapat berupa mengidentifikasi kesulitan dalam modul yang dipelajari, mendiskusikan cara pemecahan kesulitan/masalah yang ditemui, mengerjakan tugas/latihan dalam modul, menghimpun masalah yang tidak dapat diatasi oleh kelompok, mendengarkan/menyaksikan audio atau video yang merupakan suplemen modul disertai dengan diskusi.

Untuk mengefektifkan kegiatan kelompok belajar, pengelola pendidikan guru jarak jauh dapat memfasilitasi pembentukan kelompok belajar dan kegiatannya dengan berbagai cara. Salah satu di antara cara tersebut adalah menyediakan tempat pertemuan, membantu menyusun jadwal kegiatan, menyediakan atau merekomendasikan tutor jika diperlukan, dan barangkali mengadakan pertemuan secara teratur. Fasilitasi ini akan sangat bermakna, lebih-lebih pada awal kegiatan karena tanpa fasilitasi akan sulit bagi mahasiswa untuk mengadakan pertemuan. Setelah kegiatan

kelompok berjalan, fasilitasi dapat dikurangi sambil mendorong kelompok untuk mengatur dirinya sendiri.

c. *Tutorial*

Perubahan mendasar dalam paradigma pendidikan dari “berpusat pada guru” menjadi “berpusat pada siswa” (Brojonegoro, 1999), membuat pendidikan guru jarak jauh harus berpikir keras untuk mewujudkan paradigma baru tersebut. Lebih-lebih bagi para guru yang harus juga mewujudkan paradigma tersebut di kelasnya, kegiatan pembelajaran dalam bentuk tutorial menjadi sangat penting karena merupakan kegiatan yang memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Meskipun tutorial tidak diwajibkan bagi mahasiswa jarak jauh, namun bagi pendidikan guru, tutorial memegang peran sentral. Di samping sebagai ajang pertemuan antarmahasiswa dan tutor yang mampu meningkatkan motivasi belajar (Flinck & Flinck, 1990), tutorial juga berperan penting dalam peningkatan kemampuan mahasiswa menguasai kompetensi yang dituntut oleh setiap mata kuliah. Kemampuan bekerja sama, kemampuan berdiskusi, serta kemampuan memecahkan masalah merupakan kemampuan yang dapat dibentuk melalui tutorial dan terkait erat dengan pembentukan berbagai kemampuan mengajar. Melalui tutorial, mahasiswa diharapkan sempat menghayati belajar dengan menggunakan berbagai strategi yang dirancang dan diterapkan oleh tutor dengan pendekatan “berpusat pada siswa”. Pada gilirannya, penghayatan tersebut diharapkan dapat diterapkan oleh para mahasiswa di kelas masing-masing. Menyadari pentingnya fungsi tutorial dalam pembentukan kemampuan keguruan, FKIP-UT memberi perhatian khusus pada pelaksanaan tutorial dalam berbagai modus.

Tutorial diselenggarakan dalam berbagai modus, seperti tutorial tatap muka, tutorial tertulis, tutorial melalui radio, dan tutorial

online. Pada umumnya, tutorial yang paling diminati oleh para guru adalah tutorial tatap muka. Hal ini dapat dipahami, karena berbagai kemampuan/kesempatan yang diuraikan di atas dapat diperoleh dari tutorial tatap muka. Kenyataan ini tidak bertentangan pula dengan salah satu prinsip yang menyatakan bahwa pertemuan tatap muka bukan merupakan pantangan dalam pendidikan jarak jauh (Suparman, 1992). Meskipun demikian, modus tutorial yang lain juga mendapat perhatian dari mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa yang karena kondisi tempat tinggalnya tidak mungkin mengikuti tutorial tatap muka.

Dalam tutorial tatap muka diberikan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa di bawah supervisi para tutor. Tugas tersebut diperiksa oleh tutor dan akan ikut menentukan nilai akhir yang diperoleh mahasiswa dalam mata kuliah tersebut. Pada awalnya, tutorial tatap muka seperti ini disebut sebagai: Tutorial Tatap Muka Rancangan Khusus (TTM-RK) yang mempersyaratkan pertemuan sebanyak delapan kali untuk satu mata kuliah dalam satu semester. Dalam perkembangan selanjutnya, TTM-RK ini hanya disebut sebagai tutorial tatap muka (TTM), namun prinsip penyelenggaraannya sama. Khusus untuk mahasiswa pendidikan guru, TTM bersifat wajib diikuti untuk mata kuliah tertentu. Persyaratan ini diberlakukan mengingat pentingnya interaksi langsung dalam pembentukan kemampuan keguruan.

Untuk mengikuti tutorial, khususnya tutorial tatap muka, mahasiswa wajib mempelajari materi bahan ajar yang akan ditutorialkan. Mereka diharapkan datang ke tempat tutorial dengan berbagai pertanyaan atau masalah yang akan dibahas dalam pertemuan tutorial. Berbeda dengan pembelajaran tatap muka, dalam tutorial para tutor tidak akan banyak menceramahkan materi yang terdapat dalam modul, tetapi lebih banyak membimbing mahasiswa memecahkan masalah yang ditemukan ketika

- Pendidikan Guru Jarak Jauh (Kasus FKIP Universitas Terbuka)

mempelajari modul. Oleh karena itu, akan sangat sia-sia jika mahasiswa mengharapkan akan mendengarkan penjelasan panjang lebar tentang konsep-konsep yang terdapat dalam modul. Namun, hal ini tidak berarti bahwa konsep-konsep utama tidak menjadi pembahasan. Konsep-konsep tersebut tetap penting untuk dibahas, namun pembahasannya tidak hanya berasal dari tutor, tetapi juga dari mahasiswa.

Tutorial tertulis, tutorial radio, dan tutorial *online*, yang menurut Holmberg (1995) disebut sebagai tutorial jarak jauh disediakan terutama bagi mereka yang tidak mungkin mengikuti tutorial tatap muka. Meskipun layanan jarak jauh memang merupakan ciri khas/primadona dari pendidikan jarak jauh seperti yang terungkap dalam tulisan Taylor (2003), namun kenyataan yang terjadi dalam pendidikan guru jarak jauh berbeda. Tutorial tertulis dan radio banyak diikuti oleh mahasiswa FKIP, namun tidak sebanyak tutorial tatap muka, sedangkan tutorial *online*, pesertanya sangat terbatas. Penyebab dari kondisi ini mungkin kurangnya akses para guru ke internet, di samping mungkin keterampilan menggunakan internet belum dikuasai oleh banyak guru.

d. *Praktikum dan Praktek*

Kegiatan praktikum dan/atau praktek dipersyaratkan oleh berbagai mata kuliah dalam Kurikulum Pendidikan Guru. Tujuan kegiatan ini adalah membekali mahasiswa dengan keterampilan yang dituntut oleh mata kuliah, baik keterampilan untuk dirinya sendiri, maupun keterampilan yang akan diajarkan kepada para siswa, ketika mahasiswa ini melaksanakan tugas sebagai guru. Mahasiswa pendidikan guru jarak jauh wajib melakukan kegiatan praktikum atau praktek di bawah bimbingan instruktur atau secara mandiri. Untuk keperluan ini, disediakan kit, seperti Kit IPA, Kit Musik, dan Kit Olah Raga, kaset atau video, sesuai dengan

karakteristik mata kuliah, serta panduan praktek dan praktikum yang akan memandu mahasiswa ketika akan mengikuti kegiatan tersebut. Tempat kegiatan mungkin di laboratorium sekolah atau perguruan tinggi terdekat, di kelompok belajar, atau di tempat lain yang ditentukan. Sebagai bukti bahwa mahasiswa telah mengikuti kegiatan praktek/praktikum dan sekaligus untuk menilai kemampuan mereka dalam melakukan kegiatan tersebut, para mahasiswa diwajibkan membuat laporan.

e. *PKM dan PKP*

Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM) dan Pemantapan Kemampuan Profesional (PKP) merupakan mata kuliah yang menekankan pada praktek. Mengajar merupakan satu kemampuan yang sangat kompleks yang hanya mungkin dibentuk melalui latihan yang sistematis dan bertahap. Kegiatan PKM akan memungkinkan mahasiswa mengalami latihan pemantapan kemampuan mengajar yang telah dimilikinya secara bertahap dan sistematis, seperti latihan penguasaan konsep keterampilan dasar mengajar, berlatih menerapkannya dalam bentuk simulasi, serta mendiskusikan hasil latihan tersebut. Hasil diskusi digunakan sebagai masukan bagi latihan berikutnya. Dengan demikian, PKM akan mampu membuat guru mengajar lebih baik, sehingga kualitas proses belajar siswa pun diharapkan akan meningkat.

Pada awalnya, banyak pihak yang menentang kehadiran mata kuliah PKM dalam Program Pendidikan Guru dalam jabatan. Mereka beranggapan bahwa para guru yang menjadi mahasiswa tidak perlu latihan mengajar lagi, karena mereka sudah menjadi guru. Bagi para guru yang sudah mengajar ini, yang diperlukan adalah penguasaan bidang studi serta pengetahuan lain yang akan membuat wawasan mereka menjadi semakin luas. Tentu saja argumentasi demikian itu dipatahkan oleh konsep dasar kemampuan

- Pendidikan Guru Jarak Jauh (Kasus FKIP Universitas Terbuka)

keguruan, yang tidak hanya mempersyaratkan penguasaan bidang studi/bidang ilmu, tetapi juga mempersyaratkan peningkatan kemampuan dalam pemahaman tentang peserta didik, penguasaan pembelajaran yang mendidik, serta pengembangan kepribadian dan keprofesionalan, yang keempatnya merupakan rumpun kompetensi seorang guru, seperti yang tercantum dalam SKGK-SDMI (Depdiknas, 2002). Di samping itu, peningkatan kualifikasi guru tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan jenjang pendidikan guru, namun lebih penting dari itu adalah meningkatkan kemampuan profesional sebagai guru. Pada gilirannya, peningkatan kemampuan profesional ini diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas belajar siswa yang akan bermuara pada meningkatnya mutu pendidikan.

Istilah Pemantapan Pengalaman Lapangan (PPL) yang digunakan dalam pendidikan Program Pendidikan Guru Prajabatan *tidak* digunakan dalam Program Pendidikan Guru dalam jabatan karena tidak seluruh tahap-tahap latihan PPL berlaku bagi mahasiswa dalam jabatan. Istilah PPL lebih sesuai untuk program prajabatan. Sebagai gantinya, digunakan istilah Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM) karena para mahasiswa memang sudah memiliki kemampuan mengajar, sehingga yang perlu diprogramkan adalah memantapkan/meningkatkan kemampuan tersebut. Dengan demikian, PKM memang sudah memperhitungkan pengalaman guru dalam mengajar dan tidak memperlakukan mereka sebagai calon guru yang belum pernah mengajar.

PKP memungkinkan para guru mengembangkan diri menjadi guru profesional yang mampu memperbaiki kualitas pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Para mahasiswa yang mengambil Program S1 Kependidikan dipersyaratkan mengambil program ini sebagai persyaratan keluaran (*exit requirement*). Di bawah bimbingan supervisor, secara mandiri

mereka ditugaskan untuk mengidentifikasi masalah pembelajaran yang terjadi di kelasnya, menganalisis dan merumuskan masalah, merencanakan tindakan perbaikan, melaksanakan perbaikan, dan menyusun laporan. Dengan perkataan lain, mahasiswa melakukan penelitian tindakan kelas untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di kelasnya sendiri. Melalui kegiatan ini, para mahasiswa diharapkan terbiasa menemukan kekuatan dan kelemahan pembelajaran yang dikelolanya dengan melakukan refleksi profesional, dan kemudian mengembangkan cara untuk mengatasi masalah tersebut.

Keberhasilan kegiatan pembelajaran yang dirancang dalam pendidikan guru jarak jauh ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain komitmen mahasiswa, penyelenggara, dan mitra kerja pendidikan jarak jauh. Rencana yang baik jika dilaksanakan tanpa komitmen yang tinggi, tidak akan menghasilkan apa-apa. Perlu pula disadari bahwa sesuai dengan hakikatnya, pendidikan jarak jauh sangat mengandalkan kerja sama dengan berbagai pihak, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, baik dalam bentuk tutorial biasa, praktek dan praktikum, maupun dalam PKM dan PKP. Dalam kaitan ini, FKIP-UT sebagai penyelenggara pendidikan guru jarak jauh berupaya mendesain program pembelajaran secara realistis, namun tetap berpegang pada kemungkinan meningkatkan kemampuan keguruan para mahasiswa. Artinya, pengembang program harus benar-benar yakin bahwa program yang dirancang akan mampu membuat para mahasiswa meningkatkan kemampuan profesionalnya sebagai guru; sehingga mereka mampu mengelola pembelajaran yang mendidik, yaitu pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada penguasaan pengetahuan / informasi, tetapi yang juga peduli terhadap pembentukan karakter bangsa sebagai perwujudan dari tercapainya tujuan utuh pendidikan (Raka Joni, 1983, 1991, dan 2005).

- Pendidikan Guru Jarak Jauh (Kasus FKIP Universitas Terbuka)

2. Evaluasi dan Ujian Nasional

Untuk mengevaluasi ketercapaian kompetensi, mahasiswa pendidikan guru diwajibkan mengikuti berbagai prosedur penilaian. Kemampuan keguruan merupakan kemampuan yang kompleks; sehingga prosedur dan alat evaluasi harus diprogramkan secara komprehensif. Sehubungan dengan itu, ketercapaian kompetensi mahasiswa diakses melalui berbagai prosedur, yaitu: (a) Tugas Mandiri (TM), (b) Tugas Tutorial, (c) Kegiatan Praktek dan Praktikum, (d) ujian PKM dan PKP, (e) Ujian Akhir Semester (UAS), serta (f) Tugas Akhir Program (TAP). Sebagai perguruan tinggi negeri, penyelenggaraan ujian dilakukan oleh lembaga sendiri. Dengan perkataan lain, tidak ada ujian nasional yang biasanya diselenggarakan bagi mahasiswa perguruan tinggi. Berikut ini diuraikan pengertian, karakteristik, dan bobot sumbangan dari setiap jenis perangkat penilaian.

a. *Tugas Mandiri (TM)*

Sesuai dengan namanya, tugas mandiri (TM) dikerjakan secara mandiri oleh para mahasiswa. Tugas ini berupa tes, yang umumnya dalam bentuk tes objektif pilihan ganda dan diberikan untuk menguji penguasaan mahasiswa terhadap sekitar 50% materi modul bahan ajar setiap mata kuliah. Dengan demikian, fungsi TM dapat disamakan dengan ujian tengah semester untuk mahasiswa di perguruan tinggi tatap muka. Dari segi bentuk tes yang digunakan, dapat disimak bahwa kemampuan yang dinilai dengan TM sebagian besar berkisar pada penguasaan konsep yang bersifat kognitif.

b. *Tugas Tutorial*

Tugas tutorial merupakan tugas yang diberikan dalam tutorial, khususnya dalam tutorial tatap muka; meskipun tugas ini dapat juga

diberikan dalam tutorial *online* dan tutorial tertulis. Tugas diberikan dan dinilai oleh tutor. Pada umumnya, tugas ini menuntut mahasiswa mendemonstrasikan kemampuannya dalam menganalisis dan memecahkan masalah dan/atau menunjukkan keterampilannya dalam mengerjakan sesuatu yang terkait dengan mata kuliah yang sedang diambil. Tugas tutorial diberikan dan dinilai oleh tutor pada waktu yang telah ditetapkan, yaitu pada pertemuan ketiga, kelima, dan ketujuh dari tutorial yang menjadwalkan pertemuan sebanyak delapan kali. Nilai tugas tutorial mempunyai kontribusi tertentu terhadap nilai akhir mata kuliah, yaitu antara 10% s.d. 30%.

c. *Kegiatan Praktek dan Praktikum*

Kegiatan praktek dan praktikum dinilai melalui laporan yang dibuat oleh mahasiswa dengan menggunakan format yang telah disediakan. Laporan ini dinilai dan mempunyai kontribusi terhadap nilai akhir mata kuliah yang mempersyaratkan praktek/praktikum. Besar kontribusi berkisar antara 10% s.d. 40%, tergantung dari karakteristik mata kuliah.

d. *Ujian PKM dan PKP*

Ujian PKM ditempuh oleh mahasiswa D-II PGSD yang sudah mendapat rekomendasi layak mengikuti ujian dari para supervisor. Dengan adanya rekomendasi ini, diharapkan setiap mahasiswa yang mengikuti ujian PKM telah menjalani latihan yang memadai serta telah diasumsikan menguasai kompetensi yang diharapkan. Dalam ujian PKM, mahasiswa diwajibkan mengajar dua kali dengan bidang studi/topik yang berbeda. Setiap mahasiswa diuji oleh dua orang penguji yang menilai persiapan (rencana pembelajaran) dan pelaksanaan pembelajaran.

- Pendidikan Guru Jarak Jauh (Kasus FKIP Universitas Terbuka)

Ujian PKP diikuti oleh mahasiswa program S1, baik S1 PGSD maupun S1 Kependidikan Bidang Studi. Nilai seorang mahasiswa dalam PKP ditentukan oleh dua komponen, yaitu nilai laporan dan nilai ujian PKP. Laporan dibuat oleh mahasiswa atas perbaikan yang sudah dilakukannya di kelasnya sendiri; sedangkan ujian PKP mempersyaratkan mahasiswa mengajarkan dua bidang studi/topik yang berbeda yang sudah pernah menjadi fokus perbaikan ketika mahasiswa berlatih memperbaiki pembelajaran melalui PTK. Nilai akhir mahasiswa dalam PKP ditentukan oleh nilai laporan dan nilai ujian.

e. *Ujian Akhir Semester*

Ujian akhir semester (UAS) ditempuh oleh mahasiswa untuk mata kuliah yang memang mempersyaratkan UAS. Pada umumnya, UAS diberikan dalam bentuk soal pilihan ganda, yang dapat dikombinasikan dengan tes jawaban singkat, serta diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia. Nilai UAS pada dasarnya memberikan kontribusi terbesar bagi nilai akhir mata kuliah.

f. *Tugas Akhir Program*

Sebelum menyelesaikan program, mahasiswa diwajibkan menempuh ujian komprehensif tertulis (UKT), yang bertujuan untuk menguji wawasan/kemampuan mahasiswa menerapkan berbagai konsep dalam program studi yang diambilnya. Belakangan, UKT diubah menjadi Tugas Akhir Program (TAP), yang diberlakukan mulai masa registrasi 2004.2 bagi FKIP dan 2006.1 bagi UT. TAP merupakan tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa yang menuntut kemampuan dalam menganalisis dan memecahkan masalah dalam bidang masing-masing. Kemampuan ini diwujudkan dalam bentuk karya ilmiah yang dihasilkan dari bimbingan TAP

yang wajib diikuti oleh mahasiswa, serta ujian yang menuntut mahasiswa mampu memecahkan masalah pembelajaran yang dikemas dalam kasus-kasus. TAP dapat disetarakan dengan Tugas Akhir yang diberikan di perguruan tinggi tatap muka.

D. Tenaga Kependidikan

1. Jenis dan Kualifikasi

Sesuai dengan UU No. 20/Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tenaga kependidikan adalah semua personil yang membantu penyelenggaraan pendidikan; sedangkan tenaga pendidik adalah mereka yang melaksanakan tugas mengajar, mendidik, dan melatih. Sehubungan dengan itu, maka tenaga kependidikan di FKIP-UT, sebagai penyelenggara pendidikan guru jarak jauh terdiri dari tenaga kependidikan nonpendidik yaitu tenaga administrasi dan teknisi; serta tenaga pendidik, yaitu dosen, supervisor, dan instruktur. Karena mahasiswa pendidikan guru jarak jauh tersebar di seluruh pelosok tanah air, maka tenaga kependidikan ini juga tersebar di seluruh pelosok tanah air, yaitu di 35 Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ). Berikut ini diuraikan sepintas kilas tentang masing-masing tenaga.

a. Tenaga Kependidikan Nonpendidik

Tenaga kependidikan nonpendidik terdiri dari para staf administrasi, mulai dari Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Subbagian, para teknisi, pengemudi, sampai dengan para tenaga pembantu seperti penerima dan pengantar surat. Oleh karena itu, kualifikasi bagi tenaga ini bervariasi, mulai dari sarjana (bahkan ada yang Magister), Diploma III, sampai dengan lulusan SMA.

- Pendidikan Guru Jarak Jauh (Kasus FKIP Universitas Terbuka)

b. Tenaga Pendidik

Pada dasarnya, tenaga pendidik pada pendidikan guru jarak jauh dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga tetap yang memang status kepegawaiannya berada di FKIP-UT, serta tenaga dari berbagai lembaga pendidikan yang merupakan mitra kerja UT. Tenaga pendidik di FKIP-UT terdiri dari dosen, supervisor PKM & PKP, dan instruktur. Dosen FKIP-UT terdiri dari dosen tetap dan semua dosen dari berbagai lembaga pendidikan guru yang menjadi penulis modul-modul FKIP-UT. Sesuai dengan persyaratan dosen bagi perguruan tinggi, maka kualifikasi dosen merentang dari lulusan S1 sampai dengan S3, sedangkan khusus bagi dosen FKIP-UT maka para dosen ini harus mempunyai latar belakang kependidikan. Dari segi kualifikasi pendidikan, diharapkan kualifikasi pendidikan dosen minimal S2 (Magister) dalam bidang yang relevan dengan pendidikan guru. Supervisor PKM dan PKP berasal dari tenaga dosen dan guru yang sudah mempunyai pengalaman mengajar minimal lima tahun dan mampu membimbing para mahasiswa dalam melaksanakan PKM dan PKP. Tenaga instruktur adalah mereka yang membimbing mahasiswa untuk melakukan praktek dan praktikum. Persyaratan bagi instruktur adalah mempunyai kemampuan profesional dalam bidang yang sesuai (seperti instruktur Olah Raga, Seni Tari, Seni Musik), serta mampu membimbing mahasiswa melakukan praktek/praktikum dalam bidang tersebut. Dari persyaratan tersebut dapat dipahami bahwa tenaga instruktur sebagian besar berasal dari luar FKIP-UT, baik dari lembaga pendidikan guru, maupun tenaga profesional di luar lembaga pendidikan guru.

2. Rekrutmen

Pada dasarnya, rekrutmen tenaga kependidikan di FKIP-UT dapat dibedakan atas dua kelompok. Pertama, rekrutmen tenaga kependidikan yang berstatus sebagai pegawai negeri di Universitas Terbuka; dan kedua rekrutmen tenaga kependidikan yang bukan pegawai negeri di Universitas Terbuka. Kelompok pertama, direkrut berdasarkan peraturan pengangkatan pegawai negeri, dengan persyaratan tambahan mempunyai latar belakang kependidikan bagi dosen; sedangkan kelompok kedua direkrut melalui rekomendasi dari mitra kerja sama (misalnya perguruan tinggi negeri setempat). Rekomendasi ini kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala UPBJJ yang akan menerbitkan surat penugasan bagi tenaga yang diterima.

3. Status

Seperti sudah tersirat dalam uraian di atas, status tenaga kependidikan di FKIP-UT dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, yang berstatus sebagai pegawai negeri di UT, dan kedua tenaga di luar FKIP-UT, khususnya tenaga pendidik, yaitu dosen, supervisor, dan instruktur. Para tenaga kependidikan yang berstatus sebagai pegawai negeri di UT merupakan pegawai tetap yang mempunyai hak dan kewajiban sama dengan pegawai negeri lainnya; sedangkan tenaga pendidik yang berasal dari luar UT merupakan tenaga tidak tetap yang penugasannya disesuaikan dengan kebutuhan tenaga di FKIP-UT. Misalnya, para penulis modul yang juga berstatus sebagai dosen bagi mata kuliah yang ditulisnya, hanya diberi tugas ketika ada kebutuhan untuk menulis modul, serta para supervisor PKM ditugaskan ketika kegiatan PKM/PKP dan ujian PKM/PKP sedang berlangsung.

4. Deskripsi Tugas

Tenaga kependidikan di FKIP-UT sebagai penyelenggara pendidikan jarak jauh, khususnya tenaga dosen, mempunyai tugas yang berbeda dari tugas-tugas dosen yang bekerja pada pendidikan guru tatap muka. Secara umum, memang tugas dosen adalah mengemban Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Namun, secara khusus, tugas dosen di UT tidak hanya terbatas pada tugas-tugas yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, tetapi juga mengerjakan tugas-tugas pengelolaan, seperti memeriksa kelengkapan persyaratan mahasiswa yang akan menempuh ujian komprehensif atau Tugas Akhir Program (TAP), alih kredit, mengelola pengembangan bahan ajar dan bahan ujian, atau melakukan penyapaan kepada mahasiswa yang pasif. Di samping tugas-tugas di fakultas, dosen FKIP-UT juga ditugaskan di berbagai unit di UT, seperti di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Lembaga Pengembangan Bahan Ajar, Ujian, dan Sistem Informasi (LPBAUSI) dengan unit-unit pendukungnya, bahkan dapat pula ditugaskan di Rektorat dan Program Pascasarjana, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Di luar itu, masih ada lagi tugas-tugas yang diemban oleh dosen FKIP-UT, seperti melatih tutor, memantau ujian ke berbagai daerah, bahkan menjadi tutor, jika diperlukan. Karena adanya tugas-tugas tersebut, di samping tugas pokok sebagai dosen (seperti menulis modul dan soal, memeriksa ujian), maka waktu untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menjadi terbatas. Oleh karena itulah, sesuai dengan esensi tugas-tugas seorang dosen pendidikan guru jarak jauh, maka jam kerja dosen di FKIP atau di UT sama seperti tenaga kependidikan lainnya, yaitu lima hari dalam seminggu, mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.15.

E. Sarana dan Prasarana

Seperti program pendidikan pada umumnya, program pendidikan guru jarak jauh mempersyaratkan adanya sarana dan prasarana. Secara umum, dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas 20/2003) Pasal 45 ayat (1) digariskan bahwa *"Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik"*. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP-SNP 19/2005), yaitu harus memenuhi Standar Sarana dan Prasarana. Menurut PP-SNP 19/2005, Pasal 1 Butir 8, yang berbunyi *"Standar sarana dan prasarana adalah standar pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolah raga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi komunikasi dan informasi"*. Mengenai standar sarana dan prasarana, dalam PP-SNP 19 /2005 secara normatif diatur dalam Pasal 42 s.d. 48, yang berlaku untuk semua satuan pendidikan dalam semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, termasuk yang diselenggarakan dengan sistem pendidikan jarak jauh.

Di antara pasal-pasal tersebut, yang secara substantif terkait pada penyelenggaraan pendidikan jarak jauh secara spesifik adalah yang tersurat dan tersirat dalam Pasal 42 PP-SNP 19 /2005, yakni butir-butir ketentuan yang berkenaan dengan peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi.

- Pendidikan Guru Jarak Jauh (Kasus FKIP Universitas Terbuka)

Dalam Pasal 42 PP-SNP 19/2005 tersebut dikemukakan pada ayat (1) bahwa secara umum *"Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan"*. Lebih rinci mengenai sarana dan prasarana umum pendidikan digariskan pada ayat (2): bahwa *"Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan"*. Jika dilihat dengan cermat ternyata di dalam PP-SNP 19/2005 tersebut, sarana dan prasarana pendidikan jarak jauh belum diatur secara khusus. Hal ini tidaklah berarti bahwa tidak ada rambu-rambu normatif bagi pendidikan jarak jauh. Secara lebih spesifik, sarana dan prasarana pendidikan jarak jauh tersebut diatur dalam Pasal 112 RPP Penyelenggaraan Pendidikan (versi 15 Agustus 2005). Pada ayat (1) RPP tersebut dikemukakan bahwa: *"Sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan jarak jauh harus berbasis teknologi komunikasi dan informasi, dan media lain serta sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dan standar keamanan komunikasi dan informasi"*. Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan bahwa: *"Penyelenggaraan satuan pendidikan jarak jauh berkewajiban untuk secara mandiri mengembangkan sistem operasional dengan dukungan jaringan radio, jaringan TV, jaringan komputer, dan/atau jaringan komunikasi dan informasi lainnya."* Semua ketentuan itu, baik yang bersifat umum dan relevan maupun yang bersifat khusus, memberikan rambu-rambu normatif kepada UT

dalam mengadakan dan menata sarana dan prasarana pendidikannya.

UT sebagai satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi jarak jauh memiliki prasarana fisik yang terdapat di kantor Pusat UT Pondok Cabe dan Kantor-kantor UPBJJ-UT di seluruh Indonesia. Di Kantor Pusat UT terdapat fasilitas lahan dan pekarangan, gedung Rektorat, *Operation Room* dan ruang sidang senat, gedung 4 fakultas, gedung lembaga yang terdiri dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Lantai II) dan Lembaga Pengembangan Bahan Ajar, Ujian, dan Sistem Informasi (Lantai 1), gedung Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Monitoring, dan gedung Biro Administrasi Umum dan Keuangan, gedung Perpustakaan, studio Produksi Bahan Ajar Noncetak, gedung percetakan, gudang bahan ajar dan bahan penunjang akademik lainnya, gedung serba guna, mesjid, gedung Pelayanan Umum, Klinik, Wisma, sejumlah ruang sidang, sarana olah raga, dan areal konservasi alam dan lingkungan, yang pada saat ini masih dalam proses pembangunan. Setiap gedung dilengkapi dengan perlengkapan kerja, baik jumlah maupun kualitasnya yang sangat memadai. Sebagai contoh di Kantor Pusat UT terdapat lebih dari 1500 komputer yang berfungsi baik dengan rasio satu komputer untuk 3 staf. Sedang pada setiap UPBJJ-UT terdapat fasilitas ruang pimpinan, ruang tata usaha, ruang kerja, ruang kelas tempat tutorial, gudang modul, ruang perpustakaan, ruang kantin, tempat berolah raga, dan tempat beribadah.

Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan guru jarak jauh Universitas Terbuka, prasarana yang dimiliki dan/atau didayagunakan sampai dengan saat ini mencakup prasarana yang dimiliki UT dan yang dimiliki oleh unsur di luar UT yang secara kolaboratif didayagunakan oleh UT. Yang dimiliki UT adalah Kantor Pusat UT dengan seluruh kelengkapannya, di Pondok Cabe, Pamulang,

- Pendidikan Guru Jarak Jauh (Kasus FKIP Universitas Terbuka)

Tangerang, 35 Kantor Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) dengan seluruh kelengkapannya yang tersebar pada 30 Propinsi di seluruh Indonesia. Yang dimiliki pihak-pihak di luar UT tetapi secara kolaboratif didayagunakan oleh UT adalah Kantor POS - PT Pos Indonesia, Kantor BRI, Warnet, Perpustakaan Wilayah/Daerah, Perpustakaan dan Laboratorium PTN Pembina, Gedung dan/atau Laboratorium Sekolah negeri/swasta, dan prasarana publik lainnya.

Prasarana pendidikan yang terdapat di Kantor Pusat UT yang bersifat kelembagaan dengan fungsi layanan lintas unit dan berfungsi substansial dalam penyiapan dan penyelenggaraan program pendidikan guru jarak jauh adalah Pusat Produksi Bahan Ajar Cetak (PPBAC), Pusat Produksi Bahan Ajar Noncetak (PPBANC), Pusat Pengujian (Pusjian), Pusat Komputer (Puskom), Pusat Layanan Bahan Ajar (Puslaba) yang secara struktural berada di bawah Lembaga Pengembangan Bahan Ajar, Ujian, dan Sistem Informasi (LPBAUSI) dan Pusat Layanan Pustaka yang secara organisatoris berada di bawah Rektor. PPBAC bertugas *"...menyelenggarakan fungsi: penyiapan naskah master bahan ajar cetak dan melaksanakan koordinasi produksi dan penerbitan bahan ajar cetak"*. (Pasal 40 Kep-Mendiknas No 123/O/2004). Bahan ajar cetak digunakan sebagai bahan belajar utama. PPBANC bertugas *"...menyelenggarakan fungsi: penyiapan naskah master dan melaksanakan koordinasi produksi bahan ajar noncetak."* (Pasal 44 Kep-Mendiknas No 123/O/2004). Bahan ajar noncetak digunakan sebagai bahan belajar pendukung. Pusjian bertugas: *"...menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pengembangan sistem ujian, tes dan pengukuran serta pengelolaan bank soal; pelaksanaan penggandaan dan koordinasi pengiriman bahan ujian; pelaksanaan koordinasi pelaksanaan ujian; pelaksanaan pengolahan hasil ujian"*. (Pasal 48 Kep-Mendiknas No 123/O/2004). Puskom bertugas: *"...menyelenggarakan fungsi: "...pelaksanaan pengembangan dan aplikasi program; pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyimpanan data dan*

informasi; pelaksanaan pemberian layanan data dan informasi; pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana." (Pasal 52 Kepmendiknas No. 123/O/2004). Puslaba bertugas: "...menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan urusan penggudangan bahan ajar dan bahan pendukung akademik lainnya; pelaksanaan pengiriman bahan ajar, bahan ujian, dan bahan pendukung akademik lainnya; dan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi distribusi bahan ajar dan bahan pendukung akademik lainnya". (Pasal 56) Kepmendiknas No 123/O/2004) Pusat Layanan Pustaka bertugas "...menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pengadaan dana pengolahan bahan pustaka; pelaksanaan pemeliharaan dan pemberian layanan serta pendayagunaan bahan pustaka; pelaksanaan penyebaran informasi; dan pelaksanaan urusan tata usaha Pusat" (Pasal 103 Kepmendiknas No 123/O/2004). Layanan pustaka tersebut disediakan khususnya bagi para mahasiswa untuk menunjang proses belajar di UT dan untuk para dosen dalam penulisan bahan ajar dan memperluas wawasannya.

Sampai saat ini, UT mempunyai dukungan berbagai jaringan (Rektor UT,2005:28), yaitu jaringan radio dengan RRI Programa Nasional Jakarta untuk penyiaran program pendidikan; jaringan TV dengan PT Jaring Data Interaktif untuk penyelenggaraan program pendidikan melalui Q-Channel; Komitel untuk akses layanan program pendidikan melalui Warnet; PT Telkom dalam rangka pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk peningkatan kualitas pembelajaran; PT Indosat untuk layanan informasi melalui SMS; dan PT Bhakti Wasantara Net untuk pelaksanaan program melalui Wasantara Net. Prasarana lainnya yang dimiliki oleh unsur di luar UT yang secara kolaboratif didayagunakan oleh UT adalah Kantor Pos dari PT Pos Indonesia (Persero), PT BRI (Persero), Perpustakaan Wilayah/Daerah, Perpustakaan dan Laboratorium PTN Pembina, Gedung dan/atau Laboratorium Sekolah negeri/swasta, ruang kelas tempat tutorial dan

- Pendidikan Guru Jarak Jauh (Kasus FKIP Universitas Terbuka)

ujian serta prasarana publik lainnya. Kantor Pos dari PT Pos Indonesia didayagunakan dalam registrasi calon mahasiswa dan mahasiswa serta pengiriman bahan belajar dan bahan ujian beserta seluruh kelengkapannya. Kantor BRI didayagunakan dalam pelaksanaan registrasi calon mahasiswa dan mahasiswa. Warnet didayagunakan dalam pelayanan tutorial *online* dan komunikasi maya lainnya antara mahasiswa dengan Kantor Pusat UT, seperti mengecek hasil ujian. Perpustakaan Wilayah/Daerah dan Perpustakaan PTN Pembina didayagunakan oleh mahasiswa dalam memperkaya pengalaman belajarnya melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan modul sebagai bahan belajar utama. Laboratorium PTN Pembina didayagunakan dalam praktikum mahasiswa untuk mata kuliah IPA. Gedung dan/atau Laboratorium Sekolah negeri/swasta didayagunakan dalam praktikum IPA, pemantapan kemampuan mengajar (PKM), ujian PKM, dan tutorial tatap muka.

Untuk keperluan pelaksanaan PKM D-II PGSD/D-II Guru Penjaskes SD, sekolah-sekolah (SD) tempat para mahasiswa FKIP-UT bekerja secara operasional digunakan sebagai tempat masing-masing mahasiswa melakukan PKM di bawah bimbingan supervisor PKM dan kepala sekolah. Sedang untuk ujian PKM digunakan sekolah-sekolah, yang oleh UPBJJ-UT setempat sebagai penanggung jawab ujian PKM, dianggap cukup memadai untuk tempat Ujian PKM. Selain itu, untuk keperluan praktikum IPA bagi mahasiswa Diploma III IPA, digunakan Laboratorium SMP/SMA tertentu atau Lab IPA di LPTK/PTN Pembina setempat atas dasar kemitraan. FKIP juga sudah merintis Klinik Pembelajaran bagi para guru/mahasiswa sebagai wahana dan sarana untuk membantu para guru meningkatkan kualitas kinerjanya secara profesional sebagai guru.

Sedangkan prasarana publik lainnya, seperti Gedung Pertemuan digunakan dalam acara Orientasi Studi Mahasiswa Baru (OSMB) dan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI).

F. Pengelolaan, Pendanaan, dan Pengawasan

Jika dilihat secara umum, keseluruhan pengelolaan, pendanaan, dan pengawasan pendidikan guru di UT merupakan bagian integral dari sistem pengelolaan, pendanaan, dan pengawasan pendidikan UT sebagai perguruan tinggi jarak jauh *modus tunggal*. Secara substantif-akademik dan programatik-kurikuler pendidikan guru di UT berada di dalam lingkungan dan merupakan tanggung jawab FKIP, namun secara institusional-manajerial berada di dalam konteks sistem manajemen UT. Hal ini terjadi, karena FKIP merupakan salah satu fakultas di lingkungan universitas dan sebagai implikasi logis dari karakter manajemen PTJJ *modus tunggal*. Hal itu pula yang membedakan pengelolaan, pendanaan, dan pengawasan dalam konteks penyelenggaraan pendidikan guru di UT dengan penyelenggaraan pendidikan guru tatap muka di IKIP dan STKIP dahulu. Oleh karena itu, sistem pengelolaan, pendanaan, dan pengawasan pendidikan guru yang diterapkan di UT sejak berdiri tahun 1984 sampai dengan saat ini, menerapkan sistem pengelolaan, pendanaan, dan pengawasan yang khas/unik.

Keunikan itu tumbuh karena secara fundamental-sistemik pendidikan jarak jauh (PJJ) merupakan suatu sistem yang memiliki subsistem: siswa dan kegiatan instruksional, pengembangan bahan ajar, reproduksi bahan ajar, distribusi bahan ajar, media komunikasi, pengujian, logistik, dan jaminan kualitas. Masing-masing subsistem itu mempunyai fungsi khusus yang diwadahi oleh lembaga khusus, tetapi bergerak dalam konteks sistemik, sinergis dan utuh serta bersifat nasional (Suparman dan Zuhairi, 2004:225-231). Oleh

- Pendidikan Guru Jarak Jauh (Kasus FKIP Universitas Terbuka)

karena itu, sistem pengelolaan, pendanaan dan pengawasan pendidikan guru di UT juga terpola secara sistemik, sinergis, dan utuh serta bersifat nasional. Kondisi ini secara legal sangat dimungkinkan karena UU Sisdiknas 2003 pun dengan tegas menggariskan bahwa *"Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya"* (Pasal 50 ayat (6)). Ketentuan dasar tersebut dipertegas lagi oleh PP-SNP 2005, yang mengelaborasi lebih jauh bahwa *"Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi"* (Pasal 49 ayat (2)). Salah satu prinsip dasar pengelolaan yang juga ditegaskan dalam PP-SNP 2005 adalah bahwa *"Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel"* (Pasal 54 ayat(1)).

Secara sistemik-kelembagaan, keseluruhan fungsi dari subsistem itu diwadahi oleh struktur organisasi dan tatakerja UT. Setelah berkiprah selama 20 tahun lebih, sistem kelembagaan UT awal yang dibangun pada saat berdirinya tahun 1984, pada tahun 2005 telah berkembang menjadi UT dengan sistem kelembagaan baru, seperti dituangkan dalam Keputusan Mendiknas RI Nomor 123/O/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka. Berdasarkan Kepmen tersebut, UT terdiri atas: Rektor dan Pembantu Rektor; Senat Universitas; Fakultas (FKIP, FEKON, FISIP, FMIPA); Dosen; Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang di dalamnya terdapat Pusat Keilmuan, Pusat Penelitian Kelembagaan dan Pengembangan Sistem, Pusat Antar Universitas untuk Peningkatan dan Pengembangan Instruksional, Pusat Pengabdian Masyarakat); Lembaga Pengembangan Bahan Ajar,

Ujian dan Sistem Informasi (LPBAUSI) yang di dalamnya terdapat Pusat Produksi Bahan Ajar Cetak (PPBAC), Pusat Produksi Bahan Ajar Noncetak (PPBANC), Pusat Pengujian (Pusjian), Pusat Komputer (Puskom), dan Pusat Layanan Bahan Ajar (Puslaba); Pusat Jaminan Kualitas (Pusmintas); Biro Administrasi Akademik, Perencanaan, dan Monitoring (BAAPM); Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK); Pusat Layanan Pustaka; Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ); dan Dewan Penyantun. Di dalam konteks sistemik-kelembagaan itulah pendidikan guru jarak jauh UT dikelola secara sistemik.

Sebagaimana terkandung dalam konsep umum manajemen, pengelolaan pendidikan tinggi UT mencakup kegiatan *perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian*. Dalam konteks itu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian pendidikan guru dilakukan dalam kerangka sistemik, yang merupakan bagian integral dari sistem pendidikan tinggi jarak jauh UT. Kegiatan pengelolaan tersebut berkenaan dengan aspek *substansi dan proses akademik, kegiatan operasional, dan pemanfaatan sumber daya pendidikan*. Pengelolaan substansi dan proses akademik mencakup pengembangan kurikulum, pengembangan bahan ajar, dan pengembangan bahan ujian. Secara institusional kewenangan akademik atas pengelolaan substansi dan proses akademik pendidikan guru berada di bawah tanggung jawab FKIP, yang secara operasional dilaksanakan di dalam masing-masing program studi dengan koordinasi oleh masing-masing jurusan.

Secara substantif-pedagogis, perencanaan substansi dan proses akademik pendidikan guru berbasis dan bermuara pada pengembangan kompetensi guru profesional. Oleh karena itu, kurikulum dan bahan ajar pendidikan guru dirancang sebagai wahana pedagogik untuk mengembangkan kemampuan memahami peserta didik, kemampuan menguasai pembelajaran yang mendidik,

- Pendidikan Guru Jarak Jauh (Kasus FKIP Universitas Terbuka)

kemampuan kepribadian sebagai guru, kemampuan menguasai materi ajar bidang studi dalam kurikulum sekolah, kemampuan memahami secara mendalam konsep dan metodologi disiplin keilmuan yang menaungi substansi kurikulum, dan kemampuan sosial guru sebagai anggota masyarakat. Orientasi rancangan substansi dan proses akademik itu secara substantif-normatif sesuai dengan hakikat kompetensi guru sebagai pendidik, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 PP-SNP 2005, yang mempersyaratkan guru untuk memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Pengelolaan pendidikan guru seperti itu dikenal dengan nama *competency-based teacher professional development* (Houston:1960, Levis:1978) , yang pada awal tahun 1980-an di Indonesia dikenal dengan nama *pendidikan guru berbasis kompetensi* (PGBK).

Pengembangan bahan ujian untuk program pendidikan guru diarahkan pada pengembangan berbagai prosedur dan alat evaluasi penguasaan kompetensi melalui penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa-guru sesuai dengan bidang studinya. Sampai saat ini penilaian penguasaan kompetensi menggunakan prosedur tes tertulis untuk penguasaan mata kuliah, observasi klinis kemampuan pembelajaran , dan tugas akhir program (TAP) untuk program Sarjana (S1). Sedangkan sebagai alat evaluasi, digunakan tes objektif dan uraian, Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG), dan Naskah TAP. Dengan prosedur dan alat penilaian kompetensi tersebut, diyakini bahwa lulusan pendidikan guru FKIP-UT akan mampu mencerminkan penguasaan kompetensinya sebagai guru profesional dalam bidang studinya masing-masing.

Dalam pengembangan kurikulum, bahan ajar cetak, dan bahan ujian FKIP-UT memanfaatkan pakar substansi dan/atau pendidikan/ pembelajaran dari berbagai perguruan tinggi negeri terkemuka, seperti Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Pendidikan

Indonesia (UPI), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Negeri Semarang (UNES), Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Universitas Negeri Malang (UNM), dan Universitas Negeri Padang (UNP). Hubungan kemitraan dengan semua perguruan tinggi tersebut, khususnya dalam merekrut calon penulis dan menyelenggarakan kegiatan pengembangan bahan ajar dan bahan ujian, FKIP-UT mendapat dukungan operasional dari masing-masing UPBJJ setempat. Kemitraan pemanfaatan kepakaran lainnya, yang kini sudah dirintis, yakni mulai tahun 2005 adalah dalam pemeriksaan ujian akhir semester uraian pada beberapa UPBJJ sentra. Pemanfaatan kepakaran dari berbagai perguruan tinggi terkemuka tersebut dimaksudkan untuk menjamin kualitas bahan ajar dan bahan ujian agar memenuhi standar akademik dan pedagogik proses pendidikan guru. Dengan demikian, secara programatik lulusan FKIP-UT dapat menunjukkan kapasitas akademik dan kinerja profesional yang sama dengan lulusan program pendidikan guru lain di luar UT.

Pengelolaan kegiatan operasional pendidikan guru mencakup pengelolaan produksi dan distribusi bahan ajar dan bahan ujian, pengelolaan bantuan belajar, pengelolaan pelaksanaan ujian, pengelolaan hasil ujian dan pemberian sertifikasi. Pengelolaan produksi bahan ajar dilakukan melalui kegiatan penyiapan master oleh PBAC dan penyiapan master dan penggandaan bahan ajar noncetak oleh PBANC, penetapan tiras bahan ajar cetak dan noncetak dan penetapan pencetakan bahan ajar cetak di Percetakan UT atau Percetakan rekanan UT dan penetapan penggandaan bahan ajar noncetak oleh PBANC. Pengelolaan bantuan belajar mencakup penyiapan model dan perangkat tutorial tatap muka untuk mahasiswa program D-II dan Sarjana (S1) PGSD dan D-II PGTK, serta tutorial *online* dan tutorial rancangan khusus (TTRMK) untuk program pendidikan guru bidang studi SMP/SMA/SMK. Kegiatan pengelolaan lainnya adalah pemetaan kelompok belajar di seluruh

- Pendidikan Guru Jarak Jauh (Kasus FKIP Universitas Terbuka)

wilayah UPBJJ, penetapan perekrutan dan penugasan tutor dan instruktur sesuai dengan kriteria yang berlaku untuk masing-masing program, penyiapan pembekalan para tutor inti di pusat atau daerah dan penyiapan pembekalan tutor daerah pada masing-masing wilayah UPBJJ-UT.

Pengelolaan ujian mencakup pemetaan tempat ujian dan lokasi ujian di seluruh Indonesia, penetapan jenis dan jumlah naskah ujian yang harus disiapkan sesuai dengan jumlah mahasiswa yang mendaftarkan ujian/ujian ulang, penataan jenis dan jumlah naskah ujian untuk setiap UPBJJ, penyiapan dan pengemasan bahan pendukung ujian. Perencanaan pengelolaan hasil ujian mencakup penetapan pola pemeriksaan lembar jawaban ujian (LJU) soal objektif pada Pusat Komputer dan pola pemeriksaan ujian uraian di FKIP-UT dan Sentra UPBJJ, serta penetapan prosedur pengolahan hasil ujian dan penerbitan hasil ujian oleh Pusat Pengujian. Kegiatan dalam rangka sertifikasi lulusan mencakup penyiapan kelengkapan penetapan kelulusan, termasuk di dalamnya penyiapan formulir ijazah dan transkrip, penjadwalan yudisium kelulusan, penyiapan keputusan kelulusan, penyiapan acara wisuda di kantor UT Pusat dan upacara penyerahan ijazah di UPBJJ-UT.

Pengelolaan sumber daya pendidikan guru termasuk dalam pengelolaan dana dan sumber daya pendidikan UT secara keseluruhan. Jika dikaitkan dengan konsep pembiayaan pendidikan yang mencakup biaya operasi, investasi dan biaya personal sebagaimana termaktub dalam Pasal 62 PP-SNP 2005, yang dapat direncanakan oleh UT sebagai penyelenggara pendidikan guru adalah biaya operasi yang langsung dikelola sendiri. *Biaya operasi* tersebut mencakup penerimaan dana masyarakat yang diperoleh dalam bentuk sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang harus dibayar oleh setiap mahasiswa atau disediakan sepenuhnya atau sebagian oleh lembaga pemberi beasiswa atau pemberi subsidi;

penerimaan dana di luar SPP seperti penjualan bahan ajar cetak dan noncetak, penetapan penerimaan dan pengeluaran UT per tahun oleh Senat UT. Rencana tersebut kemudian diajukan kepada Departemen Keuangan melalui departemen Pendidikan Nasional guna mendapatkan pengesahan untuk direalisasikan pada setiap tahunnya. Di luar biaya operasi tersebut juga terdapat biaya operasi lain yang secara rutin disiapkan oleh Pemerintah dalam bentuk gaji dosen dan tenaga administratif UT dan juga gaji dosen perguruan tinggi lain yang secara paruh waktu didayagunakan oleh UT sebagai penulis modul, penulis naskah multi media, tutor, instruktur praktikum, supervisor dan penguji Pemantapan Kemampuan Profesional (PKP untuk Program S1 PGSD)/Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM untuk D-II PGSD/PGTK) dan sebagai pengawas dan panitia ujian akhir semester. Sedang *biaya investasi* adalah biaya yang disediakan oleh Pemerintah atau UT secara mandiri dalam bentuk *sarana dan prasarana pendidikan* yang digunakan di lingkungan UT dan di luar UT dalam rangka pelaksanaan program pendidikan guru UT. Sementara itu *biaya personal pendidikan* yang dikeluarkan oleh setiap mahasiswa dalam rangka proses pendidikannya dan penghasilan yang hilang sebagai bagian dari biaya yang hilang karena kesempatan terambil oleh belajar (*opportunity cost*), tidak termasuk dalam pembahasan biaya pendidikan yang direncanakan oleh UT sebagai lembaga penyelenggara pendidikan guru. Biaya personal adalah istilah teknis yang digunakan dalam Pasal 62 PP-SNP 19/2005 beserta penjelasannya, yang mencakup antara lain “*pakaian, transpor, buku pribadi, konsumsi, akomodasi, dan biaya pribadi lainnya*” yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab setiap mahasiswa. Oleh karena itu, secara kelembagaan tidak menjadi bagian dari pengelolaan, pembiayaan, dan pengawasan UT. Jadi biaya personal tidak sama dengan biaya untuk personil atau pegawai. Biaya

- Pendidikan Guru Jarak Jauh (Kasus FKIP Universitas Terbuka)

personil atau pegawai, seperti gaji PNS termasuk dalam biaya operasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Pengendalian dalam rangka penjaminan mutu pendidikan guru dilakukan di UT dengan menerapkan sistem penjaminan kualitas (SIMINTAS). Upaya pengendalian dilakukan dengan menetapkan prosedur operasional baku untuk semua aktivitas penyelenggaraan pendidikan guru pada FKIP UT. Prosedur operasional baku tersebut dituangkan dalam sejumlah Pedoman Simintas. Hal-hal yang dikendalikan secara sistemik antara lain pengembangan bahan ajar cetak dan noncetak; pengembangan bahan tutorial dan pengelolaan tutorial tatap muka dan tutorial *online*; pengembangan bahan ujian dan pengelolaan ujian; dan praktik pemantapan kemampuan profesional sebagai guru. Pengendalian itu dimaksudkan untuk menjamin diperolehnya produk akademis (modul, bahan ujian, bahan tutorial dll) melalui prosedur yang baku sesuai konsep dan prinsip teknologi pembelajaran.

G. Pendirian dan Akreditasi

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UT sebagai lembaga pendidikan tenaga pendidik dan kependidikan didirikan sebagai bagian integral dari Universitas Terbuka yang didirikan pada tahun 1984 dengan Keputusan Presiden No. 41 tahun 1984 dan diresmikan oleh Presiden Suharto pada tanggal 4 September 1984. Seperti dikutip oleh Wahyono (2004:115-116) dalam Pasal 1 ayat (2) Kepres tersebut, dinyatakan bahwa struktur organisasi UT terdiri atas:

- Rektor dan Pembantu rektor
- Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
- Biro Administrasi Umum
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

- Fakultas Ekonomi
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
- Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- Pusat Produksi Media Pendidikan, Informatika dan Pengolahan Data
- Pusat Pengolahan pengujian
- Unit Program Belajar Jarak Jauh.

Jika dilihat dari latar belakangnya, UT didirikan untuk menjawab dua masalah besar dalam dunia pendidikan, yakni rendahnya mutu guru dan terbatasnya daya tampung pendidikan tinggi. Seperti diangkat oleh Wahyono (2004:1003) “Pada akhir dasawarsa tahun 1970-an banyak guru SLTP dan SLTA yang dididik secara darurat dalam bentuk program singkat, sehingga belum memenuhi standar kemampuan yang disyaratkan untuk mengajar di sekolah-sekolah pada tingkat pendidikan tersebut. Upaya untuk meningkatkan pendidikan guru (D-II untuk SLTP dan S1 untuk SLTA) setelah mereka bekerja ternyata tidak mudah karena adanya kendala biaya dan waktu”. Dari argumentasi tersebut jelas sekali bahwa pendirian FKIP sebagai lembaga pendidikan tenaga pendidik dan kependidikan dalam lingkungan UT dilakukan karena adanya *kebutuhan objektif yang mendesak untuk meningkatkan kualifikasi dan mutu guru* serta adanya *komitmen nasional dan kemauan politik* untuk mengatasinya sebagai bagian integral dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, dapat dipahami mengapa gagasan pendirian UT, yang di dalamnya ada FKIP, mulai dari tahap embrional-gagasan sampai dengan dibukanya UT pada tanggal 4 September 1984 berada dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang pada saat itu di bawah pimpinan Prof. Dr. Nugroho Notosusanto sebagai Mendikbud dengan pelaksana perintisan oleh tim yang dipimpin oleh Prof. Dr. Setijadi, yang

- Pendidikan Guru Jarak Jauh (Kasus FKIP Universitas Terbuka)

kemudian menjadi Rektor pertama UT (Wahyono, 2004: 106-107). Oleh karena itu, dapat juga dikatakan bahwa program pendidikan guru yang sampai saat ini dibina dan dikembangkan oleh FKIP-UT merupakan *wujud dari komitmen negara* untuk meningkatkan kualifikasi dan mutu guru dalam upaya pencerdasan kehidupan bangsa.

Walaupun program pendidikan guru di FKIP-UT lahir sebagai perwujudan dari komitmen negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang terutama hal itu merupakan kemauan politik negara, tetapi di dalam perkembangannya, kelembagaan dan program pendidikannya tetap harus mengikuti ketentuan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berlaku. Salah satu ketentuan yang harus diikuti adalah adanya kebutuhan setiap program pendidikan tinggi untuk mendapatkan akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional (BAN). Kecuali untuk program D-II PGSD, semua program sarjana (S1) guru bidang studi Matematika dan IPA; Bahasa Indonesia dan Inggris, Ilmu Pengetahuan Sosial yang sudah berusia antara 10-20 tahun itu telah mendapatkan akreditasi resmi. Program D-II PGSD kini sedang dalam proses akreditasi. Hal ini berarti hampir semua program pendidikan guru di lingkungan UT secara akademik dan manajerial telah memenuhi satandar minimal penyelenggaraan pendidikan guru pada jenjang pendidikan tinggi dan lulusannya memiliki kualifikasi dan mutu yang memadai.

Namun demikian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur pendidikan tinggi, yakni UU Sisdiknas 2003 Pasal 60 tentang Akreditasi dengan ketentuan turunannya PP-SNP 2005, yaitu Pasal 86, semua program dan/atau satuan pendidikan pada semua jenjang, tentunya termasuk program pendidikan guru di FKIP-UT pada saatnya harus memperoleh akreditasi baru dari pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) sesuai dengan PP-SNP 2005. Menurut

ketentuan itu, titik berat akreditasi tersebut terletak pada penentuan kelayakan program. Jika dijabarkan lebih jauh, kelayakan tersebut secara konseptual mencakup kelayakan yang merujuk pada standar nasional pendidikan, yakni memenuhi *standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan* (Pasal 2 ayat (1) PP-SNP 2005). Bagi UT, yang mempunyai Visi menjadi salah satu PTJJ unggulan di Asia tahun 2010 dan PTJJ unggulan di dunia tahun 2020, upaya untuk meningkatkan kelayakan program sebagaimana tersurat dan tersirat dalam Pasal 2 ayat (1) PP-SNP 2005 tersebut bukanlah suatu orientasi baru karena selama ini UT, termasuk untuk program pendidikan guru yang dikelolanya peningkatan kelayakan program selalu dilakukan secara terus menerus. Khusus dalam pengembangan bahan ajar dan bahan ujian serta pengelolaan ujian, pada tahun 2005 UT telah memperoleh Akreditasi Internasional dari *International Council of Distance Education (ICDE)* dan pada saat ini UT sedang menyiapkan diri untuk mendapatkan ISO 9001 dalam pengelolaan layanan distribusi bahan ajar dan bahan ujian. Secara *idiil-substantif* upaya tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi jarak jauh yang diselenggarakan oleh UT, termasuk *penyelenggaraan program pendidikan tinggi untuk para pendidik dan tenaga kependidikan*. □

- Pendidikan Guru Jarak Jauh (Kasus FKIP Universitas Terbuka)

Daftar Pustaka

- Brodjonegoro, S.S. (1999). Management Change in University toward 21st Century: *The Indonesian Policy. International Seminar Proceedings*. Jakarta: Higher Education Project, Ministry of Education and Culture
- Chivore, B. R. S. (1992). *Pre-Service Teacher Education at a Distance: The Case of Zimbabwe*. <http://www1.worldbank.org/disted/Policy/Program/teach-02.html>
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1990). *Pedoman Penyelenggaraan Program Penyetaraan D II Guru SD (1 s. d. 10)*. Jakarta: Proyek Peningkatan Mutu Guru SD Setara D II.
- . (1991). *Pedoman Penyelenggaraan Program Penyetaraan D II Guru SD (1 s. d. 10)*. Jakarta: Proyek Peningkatan Mutu Guru SD Setara D II.
- . (2004) *Keputusan Mendiknas RI Nomor. 123/O/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka*, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Panduan Tutorial*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- . (2002). *Panduan Penyelenggaraan Tutorial Tatap Muka Rancangan Khusus*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- . (2004). *Panduan Tugas Akhir Program Sarjana FKIP*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- . (2002). *Standar Kompetensi Guru Kelas SD – MI, Program Pendidikan D II PGSD*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi.

- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. (2005). *Laporan Akhir Masa Jabatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Flinck, R. & Flinck, A. W. (1990). *Handbook for tutor*. Colombo: Department of Distance Education.
- Gagne, R. M.. (1985). *The Conditions of Learning and Theory of Instruction*. New York: Holt, Rinehart, and Winston.
- Holmberg, B. (1995). *Theory and Practice of Distance Education*. New York: Routledge.
- Kadarko, W. (2000). Kemampuan Belajar Mandiri dan Faktor-faktor Psikososial yang Mempengaruhinya: Kasus Universitas Terbuka. *Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*. Vol. 1, No. 1, pp. 27-41.
- Kuliah Jarak Jauh Tidak Menjamin Kompetensi Guru. **Kompas**. 9 Mei 2005, hal. 9.
- Puspitasari, K. A. & Islam, S. (2003). Kesiapan Belajar Mandiri Mahasiswa dan Calon Potensial Mahasiswa pada Pendidikan Jarak Jauh di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*. Vol. 4, No. 1, pp.16-31.
- Raka Joni, T. (1983). *Cara Belajar Siswa Aktif, Wawasan Kependidikan, dan Pembaharuan Pendidikan Guru*. Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar, 24 September 1983. Malang: IKIP Malang.
- . (1991). *Pokok-pokok Pikiran tentang Pendidikan Guru*. Jakarta: Konsorsium Ilmu Pendidikan, Ditjen Dikti.
- . (2005). *Pembelajaran yang Mendidik: Artikulasi Konseptual, Terapan Kontekstual, dan Verifikasi Empirik*. Tidak diterbitkan.

- Pendidikan Guru Jarak Jauh (Kasus FKIP Universitas Terbuka)

- Republik Indonesia(1984) *Keputusan Presiden Nomor. 41 tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka*, Jakarta
- _____ (2003) *Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Depdiknas
- _____ (2005) *Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*, Jakarta: Depdiknas
- _____ (2005) *Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: Depdiknas
- Rektor UT (2005) *Laporan Rektor UT Periode 2001-2005*, Jakarta: Universitas Terbuka
- Simpson, O. (2000). *Supporting Students in Open and Distance Learning*. London: Kogan Page Limited.
- Suparman, A. (1992). *Pendidikan Jarak Jauh*. Jakarta: PAU – PPAI Universitas Terbuka.
- Suparman, A. dan Zuhairi, A. (2004) *Pendidikan Jarak Jauh: Teori dan Praktek*, Jakarta: Pusbit UT
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0854/U/1989 tentang Pengadaan dan Penyetaraan Guru SD.
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
- Taylor, J. (2003). *Fifth Generation Distance Education*. Available at: <http://www.icde.org/oslo/icde.nsf/id/>
- Wahyono, E. dkk (2004) *Universitas terbuka: Dulu, Kini dan Esok*, Jakarta: Pusbit-UT
- Wardani, I G. A. K. (2003). *Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM): Buku Materi Pokok*. Jakarta: Universitas Terbuka.

- . (1999). Peningkatan Kualifikasi Guru dan Program Penyetaraan. dalam: Tian Belawati, dkk. *Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*. Hal: 127 -135. Jakarta: Universitas Terbuka.
- .; Siti Julaeha; & Ngadi Marsinah. (2004). *Pemantapan Kemampuan Profesional (Panduan)*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Winataputra, Udin, S. (1999). Aspek-aspek Inovatif dalam Pendidikan Guru dengan Sistem Belajar Jarak Jauh. Dalam: Tian Belawati, dkk. *Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*. Hal:136-153. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Brodjonegoro, S.S. (1999). Mangement Change in University toward 21st Century: The Indonesian Policy. *International Seminar Proceedings*. Jakarta: Higher Education Project, Ministry of Education and Culture
- Chivore, B. R. S. (1992). *Pre-Service Teacher Education at a Distance: The Case of Zimbabwe*. <http://www1.worldbank.org/disted/Policy/Program/teach-02.html>
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1990). *Pedoman Penyelenggaraan Program Penyetaraan D II Guru SD (1 s. d. 10)*. Jakarta: Proyek Peningkatan Mutu Guru SD Setara D II.
- . (1991).). *Pedoman Penyelenggaraan Program Penyetaraan D II Guru SD (1 s. d. 10)*. Jakarta: Proyek Peningkatan Mutu Guru SD Setara D II.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Panduan Tutorial*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- (2002). *Panduan Penyelenggaraan Tutorial Tatap Muka Rancangan Khusus* . Jakarta: Universitas Terbuka.
- . (2004). *Panduan Tugas Akhir Program Sarjana FKIP*. Jakarta: Universitas Terbuka.

- Pendidikan Guru Jarak Jauh (Kasus FKIP Universitas Terbuka)

————.. (2002). *Standar Kompetensi Guru Kelas SD – MI, Program Pendidikan D II PGSD*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi.

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. (2005). *Laporan Akhir Masa Jabatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Flinck, R. & Flinck, A. W. (1990). *Handbook for tutor*. Colombo: Department of Distance Education.

Gagne, R. M.. (1985). *The Conditions of Learning and Theory of Instruction*. New York: Holt, Rinehart, and Winston.

Holmberg, B. (1995). *Theory and Practice of Distance Education*. New York: Routledge.

Kadarko, W. (2000). Kemampuan Belajar Mandiri dan Faktor-faktor Psikososial yang Mempengaruhinya: Kasus Universitas Terbuka. *Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*. Vol. 1, No. 1, pp. 27-41.

Kuliah Jarak Jauh Tidak Menjamin Kompetensi Guru. Kompas. 9 Mei 2005, hal. 9.

Puspitasari, K. A. & Islam, S. (2003). Kesiapan Belajar Mandiri Mahasiswa dan Calon Potensial Mahasiswa pada Pendidikan Jarak Jauh di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*. Vol. 4, No. 1, pp.16-31.

Raka Joni, T. (1983). *Cara Belajar Siswa Aktif, Wawasan Kependidikan, dan Pembaharuan Pendidikan Guru*. Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar, 24 September 1983. Malang: IKIP Malang.

- . (1991). *Pokok-pokok Pikiran tentang Pendidikan Guru*. Jakarta: Konsorsium Ilmu Pendidikan, Ditjen Dikti.
- . (2005). *Pembelajaran yang Menididik: Artikulasi Konseptual, Terapan Kontekstual, dan Verifikasi Empirik*. (Naskah tidak diterbitkan).
- Simpson, O. (2000). *Supporting Students in Open and Distance Learning*. London: Kogan Page Limited.
- Suparman, A. (1992). *Pendidikan Jarak Jauh*. Jakarta: PAU – PPAI Universitas Terbuka.
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0854/U/1989 tentang Pengadaan dan Penyetaraan Guru SD.
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
- Taylor, J. (2003). *Fifth Generation Distance Education*. Available at: <http://www.icde.org/oslo/icde.nsf/id/>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wardani, I G. A. K. (2003). *Pemantapan Kemampuan Mengajar (PKM): Buku Materi Pokok*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- . (1999). Peningkatan Kualifikasi Guru dan Program Penyetaraan. dalam: Tian Belawati, dkk. *Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*. Hal: 127 -135. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Wardani, I G. A. K. ; Siti Julaeha; & Ngadi Marsinah. (2004). *Pemantapan Kemampuan Profesional (Panduan)*. Jakarta: Universitas.

- Pendidikan Guru Jarak Jauh (Kasus FKIP Universitas Terbuka)

Winataputra, Udin, S. (1999). Aspek-aspek Inovatif dalam Pendidikan Guru dengan Sistem Belajar Jarak Jauh dalam: Tian Belawati, dkk. *Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*. Hal:136-153. Jakarta: Universitas Terbuka.

Biodata Penulis

Asnah Said lahir di Takengon (Aceh) pada tahun 1949. Lektor Kepala pada FKIP-UT, lulusan S3 Teknologi Pendidikan pada tahun 2002 ini pernah menduduki berbagai jabatan di Perguruan Tinggi, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Universitas Terbuka. Jabatan terakhir di Universitas Terbuka adalah Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Ditunjang oleh pengalamannya mengikuti berbagai seminar dan lokakarya dalam bidang pembelajaran dan teknologi pendidikan di dalam maupun di luar negeri, ia menulis berbagai karya ilmiah dan hasil penelitian dalam bidang yang sama.

Effendi Wahyono adalah lektor kepala di jurusan Sosiologi, FISIP-UT, dilahirkan di Tegal, 21 Mei 1960. Gelar sarjana (S1) dan master Humaniora didapatkannya di Universitas Indonesia, jurusan Sejarah. Kepala Perpustakaan UT sejak tahun 1995 hingga tahun 2003, sedang mengikuti pendidikan S3 jurusan Sejarah, Universitas Indonesia.

I.G.A.K. Wardani adalah Guru Besar pada FKIP Universitas Terbuka. Ia menyelesaikan Doktor Pendidikan di *State University of New York* di Albany pada tahun 1988. Sejak awal meniti karir sebagai seorang guru, ia banyak berkecimpung dalam pengembangan pendidikan guru. Secara aktif ia terlibat dalam berbagai program pengembangan kurikulum, pelatihan/penataran, penelitian, serta berbagai seminar dan diskusi ilmiah.

Nugroho Widi. Lahir di Jepara, 26 Januari 1964. Pendidikan: lulus S-1 Teknologi Pertanian IPB tahun 1987; lulus S-2 Manajemen Sekolah Tinggi Manajemen PPM (Pelatihan Pengembangan Manajemen), Jakarta 2000. Bekerja di Lembaga Manajemen PPM sejak 1992. Terakhir menjabat kepala Pelatihan Manajemen Jarak Jauh-Pelatihan Pengembangan Manajemen (PMJJ-PPM).

Rusjdy Sjakyakirti Arifin, lahir di Pariaman 18 November 1956. Setelah tamat dari SMA tahun 1975, melanjutkan kuliah ke Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Jakarta Jurusan Teknologi Pendidikan. Setelah menyelesaikan kuliah pada tahun 1980, langsung bekerja sebagai tenaga honorer di Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan (PUSTEKKOM) Departemen Pendidikan Nasional. Pada tahun 1981 diangkat menjadi pegawai negeri sipil di PUSTEKKOM dan ditempatkan pada Studio Foto Film dan Grafis. Selama di PUSTEKKOM sampai dengan saat ini telah mengalami beberapa kali pindah unit kerja dan jabatan. Saat ini menduduki jabatan sebagai Kepala Sub Bidang Perancangan Sistem pada Bidang Pengembangan Sistem PUSTEKKOM.

Pada tahun 1995 melanjutkan studi S2 ke *Syracuse University* selama 18 bulan. Bidang yang dipelajari adalah *Instructional Design, Development and Evaluation* pada *School of Education*. Saat ini, sedang dalam tahap penyelesaian studi untuk memperoleh gelar Doktor Pendidikan pada Program Studi Manajemen Pendidikan, Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.

Setijadi adalah pensiunan Guru Besar UT. Pernah menjabat sebagai Rektor UT (1984-1992), Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (1974-1980). Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (1970-1974), Pembantu Rektor I IKIP Malang (1966-1969) di samping

sebagai pengajar pada lembaga yang sama. Pendidikan tertinggi adalah *Doctor of Philosophy* yang diperoleh dari *Cornell University* Amerika Serikat pada tahun 1964. Saat ini ia masih bekerja sebagai tenaga lepas di Universitas Terbuka dengan tugas membimbing dosen muda, dan menjadi editor majalah dan buku terbitan Universitas Terbuka.

Suratinah adalah staf edukatif FKIP yang mulai bekerja di Universitas Terbuka pada tahun 1991. Sejak Mei 2005 ia menjadi Pembantu Dekan II FKIP. Menyelesaikan S1 di IKIP Jakarta (sekarang UNJ) pada tahun 1979 dalam jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Pada tahun 1985 meraih gelar master dari *State University of New York* dalam bidang *Elementary Education*. Sepuluh tahun kemudian kembali ke negeri Paman Sam untuk mengikuti pendidikan S3 di *The Ohio State University* dan mendapatkan gelar Doktor dalam bidang *Elementary Education* pada tahun 1999.

Udin S. Winataputra adalah Lektor Kepala dalam bidang pembelajaran dan pendidikan nilai, yang kini menjabat sebagai Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka. Ia menyelesaikan pendidikan *Master of Arts (MA)* di *Macquarie University*, Australia pada tahun 1979 dalam bidang *Curriculum Development* dan Doktor Pendidikan dalam bidang Pendidikan IPS pada Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2001. Ia juga aktif pada berbagai organisasi profesi, di antaranya sebagai Sekretaris Jenderal pada *Center for Indonesian Civic Education (CICED)* dan anggota *Civitas International* dan *National Council for the Social Studies*, dan sebagai sekretaris ISPI (Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia), serta *Dewan Pakar Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu Sosial Indonesia (HISPISI)*. Sejak memulai kariernya sebagai dosen, ia memusatkan perhatian utama pada perkembangan dan

permasalahan pendidikan kewarganegaraan, pendidikan IPS, kurikulum dan pembelajaran, serta pendidikan jarak jauh.

Uwes Anis Chaeruman, lahir di Rangkasbitung (Banten) tanggal 11 Maret 1974. Setamat SLA, tahun 1993 melanjutkan kuliah di Jurusan Teknik Informatika, Universitas Persada Indonesia. Bersamaan dengan itu, pada tahun 1994 mengambil kuliah di Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Selama perkuliahan terlibat aktif dalam aktivitas kemahasiswaan kampus. Pernah menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa FIP IKIP Jakarta (1997-1998), mendirikan FIP English Club (1998), dan mendirikan serta menjadi Ketua Umum pertama Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta (1999 – 2000). Sejak masih kuliah S-1 (1998 s/d 1999), telah aktif sebagai Asisten Dosen untuk beberapa mata kuliah seperti Fotografi Pendidikan dan Pembelajaran Berbantuan Komputer.

Saat ini, sedang dalam tahap penyelesaian tesis untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Teknologi Pendidikan, Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta. Sejak tahun 2002, bekerja sebagai PNS di Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan (PUSTEKKOM) Depdiknas. Disamping itu, sambil bekerja sebagai PNS di PUSTEKKOM, kegiatan mengajar di Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta masih tetap dijalankan sebagai Dosen Luar Biasa. Mata kuliah yang dibina antara lain adalah Pengenalan Komputer, Pengantar Teknologi Pendidikan, Fotografi Pendidikan, Organisasi Belajar, Pengantar Teknologi Komunikasi Informasi, Teknologi Kinerja, Evaluasi Media Instruksional, Desain Sistem Pembelajaran dan Organisasi Belajar.